



Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Oil Palm Plantation
Fund Management Agency

Mengembangkan Infrastruktur BPDPKS, Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

Developing BPDPKS Infrastructure,
Supporting Sustainable
Indonesian Palm Oil



2018

Laporan Tahunan Annual Report

www.bpdp.or.id



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Tema dan Penjelasan Tema

Theme and Theme Descriptions

Mengembangkan Infrastruktur BPDPKS, Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

Developing BPDPKS Infrastructure, Supporting Sustainable Indonesian Palm Oil

Melewati tahun 2018 yang penuh dinamika dan tantangan dalam industri kelapa sawit, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut BPDPKS berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja agar mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Komoditas kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia dan penyumbang devisa terbesar, menghadapi tekanan yang cukup besar, yakni fluktuasi harga yang menurun, produksi yang melimpah dan berbagai tekanan negatif terhadap keberadaan industri kelapa sawit. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, BPDPKS bersama dengan dukungan *stakeholders*, berkeyakinan akan mampu mengoptimalkan kinerja ditahun-tahun mendatang. Upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan langkah strategis, didukung akurasi perencanaan dan *action plan*. Selain melakukan penghimpunan dana, BPDPKS juga menjalankan fungsinya mengembangkan sawit berkelanjutan, seperti melakukan peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit rakyat.

Passing through 2018 with full dynamics and challenges in the palm oil industry, the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, hereinafter referred to as OPPFMA, is committed to optimizing performance to be able to achieve the predetermined vision and mission.

Palm oil commodity, which is one of Indonesia's flagship commodities and the biggest foreign exchange earner, faces considerable pressure, i.e. price fluctuations, abundant production, and various negative pressures on the existence of the palm oil industry. In the midst of various difficulties encountered, OPPFMA, together with the support of stakeholders, believes that the Company will be able to optimize performance in the coming years. OPPFMA prepares strategic steps, supported by accurate planning and action plans. In addition to funding, OPPFMA also carries out its function of developing sustainable palm oil, such as replanting smallholder palm oil plantations.



Laporan Tahunan 2018
2018 Annual Report

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Oil Palm Plantation Fund Management Agency



BDPKS juga melakukan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit dengan memberikan pelatihan kepada sejumlah petani, anak petani, guru SMK perkebunan, anggota koperasi serta menyalurkan beasiswa afirmasi bagi para anak pekebun rakyat untuk mengikuti pendidikan diploma perkelapasawitan. Hal ini diharapkan untuk menghasilkan tenaga perkebunan yang kompeten dalam penerapan tata kelola pertanian.

Untuk meningkatkan efektivitas program peremajaan, BDPKS bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Perekonomian juga melakukan penyempurnaan aturan agar penyaluran dana bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengurangi akuntabilitas. BDPKS kian mantap menatap ke depan dan secara dinamis melihat peluang-peluang baru bagi penguatan kinerja dengan mengembangkan infrastruktur BDPKS, guna mendukung Sawit Indonesia yang berkelanjutan.

OPPFMA also develops human resources for palm oil plantations by providing training to several farmers, farmers' children, plantation vocational school teachers, members of cooperatives, and provides affirmation scholarships for the children of smallholders to take part in the diploma palm oil education program. This is expected to produce plantation workers who are competent in agricultural governance.

OPPFMA, together with the Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance, and the Coordinating Ministry for Economic Affairs refine the rules to improve the effectiveness of the replantation program. Thus, the funds could be disbursed faster without reducing accountability. OPPFMA strongly looks forward and dynamically foresees new opportunities for strengthening performance by developing OPPFMA's infrastructure to support sustainable Indonesian Palm Oil.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

2018

**Mengembangkan Infrastruktur BDPKPS,
Mendukung Sawit Indonesia
yang Berkelanjutan**

**Developing BDPKPS Infrastructure,
Supporting Sustainable Indonesian Palm Oil**



2017

**Menguatkan Pondasi
Kelembagaan BDPKPS
untuk Mendukung
Sawit Indonesia
yang Berkelanjutan**
**Strengthening OPPFMA
Institutional Foundation
to Support Indonesian
Sustainable Palm Oil**



▲

2016

**Melanjutkan Dukungan
bagi Sawit Indonesia
yang Lebih Berkelanjutan**
Continuing to Support
Sawit Indonesia
More Sustainable



▲

2015

**Memulai Dukungan
bagi Sawit Indonesia
yang Lebih Berkelanjutan**
Starting to Support
Sawit Indonesia
More Sustainable

Sebaran Pelatihan Masyarakat Umum dan Pendidikan Beasiswa D1 dan D3
Distribution of Public Training and Education Scholarships of Young Bachelor (D1 and D3)



Total kelas pelatihan yang telah dilaksanakan 2015 sampai dengan Desember 2018 sebanyak 129 kelas pelatihan dengan total SDM/peserta yang dilatih sebanyak 3.873 orang dilaksanakan di 20 Provinsi di Indonesia dengan melibatkan enam pelaksana pelatihan. Total Pendidikan Beasiswa yang telah dilaksanakan 2016 sampai dengan Oktober 2018 untuk Program Diploma I sebanyak 6 angkatan dengan jumlah penerima beasiswa sebanyak 900 orang dan Diploma III sebanyak 4 angkatan yang diberikan kepada 300 orang dengan melibatkan Pelaksana Pendidikan Beasiswa (D1 dan D3).

The total training held from 2015 up to December 2018 was 129 training, with a total of 3,873 training participants, conducted in 20 provinces in Indonesia, involving six trainers. Total Scholarship that has been carried out from 2016 up to October 2018 for Young Bachelor I (D1) is 6 batches with a total of 900 scholarship recipients and 4 batches of Young Bachelor III (D3) for 300 people, and the Scholarship Education Organizers were involved.

Ringkasan Kinerja BDPKS sampai dengan 2018 OPPFMA's Performance Highlights as of 2018

Kegiatan Pengembangan SDM Sawit Tahun 2016-2018

HR Palm Oil Development Activities in 2016-2018

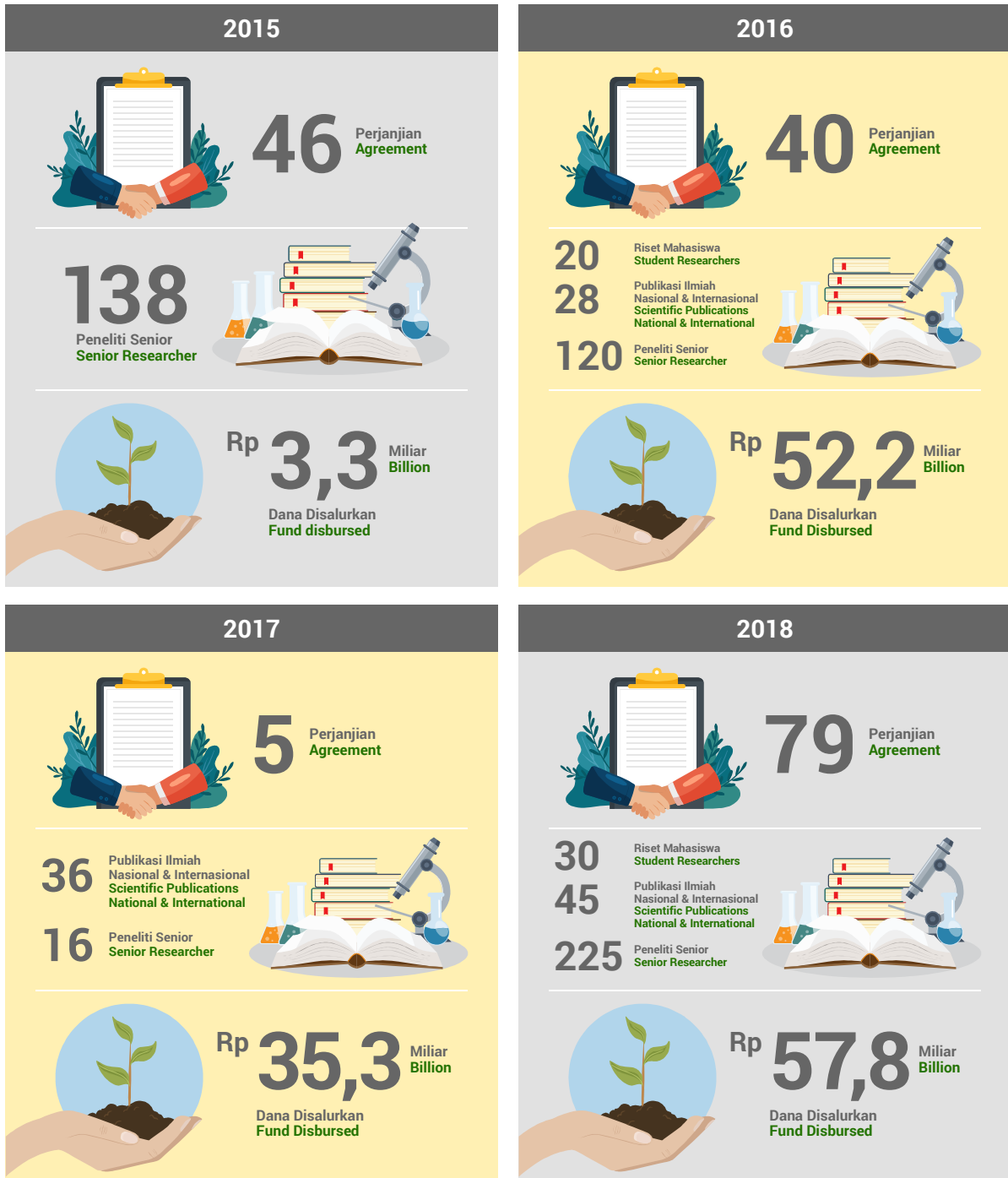
Jumlah SDM Sawit yang telah mengikuti kegiatan pengembangan SDM pada tahun 2016 sampai dengan Desember 2018.

The number of Palm Oil HR who have participated in HR development activities in 2016 to December 2018



Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 2015-2018

Research and Development in 2015-2018





Testimoni

Testimonial



DARMIN NASUTION

MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN RAKYAT
COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS

"Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu memperhatikan faktor eksternalitas dalam mendukung riset di sektor sawit. BPDPKS perlu cermat memilih riset mana yang perlu didukung. Dalam kondisi yang penuh unsur eksternalitas, dibutuhkan kejelian BPDPKS dalam memilih bagian mana yang harus dilakukan riset dan hasilnya harus bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Riset sebaiknya dilakukan terfokus meskipun jumlahnya sedikit namun mendatangkan banyak manfaat, ketimbang banyak riset namun sedikit manfaat. Jangan sampai hasil riset itu mengisi lemari saja, tetapi harus mengisi khazanah kita".

"The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) needs to take into account the external factors in supporting research in the palm oil sector. OPPFMA needs to carefully choose which research needs to be supported. In conditions with many external factors, OPPFMA must be thorough in choosing which part of the research should be conducted, with results that must be able to provide great benefits to the community. Research should be focused, even with small amount, it must provide great benefits. Do not do many researches with little to no benefit. Do not let the results of the research be just a target. It must also achieve the objectives".

BENI HERNEDI

WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
DEPUTY REGENT OF MUSI BANYUASIN

"Kami berharap Musi Banyuasin bisa mengembangkan industri hilir kelapa sawit, untuk itu kami sangat fokus pada komoditas perkebunan kelapa sawit. Saat ini kami tengah menyusun rencana untuk memulai hilirisasi. Kami akan bergerak ke depan untuk mencapai target 5.000 hektare areal lahan yang akan diremajakan di Kabupaten Musi Banyuasin."

"We hope that Musi Banyuasin can develop the downstream palm oil industry. Thus, we are very focused on the palm oil plantations as the commodity. Currently, we are planning to start the downstreaming. We will move forward to reach 5,000 hectares target land to be replanted in Musi Banyuasin Regency."





Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Daftar Isi Contents

01

Pendahuluan Background

- 1 Tema dan Penjelasan Tema
Theme and Theme Descriptions
- 2 Kesenambungan Tema
Theme Continuity
- 4 Ringkasan Kinerja Tahun 2018
Performance Highlights in 2018
- 8 Testimoni
Testimonial
- 10 Daftar Isi
Contents
- 12 Ikhtisar Data Keuangan dan
Operasional Tahun 2018
Financial and Operational
Data Highlights in 2018
- 14 Peristiwa Penting Tahun 2018
Significant Events in 2018

18

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan Report to the Regulators and Stakeholders

- 20 Laporan Dewan Pengawas
Report of the Supervisory Board
- 28 Profil Dewan Pengawas
Supervisory Board's Profiles
- 40 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors
- 50 Profil Direksi
Board of Directors' Profiles
- 55 Tanggung Jawab Atas Laporan
Tahunan 2018
Statement of Accountability to
2018 Annual Report

56

Profil BDPKS Profile of OPPFMA

- 58 Identitas BDPKS
OPPFMA's Identity
- 60 Riwayat Singkat
Brief History
- 65 Visi Misi dan Tujuan
Vision, Mission, and Objectives
- 68 Tugas, Fungsi, dan Peran
Duties, Functions, and Roles
- 70 Budaya Kerja
Work Culture
- 72 Makna Logo
Logo
- 74 Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 76 Pejabat Struktural
Structural Officials
- 80 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 93 Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi,
Komite-komite, Kepala Divisi Perusahaan, Unit Audit Internal
dan Unit/Divisi Manajemen Risiko
Education and/or Training of the Board of Commissioners,
Board of Directors, Committees, Company's Head of Division,
Internal Audit Unit, and Risk Management Unit/Division
- 96 Lembaga Profesi Penunjang
Supporting Institutions
- 98 Area dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia
Palm Oil Area and Production in Indonesia

102

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan Operational and Financial Performance Discussion and Analysis

- 104 Tinjauan Ekonomi Nasional
National Economic Review
- 114 Kontribusi BDPKS kepada Negara
OPPFMA Contribution to the State
- 118 Analisis Kinerja Operasional
Operational Performance Analysis
- 144 Analisis Operasi Per Aktivitas Usaha
Operation Analysis Per Business Activity
- 153 Analisis Kinerja Keuangan
Financial Performance Analysis
- 164 Manajemen Struktur Modal
Capital Structure Management
- 166 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2018 serta Proyeksi 2019
Comparisons between Target and Realization in 2018 and 2019 Forecast
- 169 Informasi Keuangan Lainnya
Other Financial Information
- 170 Prospek dan Strategi Usaha
Business Prospects and Strategies



178

Tata Kelola BDPKPS OPPFMA'S Corporate Governance

180	Tata Kelola BDPKPS OPPFMA'S Governance
184	Komite Pengarah Steering Committee
191	Dewan Pengawas Supervisory Board
208	Komite Audit Audit Committee
213	Sekretaris Dewan Pengawas Secretary of the Supervisory Board
216	Direksi Board of Directors
231	Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Remuneration Policy of the Supervisory Board and Board of Directors
233	Kebijakan Keberagaman Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy of the Supervisory Board and Board of Directors
241	Sekretaris Divisi Perusahaan (BDPKPS) Corporate Secretary (OPPFMA)
244	Audit Internal Internal Audit
253	Divisi Kepatuhan Manajemen Risiko BDPKPS OPPFMA's Compliance and Risk Management

263	Sistem Pengendalian Internal Internal Control
267	Kode Etik BDPKPS OPPFMA's Code of Conduct
268	Perkara Hukum Legal Cases
270	Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services
276	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Reporting Mechanism
280	Sistem Manajemen Mutu Quality Management System
283	Akuntan Publik Public Accountant
285	Teknologi Informasi Information Technology
288	Akses Informasi dan Data BDPKPS Access to the OPPFMA's Information and Data

292

Tanggung Jawab Sosial BDPKPS OPPFMA'S Social Responsibility

308

Laporan Keuangan Audited Audited Financial Statements



Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional Tahun 2018

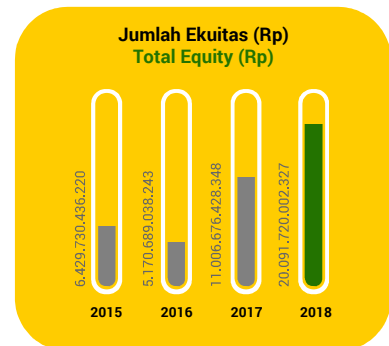
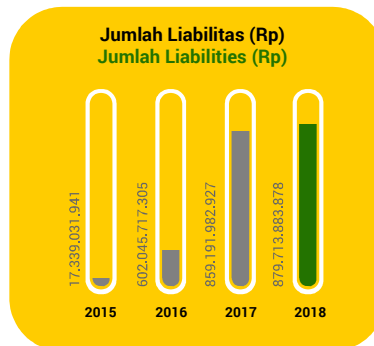
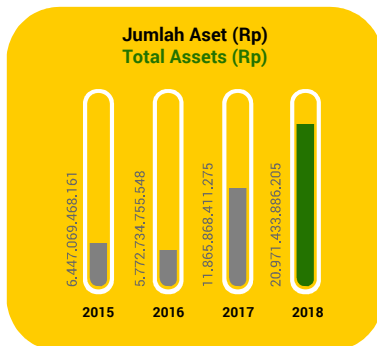
Operational and Financial Data Highlights

Ikhtisar Kinerja Keuangan

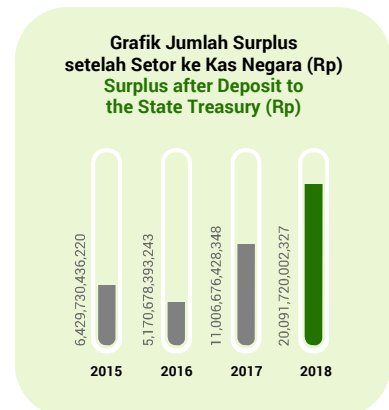
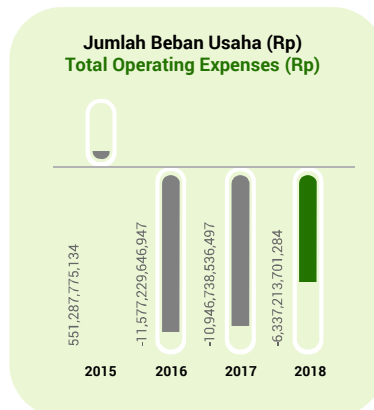
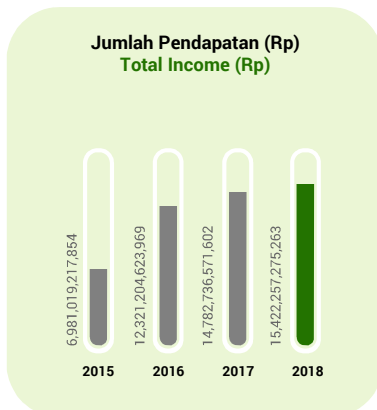
Financial Performance Highlights

Laporan Posisi Keuangan Financial Position Statement		2017	2018
Aset	Assets	11.865.868.411.275	20.971.433.886.205
Aset Lancar	Current Assets	11.851.159.824.294	20.959.252.287.096
Aset Tidak Lancar	Non-Current Assets	14.708.586.981	12.181.599.109
Liabilitas	Liabilities	859.191.982.927	879.713.883.878
Liabilitas Jangka Pendek	Current Liabilities	859.191.982.927	879.713.883.878
Ekuitas	Equity	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327
Laporan Aktivitas Activities		2017	2018
Pendapatan	Revenues	14.782.736.571.602	15.422.257.275.263
Beban	Expenses	(10.946.738.536.497)	(6.337.213.701.284)
Pengembalian setoran dari kas negara	Refund of deposit ffrom state treasury	2.000.000.000.000	-
Kenaikan/(penurunan) aset neto tidak terikat	Increase/(decrease) in unrestricted net assets	5.835.998.035.105	9.085.043.573.979
Aset neto tidak terikat awal tahun	Unrestricted net assets at the beginning of the year	5.170.678.393.243	11.006.676.428.348
Aset neto tidak terikat akhir tahun	Unrestricted net assets at the end of the year	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327
Laporan Arus Kas Statement of Cash Flows		2017	2018
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	Net Cash Flows Provided by Operating Activities	4,021,710,047,373	8,804,098,616,113
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	Net cash flows provided by (used in) investing activities	(8,563,899,000,725)	8,931,784,648,214
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	Net cash flows (used in) financing activities	2,000,000,000,000	-
Kenaikan bersih pada kas dan setara kas	Net increase in cash and cash equivalents	(2,542,188,953,352)	17,735,883,264,327
Kas dan setara kas pada awal tahun	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	5,729,108,049,237	3,186,919,095,885
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun	Cash and cash equivalents at the end of the year	3,186,919,095,885	20,922,802,360,212

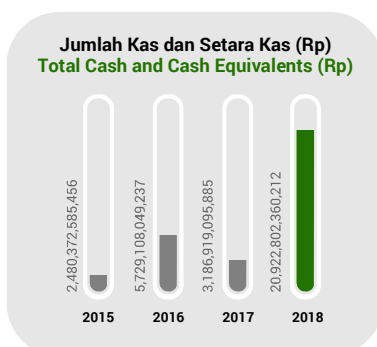
Laporan Posisi Keuangan Financial Position Statement



Laporan Aktivitas Activities



Laporan Arus Kas Statement of Cash Flows





Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Peristiwa Penting Tahun 2018

Significant Events in 2018



25 April 2018
April, 2018

Tim Negosiasi Sawit Melakukan Pertemuan dengan Uni Eropa membahas Pembatasan Produk Kelapa Sawit. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BDPKPS Dono Boestami bersama tim negosiasi yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut B melakukan perundingan pembatasan produk kelapa sawit di Uni Eropa di markas Uni Eropa di Brussel, Belgia.

The Palm Negotiation Team Held a Meeting with the European Union to discuss the Restriction of Palm Oil Products. The Managing Director of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA), Dono Boestami, together with the negotiating team, led by Coordinating Minister for Maritime Affairs, Luhut B, negotiated restrictions on palm oil products in the European Union at the European Union headquarters in Brussels, Belgium.



15 Mei 2018
May, 2018

BDPKPS Hadiri Konferensi Internasional Pengentasan Kemiskinan Melalui Perkebunan di Roma Italia. BDPKPS mengirimkan perwakilan untuk menghadiri konferensi internasional bertema "Pengentasan Kemiskinan Melalui Industri Pertanian dan Perkebunan untuk Memperkuat Perdamaian dan Kemanusiaan" di Roma yang diselenggarakan Pontifical Urban University (Universitas Kepausan Urbaniana).

OPPFMA Attended International Conference on Poverty Alleviation through Plantations in Rome, Italy. OPPFMA sent representatives to attend a conference on "Poverty Alleviation through Agriculture and Plantation Industries to Strengthen Peace and Humanity" in Rome, Italy, held by Pontifical Urban University.



25 Mei 2018
May, 2018

BDPKPS Tandatangani MoU Insentif Biodiesel Mei-Oktober 2018. BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKPS) menandatangani perjanjian pembiayaan pengadaan Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel untuk periode Mei-Oktober 2018. Pembiayaan ini merupakan bentuk konsistensi Pemerintah untuk mendukung pembangunan industri sawit yang berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan ketahanan energi. Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Utama BDPKPS Dono Boestami dengan badan usaha bahan bakar nabati (BBN) di Jakarta

OPPFMA Signed MoU for May-October 2018 Biodiesel Incentives. Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) signed a financing agreement for Biodiesel Fuel procurement for May-October 2018. This funding is a form of Government's consistency to support the development of a sustainable palm oil industry while encouraging increased energy security. The MoU was signed by OPPFMA's President Director, Dono Boestami, with the biofuel business entity (BBN) in Jakarta



06 Juli 2018
July, 2018

Direktur Penghimpunan Dana BDPKPS Herdrajat Natawijaya mendampingi kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Para anggota KOMISI XI DPR RI melakukan dialog dengan petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan semua pihak terkait program peremajaan (*replanting*) perkebunan sawit rakyat.

Director of Fund Collection of OPPFMA, Herdrajat Natawijaya, accompanied the work visitation of the House of Representatives Commission XI at the People's Palm Oil Plantation (PSR) in Serdang Bedagai Regency, North Sumatra. Members of the House of Representatives Commission XI of the Republic of Indonesia held a dialogue with farmers who are members of the Farmers Group Association (Gapoktan) and all parties related to the replanting program of smallholder palm oil plantations.



24 Juli 2018
July, 2018

BDPKPS memberikan pembekalan mengenai diplomasi kelapa sawit. Direktur Kemitraan BDPKPS Tulus Budhianto menjadi narasumber dan menyampaikan paparan mengenai industri kelapa sawit berkelanjutan dalam kaitannya dengan diplomasi kelapa sawit di luar negeri dengan tema "*Diplomacy and Palm Oil: What is the chance now?*". Program ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada diplomat senior yang telah bekerja di Kemenlu selama lebih dari 15 tahun. Para peserta dibekali antara lain *strategic diplomacy* mengenai berbagai isu dan kebijakan strategis terkait bidang ekonomi dan digital. Salah satunya adalah diplomasi minyak kelapa sawit yang sangat diperlukan bagi menangani kampanye hitam di Uni Eropa dan Amerika Serikat.

OPPFMA provided briefing on palm oil diplomacy. Director of Partnership of OPPFMA, Tulus Budhianto, was the guest speaker and presented the sustainable palm oil industry in relation to palm oil diplomacy abroad with the theme "Diplomacy and Palm Oil: What is the chance now?" The program has the objective to provide debriefing to senior diplomats who have worked at the Ministry of Foreign Affairs for more than 15 years. The participants were provided with, among others, strategic diplomacy regarding various strategic issues and policies related to the economic and digital fields. One of them is palm oil diplomacy, which is indispensable for handling black campaigns in the European Union and the United States.

**06** Agustus 2018
August, 2018

PETANI kelapa sawit bersama BDPKPS dan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan Tumbang Chipping dan Penanaman Perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahun 2018. Direktur Utama BDPKPS Dono Boestami melakukan Tumbang Chipping dan penanaman perdana di Kecamatan Sungai Ilin ini menandai dimulainya program PSR tahap II tahun tanam 2018 untuk Kabupaten Musi Banyuasin, mencakup lahan seluas 935 hektare dari total 2,4 juta hektare areal kebun yang harus diremajakan di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2018, program replanting akan mencakup lahan seluas 185 ribu hektare, BDPKPS memberikan bantuan dana sebesar Rp25 juta per hektar. Sehingga untuk replanting tahun 2018 seluas 185 ribu hektare tersebut, BDPKPS akan menyalurkan dana total sebesar Rp4,6 triliun. Program replanting di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia untuk tahun 2017 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017.

Palm oil farmers, together with OPFFMA and the Musi Banyuasin Regency, South Sumatra, undertook a Chipping Up and Planting the First Annual Palm Oil (PSR) Replanting. OPFFMA's President Director, Dono Boestami, did the Chipping Up and the first planting in Sungai Ilin District, which marked the start of the 2018 PSR phase II replanting program for Musi Banyuasin Regency, covering 935 hectares of a total of 2.4 million hectares of plantation area that must be replanted throughout Indonesia. In 2018, the replanting program will cover 185 thousand hectares of land. OPFFMA will provide Rp25 million per hectare. Thus, for the 2018 replanting program, BDPKPS will disburse Rp4.6 trillion. The replanting program in Musi Banyuasin Regency is the first to be carried out in Indonesia in 2017, and was inaugurated by President Joko Widodo on 13 October 2017.

**20** Agustus 2018
August, 2018

BDPKPS Gelar Seminar Nasional Sawit Indonesia. BDPKPS menggelar Seminar Nasional Sawit Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta. Seminar yang digelar menandai lebih dari tiga tahun berdirinya BDPKPS itu mengusung tema "Menguatkan Pondasi Kelembagaan BDPKPS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan".

OPPFMA Held Indonesian Palm Oil Seminar. OPFFMA held the Indonesian Palm Oil Seminar at Borobudur Hotel, Jakarta. The seminar marked the third anniversary of OPFFMA's establishment, and was held with the theme "Strengthening OPFFMA's Institutional Foundation to Support Indonesia's Sustainable Palm Oil, Reduce Poverty Rate, and Create Welfare".

**29** Agustus 2018
August, 2018

BDPKPS Luncurkan Call Center 14036 untuk Biodiesel B20. BDPKPS Luncurkan Call Center 14036 untuk Biodiesel B20 pada upacara pembukaan The 7th IndoEBTKE ConEx 2018 di Balai Kartini, Jakarta. Call Center 14026 B20 disediakan oleh BDPKPS kepada publik yang membutuhkan informasi tentang B20, termasuk penerapannya pada kendaraan dan mesin yang membutuhkan bahan bakar B20. Pengusaha juga dapat menggunakan layanan ini sebagai sarana pengumpulan data mengenai penggunaan dan distribusi B20. Call Center 14026 B20 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kebijakan pemerintah tentang program wajib Biodiesel B20.

OPPFMA launched Call Center 14036 service to provide information concerning biodiesel B20.

OPPFMA launched Call Center 14036 service to provide information concerning biodiesel B20 at the opening ceremony of The 7th IndoEBTKE ConEx 2018 at Balai Kartini, Jakarta. The Call Center 14026 B20 is provided by BDPKPS to the public who needs information on B20, including its application on vehicles and machinery that require B20 fuel. Businesspeople can also use this service as a means of data collection regarding the use and distribution of B20. Call Centre 14026 B20 is aimed to raise public awareness on government's policy of Biodiesel B20 mandatory program.

**30** Agustus 2018
August, 2018

30 Mahasiswa Pemenang Lomba Riset Sawit 2018 ikuti Pembekalan dan Fieldtrip di Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit. 30 MAHASISWA pemenang lomba riset sawit mahasiswa yang berasal dari seluruh universitas di Indonesia mendapatkan pembekalan dan kunjungan ke kebun dan pabrik kelapa sawit milik PTPN VIII di Cikasungka, Kabupaten Bogor. Pembekalan dan fieldtrip ini diberikan agar mahasiswa ini memahami tentang industri kelapa sawit dan mengerti tentang pelaksanaan riset yang baik dan benar. Tim Sekretariat Lomba Riset Sawit BDPKPS memberikan pengarahan tentang pengelolaan administrasi riset, tata cara pelaporan, dan monitoring serta evaluasi. 30 Pemenang lomba riset sawit ini akan melakukan penelitian selama 9 bulan, dengan dana riset maksimal sebesar Rp. 20 juta.

30 Students Won the 2018 Palm Research Competition Went on Fieldtrip and Briefing at the Palm Oil Plantation and Factory. Thirty students who won the student oil research contest throughout universities in Indonesia received a briefing and a visit to PTPN VIII's palm oil plantations and mills in Cikasungka, Bogor Regency. This briefing and field trip was provided so that these students understood about the palm oil industry and understood how to conduct good and appropriate research. The OPFFMA's Palm Oil Research Competition Secretariat Team provided guidance on managing research administration, reporting procedures, and monitoring and evaluation. 30 winners of the palm research competition will conduct research for 9 months, with a maximum research fund of Rp20 million.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Peristiwa Penting Tahun 2018 Peristiwa Penting Tahun 2018



19 September 2018
September, 2018

BDPKPS Dukung Trade Expo Indonesia 2018.

Direktur Kemitraan BDPKPS Tulus Budhianto BDPKPS pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 yang akan digelar pada 24-28 Oktober 2018. Acara yang digelar Kementerian Perdagangan ini akan dilangsungkan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Banten. TEI 2018 merupakan pameran perdagangan internasional *business to business* (B2B) yang digelar untuk memacu pertumbuhan produk ekspor dan perluasan pasar ekspor Indonesia. TEI kali ini merupakan yang ke-33 digelar dengan mengusung tema "*Creating Products for Global Opportunities*". Dalam acara ini juga akan digelar kegiatan seperti Forum Perdagangan, Wisata, dan Investasi, pertemuan bisnis, konsultasi bisnis, diskusi regional, misi perdagangan lokal dan internasional, kompetisi *start-up* ekspor, dan *talk show*.

OPPFMA Supports Trade Expo Indonesia 2018. Director of Partnership of OPFMA, Tulus Budhianto, will open the 2018 Trade Expo Indonesia (TEI), which will be held on 24-28 October 2018. The event will be held by the Ministry of Trade will be held at the Bumi Serpong Damai (BSD) City Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Banten. TEI 2018 is a business to business (B2B) international trade exhibition to spur the growth of export products and the expansion of the Indonesian export market. This 33rd TEI was held with the theme "*Creating Products for Global Opportunities*". In this event, there will also be activities such as the Trade, Tourism and Investment Forum, business meetings, business consultations, regional discussions, local and international trade missions, export start-up competitions, and talk shows.



26 September 2018
September, 2018

Sosialisasi Implementasi Program Mandatori Biodiesel 20% (B20).

Sebagai tindak lanjut atas diluncurkannya Program Mandatori Biodiesel 20% (B20) oleh Pemerintah, maka untuk memastikan kelancaran kebijakan perluasan mandatori tersebut, BDPKPS melakukan sosialisasi di Batam, Kepulauan Riau. Sosialisasi Implementasi Program Mandatori Biodiesel 20% (B20) bertema "Biodiesel untuk Bangsa dan Negara", dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Pembangunan Ekonomi Gubernur Kepulauan Riau Syamsul Bahrum. Hadir dalam acara tersebut Direktur Penyaluran Dana BDPKPS, Edi Wibowo, kalangan regulator, unsur pemerintah daerah, Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM), Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN), badan klasifikasi, asosiasi terkait penggunaan B20, akademisi, BUMN dan lain-lain.

Socialization of the 20% Biodiesel (B20) Mandatory Program.

As a follow up to the 20% Biodiesel (B20) Mandatory Program by the Government, OPFMA conducted a socialization in Batam, Riau Islands, to ensure the smoothness of the mandatory expansion policy. The Socialization for the 20% Biodiesel (B20) Mandatory Program with the theme "Biodiesel for the People and Nation", was officiated by Assistant II for Economic Development of the Riau Islands Governor, Syamsul Bahrum. The event was attended by OPFMA's Director of Fund Disbursement, Edi Wibowo, regulators, local government, Fuel Oil Business Entity (BU BBM), Biofuels Business Entity (BU BBN), classification agencies, associations related to the use of B20, academics, SOEs, etc.



05 Oktober 2018
October, 2018

BDPKPS Bersama 8 Kementerian dan Lembaga Perkuat Sosialisasi B20.

BDPKPS bersama delapan kementerian dan lembaga terkait berkomitmen untuk memperluas sosialisasi penerapan program perluasan mandatori B20 agar masyarakat lebih mengetahui secara lebih mendalam mengenai bahan bakar campuran 80% solar dengan 20% biodiesel. Langkah sosialisasi ini juga diperlukan untuk menghindari kesalahan persepsi yang mungkin muncul di publik terkait penggunaan bahan bakar.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Humas dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, dan sejumlah kalangan lain. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai perlunya tindakan bersama untuk mensosialisasikan B20 secara lebih intensif.

OPPFMA, in Collaboration with 8 Ministries and Institutions, Strengthens B20 Socialization.

OPPFMA, in collaboration with 8 ministries and institutions are committed to expand the socialization of the B20 mandatory expansion program to ensure that the public knows better about 80% diesel fuel mix with 20% biodiesel. This socialization is necessary to avoid misperceptions that might arise in the public's perception regarding fuel utilization. The event was attended by PR representatives from the Coordinating Ministry for the Economy, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Trade, the Ministry of Transportation, the Ministry of SOEs, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance, the Ministry of Industry, the Association of Indonesian Biofuel Producers, and various other communities. The meeting resulted in an agreement on joint action for a more intensive B20 socialization.



29 Oktober 2018
October, 2018

Joko Supriyono Anggota Dewan Pengawas BDPKPS mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pembukaan *Indonesian Palm Oil Conference* (IPOC) 2018 & 2019 *Price Outlook* di Sofitel Nusa Dua Bali.

Joko Supriyono, a member of the OPFMA's Supervisory Board, accompanied President Joko Widodo in opening the 2018 Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) & 2019 Price Outlook at the Sofitel, Nusa Dua, Bali





Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

02

Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan Report to Regulators and Stakeholders



Sampai dengan 31 Desember 2018 BDPKS mencatat Aset sebesar Rp20.971 triliun, meningkat 76,74% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11.865 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus tahun 2018 yang lebih besar. Adapun Liabilitas sebesar Rp879.71 miliar meningkat 2,38% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp859.19 miliar yang disebabkan oleh pengakuan beban pembayaran selisih harga biodiesel yang telah diverifikasi oleh Kementerian ESDM.

As of 31 December 2018, OPPFMA recorded assets of Rp20,971 trillion, an increase of 76.74% compared to 2017, which was Rp11,865 trillion. This increase was mainly due to a larger surplus in 2018. Liabilities amounted to Rp879.71 billion, increased by 2.38% compared to 2017, which was Rp859.19 billion, due to the recognition of the biodiesel price variance verified by the Ministry of Energy and Mineral Resources.





Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Laporan Dewan Pengawas

Message from the Supervisory Board



Rusman Heriawan
Ketua **Chairman**

Dewan Pengawas mencermati bahwa capaian kinerja BDPKS tahun 2018 merupakan hasil dari sinergi Direksi dan Dewan Pengawas, dukungan kebijakan pemerintah dan dampak perkembangan industri sawit Indonesia.

Supervisory Board noted that OPPFMA's performance in 2018 was the result of the synergy of the Board of Directors and the Supervisory Board, the support of government policies, and the impact of the palm oil industry development.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga BDPKS berhasil melewati tahun buku 2018 dengan pencapaian sangat baik. Dewan Pengawas secara kolektif mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan BDPKS dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada Direksi. Izinkan saya mewakili Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan terhadap hasil kinerja BDPKS untuk Tahun Buku 2018. Laporan disampaikan untuk memenuhi pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Selama tahun 2018, Dewan Pengawas BDPKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi agar terus menjalankan komitmennya untuk selalu meningkatkan kinerja BDPKS dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (GG) dalam kegiatan sehari-hari.

We give praise to the Almighty God, for it is with His abundant grace and blessings that BDPKS succeeded in passing the fiscal year 2018 with very good achievement. The Supervisory Board collectively has the duties and responsibilities for OPPFMA's management by supervising and providing direction to the Board of Directors. I, on behalf of the Supervisory Board, submit a supervisory report on OPPFMA's performance results for the Fiscal Year 2018. This report is submitted to fulfill the supervisory duties as regulated in Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.05/2016 on the Supervisory Board of Public Service Agency.

During 2018, OPPFMA's Supervisory Board proactively supervises and provides advice to the Board of Directors. Supervision is carried out directly, including monitoring the follow-up on the recommendations of the Supervisory Board to the Board of Directors to improve OPPFMA's performance by upholding the Good Governance (GG) principles in daily activities.



Penilaian atas Kinerja Direksi

Assessment on the Board of Directors' Performance

Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada manajemen BPDPKS atas pencapaian kinerja di tahun 2018 yang meningkat signifikan melampaui target yang ditetapkan. Dewan Pengawas mencermati bahwa capaian kinerja BPDPKS tahun 2018 merupakan hasil dari sinergi Direksi dan Dewan Pengawas, dukungan kebijakan pemerintah dan dampak perkembangan industri sawit Indonesia. Capaian kinerja BPDPKS tahun 2018 juga merefleksikan peningkatan proses berbasis *good governance*.

Sampai dengan 31 Desember 2018 BPDPKS mencatat Aset sebesar Rp20.971 triliun, meningkat 76,74% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11.865 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surplus tahun 2018 yang lebih besar. Adapun Liabilitas sebesar Rp879.71 miliar meningkat 2,38% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp859.19 miliar yang disebabkan oleh pengakuan beban pembayaran selisih harga biodiesel yang telah diverifikasi oleh Kementerian ESDM. Sementara itu, adanya surplus tahun 2018 dan pengembalian setoran dari kas negara sebesar Rp2.000.000.000.000, berdampak pada kenaikan Ekuitas BPDPKS menjadi 20.091 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 82,52% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11.007 triliun.

Dari sisi operasional, BPDPKS membukukan pendapatan Rp15.42 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp4.824 triliun yang telah dialokasikan untuk program replanting, pendidikan dan pelatihan petani kelapa sawit, mendanai riset pada sejumlah universitas/lembaga riset, dan telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah dan hak paten serta promosi dan diplomasi sawit. Sementara itu, Pendapatan atas pengelolaan dana sebesar Rp1.047 triliun.

Dewan Pengawas juga senantiasa mendukung Program Mandatori Biodiesel 20% (B-20) pada setiap minyak diesel (solar) yang berhasil menyerap 2,288 juta KL. Dimana program ini telah memberikan manfaat besar dalam bentuk pengurangan gas emisi.

The Supervisory Board appreciates OPPFMA management for the achievement of 2018 performance, which increased significantly beyond the predetermined targets. Supervisory Board noted that OPPFMA's performance in 2018 was the result of the synergy of the Board of Directors and the Supervisory Board, the support of government policies, and the impact of the palm oil industry development. OPPFMA's performance in 2018 reflects an improvement in the process of good governance.

As of 31 December 2018, OPPFMA recorded assets of Rp20,971 trillion, an increase of 76.74% compared to 2017, which was Rp11,865 trillion. This increase was mainly due to a larger surplus in 2018. Liabilities amounted to Rp879.71 billion, increased by 2.38% compared to 2017, which was Rp859.19 billion, due to the recognition of the biodiesel price variance verified by the Ministry of Energy and Mineral Resources. Meanwhile, the 2018 surplus and return of deposits from the state treasury of Rp2,000,000,000,000 have an impact on the increase in OPPFMA's Equity to Rp20,091 trillion, or increased by 82.52% compared to 2017, which was Rp11,007 trillion.

In terms of operations, OPPFMA recorded revenues of Rp15.42 trillion and disbursed funds of Rp4,824 trillion, which had been allocated for replanting, education and training programs for palm oil farmers, funded research at several universities/research institutions, and produced various scientific publications and patents, and palm oil promotion and diplomacy. Income from fund management amounted to Rp1,047 trillion.

The Supervisory Board supports the Mandatory Biodiesel 20% Program (B-20) on each diesel oil, which successfully absorbs 2.288 million KL. This program has provided great benefits in reducing gas emissions.

Pandangan Atas Prospek Usaha

View on Business Prospects

Prospek perekonomian domestik 2019 akan tetap kuat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas yang terjaga ditengah kondisi perekonomian global yang belum kondusif,. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diprakirakan tetap solid pada kisaran 5,0% - 5,4% ditunjang oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik konsumsi maupun investasi. Sementara itu, kinerja ekspor neto belum banyak dapat menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi 2019 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dunia yang melandai.

Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh kuat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi swasta diprakirakan tumbuh dalam kisaran 5,2% - 5,6% pada 2019 dipengaruhi tingginya konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat didukung daya beli masyarakat yang terjaga, seiring dengan pendapatan yang membaik disertai inflasi yang rendah, serta dampak positif dari penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Peran stimulus fiskal pemerintah baik melalui bantuan sosial maupun instrumen fiskal lainnya juga berperan menopang kinerja konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi swasta juga bersumber dari peningkatan kinerja konsumsi LNPRT sebagai dampak positif dari pengeluaran terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

In 2019, the domestic economy is projected to remain strong, which shall be marked by better and more stable economic growth amidst the not conducive global economic conditions. Indonesia's economic growth in 2019 is predicted to remain solid at 5.0% - 5.4%, supported by strong domestic demand, both consumption and investment. Meanwhile, the net export performance was unable to sustain an increase in economic growth in 2019, in line with sluggish world economic growth.

Private consumption is expected to grow strongly, to sustain economic growth in 2019. Private consumption is predicted to grow by 5.2% - 5.6% in 2019 due to high household consumption and consumption of nonprofit institutions serving households (LNPRT). Growth in household consumption is expected to remain strong, supported by maintained public' purchasing power, in line with improved income accompanied by low inflation, as well as the positive impact of General Election (Pemilu).

The government fiscal stimulus through social assistance and other fiscal instruments plays a role in sustaining the performance of household consumption. The private consumption performance is also influenced by an increase in LNPRT consumption performance as a positive impact of expenditure related to the 2019 General Election.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola BDPKPS

View on Business Prospects

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik BDPKPS selalu berupaya untuk dapat menerapkan implementasi *Good Governance* pada setiap lini bisnisnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi dan tanggung jawab) guna mempertahankan eksistensi BDPKPS dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang, Dewan Pengawas menilai BDPKPS telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tata kelola organisasi dapat dilaksanakan secara konsisten.

In terms of improving the OPPFMA's Good Governance in every business line based on the Good Governance principles (transparency, accountability, fairness, independence, and responsibility) to maintain the OPPFMA in facing challenges and business competition in the future, the Supervisory Board considers that OPPFMA has made various efforts to ensure that the organizational governance is carried out consistently.



Laporan Dewan Pengawas Message from the Supervisory Board

Organ tata kelola BDPKPS dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola BDPKPS dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol check and balance. Pengelolaan BDPKPS senantiasa dilandasi dengan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Pengawas senantiasa mendorong komitmen BDPKPS untuk menerapkan tata kelola perusahaan di seluruh tingkatan organisasi. BDPKPS secara bertahap melakukan penyempurnaan atas kelengkapan kebijakan dan prosedur di seluruh organisasi BDPKPS dalam rangka mendukung berjalannya sistem operasional mampu sejalan dengan prinsip *good governance*.

Sistem pengendalian internal BDPKPS dilakukan melalui penerapan kebijakan dan prosedur secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha BDPKPS, manajemen risiko, perencanaan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Konsep Sistem Pengendalian Internal sejalan dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO). Dewan Pengawas senantiasa mengawasi kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit.

Dewan Pengawas menyadari bahwa BDPKPS tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usahanya, karena itu kami mendorong peningkatan kemampuan di bidang manajemen risiko agar mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang akan dihadapi. Kami meyakini bahwa dengan tata kelola yang semakin baik, maka BDPKPS akan mampu mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

The OPPFMA's corporate governance is formed to ensure that the implementation of OPPFMA's governance principles shall be done effectively with clear roles and responsibilities to create check and balance control mechanism. BDPKPS's management is always performed based on good governance principles in accordance with prevailing regulations. The Supervisory Board always encourages BDPKPS's commitment to implementing integrated corporate governance at all levels of the organization. In addition, OPPFMA has gradually refined the policies and procedures within the organization to be more comprehensive, in order to be able to support the operational system in line with the principles of good governance.

The OPPFMA's internal control system is applied through consistent implementation of policy and procedures, in relation to OPPFMA's business activity, risk management, strategic planning, segregation of duties, and clear authority delegation, as well as adequate accounting policy. The concept of the Internal Control System is in line with the Internal Control System of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The Supervisory Board, assisted by the Audit Committee, monitors the adequacy and fairness in the preparation of financial statements, risk management, by taking into account the prudential principles.

The Supervisory Board realizes that OPPFMA is inseparable from business risks that may affect its business activities. Therefore, We encourage capacity building in risk management in order to be able to identify and mitigate the risks that will be faced. We believe that with better governance, OPPFMA will be able to achieve sustainable growth and provide added value for all stakeholders.

Dewan Pengawas menyadari bahwa BDPKS tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usahanya, karena itu kami mendorong peningkatan kemampuan di bidang manajemen risiko agar mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang akan dihadapi.

The Supervisory Board realizes that OPPFMA is inseparable from business risks that may affect its business activities. Therefore, We encourage capacity building in risk management in order to be able to identify and mitigate the risks that will be faced. We believe that with better governance, OPPFMA will be able to achieve sustainable growth and provide added value for all stakeholders.

Komite di Bawah Dewan Pengawas **Committees Reporting Directly to the Supervisory Board**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota sesuai dengan Keputusan Direktur Utama BDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BDPKS. Komite Audit bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun auditor eksternal serta memastikan kebenaran dan keandalan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku sehingga Dewan Pengawas senantiasa terupdate dan dapat memberikan arahan yang tepat kepada Direksi. Selain itu, Dewan Pengawas mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas yang bertugas memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Pengawas dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas.

In carrying out the supervisory function, the Supervisory Board is assisted by the Audit Committee, which comprises 1 Chairman and 2 Members, in accordance with Decree of OPPFMA's President Director No. KEP-08/DPKS/2016 on the Establishment of the Audit Committee at OPPFMA. The Audit Committee has the duty to assist the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of internal control carried out by internal and external auditors, as well as ensuring the truth and reliability of financial statements and other financial information to ensure compliance with prevailing standards and rules. Therefore, the Supervisory Board is always updated and shall provide proper advice to the Board of Directors. In addition, the Supervisory Board appointed a Secretary of the Supervisory Board who functions to provide administrative and secretarial support to the Supervisory Board in facilitating the implementation of the Supervisory Board's duties.



Komposisi Dewan Pengawas Composition of the Supervisory Board

Selama tahun 2018 komposisi Dewan Pengawas mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Lukita Dinarsyah Tuwo, Sdr. Suahasil Nazara, Sdr. Rida Mulyana dan Sdr. Gamal Nasir sebagai Dewan Pengawas dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengangkat Sdr. Musdhalifah Machmud, Sdr. Bambang, Sdr. Bambang dan Sdr. Heru Pambudi serta Sdr. Djoko Siswanto berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 692/KMK.05/2018 tanggal 16 Oktober 2018 sebagai Dewan Pengawas yang baru. Sehingga komposisi Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

During 2018, the composition of the Supervisory Board changed from time to time. Based on the Decree of the Minister of Finance, she honorably dismissed Mr. Lukita Dinarsyah Tuwo, Mr. Suahasil Nazara, Mr. Rida Mulyana, and Mr. Gamal Nasir as the Supervisory Board, and based on the Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018, appointed Mrs. Musdhalifah Machmud, Mr. Bambang, Mr. Bambang, and Mr. Heru Pambudi, as well as Mr. Djoko Siswanto based on the Minister of Finance's Decree No. 692/KMK.05/2018 dated 16 October 2018 as the new Supervisory Board. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners as of 31 December 2018 is as follows:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representative Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture	
Arlinda	Anggota Member	Kementerian Perdagangan Ministry of Trade	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian Ministry of Industry	
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/ Bappenas Ministry of National Development Planning/ Bappenas	
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) GAPKI (Indonesian Palm Oil Association/IPOA)	
Musdhalifah Machmud	Anggota Member	Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 Tanggal 6 Juni 2018 Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018
Bambang	Anggota Member	Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture	
Heru Pambudi	Anggota Member	Bea dan Cukai Customs and Excises	
Djoko Siswanto	Anggota Member	Kementerian ESDM Ministry of EMR	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 692/KMK.05/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Minister of Finance's Decree No. 692/KMK.05/2018 dated 16 October 2018

Kami memandang, komposisi yang ada telah memenuhi aspek keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan, memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha BDPKS, membuat keputusan secara independen, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

We consider that the composition has fulfilled the expertise aspects to be able to carry out the responsibilities mandated, has adequate understanding and competence to face problems that may arise in OPPFMA's business activities, can make decisions independently, and can effectively conduct reviews and provide constructive input on the Board of Directors' performance.

Ucapan Terima Kasih Acknowledgments

Kami memberikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh pegawai yang telah bahu membahu bekerja keras sehingga BDPKS masih dapat menjaga kesinambungan operasional BDPKS di tengah situasi bisnis yang penuh tantangan di tahun 2018 ini. Demikian juga kami atas nama Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih kepada segenap pemangku kepentingan, atas dukungan dan kepercayaan kepada kami.

We give appreciation to the Board of Directors and all employees who have worked hand in hand so that OPPFMA can maintain the OPPFMA's operation sustainability in the midst of a challenging business situation in 2018. Likewise, We, on behalf of the Supervisory Board, would like to thank all our stakeholders for their support and confidence in us.

Jakarta, ... 2018 Jakarta, ... 2018
Atas Nama Dewan Pengawas On Behalf of the Supervisory Board
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)

Rusman Heriawan
Ketua Dewan Pengawas
Supervisory Board's Chairman



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Profil Dewan Pengawas BDPKS

Supervisory Board's Profiles of OPPFMA





Selama tahun 2018 terdapat 3 (tiga) periode pergantian komposisi Dewan Pengawas yaitu Periode 1 Januari - 6 Juni 2018, 6 Juni 2018 - 16 Oktober 2018 dan 17 Juli - 31 Desember 2017.

During 2018, there were 3 (three) periods of change of the Supervisory Board's composition, i.e. 1 January - 6 June 2018, 6 June 2018 - 16 October 2018, and 17 July - 31 December 2018.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Profil Dewan Pengawas BDPKPS Supervisory Board's Profiles of OPPFMA

Periode 1 Januari - 6 Juni 2018 dijabat oleh:

The Supervisory Board on 1 January - 6 June 2018 was held by:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representatif Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture
Lukita Dinarsyah Tuwo	Anggota Member	Kementerian koordinator bidang perekonomian	Coordinating Ministry for Economic Affairs
Suhasil Nazara	Anggota Member	Kementerian keuangan	Ministry of Finance
Arlinda	Anggota Member	Kementerian perdagangan	Ministry of Trade
Rida Mulyana	Anggota Member	Kementerian ESDM	Ministry of EMR
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian	Ministry of Industry
Gamal Nasir	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/Bappenas	Ministry of National Development Planning/Bappenas
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)	GAPKI (Indonesian Palm Oil Association/IPOA)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015
Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015

Periode 6 Juni - 16 Oktober 2018 dijabat oleh:

The Supervisory Board on 6 June - 16 October 2018 was held by:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representatif Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture
Arlinda	Anggota Member	Kementerian perdagangan	Ministry of Trade
Rida Mulyana	Anggota Member	Kementerian ESDM	Ministry of EMR
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian	Ministry of Industry
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/Bappenas	Ministry of National Development Planning/Bappenas
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)	GAPKI (Indonesian Palm Oil Association/IPOA)
Musdhalifah Machmud	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture
Heru Pambudi	Anggota Member	Bea dan Cukai	Customs and Excises
Bambang	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015
Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 Tanggal 6 Juni 2018
Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018

Periode 16 Oktober 2018 - 31 Desember 2018 profil sebagai berikut:

The Supervisory Board's composition for the period 16 October - 31 December 2018 is as follows:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Representatif Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture
Arlinda	Anggota Member	Kementerian perdagangan	Ministry of Trade
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian	Ministry of Industry
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	Ministry of National Development Planning/Bappenas
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)	GAPKI (Indonesian Palm Oil Association/IPOA)
Musdhalifah Machmud	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture
Heru Pambudi	Anggota Member	Bea dan Cukai	Customs and Excises
Bambang	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture
Djoko Siswanto	Anggota Member	Kementerian ESDM	Ministry of EMR





Profil Dewan Pengawas BPDPKS Supervisory Board's Profiles of OPPFMA

Profil Dewan Pengawas sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

The profile of the Supervisory Board as of 31 December 2018 is as follows:

RUSMAN HERIAWAN KETUA CHAIRMAN



Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, 4 November 1951 (67 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Memperoleh gelar Diploma Tiga di Akademi Statistik, (AIS) Jakarta (1974), Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1983), meraih gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (PWD) (2002) dan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (2004).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Kepala Badan Pusat Statistik (2006 - 2011), Deputy Bidang Statistik Sosial (2004 - 2006), Direktur Statistik Perdagangan dan Jasa (2001-2004) dan Peneliti Utama, Balitbang Pertanian-Kementerian Pertanian, (2006 s.d. sekarang) *Platform Advisor on Indonesia Sustainable Palm Oil*, UNDP.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Bogor, November 04, 1951 (67 years old), domiciled at Jakarta. Serving as the Chairman of OPPFMA Supervisory Board pursuant to Minister of Finance Decree Number 714/KMK.05/2015 dated June 26, 2015.

Hold a Young Bachelor Degree from Statistics Academy (AIS) Jakarta (1974), Bachelor of Economics, University of Indonesia (1983), Master of Regional and Rural Planning (PWD) (2002), and Doctorate degree from Bogor Agricultural Institute (2004).

During his career, he has held various important positions: Chairman of Statistics Indonesia (2006-2011), Deputy for Social Statistics (2004-2006), Director of Trade and Service Statistics (2001-2004), and Principal Researcher, Agriculture Research and Development - Ministry of Agriculture (2006 - present), Platform Advisor on Indonesia Sustainable Palm Oil, UNDP.

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.

MUSDHALIFAH MACHMUD ANGGOTA MEMBER



Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, 25 September 1961 (57 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 454/KMK.05/ 2018 Tanggal 6 Juni 2018.

Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Hutan di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1987, menyelesaikan pendidikan *Diploma of Monitoring Indonesian Environment* di *International Institute for Aerospace Survey and Earth Science* (ITC) di Enschede, Netherland pada 1992, dan melanjutkan pendidikan Magister Studi Pembangunan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2003.

Indonesian citizen, born in Ujung Pandang, 25 September 1961 (57 years), domiciled in Jakarta. Appointed as a Member of OPPFMA's Supervisory Board based on Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018.

Completed her Bachelor of Forest Management at the Bogor Agricultural Institute (IPB) in 1987, Diploma of Monitoring Indonesian Environment at the International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) in Enschede, Netherland, in 1992, and Master of Development Studies at Bandung Institute of Technology (ITB) in 2003.

Selain menjabat Anggota Dewan Pengawas BDPKPS, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Perum BULOG dan sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

In addition to serving as a Member of OPFMA's Supervisory Board, she also serves as the Supervisory Board of the National Logistics Agency (BULOG) and as Deputy for the Food and Agriculture Coordinating Ministry for Economic Affairs.

She has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.

HERU PAMBUDI

ANGGOTA MEMBER



Warga Negara Indonesia, lahir di Bondowoso pada tanggal 11 Februari 1970 (48 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKPS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 454/KMK.05/ 2018 Tanggal 6 Juni 2018.

Menempuh pendidikan D III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan dengan pendidikan terakhir yaitu S2 di University Of Newcastle, Upon Tyne pada Tahun 2001

Sebelum menduduki jabatan sekarang sebagai Dewan Pengawas BDPKPS, beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai pada tahun 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea Dan Cukai sejak tanggal 25-06-2015.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Bondowoso, 11 February 1970 (48 years), domiciled in Jakarta. Appointed as a Member of OPFMA's Supervisory Board based on Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018.

Young Diploma from the State College of Accountancy in 1991. He obtained his Master degree at the University of Newcastle Upon Tyne, in 2001

Prior to his current position as OPFMA's Supervisory Board, he served as Director of Admissions and Customs and Excise Regulations in 2015. He currently serves as Director General of Customs and Excise since 25 June 2015.

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.



ARLINDA ANGGOTA MEMBER



Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, 24 Maret 1963 (54 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK. 05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1985), gelar *Master Degree in Economics* di bidang Ekonomi dari University Of Colorado At Boulder, United State of America (USA) (1993).

Selama kurun waktu 1994 sampai dengan saat ini, beliau aktif mengikuti dan mewakili Indonesia di forum internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral dan juga aktif mempromosikan produk-produk dan jasa Indonesia di mancanegara untuk meningkatkan ekspor non migas dan nation branding Indonesia.

Beberapa jabatan strategis Kementerian Perdagangan yang pernah diemban antara lain: Atase Perdagangan - KBRI di Washington DC USA (2006 - 2009), Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan (2009 - 2011), Direktur Impor, Dit. Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (2012), Kepala Pusat Hubungan Masyarakat (2012 - 2013), Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (2013 - 2015), Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa (2015 - sekarang). Beliau juga dipercaya untuk terlibat aktif di beberapa Tim Teknis dalam rangka peningkatan ekspor non migas Indonesia, yaitu:

- Anggota Tim Teknis Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Juli 2015 - September 2016);
- Ketua Tim Deregulasi Kebijakan Perdagangan (Agustus 2015 - Agustus 2017);
- Ketua Tim Percepatan Turunan Peraturan UU Perdagangan No. 7 Tahun 20014 (Januari 2016 - Agustus 2017).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Palembang, 24 March 1963 (54 years), domiciled in Jakarta. Appointed as a Member of OPPFMA's Supervisory Board based on Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015.

Obtained a Bachelor of Agriculture from Bogor Agriculture Institute (1985), Master of Economics from the University of Colorado at Boulder, United States of America (USA) (1993).

Throughout 1994-present, she actively participates in and represents Indonesia in international bilateral, regional, and multilateral forums. She actively promotes Indonesian products and services abroad to increase non-oil and gas exports and Indonesia's brands.

Several positions in the Ministry of Trade that has been held includes: Trade Attaché - Indonesian Embassy in Washington DC USA (2006-2009), Head of the Center for Trade Policy Harmonization (2009-2011), Director of Imports, Directorate of Imports, Directorate General of Foreign Trade (2012), Head of Center for Public Relations (2012-2013), Assistant of Minister for Foreign Trade Policy and Special Economic Zones Development (2013-2015), Assistant of Minister for Trade Services (2015-present). She is also actively involved in several Technical Teams to improve Indonesia's non-oil and gas exports:

- Member of the Batam Free Trade Zone and Free Port Technical Team (July 2015 - September 2016);
- Chairperson of the Trade Policy Deregulation Team (August 2015 - August 2017);
- Head of the Team for the Acceleration of Derivative Regulations on Trade Law No. 7 of 2014 (January 2016 - August 2017).

She has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.

DJOKO SISWANTO

ANGGOTA MEMBER



Warga Negara Indonesia, lahir di Sumedang, 2 Mei 1963 (54 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKPS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 692/ KMK.05/ 2018 Tanggal 16 Oktober 2018.

Memperoleh gelar Diploma Teknik Mesin Politeknik Universitas Indonesia. Lalu, dia melanjutkan kuliah S1 di teknik Perminyakan ITB (1986-1990). Pada 2000-2001, dia lulus di Edinburg Business School di Herriot Watt University, Inggris. Selain itu juga mengambil S2 Spesialis manajemen migas di *Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy*, Dundee University, Inggris. Dan meraih gelar Doktor Teknik Perminyakan ITB (2006-2011).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, diantaranya: Direktur Teknik di Dirjen Migas pada Direktorat Teknik (1992), selanjutnya dia alih posisi ke Direktorat Eksplorasi dan Produksi Dirjen Migas (1999). Pada 2002, juga merangkap jabatan fungsional Inspektur Migas Dirjen Migas (2003). Karirnya di BPH Migas, dimulai sejak 2004, diawali menjabat sebagai anggota Pokja Direktorat BBM, BPH Migas. Pada 2008, beralih menjadi Kepala Pokja Tarif, Iuran, Akun Pengaturan dan harga Gas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Direktorat Gas Bumi BPH Migas. Pada 2010, dia juga menjadi Pelaksana Harian Direktur Gas Bumi BPH Migas. Pada periode 2012-2013, dia pun menjabat sebagai Direktur BBM BPH Migas. Kemudian, pada 2013 sampai 2015, menjadi sekretaris BPH Migas. Terakhir, dia menjadi Direktur Gas bumi pada periode 2014-2015. Setelah itu, beliau kembali ke Kementerian ESDM dan menjabat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas pada 2015. Lalu, Djoko pun merapat ke SKK Migas sebagai Deputy Pengendalian Pengadaan sampai akhirnya menjadi Dirjen Migas.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Sumedang, 2 May 1963 (54 years), domiciled in Jakarta. Appointed as a Member of OPFMA's Supervisory Board based on Minister of Finance's Decree No. 692/KMK.05/2018 dated 16 October 2018.

Obtained a Diploma in Mechanical Engineering at the Polytechnic University of Indonesia. Then, he continued his study at ITB Petroleum Engineering (1986-1990). In 2000-2001, he graduated from Edinburg Business School at Herriot Watt University, England. In addition, he also has a Master in Oil and Gas Management at the Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy, Dundee University, England. He has a Doctoral degree in petroleum engineering from ITB (2006-2011).

During his career, he has held various important positions: Technical Director at the Director General of Oil and Gas at the Directorate of Engineering (1992). He was transferred to the Directorate of Exploration and Production of the Director General of Oil and Gas (1999). In 2002, he held the functional position as the Inspector General of Oil and Gas (2003). His career at BPH Migas started in 2004, as a member of the Working Group of the Directorate of Oil Fuel, BPH Migas. In 2008, he became the Head of the Working Group on Tariffs, Contribution, Regulations Accounts, and Gas Prices for Household and Small Customers, the Directorate of Natural Gas BPH Migas. In 2010, he also became the Acting Director of Natural Gas at BPH. In 2012-2013, he served as Director of Oil Fuel at BPH Migas. Then, in 2013-2015, he became the Secretary of BPH Migas. Finally, he became the Director of Natural Gas in 2014-2015. After that, he returned to the Ministry of Energy and Mineral Resources and served as Director of Upstream Oil and Gas Business Development in 2015. He served at SKK Migas as Deputy of Procurement Control, and then he became the Director General of Oil and Gas.

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Profil Dewan Pengawas BDPKPS Supervisory Board's Profiles of OPPFMA

PANGGAH SUSANTO ANGGOTA MEMBER



Warga Negara Indonesia, lahir di Temanggung, 19 Oktober 1958 (59 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKPS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1984), dan Magister Manajemen STEI IPWI (1997).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Direktur Industri Maritim dan Jasa Keteknikan (2005 - 2008), Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan (2008 - 2010), Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (2010 - 2013), Plt Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (2014 - 2015), Direktur Jenderal Industri Agro (Juli 2013 - sekarang). Selain itu beliau juga mendapat penugasan khusus sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik (2016), Komisaris Utama PT Rekayasa Industri (2014 - 2016), Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (2011 - 2014), Komisaris PT Dok & Perkapalan (1997 - 2011), Sekretaris Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik (1996 - 2003) dan Staf Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (1994 - 1996). Selama kurun waktu 1994 sampai saat ini, beliau juga mendapat penugasan ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam berbagai forum terkait perdagangan internasional serta melakukan berbagai kajian terkait teknologi proses pupuk.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Temanggung, 19 October 1958 (59 years), domiciled in Jakarta. Appointed as a Member of OPPFMA's Supervisory Board based on Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015.

Obtained a Bachelor of Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology (1984), and a Master of Management STEI from IPWI (1997).

During his career, he has held various important positions: Director of Maritime Industry and Engineering Services (2005-2008), Director of Land and Aerospace Transportation Equipment Industry (2008-2010), Director General of Manufacturing Industry Bases (2010-2013), Acting Director General of High Technology-Based Leading Industries (2014-2015), Director General of Agroindustry (July 2013-present). In addition, he also received special assignments as Commissioner of PT Petrokimia Gresik (2016), President Commissioner of PT Rekayasa Industri (2014-2016), Commissioner of PT Pupuk Kalimantan Timur (2011-2014), Commissioner of PT Dok & Perkapalan (1997-2011), Secretary of the Board of Commissioners of PT Petrokimia Gresik (1996-2003), and the Member of the Board of Commissioners of PT Pupuk Kalimantan Timur (1994-1996). Throughout 1994-present, he received an assignment abroad to participate in various forums related to international trade and conduct various studies related to fertilizer process technology.

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.

BAMBANG ANGGOTA MEMBER



Warga Negara Indonesia, lahir di Blitar 8 November 1965 (53 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 454/KMK.05/ 2018 Tanggal 6 Juni 2018.

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari niversitas Haluoleo Kendari (1989), Magister Manajemen Institut Pertanian Bogor (2003).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, diantaranya: Pimpinan Proyek APBD Proyek Pengembangan Tanaman Industri (1992 - 1993), Pimpinan Proyek APBN Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi Sultra (1993 - 1994), Kepala Bagian Perencanaan TCSDP (1994 - 1995), Kepala UPP TCSDP (1995 - 1997), Counterpart JICA (1997 - 1998), Kepala Seksi Pengembangan Teknologi (2001 - 2003), Kepala Seksi Pengembangan Industri Primer (2003 - 2008), Kasubdin. Pengolahan dan Pemasaran Hasil (2008 - 2009), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil (2009 - 2013) dan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura (2013 - 2016). Selain itu juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkebunan (2016 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Blitar 8 November 1965 (53 years), domiciled in Jakarta. Appointed as a Member of OPFMA's Supervisory Board based on Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018.

He has a Bachelor of Agriculture from the Haluoleo Kendari University (1989), Masters in Management, Bogor Agricultural Institute (2003).

During his career, he has held various important positions: Head of the Regional Budget Project for Industrial Plant Development (1992-1993), Head of the Regional Budget Development Project of the Southeast Sulawesi Transmigration Project (1993-1994), Head of the TCSDP Planning Section (1994-1995), Head of the TCSDP UPP (1995-1997), JICA Counterpart (1997-1998), Head of Technology Development Section (2001-2003), Head of Primary Industry Development Section (2003-2008), Head of Sub-department of Product Processing and Marketing (2008-2009), Head of Product Processing and Marketing (2009-2013) and Head of Plantation and Horticulture Services (2013-2016). In addition, he also served as Director General of Plantations (2016-present).

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.



Profil Dewan Pengawas BDPKPS Supervisory Board's Profiles of OPPFMA

LOSO JUDIJANTO ANGGOTA MEMBER



Warga Negara Indonesia, Lahir di Magetan, 19 Januari 1971 (47 tahun), berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKPS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Meraih gelar Sarjana Sains dari Institut Pertanian Bogor (1994), dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (1995) dan memperoleh gelar Master of Statistics The University of New South Wales, Sydney, Australia (1998).

Berbagai pengalaman profesional beliau sejak tahun 1995 - 2015 yaitu: Peneliti Kebijakan Publik di *Center for Policy and Implementation Studies* (Oktober 1995 - Juni 1996), Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (Januari 1999 - Desember 2003), *Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialists* (Januari 2001 - November 2004), Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (November 2004 - Maret 2007), Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Desember 2007 - Mei 2009), Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Mei 2009 - Februari 2011), Komisaris Independen PT Bank Bukopin Tbk (Maret 2009 - Maret 2010) dan Ketua Komite Risk Management Oversight PT Bank Bukopin Tbk, Komisaris PT Telkomsel (Juli 2007 - Mei 2012), Komite Audit PT Indonesia Infrastructure Finance (2012 - 2014), PT Berau Coal Energy Tbk (2010 - 2014), PT Trimegah Securities Tbk (2010 - 2014), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007 - 2009) dan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2014 - Agustus 2015). Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas (Agustus 2015 - Agustus 2016), dan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Agustus 2016 - sekarang).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Magetan, 19 January 1971 (47 years), domiciled in Bekasi. Appointed as a Member of OPPFMA's Supervisory Board based on Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015.

Holds a Bachelor of Science from Bogor Agriculture Institute (1994), a Master of Management from the University of Indonesia (1995), and a Master of Statistics at the University of New South Wales, Sydney, Australia (1998).

His various professional experiences throughout 1995-2015: Public Policy Researcher at the Center for Policy and Implementation Studies (October 1995 - June 1996), Secretary of the Board of Commissioners of PT Pupuk Iskandar Muda (January 1999 - December 2003), Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialists (January 2001 - November 2004), Special Staff of the Minister of Communication and Information (November 2004 - March 2007), Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (December 2007 - May 2009), Experts of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (May 2009 - February 2011), Independent Commissioner of PT Bank Bukopin Tbk (March 2009 - March 2010), and Chairman of Risk Management Oversight Committee of PT Bank Bukopin Tbk, Commissioner of PT Telkomsel (July 2007 - May 2012), Audit Committee of PT Indonesia Infrastructure Finance (2012-2014), PT Berau Coal Energy Tbk (2010-2014), PT Trimegah Securities Tbk (2010-2014), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007-2009), and Special Staff to the Coordinating Minister for Economic Affairs (October 2014 - August 2015). Special Staff of the State Minister for National Development Planning/Head of Bappenas (August 2015 - August 2016), and Special Staff of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Defense Agency (August 2016 - present).

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.

JOKO SUPRIYONO

ANGGOTA MEMBER



Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, 20 Mei 1962 (54 tahun), berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BDPKKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986).

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, antara lain: Asisten Afdeling di PT Perkebunan II, Medan (1986 - 1994), Tenaga Instruktur di PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994). Selama kurun waktu tahun 1995 sampai sekarang menduduki beberapa jabatan di PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai Departemen *Head-Human Resources* (1995 - 1999), *Division Head - Human Resources* (2000 - 2002), *Area Director - Riau Region* (2002 - 2005), *Deputy Director - Operation* (2005 - 2007), *Director - Human Resources* (2007 - 2009), *Director - Env & Social Responsibility* (2009 - 2011), *Director in charge of Sustainability and Public Relation*, *President Director of Sumatera Operation* (2011 - 2015), *Director in charge of Sustainability and Public Relation*, *President Commissioner of Sumatera Operation* (2015 - sekarang).

Selain itu beliau juga menduduki berbagai jabatan di organisasi profesi antara lain: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau sebagai Ketua (2003 -2006), Anggota Komite GAPKI Pusat (2008 -2009), Sekretaris Jenderal GAPKI Pusat (2009 -2015), Ketua Umum GAPKI Pusat (2015 - sekarang), Ketua Bidang Infrastruktur dan Lahan di Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) (2012 - 2015).

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Nganjuk, 20 May 1962 (54 years), domiciled in Bekasi. Appointed as a Member of OPPFMA's Supervisory Board based on Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015.

Obtained a Bachelor's degree from the Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1986).

During his career, he has held various important positions: Assistant Afdeling at PT Perkebunan II, Medan (1986-1994), Instructor at PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994). Throughout 1995-present, he held several positions, i.e. at PT Astra Agro Lestari Tbk as Head of Human Resources Department (1995-1999), Division Head - Human Resources (2000-2002), Area Director - Riau Region (2002-2005), Deputy Director - Operations (2005-2007), Director - Human Resources (2007-2009), Director - Environment & Social Responsibility (2009-2011), Director in charge of Sustainability and Public Relations, President Director of Sumatra Operation (2011-2015), Director in charge of Sustainability and Public Relations, President Commissioner of Sumatra Operation (2015-present).

In addition, he also held various positions in professional organizations: Indonesian Palm Oil Association (IPOA) Riau Branch as Chairman (2003-2006), Member of the Central IPOA Committee (2008-2009), Secretary General of the Central IPOA (2009-2015), General Chairman of the Central IPOA (2015-present), Chairman of Infrastructure and Land at the Indonesian Palm Oil Board (IPOB) (2012-2015).

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Laporan Direksi

Board of Directors' Report



Dono Boestami
Direktur Utama **President Director**

Jumlah Aset BDPKKS tahun 2018 adalah sebesar Rp20.971.433.886.205 meningkat 76,74% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11.865.868.411.275. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tingginya pendapatan pungutan dan pengelolaan dana, serta berkurangnya selisih harga biodiesel yang menyebabkan beban biodiesel yang lebih kecil dari periode sebelumnya sehingga terjadi peningkatan aset yang signifikan.

In 2018, OPPFMA's Total Assets amounted to Rp20,971,433,886,205, increased by 76.74% compared to 2017, which was Rp11,865,868,411,275. The increase was mainly due to high collection fees and fund management, as well as reduced biodiesel price differences which led to a smaller biodiesel liabilities compared to the previous period, resulting in a significant increase in assets.

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, Dear Distinguished Stakeholders,

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kami atas nama Direksi menyampaikan laporan pengelolaan dan pencapaian BDPKKS di tahun keempat berdiri. Hal ini sebagai bukti eksistensi BDPKKS sekaligus kebanggaan atas kepercayaan negara kepada kami dalam mengelola dana perkebunan kelapa sawit yang berperan dalam pengembangan sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia. Merupakan kehormatan bagi saya mewakili seluruh anggota Direksi yang lain, untuk menyampaikan bahwa tahun 2018 merupakan tahun yang mengesankan dimana BBPDKKS mampu menjaga kinerja yang berkelanjutan dan berhasil menciptakan nilai yang optimal bagi segenap pemangku kepentingan. Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami melaporkan pengelolaan dan kinerja BDPKKS selama tahun buku 2018 melalui Laporan Tahunan Tahun 2018.

We give thanks to the God Almighty, on this occasion, We, on behalf of the Board of Directors, submit management reports and OPPFMA's achievements in the fourth year since its establishment. This is the evidence of OPPFMA's existence and our pride in the country's confidence in managing the funds of palm oil plantations that play a role in the development of sustainable palm oil as one of Indonesia's strategic commodities. It is my honor to represent all the other members of the Board of Directors, to convey that 2018 was an impressive year, in which OPPFMA was able to maintain sustainable performance and thrive in creating optimal value for the stakeholders. On this opportunity, let us submit the management and performance report of OPPFMA throughout 2018 fiscal year, in this 2018 Annual Report.



Perbaikan Kondisi Ekonomi Global Berdampak Pada Peningkatan Nilai Industri Kelapa Sawit Improvement in Global Economic Conditions Impacts on Value Increase of the Palm Oil Industry

Di tengah berbagai kesulitan yang di hadapi di Tahun 2018, industri sawit Indonesia tetap berjuang dan mengokohkan kuda-kudanya untuk bertahan serta berkembang. Industri yang menjadi mesin penghasil devisa terbesar Indonesia ini, menghadapi fluktuasi harga yang menurun, produksi yang melimpah dan berbagai tekanan negatif terhadap keberadaan industri kelapa sawit.

Ekspor minyak sawit Indonesia secara keseluruhan (CPO dan produk turunannya, biodiesel dan oleochemical) membukukan kenaikan sebesar 8% atau dari 32,18 juta ton pada 2017 meningkat menjadi 34,71 juta ton di tahun 2018. Peningkatan yang paling signifikan secara persentase dicatatkan oleh biodiesel Indonesia yaitu sebesar 851% atau dari 164 ribu ton pada 2017 meroket menjadi 1,56 juta ton di tahun 2018. Peningkatan ekspor biodiesel tersebut disebabkan Indonesia memenangkan kasus tuduhan anti-dumping biodiesel oleh Uni Eropa di WTO.

Peningkatan ekspor juga diikuti oleh produk turunan CPO (*refine CPO* dan *laurif oil*) sebesar 7% atau dari 23,89 juta ton pada 2017 meningkat menjadi 25,46 juta ton di tahun 2018. Ekspor Olechemical juga mencatatkan kenaikan 16% atau dari 970 ribu ton pada 2017 meningkat menjadi 1,12 juta ton di tahun 2018. Sebaliknya, untuk produk CPO membukukan penurunan sebesar 8% atau dari 7,16 juta ton pada 2017 menurun menjadi 6,56 juta ton di 2018. Penurunan ekspor CPO menunjukkan bahwa Industri hilir sawit Indonesia terus berkembang, sehingga produk dengan nilai tambah/ produk turunan lebih tinggi ekspor dibandingkan dengan minyak mentah sawit (CPO).

Sementara itu harga rata-rata CPO tahun 2018 tercatat US\$595,5/metrik ton atau menurun 17% dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2017 yaitu US\$714,3/ metrik ton. Penurunan harga yang cukup signifikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain melimpahnya stok minyak nabati dunia termasuk minyak sawit di Indonesia dan Malaysia, perang dagang antara China dan Amerika Serikat, daya beli yang lemah karena perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor dan beberapa regulasi negara tujuan ekspor juga turut andil dalam penurunan harga.

In the midst of the difficulties encountered throughout 2018, the Indonesian palm oil industry continues to struggle and strengthen itself to survive and thrive. The industry, as the largest foreign exchange earner in Indonesia, faces declining price fluctuations, abundant production, and various negative pressures on the existence of palm oil industry.

Overall, Indonesia's palm oil exports (CPO and its derivatives, biodiesel, and oleochemicals) recorded an increase of 8%, from 32.18 million tons in 2017 to 34.71 million tons in 2018. The most significant increase in percentage is recorded by Indonesian biodiesel, i.e. 851%, from 164 thousand tons in 2017 and skyrocketed to 1.56 million tons in 2018. The increase in biodiesel exports was because Indonesia won the case against European Union's anti-dumping biodiesel at the WTO.

The increase in exports was also followed by CPO derivative products (*refine CPO* and *laurif oil*) by 7%, from 23.89 million tons in 2017 to 25.46 million tons in 2018. Oleochemical exports also increased by 16%, from 970 thousand tons in 2017 to 1.12 million tons in 2018. On the contrary, CPO products decreased by 8%, from 7.16 million tons in 2017 to 6.56 million tons in 2018. The decline in CPO exports shows that Indonesia's downstream palm oil industry continues to grow, thus the products with added value (derivative products) attracted more exports than the crude palm oil (CPO).

Meanwhile, the average CPO price in 2018 was recorded at US\$595.5/metric ton, decreased by 17% compared to the average price in 2017, which was US\$714.3/metric ton. This significant price decline was caused by several factors, including the abundance of world vegetable oil stocks, which include palm oil in Indonesia and Malaysia, trade wars between China and the United States, weak purchasing power due to slowing economic growth in several export destination countries, and several state regulations from export destinations.

Rendahnya harga minyak sawit global ikut menggerus nilai devisa yang dihasilkan meskipun secara volume ekspor meningkat. Nilai sumbangan devisa minyak sawit Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan mencapai US\$20,54 miliar atau menurun 11% dibandingkan dengan nilai devisa tahun 2017 yang mencapai US\$22,97 miliar.

Beralih kepada ekspor minyak sawit khusus CPO dan produk turunannya ke beberapa negara tujuan utama secara *year on year* (yoy) terjadi peningkatan khususnya China, Bangladesh, Pakistan, negara-negara Afrika dan Amerika Serikat. Tahun 2018, China membukukan peningkatan impor mencapai 4,41 juta ton atau naik 18% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 3,73 juta ton. Peningkatan impor diikuti Bangladesh 16%, negara-negara Afrika 13%, Pakistan 12% dan Amerika Serikat 3%. Di sisi berlawanan, penurunan impor minyak sawit Indonesia dibukukan oleh India 12% (2018 - 7,63 juta ton ; 2017 - 6,71 juta ton), negara-negara Timur Tengah 9% (2018 - 1,94 juta ton ; 2017 - 2,12 juta ton) dan Uni Eropa 5% (2018 - 4,78 juta ton ; 5,03 juta ton).

Penyebab turunnya impor India di 2018 sebagai akibat dari kebijakan pemerintah India yang menaikkan bea masuk impor CPO 44% dan refined products 54% yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2018. Pemberlakuan regulasi ini telah menyebabkan impor minyak Sawit India menurun tajam, khususnya di bulan April dan Mei. Keadaan mulai membaik setelah India mengalami perselisihan dagang dengan Amerika Serikat yang berujung pada India melaporkan kasus perselisihan dagang ke WTO dan menaikkan tarif bea masuk kedelai.

Beralih ke program biodiesel *mandatory* B20, kami mengapresiasi pemerintah yang mengambil langkah tepat dengan memberlakukan perluasan *mandatory* B20 kepada Non - PSO. Program ini cukup mendukung dalam penyerapan biodiesel di dalam negeri melalui program *mandatory* B20 mencapai 3,8 juta ton atau naik 72% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mampu mencapai 2,22 juta ton. Kinerja penyerapan biodiesel ini menunjukkan bahwa program *mandatory* B20 berjalan dengan konsisten.

Sepanjang tahun 2018, perusahaan perkebunan sawit terus berbenah diri dan bersiaga dalam menjaga terjadinya kebakaran lahan. Hampir tidak ada kasus kebakaran di perkebunan kelapa sawit.

The low price of global palm oil has eroded the value of foreign exchange even though the volume of exports increased. In 2018, Indonesia's palm oil foreign exchange contributed to US\$20.54 billion, decreased by 11% compared to the value of foreign exchange in 2017, which reached US\$22.97 billion.

In terms of export of palm oil, specifically CPO and its derivatives, there has been an increase to several major destination countries, especially in China, Bangladesh, Pakistan, African countries, and the United States on the year on year (yoy). In 2018, China's imports increased by 18%, or 4.41 million tons, compared to 2017, which amounted to 3.73 million tons. The increase in imports was followed by Bangladesh of 16%, African countries of 13%, Pakistan of 12%, and the United States of 3%. On the contrary, the decline in Indonesia's palm oil imports was recorded by India of 12% (2018 - 7.63 million tons; 2017 - 6.71 million tons), Middle Eastern countries of 9% (2018 - 1.94 million tons; 2017 - 2.12 million tons), and the European Union of 5% (2018 - 4.78 million tons; 2017 - 5.03 million tons).

The decline in Indian imports in 2018 was a result of the Indian government's policy of increasing import duties on CPO by 44% and refined products by 54%, which was enacted on 1 March 2018. The enactment of this regulation has caused India's palm oil imports to decline sharply, especially in April and May. The situation improved after India experienced a trade dispute with the United States, that led to India reporting a case of trade disputes to the WTO and raising soybean import tariffs.

In terms of the *mandatory* B20 biodiesel program, we appreciate that government took the right step by implementing the expansion of *mandatory* B20 to Non-PSO. This program supports the absorption of biodiesel in the country through the *mandatory* B20 program, which achieved 3.8 million tons, increased by 72% compared to last year, which was 2.22 million tons. The biodiesel absorption performance shows that the *mandatory* B20 program is running consistently.

Throughout 2018, oil palm plantation companies continue to improve themselves and be prepared to prevent land fires. There are almost no cases of fire in oil palm plantations.



Laporan Direksi Board of Directors' Report

GAPKI dan perusahaan anggotanya terus meningkatkan upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di sekitar konsesi dengan pembentukan Desa Siaga Api di berbagai daerah dengan berbagai nama. Pelatihan antisipasi dan mitigasi karlahut juga dilaksanakan di berbagai daerah. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan dan dilanjutkan untuk ke depannya.

Di tahun 2018 sejumlah tantangan baik dalam dan luar negeri yang dihadapi industri sawit nasional adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketidakpastian hukum dalam keberlanjutan perkembangan industri sawit, antara lain karena regulasi yang kurang berpihak maupun "*conflicting regulation*";
2. Kondisi pasar global komoditi;
3. Hambatan perdagangan di sejumlah kawasan/negara tujuan ekspor;
4. Tekanan kampanye negatif yang makin gencar dan mengancam citra industri sawit;
5. Penguatan pasar domestik dan implementasi kebijakan biodiesel yang belum memuaskan.

IPOA and its member companies strive to increase efforts to prevent land and forest fires around the concession by establishing Desa Siaga Api (Fire Ready Village) in various regions under various names. Anticipatory training and mitigation of land and forest fires are also carried out in various regions. This activity will continue to be improved and continued in the future.

In 2018, the following are national and foreign challenges faced by the national palm oil industry:

1. There are still legal uncertainties in the sustainability of the palm oil industry development, partly because of lack of impartiality of regulations and "*conflicting regulation*";
2. Global commodity market conditions;
3. Trade barriers in various regions/export destination countries;
4. Negative campaign pressure that is increasingly intense and threatens the image of the palm oil industry;
5. Domestic market strengthening and unsatisfactory biodiesel policies implementation.

Kinerja Perusahaan Company's Performance

Aspek Keuangan

Jumlah Aset BDPKPS tahun 2018 adalah sebesar Rp20.971.433.886.205 meningkat 76,74% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11.865.868.411.275. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tingginya pendapatan pungutan dan pengelolaan dana, serta berkurangnya selisih harga biodiesel yang menyebabkan beban biodiesel yang lebih kecil dari periode sebelumnya sehingga terjadi peningkatan aset yang signifikan.

Realisasi beban usaha BDPKPS tahun 2018 sebesar Rp6.337.213.701.284 menurun 42,11% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp(10.946.738.536.497). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan selisih harga biodiesel yang menyebabkan penurunan beban pembayaran selisih harga biodiesel. Sebagai badan pengelola dana, mekanisme pengelolaan dana pendapatan BDPKPS berasal dari Pendapatan operasional jasa layanan yang terdiri dari Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan Pendapatan atas pengelolaan dana.

Financial Aspect

In 2018, OPPFMA's Total Assets amounted to Rp20,971,433,886,205, increased by 76.74% compared to 2017, which was Rp11,865,868,411,275. The increase was mainly due to high collection fees and fund management, as well as reduced biodiesel price differences which led to a smaller biodiesel liabilities compared to the previous period, resulting in a significant increase in assets.

Operating expenses of OPPFMA in 2018 amounted to Rp6,337,213,701,284, decreased by 42.11% compared to 2017, which was Rp(10,946,738,536,497). The decline was mainly due to a decrease in the price difference of biodiesel, which caused a decrease in the payment for biodiesel liabilities. As a fund management agency, the mechanism for fund management of OPPFMA's income is derived from Operating Income of services consisting of Income from fund collection of oil palm plantations and Income from fund management.

Pada tahun 2018 BDPKPS membukukan pendapatan sebesar Rp15.422.257.275.263 meningkat 4,33% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp14.782.736.571.602. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh tingginya volume ekspor yang menyebabkan kenaikan pendapatan pungutan dan serta dana pengelolaan yang semakin besar yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan pengelolaan dana.

In 2018, OPPFMA recorded revenues of Rp15,422,257,275,263, an increase of 4.33% compared to 2017, which was Rp14,782,736,571,602. The increase in revenue was due to the high export volume which caused an increase in fund collection and fund management, resulting in increased fund management revenues.

Strategi Usaha

Strategi Usaha

BDPKPS melakukan analisis kondisi internal dan eksternal sebagai upaya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) dalam 5 tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut terdiri dari:

- Memastikan terbitnya peraturan-peraturan sebagai landasan untuk memberikan layanan yang prima dalam rangka pencapaian visi dan misi;
- Membangun komitmen dengan para pihak yang memiliki hubungan (termasuk semua pemangku kepentingan) dalam pemungutan biaya, pengalokasian, dan pengelolaan DPKS;
- Menerapkan standar pelayanan yang terukur dengan memperhatikan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta mempersiapkan sistem pemberian *reward* dan *punishment* yang kewenangan dalam pengelolaan DPKS;
- Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas kewenangan dalam pengelolaan DPKS;
- Meningkatkan koordinasi sinergi dan membangun kemitraan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan dan badan pengelolaan dana sejenis; dan
- Membangun sistem pelaksanaan tugas dan fungsi berbasis teknologi.

Strategi usaha BDPKPS dalam rangka menghadapi tantangan dan menangkap peluang pada industri kelapa sawit mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Rencana Strategis Kementerian pertanian dan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian yang disusun dalam Rencana Strategis Bisnis BDPKPS Tahun 2015-2019. Rencana Strategis BPPDKPS Tahun 2019 yaitu:

OPPFMA analyzes the internal and external conditions as an effort to identify challenges faced in managing the Oil Palm Plantation Fund (DPKS) in the next 5 years. These challenges consist of:

- Ensuring the issuance of regulations as a basis for providing excellent service to achieve the vision and mission;
- Building commitments with parties involved (including all stakeholders) in the collection, allocation, and management of DPKS;
- Implementing measurable service standards by taking into account the professionalism in carrying out their duties and functions;
- Improving the quality and quantity of human resources and preparing a reward and punishment system under the authority of DPKS management;
- Developing policies to strengthen and expand authority in managing DPKS;
- Improving synergies and building long-term partnerships with stakeholders and similar fund management bodies; and
- Establishing systems for implementing tasks and functions based on technology.

In order to face challenges and seize opportunities in the palm oil industry, OPPFMA's business strategy refers to the Ministry of Finance's Strategic Plan, the Ministry of Agriculture's Strategic Plan, and the Ministry of Industry's Strategic Plan, formulated in the 2015-2019 OPPFMA's Strategic Business Plan. OPPFMA's 2019 Strategic Business Plans are:



Laporan Direksi Board of Directors' Report

- a) Menyiapkan tata kelola, tegulasi eksternal maupun internal (SOP dan manual) untuk setiap aktivitas;
- b) Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan seluruh *stakeholders*;
- c) Melakukan pemilihan pola investasi dengan hasil pengembalian yang maksimal;
- d) Penggunaan saldo awal mencukupi kebutuhan dana penyaluran;
- e) Mengusulkan kepada Komite Pengarah agar penetapan alokasi dana berdasarkan kebutuhan setiap layanan penyaluran dan bukan berdasarkan proporsi dana.

- a) Preparing governance, both external and internal regulation (SOP and manual) for each activity;
- b) Conducting communication, coordination, and cooperation with all stakeholders;
- c) Selecting investment patterns with maximum return;
- d) Managing initial balance to be sufficient for the fund disbursement;
- e) Proposing to the Steering Committee that the fund allocation is determined based on the needs of each disbursement service, and not based on the proportion of funds.

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2018 Comparison between Target and Realization in 2018

Pendapatan BDPDKS tahun 2018 sebesar Rp15.422.257.275.263 atau tercapai 140,30% dari target RBA 2018 sebesar Rp10.992.000.000.000. Selanjutnya sesuai dengan RBA 2019, jumlah pendapatan diproyeksikan sebesar Rp11.438.000.000.000.

In 2018, OPPFMA's revenue amounted to Rp15,422,257,275,263, or 140.30% of the 2018 Business and Budget Plan (RBA) target of Rp10,992,000,000,000. Further, in accordance with the 2019 RBA, the projected total revenue is Rp11,438,000,000,000.

Beban usaha BDPDKS tahun 2018 sebesar Rp6.337.213.701.284 atau tercapai 57,65% dari target RBA 2018 sebesar Rp10.992.000.000.000. Selanjutnya sesuai dengan RBA 2019, jumlah beban usaha diproyeksikan sebesar Rp10.992.000.000.000.

In 2018, OPPFMA's operating expenses amounted to Rp6,337,213,701,284 or 57.65% of the 2018 Business and Budget Plan (RBA) target of Rp10,992,000,000,000. Further, in accordance with the 2019 RBA, the projected total Operating Expenses is Rp10,992,000,000,000.

Analisis Prospek Usaha Analysis on Business Prospects

Prospek perekonomian domestik 2019 akan tetap kuat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas yang terjaga ditengah kondisi perekonomian global yang belum kondusif,. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap solid pada kisaran 5,0% - 5,4% ditunjang oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik konsumsi maupun investasi. Sementara itu, kinerja ekspor neto belum banyak dapat menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi 2019 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dunia yang melandai.

In 2019, the domestic economy is projected to remain strong, which shall be marked by better and more stable economic growth amidst the not conducive global economy conditions. Indonesia's economic growth in 2019 is predicted to remain solid at 5.0% - 5.4%, supported by strong domestic demand, both consumption and investment. Meanwhile, the net export performance was unable to sustain an increase in economic growth in 2019, in line with sluggish world economic growth.

Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh kuat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,2% - 5,6% pada 2019 dipengaruhi tingginya konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR).

Private consumption is expected to grow strongly, to sustain economic growth in 2019. Private consumption is predicted to grow 5.2% - 5.6% in 2019 due to high household consumption and consumption of nonprofit institutions serving households (LNPR).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat didukung daya beli masyarakat yang terjaga, seiring dengan pendapatan yang membaik disertai inflasi yang rendah, serta dampak positif dari penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Peran stimulus fiskal pemerintah baik melalui bantuan sosial maupun instrumen fiskal lainnya juga berperan menopang kinerja konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi swasta juga bersumber dari peningkatan kinerja konsumsi LNPRT sebagai dampak positif dari pengeluaran terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Growth in household consumption is expected to remain strong, supported by maintained public purchasing power, in line with improved income accompanied by low inflation, as well as the positive impact of General Election (Pemilu).

The government fiscal stimulus through social assistance and other fiscal instruments plays a role in sustaining the performance of household consumption. The private consumption performance is also influenced by an increase in LNPRT consumption performance as a positive impact of expenditure related to the 2019 General Election.

Perkembangan Penerapan GG Good Governance Improvement

Dalam rangka memperkuat implementasi Tata Kelola Organisasi yang Baik (GG), kami senantiasa melaksanakan perencanaan yang terukur dan tertuang dalam dokumen Pola Tata Kelola serta melakukan kegiatan evaluasi untuk menilai sejauh mana efektivitas penyelenggaraan GCG di lingkungan BLU BDPKPS serta hal-hal yang menjadi perhatian utama. Di sepanjang tahun 2018, BLU BDPKPS telah menunjukkan perkembangan implementasi GCG ke arah yang membanggakan dibandingkan dengan tahun 2017. Kami telah melakukan perbaikan di beberapa *critical area* berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2017 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perbaikan atas beberapa area penting dilakukan dengan meningkatkan kualitas kebijakan dan prosedur kerja, tingkat kepatuhan SDM terhadap prosedur kerja, serta pengawasan yang dilakukan secara berjenjang.

In order to strengthen the Good Corporate Governance (GCG), we always carry out plans that are assessed and stipulated in the Governance Pattern document, and conduct evaluation to assess the effectiveness of GCG implementation within the OPFMA Public Service Agency and other key matters. Throughout 2018, OPFMA Public Service Agency has shown improvement in the progress of GCG implementation compared to 2017. We have made improvements in several critical areas based on the results of the 2017 performance evaluation, determined by the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance. Several important areas were developed by improving the quality of work policies and procedures, the level of HR compliance with work procedures, as well as gradual monitoring.

Perubahan Komposisi Direksi Change in Board of Directors' Composition

Komposisi Direksi BDPKPS mengalami perubahan mengalami perubahan, semula jumlah Direksi berjumlah 6 (enam) orang, namun pada Juli 2018 Sdr. Agustinus Antonius yang menjabat Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana mengundurkan diri. Sehingga komposisi Direksi sampai 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the OPFMA's Board of Directors has changed. Originally, it comprises six (6) Directors. However, in July 2018, Mr. Agustinus Antonius, who served as Director of Fund Planning and Management, resigned. Therefore, the Board of Directors's composition as of 31 December 2018 is as follows:



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Laporan Direksi Board of Directors' Report

Nama Pejabat Name	Jabatan Position		Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Dono Boestami	Direktur Utama	President Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Tulus Budhianto	Direktur Kemitraan	Director of Partnership	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
-	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana*	Director of Fund Planning and Management*	-
Herdrajat Natawidjaja	Direktur Penghimpun Dana	Director of Fund Collection	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Edi Wibowo	Direktur Penyaluran Dana	Director of Fund Disbursement	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Catur Ariyanto Widodo	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK.01/2016 tanggal 20 Mei 2016 Minister of Finance's Decree No. 372/KMK.01/2016 dated 20 May 2016
* Dijabat oleh Sdr. Agustinus Antonius sampai Juli 2018 Held by Agustinus Antonius until July 2018			

Jajaran Direksi tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja BDPKS secara berkelanjutan terutama dalam mendukung program pemerintah. Kami terus berkomitmen untuk melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab secara independen, akuntabel serta meningkatkan soliditas internal agar dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih besar dan lebih bernilai. Lebih dari itu, memberikan yang terbaik adalah komitmen kami kepada segenap pemangku kepentingan.

The Board of Directors is expected to improve the OPPFMA's performance continuously, especially in supporting government programs. We continue to be committed to carrying out roles, duties, and responsibilities in an independent, accountable manner, and to increasing internal solidity to improve the achievement of greater and more valuable performance. Further, we are committed to providing the best to all stakeholders.

Apresiasi Appreciation

Kami mewakili seluruh anggota Direksi, menyampaikan apresiasi sebesar besarnya dan ucapan terima kasih kepada Komite Pengarah selaku pemberi kebijakan atas operasional pelaksanaan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, atas kepercayaan, arahan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas kinerja kami baik di tahun anggaran 2018 maupun untuk tahun-tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dewan Pengawas atas arahan dan nasehat yang diberikan sehingga Direksi mampu mengelola dan mencapai target sesuai strategi bisnis yang telah ditetapkan.

We, on behalf of all members of the Board of Directors, express our appreciation and gratitude to the Steering Committee as the policy provider for the operational implementation of the management of palm oil plantations, for their trust, direction, and advice to improve the quality of our performance in the 2018 fiscal year and future years. We would also like to express our gratitude to the entire Supervisory Board for the direction and advice provided. Hence, the Board of Directors is able to manage and achieve targets in accordance with the established business strategy.

Jakarta, ... 2018 Jakarta, ... 2018

Atas Nama Direksi On Behalf of the Board of Directors

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)

Dono Bustami
Direktur Utama
President Director



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Profil Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Board of Directors' Profiles of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)



DONO BOESTAMI
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR



Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 13 Januari 1963 (55 tahun), berdomisili di Jakarta Menjabat sebagai Direktur Utama BDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017.

Meraih gelar *Bachelor of Science Civil Engineering* (1985) dan *Master of Science Project & Construction Management* dari Golden Gate University, Amerika Serikat (1989).

Beliau memiliki banyak pengalaman di dunia finansial dan pasar modal. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabat antara lain Direktur Investment Banking pada PT Danareksa (Persero) (2001); Direktur Utama PT Citigroup Securities Indonesia (2004); Direktur PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006); Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011), dan Direktur Keuangan PT Atlas Resources Tbk (2012). Selain itu, Beliau juga sempat mengenyam pengalaman sebagai anggota Komite Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) (2008-2011). Jabatan terakhir adalah Direktur PT MRT (2013 - 2017), sebelum diangkat sebagai Direktur Utama BDPKS.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Surabaya, East Java, 13 January 1963 (55 years), domiciled in Jakarta. Appointed as President Director of OPPFMA based on Minister of Finance's Decree 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017.

Holds a Bachelor of Science in Civil Engineering (1985) and a Master of Science Project & Construction Management from Golden Gate University, United States (1989).

He has various experience in the financial and capital markets. Several important positions held include Director of Investment Banking at PT Danareksa (Persero) (2001); President Director of PT Citigroup Securities Indonesia (2004); Director of PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006); Finance Director of PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011); and Finance Director of PT Atlas Resources Tbk (2012). In addition, He was a member of the Indonesia Stock Exchange (BEI) Listing Committee (2008-2011). His last position was Director of PT MRT (2013-2017), prior to being appointed as President Director of OPPFMA.

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.

CATUR ARIYANTO WIDODO
DIREKTUR KEUANGAN, UMUM,
KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO
DIRECTOR OF FINANCE, GENERAL,
COMPLIANCE, AND RISK MANAGEMENT



Warga Negara Indonesia, lahir di Ungaran, Jawa Tengah, 22 Februari 1971 (47 tahun), berdomisili di Jakarta Menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK.01/UP.11/2016 Tanggal 20 Mei 2016.

Meraih gelar Diploma Tiga di Sekolah Tinggi Akuntansi (STAN) (1993), Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1999). Pada tahun 2005 menyelesaikan *Program Master of International and Development Economic* pada The Australian National University (ANU), Australia.

Indonesian citizen, born in Ungaran, Central Java, 22 February 1971 (47 years), domiciled in Jakarta. Appointed as Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management of OPPFMA based on Minister of Finance's Decree No. 372 KMK.01/UP.11/2016 dated 20 May 2016.

He earned Diploma 3 Degree from the State College of Accountancy (STAN) (1993), Bachelor of Economy from the University of Indonesia (1999). In 2015 he graduated from the Master of International and Development Economies Program at The Australian National University (ANU), Australia.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Profil Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Board of Directors' Profiles of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)

Selama merintis karir, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting di Ditjen Perbendaharaan, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Instansi III, Kepala Seksi Analisis Laporan Keuangan, Kabid Pembinaan Perbendaharaan, Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU, Kasubdit PPK BLU II, Kabag Umum Kanwil DJPB Prov. Sulbar dan jabatan terakhir sebagai Kakanwil DJPB Prov. Sulbar sebelum diangkat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKPS.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Throughout his career, he has been assigned to serve key positions at the Directorate General of Treasury, i.e. Head of Institutional Accounting Development Section III, Head of Financial Reporting Analysis Section, Head of Treasury Development Department, Head of Public Service Agency Performance Development Sub-Directorate, Head of Commitment-Making Official Public Service Agency II Sub-Directorate, Head of General Affairs Development of Directorate General of Treasury Regional Office West Sulawesi, and lastly serving as Head of Directorate General of Treasury Regional Office West Sulawesi prior to his appointment as the Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management Directorate of OPPFMA.

He has no affiliations with the other members of the Supervisory Board and the Board of Directors.

VACANT

**DIREKTUR PERENCANAAN
DAN PENGELOLAAN DANA**
DIRECTOR OF FUND PLANNING
AND MANAGEMENT

HERDRAJAT NATAWIDJAJA

DIREKTUR PENGHIMPUNAN DANA
DIRECTOR OF FUND COLLECTION



Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 28 Februari 1957 (61 tahun), berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai Direktur Penghimpunan Dana BDPKPS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 725/KMK.05/2016 Tanggal 30 September 2016.

Meraih gelar Sarjana Proteksi Tanaman Universitas Mulawarman Samarinda (1982), gelar S2 Jurusan Nematology pada Fakultas Science, University of Gent Belgium, Belgia (1994) dan *Phylosophy of Doctor in Plant Pathology (Major), Entomology and Development of Communication (Minor)* University Philippines Los Banos Philippina (2003), serta mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (APRA) 45 Lemhannas Republik Indonesia (2010).

Indonesian Citizen, born in Bandung, 28 February 1957 (61 years), domiciled in Tangerang. Appointed as Director of Fund Collection of OPPFMA based on Minister of Finance's Decree No. 725/KMK.05/2016 dated 30 September 2016.

Holds a Bachelor of Plant Protection at Mulawarman University Samarinda (1982), Master of Nematology at the Faculty of Science, University of Gent, Belgium (1994), and Doctor of Philosophy in Plant Pathology (Major), Entomology and Development of Communication (Minor) at Philippines Los Banos University, Philippines (2003), and participated in the 45th National Regular Educational Program (APRA) Lemhannas Republic of Indonesia (2010).

Selama kurun waktu 2004 sampai dengan tahun 2015 menjadi Direktur Perlindungan Tanaman Perkebunan, Direktur Pembinaan Usaha dan Pascapanen serta Direktur Tanaman Tahunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Pada tahun 2016 ditugaskan sebagai Kepala Sekretariat Komisi ISPO. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Throughout 2004-2015, he was the Director of Plantation Plant Protection, Director of Business Development and Postharvest, and Director of Annual Plant at the Director General of Plantations, Ministry of Agriculture. In 2016, he was assigned as Secretariat Head of the ISPO Commission. He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.

EDI WIBOWO
DIREKTUR PENYALURAN DANA
DIRECTOR OF FUND DISBURSEMENT



Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, Jawa Timur, 4 Oktober 1967 (51 tahun), berdomisili di Bogor. Menjabat sebagai Direktur Penyaluran Dana BDPKPS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017.

Indonesian citizen, born in Madiun, East Java, 4 October 1967 (51 years), domiciled in Bogor. Appointed as Director of Fund Disbursement of OPPFMA based on Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017.

Meraih gelar Sarjana Mekanisasi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1991), mengikuti *Professional Development on Energy* - di Chicago- USA 1994 dan 1996, meraih gelar Master Teknik pada Jurusan Teknik Mesin - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (2002).

He holds a Bachelor of Agricultural Mechanization in Bogor Agricultural University (1991), attended Professional Development on Energy - in Chicago-USA 1994 and 1996, earned a Master's degree in Engineering at the Department of Mechanical Engineering - Faculty of Engineering, University of Indonesia (2002).

Sebelum menjadi Direktur Penyaluran Dana di BDPKPS mulai Februari 2017, Edi Wibowo adalah seorang peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas "Lemigas" sejak tahun 1992, dan Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi di Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional sejak 2009. Sejak 2011 ia menjadi Kepala Sub Direktorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi-DJ EBTKE KESDM, Kepala Sub Direktorat Pengusahaan dan Pengawasan Bioenergi DJ EBTKE KESDM sejak Juni 2015 dan Kepala SubDirektorat Program Bioenergi DJ EBTKE KESDM sejak Juli 2016.

Prior to being the Director of Fund Disbursement at OPPFMA in February 2017, Edi Wibowo was a researcher at the Research and Development Center for Oil and Gas Technology "Lemigas" since 1992, and Head of the Facilitation Subdivision for Energy Utilization Policy at the Secretary General of the National Energy Council since 2009. Since 2011, he has been the Head of the Energy and Environmental Bioenergy Subdirectorate - Directorate General of EBTKE (New and Renewable Energy and Energy Conservation) MEMR, the Head of the Subdirectorate of Bioenergy Utilization and Monitoring of Directorate General of EBTKE MEMR since June 2015, and the Head of the Subdirectorate of Bioenergy Program at Directorate General of EBTKE MEMR since July 2016.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.

He has no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners and Directors.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Profil Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Board of Directors' Profiles of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA)

TULUS BUDHIANTO
DIREKTUR KEMITRAAN
DIRECTOR OF PARTNERSHIP



Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 7 Juni 1957 (61 tahun), berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Kemitraan BDPKPS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017.

Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985, gelar Masters of Arts di bidang *International Development Studies*, dari St. Mary's University, Halifax, Canada tahun 1998.

Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Perindustrian tahun 1987 sampai dengan tahun 2000, yang kemudian digabung sebagai Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Sekembali dari penugasan sebagai Atase Perdagangan pada periode tahun 2007-2010; selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, berturut-turut menjabat sebagai Sekretaris Ditjen. Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan, Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan, dan Kepala Biro Perencanaan-Kementerian Perdagangan.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.

Indonesian citizen, born in Surakarta, Central Java, 7 June 1957 (61 years), domiciled in Jakarta. Appointed as Director of Partnership of OPPFMA based on Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017.

Has a Bachelor of Agricultural Technology, Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1985, and a Master of Arts in International Development Studies, from St. Mary's University, Halifax, Canada, in 1998.

He began his career as a Civil Servant at the Ministry of Industry from 1987 to 2000, which was later merged as the Ministry of Industry and Trade. After returning from his assignment as a Trade Attache in 2007-2010; during 2010-2016, he served as Secretary of the Directorate General. International Trade Cooperation, Head of the Trade Education and Training Center, Head of the Trade Policy Harmonization Center, and Head of the Planning Bureau of the Ministry of Trade.

He has no affiliation with fellow members of the Supervisory Board and Directors.

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018

Responsibility for the 2018 Annual Report

Dewan Pengawas dan Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertanggung jawab atas Laporan Tahunan ini, berikut informasi keuangan dan informasi lain yang terkait, yang telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing dibawah ini.

The Supervisory Board and the Board of Directors of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency hold the accountability for this Annual Report, including the financial statements and other relevant information, which have been approved by all members of the Supervisory Board and the Board of Directors by affixing their signatures below.

Dewan Pengawas Supervisory Board	Direksi Board of Directors
Rusman Heriawan Ketua Chairman	Dono Boestami Direktur Utama President Director
Arlinda Anggota Member	Catur Ariyanto Widodo Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General, Compliance and Risk Management
Panggah Susanto Anggota Member	- Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Planning and Fund Management
Loso Judijanto Anggota Member	
Joko Supriyono Anggota Member	Herdrajat Natawidjaja Direktur Penghimpunan Dana Director of Fund Raising
Musdhalifah Machmud Anggota Member	Edi Wibowo Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement
Heru Pambudi Anggota Member	Tulus Budhianto Direktur Kemitraan Director of Partnership
Bambang Anggota Member	
Joko Siswanto Anggota Member	



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

03

Profil BDPKS OPPFMA Profile



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) is a task force of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the form of a Public Service Agency (BLU) that collects, administers, manages, stores, and disburses funds for oil palm plantations.





Identitas BDPKS

OPPFMA Identity



Nama

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Name

Oil Palm Plantation Fund Management Agency

Nama Panggilan Perusahaan

BDPKS

Nama Panggilan Perusahaan

OPPFMA

Kegiatan Usaha

Menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran.

Business Activities

Collecting, administering, managing, saving, and distributing funds to encourage the development of sustainable palm oil plantations. Fund collections originated from the Palm Oil Plantation Business Actors, Funding Institution, Community Funds, and other legitimate funds. Funds collected include levies on exports of oil palm plantation commodities and/or their derivatives and fees.

Kepemilikan

Pemerintah Republik Indonesia

Ownership

Government of the Republic of Indonesia

Tanggal Pendirian

10 Juni 2015

Date of Establishment

June 10, 2015

Jumlah Pegawai

93 orang

Employees

93 people

Alamat Kantor

Graha Mandiri Lt.5
Jl. Imam Bonjol No.61,
Menteng, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10310

Office Address

Graha Mandiri 5th Floor
Jl. Imam Bonjol No.61,
Menteng, Central Jakarta,
DKI Jakarta 10310

Website

www.bdp.or.id

Website

www.bdp.or.id

Info Kontak

Telp: (021) 123-4567890, (021) 123-0987654
Email: info@bdp.or.id

Contact Info

Phone: (021) 123-4567890, (021) 123-0987654
Email: info@bdp.or.id

Jam Operasional :

Senin - Jumat 07.30 - 17.00 WIB

Operational Hours:

Monday-Friday 7.30 AM-5.00 PM, WIB

Media Sosial

-  [www.twitter.com/bdp_sawit](https://twitter.com/bdp_sawit)
-  www.instagram.com/bdpkelapasawit
-  www.facebook.com/bdpdsawit

Social Media

-  [www.twitter.com/bdp_sawit](https://twitter.com/bdp_sawit)
-  www.instagram.com/bdpkelapasawit
-  www.facebook.com/bdpdsawit



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Riwayat Singkat BDPKS

Brief History of OPPFMA





Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.

The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) is a task force of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the form of a Public Service Agency (BLU) that collects, administers, manages, stores, and disburses funds for oil palm plantations.



Riwayat Singkat BDPKS Brief History of OPPFMA

Pada tanggal 10 Juni 2015, BDPKS ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Penetapan BDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

On 10 June 2015, OPPFMA was established as a government agency that implements BLU financial pattern through Minister of Finance's Decree No. 113/PMK.01/2015 on the Establishment of OPPFMA at the Ministry of Finance as a Government Agency Implementing Public Service Agency Financial Management.

Landasan hukum pendirian BDPKS adalah sebagai berikut:

The legal basis of the establishment of OPPFMA is as follow:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Law No. 17 of 2003 dated 5 April 2003 on the State Finance;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perkebunan;

2. Law No. 39 of 2014 dated 17 October 2014 on Plantation;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

3. Law No. 24 of 2015 dated 25 May 2015 on Plantation Fund Collection;

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

4. Presidential Regulation No. 61 of 2015 dated 25 May 2015 on Palm Oil Fund Collection and Utilization;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

5. Presidential Regulation No. 24 of 2016 dated 15 March 2016 on the Amendment to the Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the Palm Oil Fund Collection and Utilization.

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

6. Presidential Regulation No. 66 of 2018 dated 15 August 2018 on the Amendment to the Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the Palm Oil Fund Collection and Utilization.

Pendapatan BDPKS akan dicatat dalam APBN melalui prosedur pengesahan pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian pendapatan BDPKS diakui sebagai pendapatan negara pada saat pengesahan pendapatan tersebut. Sementara untuk pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional BDPKS akan masuk ke realisasi APBN pada saat yang sama dengan pengesahan pendapatan. BDPKS hanya melaporkan pendapatan tersebut ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan.

OPPFMA revenues will be recorded in the State Budget through the ratification procedure at the end of the reporting period. Accordingly, OPPFMA revenues are recognized as state revenues at the time of the ratification of such revenues. Revenues that are utilized for OPPFMA's operational cost will be recorded at State Budget's realization on the ratification of revenues. OPPFMA reports the income to the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance's Financial Planning Bureau.

Jejak Langkah BDPKPS OPPFMA Milestones

Ketergantungan terhadap BBM impor membuat neraca perdagangan migas defisit	Dependence on imported fuel makes the deficit on oil and gas trade balance	2014
Harga CPO menurun secara signifikan akibat kemerosotan harga minyak mentah dan kelebihan pasokan CPO di pasar domestik. Petani sawit terkena dampak penurunan harga CPO. Program biodiesel tidak berjalan.	CPO prices declined significantly due to the decline in crude oil prices and the oversupply of CPO on the domestic market. Palm farmers affected by CPO price decline. Biodiesel program did not work.	January 2015
Semua pemangku kepentingan berupaya menjaga stabilitas harga CPO. Kemenko Perekonomian memanggil seluruh pemangku kepentingan di industri Sawit (Kementerian Keuangan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian) dan pelaku industri (pengusaha, perkebunan, biodiesel, otomotif dan petani).	All stakeholders tried to maintain CPO price stability. The Coordinating Ministry for the Economy called all stakeholders in the Palm Oil industry (Ministry of Finance, EMR, Trade, Industry, Agriculture) and industry actors (entrepreneurs, plantations, biodiesel, automotive, and farmers).	February 2015
Finalisasi regulasi pembentukan BDPKPS Draft regulasi diuji Pemerintah.	Finalization of OPPFMA establishment regulation. The draft is tested by the Government.	April 2015
Pemerintah menerbitkan BDPKPS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.	The government issued OPPFMA in the form of Government Regulation (PP) and Presidential Regulation (Perpres). Presidential Regulation No. 24 of 2016 dated 15 March 2016 on the Amendment to the Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the Palm Oil Fund Collection and Utilization.	May 2015
BDPKPS resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) non struktural	OPPFMA officially became a non-structural Public Service Agency (BLU).	June 2015



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Riwayat Singkat BDPKPS Riwayat Singkat BDPKPS

Operasi BDPKPS mulai berjalan.	OPPFMA started to operate.	July 2015
BDPKPS menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan <i>launching</i> biodiesel B-15 BDPKPS menyalurkan dana subsidi untuk pertama kalinya ke Pertamina Penetapan denda Rp6000/ liter atas dana subsidi yang wajib dicampur <i>Tender</i> PSO pertama melalui pembiayaan BDPK sebesar 1,8 juta kilo liter Harga kelapa sawit meningkat.	OPPFMA signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the development of sustainable palm oil and the launching of B-15 biodiesel OPPFMA disbursed the first subsidized funds to Pertamina Penalty fines of Rp6,000/liter for subsidy funds that must be mixed First PSO Tender through Plantation Fund Management Agency (BPDP) of 1.8 million kiloliters Increased palm oil prices.	August 2015
Pemerintah berupaya mengurangi impor bahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM) melalui penetapan <i>mandatory</i> biodiesel pertama (B-1 hingga B-15), peluncuran <i>Call Center</i> 14036 untuk informasi mengenai biodiesel B20 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	The Government is trying to reduce the import of fossil fuels through the establishment of the first mandatory biodiesel (B-1 to B-15), the launch of 14036 Call Center for information on B20 biodiesel Presidential Regulation No. 66 of 2018 dated 15 August 2018 on the Amendment to the Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the Palm Oil Fund Collection and Utilization	2015 - 2018

Visi, Misi dan Tujuan BDPKS

Vision, Mission, and Objectives of OPPFMA



Visi Vision

Menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia

To be the fund manager who plays a role in the sustainable development of palm oil as one of Indonesia's strategic commodities

Misi Mission

Mengelola dan menumbuhkembangkan dana pengembangan dana kelapa sawit secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan dan stabilitas komoditas strategis

To manage and foster the palm oil development funds professionally, transparently, accountably, and in a sustainable manners to ensure the sustainability of palm oil program as to improve and stabilize the strategic commodity



Tujuan BDPKS OPPFMA Objectives

Melakukan pengelolaan DPKS untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional dunia

To manage CPO Fund and ensure the continuity of the sustainable palm oil program as a global strategic commodity.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit

To enhance the palm oil human resource capacity.

Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit

To encourage developments in palm oil downstream industry.

Meningkatkan optimalisasi penggunaan hasil perkebunan kelapa sawit untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor

To optimize the utilization of palm oil yields for industrial raw materials, renewable energy, and export.

Meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dunia

To improve and maintain the stability of palm oil business income by optimizing price amid the fluctuating global palm oil commodity price.

Maksud pembentukan BDPKPS menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran. Selanjutnya dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

OPPFMA has the objective to collect, administer, manage, save, and distribute funds to encourage the development of sustainable palm oil plantations. Fund collections originated from the Palm Oil Plantation Business Actors, Funding Institution, Community Funds, and other legitimate funds. Funds collected include levies on exports of oil palm plantation commodities and/or their derivatives and fees. The collected fund will be utilized to:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme kemandirian dan berdaya saing serta untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.b. Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dimaksudkan untuk (1) pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit; (2) kebutuhan pangan; (3) hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit; (5) penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.c. Promosi Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk meningkatkan (1) citra nilai produk Kelapa Sawit (2) informasi pasar kelapa sawit, (3) memperluas pasar kelapa sawit, (4) meningkatkan investasi perkebunan kelapa sawit dan atau (5) menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan kelapa sawit;d. Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit serta menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal ; dane. Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Sarana dan prasarana terdiri atas benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar dan verifikasi atau penelusuran teknis. | <ul style="list-style-type: none">a. Develop human resources for oil palm plantations in order to increase knowledge, skills, professionalism of independence and competitiveness, as well as to improve technical, managerial, and entrepreneurial skills.b. Research and develop oil palm plantations, in order to (1) satisfy the oil palm plantations; (2) meet the food needs; (3) downstream the palm oil plantation industry; (5) supply and use biodiesel fuels.c. Promote Oil Palm Plantations, to improve (1) the image of Palm Oil products (2) oil market information, (3) oil palm market expansion, (4) investment in oil palm plantations, and/or (5) to develop marketing centers for palm oil plantation commodities;d. Rejuvenate Oil Palm Plantations, to increase the productivity of oil palm plantations and maintain the area of oil palm plantations to be used optimally; ande. Facilitate the Oil Palm Plantation Facilities and Infrastructure, to increase production, productivity, and quality of oil palm plantations. Facilities and infrastructure consist of seeds, fertilizers, pesticides, post-harvest equipment, and processing, garden roads and access roads to public roads and/or ports, transportation equipment, agricultural machinery, the establishment of market infrastructure and verification or technical tracking. |
|--|---|



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Tugas, Fungsi dan Peran BDPKS

Duties, Functions, and Roles of OPPFMA



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas BDPKS adalah mengumpulkan pungutan dan iuran dari Kelapa sawit atau turunannya dan menyalurkannya sesuai fungsi - fungsi sebagai berikut:

Based on the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency, OPFMA has the duties to collect fees and contributions from palm oil or its derivatives and distribute them according to the following functions:

A	Melakukan pengelolaan DPKS untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional;	Managing DPKS (CPO Fund) to ensure the sustainability of the sustainable palm oil program as a national strategic commodity;
B	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit;	Building the capacity of human resources in the palm oil sector;
C	Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit;	Encouraging the downstream palm oil industry development;
D	Meningkatkan optimasi penggunaan hasil perkebunan kelapa sawit untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;	Increasing the optimization of the palm oil plantations utilization for industrial raw materials, renewable energy, and exports;
E	Meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dunia.	Increasing and maintaining the stability of the oil palm plantation business revenue by optimizing prices amidst fluctuations in the world's palm oil commodity price.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Budaya Kerja BDPKS

Work Culture of OPPFMA

BDPKS memiliki nilai-nilai inti yang menjadi budaya kerjanya yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu:

OPPFMA has core values as the work culture that is in line with the values of the Ministry of Finance:



Integritas Integrity

BDPKS memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dengan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

OPPFMA is committed to upholding integrity in carrying out its duties by thinking, saying, behaving, and acting properly and correctly, and upholding the code of ethics and moral principles



Profesionalisme Professionalism

BDPKS terus berupaya untuk bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

OPPFMA strives to work completely and accurately on the best competencies with full responsibility and high commitment



Sinergi Synergy

BDPKPS akan senantiasa membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan

OPPFMA strives to build and ensure productive internal cooperative relationships and harmonious partnerships with stakeholders



Pelayanan Services

BDPKPS akan senantiasa berupaya memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan, yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman

OPPFMA strives to provide services that meet stakeholder satisfaction, which is carried out comprehensively, transparently, quickly, accurately, and safely



Kesempurnaan Perfection

BDPKPS senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk memberikan dan menjadi yang terbaik

OPPFMA strives to improve in all fields to provide and be the best



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



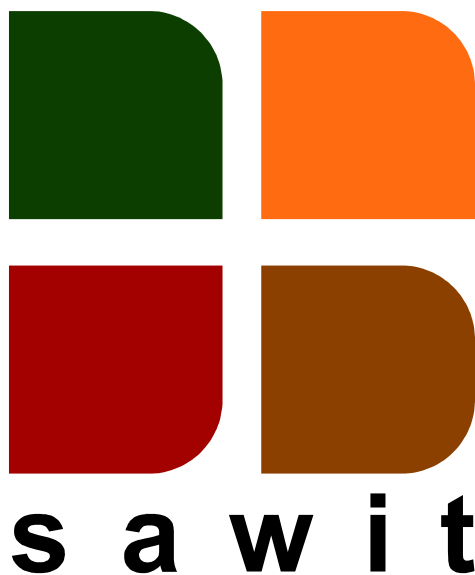
Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Makna Logo BDPKS

Logo Meaning of OPPFMA

Logo itu merupakan paduan dari huruf:

The logo is a combination of letter:



Masing-masing warna mempunyai makna yaitu:

The colours have the meaning as follows:

Warna HIJAU :

Kelestarian, *Sustainability*,
Ramah Lingkungan

GREEN :

Continuity, Sustainability,
Environmentally Friendly

Warna MERAH :

Energi, Pemberdaya/*Enabler*

RED :

Energy, Enabler

Warna ORANYE :

Bisnis, Profesionalisme

ORANGE :

Business, Professionalism

Warna COKLAT :

Lahan, Rakyat, Petani

BROWN :

Land, People, Farmers

**Semua berada didasar /
latar belakang warna putih**
= transparansi, akuntabilitas

**The logo has a white-based
colour** = transparency,
accountability

Tulisan sawit =

dana dan pemberdayaan
dari dan untuk sawit

Sawit writing =

funding and empowerment
from and for oil palm

Struktur Organisasi BDPKS

Organizational Structure of OPPFMA



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015, BDPKS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, struktur organisasi BDPKS terdiri dari:

1. Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
3. Direktorat Penghimpunan Dana;
4. Direktorat Penyaluran Dana;
5. Direktorat Kemitraan;
6. Satuan Pemeriksa Internal; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BDPKS serta untuk mencapai visi dan misinya, BDPKS telah melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan dan uraian tugas Kepala Divisi pada BDPKS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama BDPKS Nomor KEP-66/DPKS/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penyesuaian Struktur Jabatan dan Uraian Tugas Kepala Divisi BDPKS. Adapun bagan organisasi BDPKS adalah sebagai berikut;

Based on the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.01/2015, OPPFMA is directly responsible to the Minister of Finance, through the Directorate General of the Treasury. According to the Minister of Finance Regulation, the OPPFMA's organizational structure consists of:

1. Directorate of Finance, General, Compliance, and Risk Management;
2. Directorate of Fund Planning and Management;
3. Directorate of Fund Collection;
4. Directorate of Fund Disbursement;
5. Directorate of Partnership;
6. Internal Audit Unit; and
7. Group of Functional Officers.

In order to improve the effectiveness of the duties, principal, and functions of OPPFMA, and to achieve its vision and mission, OPPFMA has adjusted the nomenclature of the position and job description of the Division Head of OPPFMA based on the OPPFMA President Director's Decree No. KEP-66/DPKS/2016 dated 26 December 2016 on the Adjustment of Position Structure and Job Description of the Head of Division of OPPFMA. The organizational chart of OPPFMA is as follow;



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Struktur Organisasi BDPKPS Organizational Structure of OPPFMA



Anggota Member

Musdhalifah Machmud	Panggah Susanto
Heru Pambudi	Bambang
Arlinda	Loso Judijanto
Djoko Siswanto	Joko Supriyono

Kepala Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Audit Unit

Triana Meinarsih

Direktur Penghimpunan Dana Director of Fund Collection

Herdradajat Natawidjaja

Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Head of CPO Duties and Contributions

Deri Ridhanif

Kepala Divisi Biaya dan Iuran Produk Turunan Head of Derivative Product Duties and Contributions

Kus Emy Puspita Dewi

Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement

Edi Wibowo

Kepala Divisi Program Pelayanan Head of Service Program

Prayudha Moeljo

Kepala Divisi Unit Penyaluran Head of Distribution Unit

Fajar Wahyudi

Direktur Kemitraan Director of Partnership

Tulus Budhianto

Kepala Divisi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Head of Small and Medium Entrepreneurs and Cooperatives

Helmi Muhansyah

Kepala Divisi Perusahaan Head of Corporate

Achmad Maulizal Sutawijaya

Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan & Civil Society Head of Community Institutions and Civil Society

Wawan Hardiwinata



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Pejabat Struktural

Structural Officials

HARI KUNCORO

SUHARMAN

SIDIK HARYADI



Kepala Divisi Anggaran
dan Akuntansi
Head of Budget and
Accounting Division

Kepala Divisi Umum dan
Sumber Daya Manusia
Head of General Affairs
and Human Resources
Division

Kepala Divisi Kepatuhan
dan Manajemen Risiko
Head of Compliance and
Risk Management
Division

**MUHAMMAD
FERIAN**

**KURNIADI
PERDANA PUTRA**

ARFIE THAHAR

DERI RIDHANIF



Kepala Divisi
Pengembangan Biodiesel
**Head of Biodiesel
Development Division**

Kepala Divisi Replanting,
Reforestation dan
Promosi Perkebunan
**Head of Replanting,
Reforestation, and
Plantation Promotion
Division**

Kepala Divisi Pendidikan SDM,
Litbang, dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana
**Head of HR Education, Research
and Development, and Facility
and Infrastructure Development
Division**

Kepala Divisi Pemungutan
Biaya dan Iuran CPO
**Head of CPO Duties and
Contributions Division**



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Pejabat Struktural Structural Officials

**KUS EMY
PUSPITA DEWI**

**PRAYUDHA
MOELJO**

FAJAR WAHYUDI



Kepala Divisi Biaya dan
Iuran Produk Turunan
Head of Derivative
Product Duties and
Contributions Division

Kepala Divisi Program
Pelayanan
Head of Service
Program Division

Kepala Divisi Unit
Penyaluran
Head of Distribution
Unit Division

**HELMI
MUHANSYAH**

**ACHMAD MAULIZAL
SUTAWIJAYA**

**WAWAN
HARDIWINATA**

**TRIANA
MEINARSIH**



Kepala Divisi Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi
Head of Small and
Medium Entrepreneurs
and Cooperatives Division

Kepala Divisi Perusahaan
Head of Corporate
Division

Kepala Divisi Lembaga
Kemasyarakatan & Civil Society
Head of Community Institutions
and Civil Society Division

Kepala Satuan
Pengawasan Internal
Head of Internal Control
Unit



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Sumber Daya Manusia BDPKS

Human Resources of OPPFMA





Dalam menjalankan usaha yang terus berkembang, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aset utama yang perlu dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan metode yang efektif. BDPKS menerapkan metode pendekatan *Human Capital Management* dalam melakukan pengelolaan SDM, metode ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang dimiliki BDPKS sehingga mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi tuntutan pertumbuhan perusahaan.

In conducting business in a developing field, Human Resources (HR) is the main asset that needs to be managed and developed in a sustainable manner with effective methods. In managing HR, OPPFMA applies the Human Capital Management approach. This method focuses on improving the quality of HR at OPPFMA to be able to build HR capacity in facing the demands of company growth.



Struktur Pengelola SDM HR Management Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015, pengelolaan fungsi SDM BDPKPS dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia & Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur Pengelola SDM BDPKPS tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Based on the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.01/2015, the HR management of OPPFMA is carried out by the Human Resources & General Affairs Division who reports directly to the Directorate of Finance, General, Compliance, and Risk Management. Structure of OPPFMA's HR Management in 2018 is as follows:



Komposisi Pegawai Employees Composition

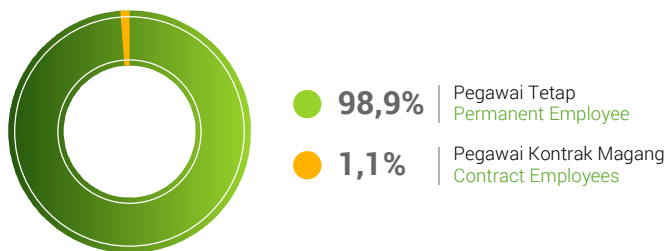
Jumlah pegawai BDPKPS pada tahun 2018 adalah 94 pegawai, bertambah dibanding tahun 2017 yang berjumlah 93 pegawai. Terdapat penambahan jumlah pegawai sebanyak 1 orang (mutasi masuk sebanyak 10 orang, mutasi keluar sebanyak 9 orang). Distribusi pegawai berdasarkan status, level jabatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia adalah sebagai berikut:

In 2018, OPPFMA has 94 employees, increased compared to 93 employees in 2017. The increase is 1 employee (10 employees mutated in, and 9 employees mutated out). Distribution of employees based on status, position, gender, education level, and age are as follows:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition Based on Employee Status

Status Status	2018	2017	2016	2015
Pegawai Tetap Permanent Employee	93	92	85	47
Pegawai Kontrak Magang Contract Employees	1	1	0	0
Jumlah Total	94	93	85	47

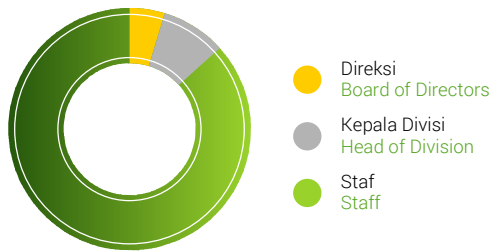
Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018
Graph: Employee Composition by Status in 2018



Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan Graph: Employee Composition by Status in 2018

Level Jabatan	2018	2017	2016	2015
Direksi Board of Directors	5	6	4	47
Kepala Divisi Head of Division	14	11	13	0
Staf Staff	74	75	68	-
Jumlah Total	93	92	85	47

Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2018
Graph: Employee Composition by Position in 2018



Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Employee Composition Based on Age

Usia Age	2018	2017	2016	2015
≥ 30	31	38	29	16
31 - 40	36	31	31	12
41 - 50	12	13	14	13
51 - 60	12	10	11	6
> 60	2	0	1	0
Jumlah Total	93	92	86	47



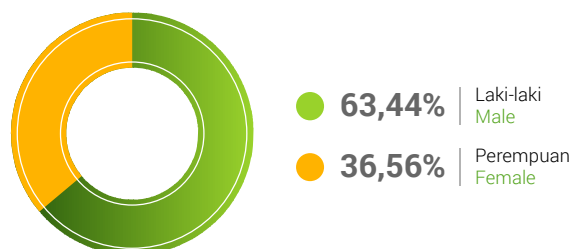
Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2018
Graph: Employee Composition by Age in 2018



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Employees Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2018	2017	2016	2015
Laki-laki Male	59	57	54	47
Perempuan Female	34	35	31	0
Jumlah Total	93	92	85	47

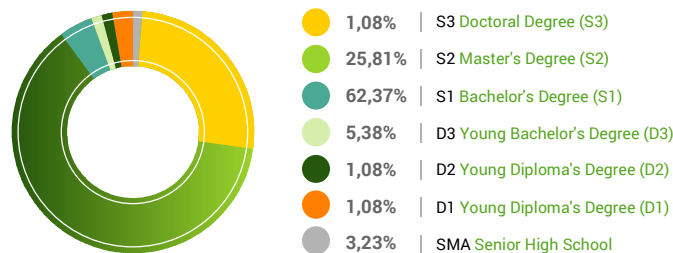
Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
Graph: Employee Composition by Gender in 2018



Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2018	2017	2016	2015
S3 Doctoral Degree (S3)	1	1	2	1
S2 Master's Degree (S2)	24	23	20	14
S1 Bachelor's Degree (S1)	58	54	47	27
D3 Young Bachelor's Degree (D3)	5	6	9	5
D2 Young Diploma's Degree (D2)	1	1	0	-
D1 Young Diploma's Degree (D1)	1	2	2	-
SMA Senior High School	3	5	5	-
Jumlah Total	93	92	85	47

Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018
Graph: Employee Composition by Education in 2018



Kesempatan yang Sama kepada Pegawai Equal Opportunities to Employees

BPDPKS senantiasa berkomitmen untuk menjunjung kesetaraan dalam menyeleksi sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar untuk menjadi calon pegawai yang profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender atau kondisi fisik mulai dari penerimaan pegawai, melaksanakan tugasnya secara profesional, dan memperoleh kompensasi. BPDPKS menjamin tidak terjadinya diskriminasi sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja *excellence*. Dengan demikian BPDPKS berupaya melakukan proses pengelolaan SDM berdasarkan faktor kemampuan (*competency*) dan kinerja (*performance*) yang sejalan dengan aspek *fairness*.

OPPFMA is always committed to upholding equality in selecting human resources by providing equal opportunities to applicants to become professional candidates for employees regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, or physical conditions, during recruitment, carrying out their duties professionally, and obtaining compensation. OPPFMA guarantees no discrimination to ensure fair and honest treatment to encourage employees in accordance with their potential, abilities, experience, and skills to achieve performance excellence. Thus, OPPFMA seeks to process HR management based on competency and performance that are in line with the fairness aspect.

Proses Rekrutmen Yang Berkualitas Quality Recruitment Process

Rekrutmen merupakan proses mendapatkan SDM terbaik sesuai dengan Rencana Jangka Pendek maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Perekrutan yang dilakukan bersifat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme yang dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. BPDPKS membuka kesempatan yang sama bagi semua kandidat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun gender selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Recruitment is the process of obtaining the best human resources in accordance with the Company's Short-Term Plan and Long-Term Plan. Recruitment is open and upholds professionalism based on employee needs analysis. OPPFMA provides equal opportunities for all candidates without differentiating ethnicity, religion, race, or gender, as long as they meet the set forth requirements.



Sumber Daya Manusia BDPKS Human Resources of OPPFMA

Adapun proses rekrutmen sebagai berikut:

The recruitment process is as follow:

a. Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja

a. Formulation of employee needs based on workload analysis

b. Pembentukan panitia seleksi

b. Establishment of selection committee

c. Penunjukan / bekerja sama dengan pihak ketiga penyelenggara rekrutmen

c. Appointment/collaboration with third party recruitment providers

d. Pengumuman di surat kabar nasional dan website kantor

d. Announcements in national newspapers and websites

e. Verifikasi / seleksi administrasi

e. Administrative verification/selection

f. Ter tertulis *assessment*

f. Written assessment

g. Tes wawancara oleh Direksi

g. Interview by the Directors

h. Pengumuman kelulusan

h. Selection announcements

i. Penetapan

i. Confirmation

Selama tahun 2018, BDPKS telah melakukan perekrutan sebanyak 3 orang, yang menduduki posisi sebagai Kepala Divisi / Satuan yaitu Kepala Satuan Pemeriksa Internal, Kepala Divisi Perusahaan, dan Kepala Divisi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

During 2018, OPPFMA recruited 3 people, who held positions as Head of Divisions/Units, i.e. the Head of the Internal Audit Unit, the Head of the Corporate, and the Head of the Small, Medium, and Cooperative Business.



Sistem Manajemen Kinerja BDPKS OPPFMA Performance Management System

Pengukuran kinerja di BDPKS dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan. Sistem penilaian yang dibangun mampu menjadi pembeda antara pegawai berkinerja tinggi dengan pegawai berkinerja rendah. Penilaian kinerja mengukur pencapaian pekerja terhadap target individu yang merupakan turunan dari sasaran/target BDPKS. Target individu pekerja ditetapkan dan disepakati bersama atasan di awal tahun, sebagai turunan dari target/sasaran atasannya dan sejalan dengan *Key Performance Indicator* (KPI) Direktorat.

In OPPFMA, performance is measured based on the principles of objectivity and fairness. The appraisal system that was enforced was able to be a differentiator between high-performance employees and low-performance employees. Performance appraisal measures the achievement of employees' targets that are derived from OPPFMA's objectives/targets. Individual targets for the employee are set and agreed with the supervisor at the beginning of the year, as a derivative of the objectives/targets of the supervisor, and in line with the Directorate's Key Performance Indicator (KPI).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Competency Development and Training

BDPKS telah memiliki program pengembangan kompetensi yang terencana, sistematis dan terfokus sesuai perkembangan bisnis perusahaan. Salah satu program pengembangan kompetensi utama yang telah dilaksanakan secara konsisten adalah Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mendukung proses pemeliharaan dan peningkatan kualitas SDM. Setiap pegawai BDPKS dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan kebutuhan posisi jabatannya.

OPPFMA has a planned, systematic, and focused competency development in accordance with the company's business development. One of the main competency development programs that have been implemented consistently is the Education and Training Program (Diklat) that supports the process of maintaining and improving the quality of human resources. Each OPPFMA's employee is required to have good competence in accordance with the requirements of the position.





Sumber Daya Manusia BDPKPS Human Resources of OPPFMA

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja, BDPKPS memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh baik di dalam maupun luar negeri. Selama tahun 2018, BDPKPS telah melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai, sebagai berikut:

In an effort to improve the ability and work skills, OPPFMA provides an opportunity for every employee who meets the requirements to attend education/training held by both domestically and abroad. During 2018, OPPFMA has conducted training and competency development for employees as follows:

No	Tanggal Penugasan Date of Duty		Acara Event	Peserta Participant	Tempat Pelaksanaan Place
TRIWULAN I QUARTER I					
1	16-18 Januari 2018 January 16-18, 2018	Seminar Nasional "Sustainable Palm Oil Insight"	Sustainable Palm Oil Insight National Seminar	Deri Ridhanif Riezca Kartika Dara	Auditorium LPP LPP Auditorium
2	16-19 Januari 2018 January 16-19, 2018	Seminar Nasional "Sustainable Palm Oil Insight"	Sustainable Palm Oil Insight National Seminar	Seta Bagja Fardaka	Auditorium LPP LPP Auditorium
3	20-22 Februari 2018 February 20-22, 2018	Seminar Nasional "Kiat Sukses Replanting"	"Tips for Successful Replanting" National Seminar	Ira Usdiana S Riezca Kartika Dara	Menara 165 Convention Center Room Andalucia Menara 165 Convention Center Room Andalucia
4	5-8 Maret 2018 March 5-8, 2018	Seminar Kelapa Sawit APKASINDO RIAU "Sawit Hendak Dibawa Kemana"	APKASINDO RIAU Palm Oil Seminar "The Future of Palm"	Kus Emy Pupita Dewi Ira Usdiana S Yulitta Amy	Hotel Golden Tulip, Pekanbaru Golden Tulip Hotel, Pekanbaru
5	6-7 Maret 2018 March 6-7, 2018	Pelatihan Hukum Online 2018	Online Legal Training 2018	Rangga Pradipta Firman Fathoni	Fraser Place, Setiabudi
6	8-9 Maret 2018 March 8-9, 2018	Seminar Jakarta Food Security Summit ke 4	4th Jakarta Food Security Summit	Kus Emy Pupita Dewi Riezca Kartika Dara Soraya Lesika Harlan	R. Cendrawasih, JCC
7	12-15 Maret 2018 March 12-15, 2018	Pelatihan PPKS Medan, tema "Tekno Ekonomi Budidaya dan Pengelolaan Kelapa Sawit	PPKS Medan Training "Techno-Economic Cultivation and Management of Palm Oil"	Hosea Reno Valentino Sarah Isnania Cendana	Kantor PPKS Medan PPKS Medan Office
8	19 Maret 2018 March 19, 2018	Lokakarya Nasional Sawit Rakyat Menuju ISPO	Palm Oil National Workshop Towards ISPO	Anwar Sadat	Hotel JS Luwana, Jakarta Pusat JS Luwana Hotel, Central Jakarta
TRIWULAN II QUARTER II					
1	11-13 April 2018 April 11-13, 2018	Seminar Nasional SNTKK 2018	2018 STNKK National Seminar	Sulthan M. Yusa	Grand Quality Yogyakarta
2	25-28 April 2018 April 25-28, 2018	Seminar Kelapa Sawit APKASINDO Papua Barat "Perkembangan Komoditi KS yang berkelanjutan"	West Papua APKASINDO Palm Oil Seminar "Sustainable Development of Palm Oil"	Wardoyo Akbar Alfianto	Hotel Aston NIU, Manokwari Aston NIU Hotel, Manokwari
3	11-12 April 2018 April 11-12, 2018	Seminar ICE ISPO 2018	ICE ISPO 2018	Meliana Meling Ira Usdiana S	Balai Kartini Jakarta

No	Tanggal Penugasan Date of Duty		Acara Event	Peserta Participant	Tempat Pelaksanaan Place
4	10-11 April 2018 April 10-11, 2018	Pelatihan Teknik Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Metode Evaluasi Penawaran	Training on Preparing Procurement Documents and Bid Evaluation Methods	Moch. Anang Iswanto Hendra Kesuma W Josef Tri S Rhesa Adriansyah Akbar Dewantoro Fitriyah	Hotel All Season Gajah Mada All Season Gajah Mada Hotel
5	9 April 2018 April 9, 2018	Training Portfolio Management	Portfolio Management Training	Lilik Sugiyono Handoko Iman Khafid Baehaqi Rangga Rahmananda	Mandiri Incubator
6	2-5 Mei 2018 May 2-5, 2018	Public Course Investment Management	Public Course Investment Management	Dewi Anggraeni Fajril Amirul Aulia Rinaldy Rahmat Dwi Septian Andi Dwi Novi Rhesa Adriansyah Novi Hastuti H Hendar Sudrajat Risa Rahajeng Sulthan M. Yusa Nathasya Nadia F Anwar Sadat Riezca Kartika Dara	Hotel East Park, Yogyakarta East Park Hotel, Yogyakarta
7	14-23 Mei 2018 May 14-23, 2018	Sertifikasi Internal Auditor CIA	CIA Internal Auditor Certification	Edy Sucipto Rahajeng Vemmy M. Indra Yudha Kusuma Cahya Wisnu Ardi	Gd Binasetra, Komplek Bidakara Binasetra Building, Bidakara Complex
8	13-14 Mei 2018 May 13-14, 2018	Try Out dan Ujian Sertifikasi PBJ	Try Out and Certification Test of PBJ	Hendra Kesuma W T.B Oka Prawira	Harper Hotel Jl. MT Haryono Kav 6-7 Jakarta
TRIWULAN III QUARTER III					
1	6 September 2018 September 6, 2018	Pelatihan Sekretaris Idaman	Excellent Secretary Training	Linda Sitanandra	Hotel, Jakarta
2	31 Agustus 2018 August 31, 2018	Pelatihan/Training Manajemen Risiko Batch V	Batch V Risk Management Training	Nanin Dwi Rinawati Dwi Anggraeni Julia Rahmi Gelly Susantry Mina Hidayah Aldi Bahana Fitriani Rizda Wulan Tri Hartanti Akhmad Nurdin Maya Riyanti Ira Usdiana S Yulisa Nurliyasaki Winge Ayu Bestari Syela Nur'ela	Hotel, Jakarta
3	27-30 Agustus 2018 August 27-30, 2018	Konferensi Nasional Internal Auditor Indonesia 2018	Indonesian Internal Auditor National Conference 2018	Edy Sucipto Rahajeng Vemmy	Hotel, Jakarta



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Sumber Daya Manusia BDPKKS Human Resources of OPPFMA

No	Tanggal Penugasan Date of Duty	Acara Event	Peserta Participant	Tempat Pelaksanaan Place
5	23-24 Agustus 2018 August 23-24, 2018	Workshop Jurnalistik dan Pengelolaan <i>Website</i> <i>Batch II</i>	Journalism and Website Management Batch II Workshop Mina Hidayah Cahya Wisnu Ardi Fajril Amirul Akhmad Nurdin Deddi Ikhsan Hendar Sudrajat Anwar Sadat Yulisa Nurliyasari Ira Usdiana S Akbar Alfianto Riezca Kartika Dara	Hotel, Jakarta
6	1-3 Agustus 2018 August 1-3, 2018	Sosialisasi Piagam SPI	SPI Charter Socialization Muhammad Indra Yudha Nur Apria Hidayati Prasetyo Luhur Fajril Amirul Aulia Rinaldy Novi Hastuti H Rizda Wulan Fitriyah Khairunnisa Yushardi Lerifardiyan Hendar Sudrajat Nanin Dwi Rinawati Wardoyo Ira Usdiana S Moch. Anang Iswanto Priyo Asmoro Refiana Octavia Andi Dwi Novi Rhesa Adriansyah Akhmad Nurdin Sulthan M. Yusa Aurora Rizkika Sukri Anwar Sadat	Pajajaran Suite Hotel Bogor
TRIWULAN IV QUARTER IV				
1	2-6 Oktober 2018 October 2-6, 2018	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa	Technical Guidance and Certification of Goods/Services Procurement Expert Examination Prasetyo Luhur Cahya Wisnu Ardi T.B Oka Prawira Wahyu Hidayat Pratama Josef Tri S Romdhoni A Aldi Bahana Osye Meiriana S Fitriani Tri Hartanti Sukri Yulisa Nurliyasari Yulitta Amy	Hotel Harper Jl. MT Haryono Kav 6-7
2	22-23 Oktober 2018 October 22-23, 2018	CRMS	CRMS Gelly Susantry	Hotel JS Luwana, Jakarta Pusat JS Luwana Hotel, Central Jakarta
3	6-7 November 2018 November 6-7, 2018	PSAK 71,72, dan 73	PSAK 71,72, and 73 Cahya Wisnu Ardi	Kampus UI Salemba UI Campus, Salemba

No	Tanggal Penugasan Date of Duty	Acara Event	Peserta Participant	Tempat Pelaksanaan Place
4	5-6 Desember 2018 December 5-6, 2018	Diklat Keuangan Finance Training	Nur Apria Hidayati Moch. Anang Iswanto Achmad Hanafi Husni Firmansyah Zulkifly Rangga Pradipta Linda Sitanandra Nanin Dwi Rinawati Refiana Octavia Wahyu Hidayat Pratama Mina Hidayah Aldi Bahana Andi Dwi Novi Akbar Dewantoro Rhesa Adriansyah Rahmat Dwi Septian Fitriani Luthfi Osye Meiriana S Rizda Wulan Dwi Nuswantara Sarah Isnania Cendana Novi Hastuti H Michelle Amorra T Tri Hartanti Neila Amelia Nathasya Nadia F Deddi Ikhsan Yulisa Nurliyasari Yulitta Amy Romdhoni A	Hotel Ashley, Jakarta Ashley Hotel, Jakarta
5	21-23 November 2018 November 21-23, 2018	Sosialisasi Implementasi Program Mandatori Biodiesel	Socialization of the Implementation of the Biodiesel Mandatory Program	Eki Dwi Wijanarko Balikpapan

Program Kesejahteraan Pegawai Employee Welfare Program

BDPKPS berupaya untuk memenuhi kesejahteraan pegawai melalui beberapa aspek antara lain :

1. Gaji
2. Tunjangan
3. Bonus
4. Jaminan kesehatan

OPPFMA strives to meet employee welfare through several aspects, including:

1. Salary
2. Allowances
3. Bonus
4. Health insurance



Program Pensiun Retirement Program

BDPKS memiliki program pensiun dengan mengikutsertakan pegawainya yang memasuki masa pensiun dengan diikuti pelatihan persiapan pensiun. Pelatihan tersebut dapat diusulkan oleh pegawai yang bersangkutan sebagai bekal setelah tidak bekerja di BDPKS. Selama tahun 2018, tidak terdapat pegawai BDPKS yang memasuki masa pensiun.

OPPFMA has a pension program by ensuring employees who are entering the retirement period to participate in the retirement preparation training. The training can be proposed by the employee as a provision after finishing his duties at OPPFMA. During 2018, there were no employees of OPPFMA who were entering the pension age.

Tingkat Perpindahan (*Turnover*) Pegawai Employee Turnover Rate

Tingkat perpindahan pegawai yang keluar dari BDPKS dengan berbagai sebab antara lain pengunduran diri secara sukarela, kinerja di bawah target, pelanggaran disiplin, dan pensiun serta mutasi/pindah tugas. Berikut adalah tabel turnover BDPKS selama tahun 2018:

The turnover rate in BDPKS is influenced by various reasons, including voluntary resignation, underperformance, disciplinary violations, and retirement, as well as mutation/rotation. The following is OPPFMA's turnover throughout 2018:

Jumlah Perputaran Pegawai Employee Turnover		2018
Atas permintaan sendiri	Resigned	4
Kinerja di bawah target	Underperformed	-
Pindah tugas / mutasi	Rotation/mutation	4
Pelanggaran disiplin	Disciplinary violations	-
Pensiun	Pension	-
Sebab lain	Others	1

Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko

Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Company's Head of Division, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit/Division



Pelatihan Dewan Pengawas Tahun 2018

Supervisory Board's Training in 2018

Selama tahun 2018 Dewan Pengawas telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop antara lain:

During 2018, the Supervisory Board has attended the following training/seminars/workshops:

No	Kegiatan Activity	Dewan Pengawas Supervisory Board
1	Seminar Kelapa Sawit Riau	Riau Palm Oil Seminar
2	Pembahasan Isu Negatif Komoditas Sawit di Eropa	Discussion on Negative Issues of Palm Commodities in Europe
3	The Quadrennial International Oil Palm Conference	The Quadrennial International Oil Palm Conference
4	Conference and Exhibition on Indonesia Palm Oil	Conference and Exhibition on Indonesia Palm Oil
5	International and Conference GlobOil	International and Conference GlobOil
6	European Palm Oil Conference	European Palm Oil Conference
7	Indonesia Palm Oil Conference	Indonesia Palm Oil Conference



Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko
Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Company's Head of Division, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit/Division

Pelatihan Komite Audit Tahun 2018

Audit Committee's Training in 2018

Selama tahun 2018 Komite Audit telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop antara lain

During 2018, the Audit Committee has attended the following training/seminars/workshops

No	Kegiatan Activity	Dewan Pengawas Supervisory Board
1	Short Course - Explain The Oilseeds Agriculture	Loso Judijanto

Pelatihan Direksi Tahun 2018

Board of Directors' Training in 2018

Selama tahun 2018 Direksi telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop antara lain:

During 2018, the Board of Directors has attended the following training/seminars/workshops:

No		Kegiatan Activity	Tempat Venue	Direksi Board of Directors
1	<i>Seminar Nasional Suistanable Palm Oil Insight</i>	Sustainable Palm Oil Insight National Seminar	Yogyakarta	Edi Wibowo
2	<i>Pricing Outlook Conference and Exhibition</i>	Pricing Outlook Conference and Exhibition	Malaysia	Dono Boestami
3	<i>Suistanable Oils & Fat International Congress</i>	Sustainable Oils & Fat International Congress	Perancis France	Dono Boestami
4	<i>Seminar Kelapa Sawit Riau</i>	Riau Palm Oil Seminar	Pekanbaru	Herdrajat Natawidjaja
5	<i>Executive Training</i>	Executive Training	Jakarta	Catur Ariyanto Widodo
6	<i>Pembahasan Isu Negatif Komoditas Sawit di Eropa</i>	Discussion on Negative Issues of Palm Commodities in Europe	Perancis	Tulus Budhianto
7	<i>Penguatan Sertifikasi ISPO Sawit Indonesia di Dunia Internasional</i>	Strengthening Indonesian Palm Oil ISPO Certification Internationally	Singapura Singapore	Dono Boestami
8	<i>Asia and The Pasific Regional Conference</i>	Asia and the Pacific Regional Conference	Fiji	Herdrajat Natawidjaja
9	<i>Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan"</i>	"Kejuangan" Chemical Engineering National Seminar	Yogyakarta	Edi Wibowo
10	<i>Workshop Indonesian Oil Palm Health</i>	Workshop Indonesian Oil Palm Health	Medan	Tulus Budhianto
11	<i>Seminar Eridicating Poverty Through the Agriculture and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity</i>	Eradicating Poverty Through the Agriculture and Plantation Industry to Empower Peace and Humanity Seminar	Vatikan Vatican	Edi Wibowo
12	<i>The Quadrennial International Oil Palm Conference</i>	The Quadrennial International Oil Palm Conference	Medan	Dono Boestami, Herdrajat Natawidjaja Edi Wibowo, Tulus Budhianto
13	<i>Seminar Nasional Planters Indonesia</i>	Indonesia's Planters National Seminar	Yogyakarta	Catur Ariyanto Widodo
14	<i>Workshop of Palm Oil Cultivation</i>	Workshop of Palm Oil Cultivation	Malaysia	Catur Ariyanto Widodo

No	Kegiatan Activity	Tempat Venue	Direksi Board of Directors
15	Seminar Internasional Pencapaian Industri Sawit Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global dengan Teknologi, Inovasi, dan Edukasi Masyarakat Persawitan	Pelalawan	Dono Boestami, Catur Ariyanto Widodo
16	FGD Besaran Konversi CPO dan Faktor Berat Jenis Biodiesel dalam Formula HIP BBN Jenis Biodiesel	Jakarta	Edi Wibowo
17	FGD Sawit Berkelanjutan	Yogyakarta	Dono Boestami, Tulus Budhianto
18	Conference and Exhibition on Indonesia Palm Oil	Pakistan	Dono Boestami
19	International and Conference Global Oil	India	Dono Boestami, Catur Ariyanto Widodo
20	European Palm Oil Conference	Swiss & Spain	Tulus Budhianto
21	Global International Conference	Luxembourg	Dono Boestami, Catur Ariyanto Widodo
22	Seminar Nasional Lahan Suboptimal	Palembang	Herdrajat Natawidjaja
23	Indonesia Palm Oil Conference	Bali	Catur Ariyanto Widodo, Tulus Budhianto
24	Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)	Malaysia	Catur Ariyanto Widodo
25	FGD Persiapan Produksi Aviation Biofuel dari Kelapa Sawit	Jakarta	Edi Wibowo

Pelatihan Kepala Divisi Perusahaan BDPKPS Tahun 2018

Training of the Head of Divisions of OPPFMA in 2018

Selama tahun 2018 Kepala Divisi Perusahaan telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop

During 2018, the Head of Divisions have attended the following training/seminar/workshops

No	Kegiatan Activity	Tempat Venue
1	FGD terkait FOME dan Pemanfaatan Batang Kelapa Sawit	Jakarta
2	FGD Market Outlook Kelapa Sawit	Jakarta
3	Diskusi tentang Meningkatkan Konsumsi CPO Domestik untuk Penghematan Devisa	Jakarta
4	Seminar Internasional Pencapaian Industri Sawit Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global dengan Teknologi, Inovasi, dan Edukasi Masyarakat Persawitan	Pelalawan
5	Workshop Jurnalistik	Jakarta
6	Conference and Exhibition on Indonesia Palm Oil	Pakistan
7	Talkshow Alternatif Pemanfaatan Biogas Berbasis Limbah Cair Kelapa Sawit	Jakarta



Pelatihan Unit Internal Audit Tahun 2018

Internal Audit Unit's Training in 2018

Selama tahun 2018 Unit Internal Audit telah mengikuti pelatihan/seminar/*workshop* antara lain:

1. Sertifikasi Internal Auditor CIA
2. Konferensi Nasional Internal Auditor Indonesia 2018
3. Sosialisasi Piagam SPI

During 2018, the Internal Audit has attended the following training/seminars/workshops:

1. CIA Internal Auditor Certification
2. Indonesian Internal Auditor National Conference 2018
3. SPI Charter Socialization

Pelatihan Unit/Divisi Manajemen Risiko Tahun 2018

Risk Management Unit's Training in 2018

Selama tahun 2018 Unit/Divisi Manajemen Risiko telah mengikuti pengembangan kompetensi antara lain :

1. Pelatihan/Training Manajemen Risiko Batch V
2. CRMS

During 2018, the Risk Management Unit/Division has attended the following capacity building:

1. Batch V Risk Management Training
2. CRMS

Lembaga Profesi Penunjang

Supporting Institutions

Lembaga Profesi BDPKS adalah sebagai berikut :

The OPPFMA's Supporting Institutions are as follows:

Keterangan Description	Profesi Penunjang Supporting Institutions	
Akuntan Publik Public Accountant	dbsd&a Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Registered Public Accountants Branch License Number 862/KM.1/2015 HEAD OFFICE Menara Kuningan 11th Floor Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta 12940 Indonesia	dbsd&a Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Registered Public Accountants Branch License Number 862/KM.1/2015 HEAD OFFICE Menara Kuningan 11th Floor Jl. HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta 12940 Indonesia
Auditor Pemerintah Government's Auditor	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jalan Jendral Gatot Subroto No.Kav 31 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210	The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) Jl. Jendral Gatot Subroto No. Kav 31 Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 10210





Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Setiap Propinsi di Indonesia Tahun 2018

Palm Oil Area and Production in every Province in Indonesia in 2018



Area dan Produksi Kelapa Sawit di Setiap Propinsi di Indonesia Indonesian Palm Oil Area and Production per Province

ACEH

Luas Lahan **Total Area** : 549.533 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 1.287.262 Ton

SUMATERA UTARA **NORTH SUMATRA**

Luas Lahan **Total Area** : 1.606.562 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 6.208.690 Ton

RIAU

Luas Lahan **Total Area** : 2.844.520 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 9.822.787 Ton

KEPULAUAN RIAU

Luas Lahan **Total Area** : 22.089 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 58.620 Ton

SUMATERA BARAT **WEST SUMATRA**

Luas Lahan **Total Area** : 490.350 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 1.322.759 Ton

JAMBI

Luas Lahan **Total Area** : 898.475 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 2.384.221 Ton

BENGKULU

Luas Lahan **Total Area** : 379.084 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 984.340 Ton

SUMATERA SELATAN **SOUTH SUMATRA**

Luas Lahan **Total Area** : 1.203.915 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 3.914.138 Ton

KEP. BANGKA BELITUNG

Luas Lahan **Total Area** : 279.963 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 813.428 Ton

LAMPUNG

Luas Lahan **Total Area** : 271.110 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 601.505 Ton

BANTEN

Luas Lahan **Total Area** : 19.594 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 29.198 Ton

JAWA BARAT **WEST JAVA**

Luas Lahan **Total Area** : 14.032 Ha
Jumlah Produksi **Total Production** : 36.216 Ton



KALIMANTAN BARAT WEST KALIMANTAN
Luas Lahan *Total Area* : 1.568.074 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 3.298.012 Ton

KALIMANTAN TENGAH CENTRAL KALIMANTAN
Luas Lahan *Total Area* : 1.511.698 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 4.896.654 Ton

KALIMANTAN SELATAN SOUTH KALIMANTAN
Luas Lahan *Total Area* : 577.305 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 1.602.530 Ton

KALIMANTAN UTARA NORTH KALIMANTAN
Luas Lahan *Total Area* : 260.094 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 538.965 Ton

KALIMANTAN TIMUR EAST KALIMANTAN
Luas Lahan *Total Area* : 1.059.237 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 2.463.709 Ton

SULAWESI BARAT WEST SULAWESI
Luas Lahan *Total Area* : 218.755 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 514.922 Ton

SULAWESI TENGAH CENTRAL SULAWESI
Luas Lahan *Total Area* : 204.698 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 386.861 Ton

GORONTALO
Luas Lahan *Total Area* : 20.868 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 1.829 Ton

SULAWESI TENGGARA SOUTH EAST SULAWESI
Luas Lahan *Total Area* : 76.565 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 117.488 Ton

SULAWESI SELATAN SOUTH SULAWESI
Luas Lahan *Total Area* : 71.297 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 171.331 Ton

MALUKU
Luas Lahan *Total Area* : 12.818 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 4.614 Ton

PAPUA BARAT WEST PAPUA
Luas Lahan *Total Area* : 69.375 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 123.578 Ton

PAPUA
Luas Lahan *Total Area* : 79.246 Ha
Jumlah Produksi *Total Production* : 109.356 Ton



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Setiap Propinsi di Indonesia Tahun 2018 Palm Oil Area and Production in every Province in Indonesia in 2018

No	Propinsi Province	Perkebunan Rakyat Smallholder		Perkebunan Negara Government Estate		Perkebunan Swasta Private Estate		Jumlah Total	
		Luas Areal (Ha)	Produksi Production (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi Production (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi Production (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi Production (Ton)
1	Aceh	283.465	573.214	39.187	85.021	226.881	629.026	549.533	1.287.262
2	Sumatera Utara North Sumatra	473.407	1.401.883	319.087	1.305.631	814.068	3.051.177	1.606.562	6.208.690
3	Sumatera Barat West Sumatra	242.245	607.242	9.971	28.298	238.134	697.219	490.350	1.322.759
4	Riau	1.637.775	4.379.923	90.624	355.680	1.116.122	5.087.183	2.844.520	9.822.787
5	Kepulauan Riau Riau Islands	1.860	2.659	-	-	20.229	55.961	22.089	58.620
6	Jambi	586.940	1.375.617	21.678	88.239	289.857	884.365	898.475	2.384.221
7	Sumatera Selatan South Sumatra	588.761	1.751.075	45.104	143.996	570.050	2.019.067	1.203.915	3.914.138
8	Kep. Bangka Belitung Bangka Belitung Islands	82.253	157.864	-	-	197.710	655.564	279.963	813.428
9	Bengkulu	248.817	615.289	3.635	11.942	126.632	357.109	379.084	984.340
10	Lampung	151.042	256.888	12.843	34.835	107.225	309.782	271.110	601.505
WILAYAH SUMATERA SUMATRA AREA		4.296.565	11.121.654	542.126	2.053.641	3.706.909	14.196.453	8.545.600	27.371.749
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat West Java	343	511	9.068	24.049	4.621	11.655	14.032	36.216
13	Banten	7.440	8.405	9.099	17.287	3.054	3.506	19.594	29.198
14	Jawa Tengah Central Java	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur East Java	-	-	-	-	-	-	-	-
WILAYAH JAWA JAVA AREA		7.783	8.916	18.167	41.336	7.675	15.161	33.625	65.413
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
WILAYAH NUSA TENGGARA NUSA TENGGARA AREA		-	-	-	-	-	-	-	-

No	Propinsi Province	Perkebunan Rakyat Smallholder		Perkebunan Negara Government Estate		Perkebunan Swasta Private Estate		Jumlah Total	
		Luas Areal (Ha)	Produksi Production (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi Production (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi Production (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi Production (Ton)
20	Kalimantan Barat West Kalimantan	451.890	840.265	49.497	132.034	1.066.687	2.325.713	1.568.074	3.298.012
21	Kalimantan Tengah Central Kalimantan	198.799	293.220	-	-	1.312.899	4.603.434	1.511.698	4.896.654
22	Kalimantan Selatan South Kalimantan	125.646	344.839	14.921	43.355	436.738	1.214.336	577.305	1.602.530
23	Kalimantan Timur East Kalimantan	327.185	613.550	54.314	157.815	677.739	1.692.343	1.059.237	2.463.709
24	Kalimantan Utara North Kalimantan	49.790	108.907	-	-	210.304	430.057	260.094	538.965
WILAYAH KALIMANTAN KALIMANTAN AREA		1.153.309	2.200.782	118.732	333.204	3.704.366	10.265.884	4.976.408	12.799.870
25	Sulawesi Utara North Sulawesi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Gorontalo	7.150	73	-	-	13.719	1.756	20.868	1.829
27	Sulawesi Tengah Central Sulawesi	103.329	183.358	1.147	3.835	100.222	199.668	204.698	386.861
28	Sulawesi Selatan South Sulawesi	50.036	121.919	17.118	42.002	4.143	7.409	71.297	171.331
29	Sulawesi Barat West Sulawesi	134.768	312.943	-	-	83.987	201.979	218.755	514.922
30	Sulawesi Tenggara South East Sulawesi	13.396	3.108	3.117	6.723	60.053	107.657	76.565	117.488
WILAYAH SULAWESI SULAWESI AREA		308.678	621.401	21.382	52.560	262.124	518.470	592.184	1.192.431
31	Maluku	1.182	81	-	-	11.636	4.533	12.818	4.614
32	Maluku Utara North Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	22.316	17.251	11.105	22.676	35.955	83.651	69.375	123.578
34	Papua Barat West Papua	17.681	40.787	1.609	4.346	59.956	64.264	79.246	109.356
WILAYAH MALUKU & PAPUA MALUKU & PAPUA AREA		41.178	58.079	12.714	27.022	1107.547	152.447	161.439	237.548
INDONESIA		5.807.514	14.010.833	713.121	2.507.763	7.788.621	25.148.415	14.309.256	41.667.011



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

04

Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan **Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance**



Pendapatan BDPKS dari hasil pengelolaan dana sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp1.047miliar atau lebih besar 107% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp505 miliar.

OPPFMA of income recorded Rp1,047 billion fund management up to 31 December 2018, or 107% higher compared to the same period in the previous year of Rp505 billion.





Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Tinjauan Ekonomi Nasional

National Economic Review



Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth

Pertumbuhan ekonomi 2018 tercatat 5,17%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013. Secara umum, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap solid, mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia 2018 dalam tren melambat dan ketidakpastian global sedang meningkat.

In 2018, the economic growth was recorded at 5.17%, an increase compared to the previous year's growth of 5.07%. This was the highest growth since 2013. In general, this shows that the Indonesian economy remains solid, taking into account that at the same time, the world economic growth is slowing down, and global uncertainties are on the rise.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tidak terlepas dari dampak positif bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam merespons ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 banyak ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah.

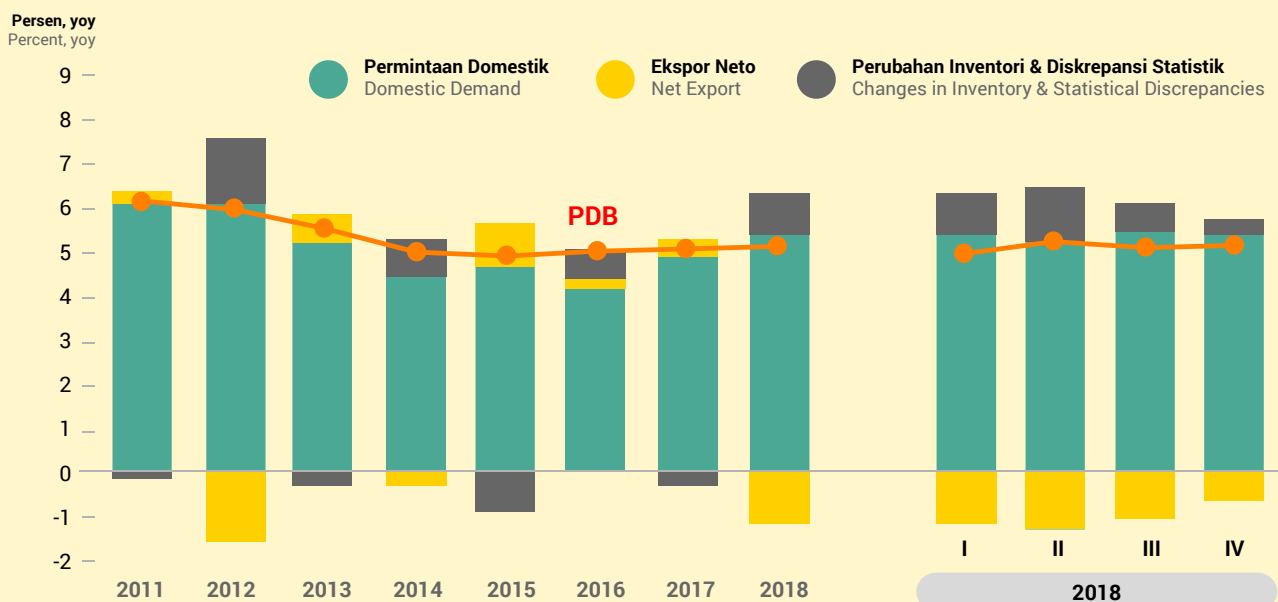
Beberapa kegiatan lain juga memengaruhi pengeluaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), kegiatan berskala internasional, seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International *Monetary Fund-World Bank* (IMF-WB) dan aktivitas persiapan pemilihan umum (Pemilu). Sementara itu, peran ekspor neto menurun dipengaruhi kinerja ekspor yang melambat seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, di tengah impor yang tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik.

The increase in economic growth in 2018 is inseparable from the positive impact of the policy mix adopted by Bank Indonesia and the Government in responding to global uncertainty. Indonesia's economic growth increase in 2018 was largely supported by domestic demand. Growth in consumption and investment increased, supported by improved income, the continued development of infrastructure projects, and maintained purchasing power in line with low inflationary pressures.

Several activities also influenced the expenditure, i.e. regional head elections (Pilkada), international scale activities, such as the Asian Games the annual meeting of the International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB), and preparatory activities for General Elections. Meanwhile, the net exports declined due to slowing export performance, in line with slowing world economic growth, amidst high growth in imports, which is in accordance with rising domestic demand.



Tinjauan Ekonomi Nasional National Economic Review



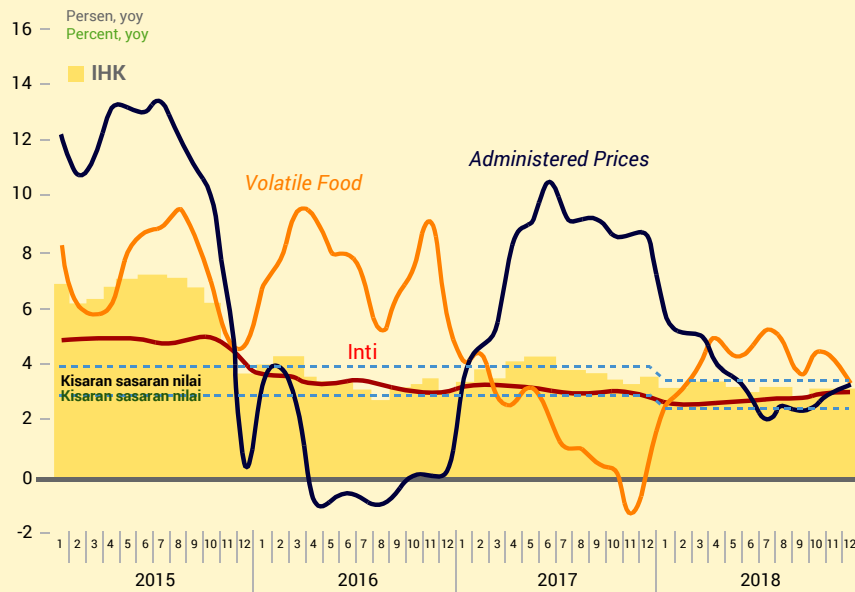
Inflasi Inflation

Inflasi pada 2018 tetap rendah terkendali dalam rentang sasaran $3,5 \pm 1\%$, meskipun pada saat bersamaan Rupiah mengalami depresiasi. Inflasi IHK pada akhir 2018 tercatat 3,13%, sehingga membuat inflasi berada dalam kisaran sasaran dalam 4 tahun berturut-turut. Inflasi 2018 tercatat rendah, baik bila dibandingkan dengan capaian inflasi tahun 2017 (3,61%) maupun dengan rerata historis empat tahun terakhir (4,59%).

In 2018, the inflation remains low, within the target range of $3.5 \pm 1\%$ even though at the same time, Rupiah is depreciating. CPI inflation at the end of 2018 was recorded at 3.13%, thus the inflation is within the target range for 4 consecutive years. 2018 inflation was recorded low, both when compared with inflation in 2017 (3.61%), and with the historical average of the last four years (4.59%).

Grafik Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi (%)

Graph: Realization of CPI Inflation and Inflation Targets (%)

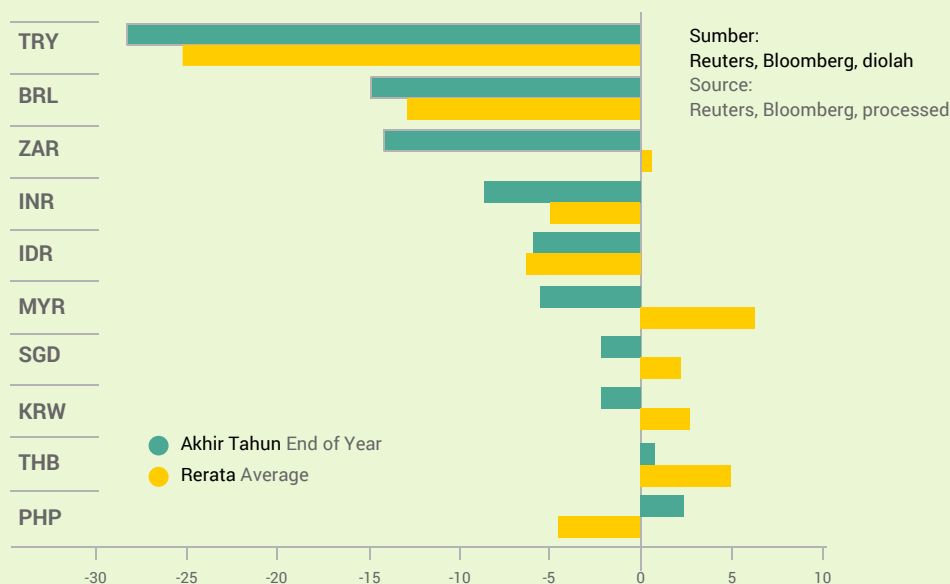


Sumber: BPS Source: BPS

Nilai Tukar Mata Uang Currency Exchange Rates

Nilai tukar Rupiah pada 2018 secara rerata melemah 6,05% (yoy) ke level Rp14.246/dolar AS dari Rp13.385/dolar AS pada 2017. Secara *point-to-point* (ptp), nilai tukar Rupiah melemah 5,65% dan ditutup di level Rp14.380/dolar AS pada akhir 2018. Namun demikian, pelemahan Rupiah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain seperti rupee India, rand Afrika Selatan, real Brazil, dan lira Turki.

The Rupiah exchange rate in 2018 weakened by 6.05% (YoY) to Rp14,246/US Dollar, from Rp13,385/US Dollar in 2017. Point-to-point (ptp), the Rupiah exchange rate weakened 5.65%, and closed at Rp14,380/US Dollar at the end of 2018. However, the Rupiah weakening is still lower than the depreciation of currencies of other countries, such as Indian rupees, South African rand, Brazilian real, and Turkish lira.



Sekilas Industri *Crude Palm Oil* (CPO) Crude Palm Oil (CPO) Industry at a Glance

Di tengah berbagai kesulitan yang di hadapi di Tahun 2018, industri sawit Indonesia tetap berjuang dan mengokohkan kuda-kudanya untuk bertahan serta berkembang. Industri yang menjadi mesin penghasil devisa terbesar Indonesia ini, menghadapi fluktuasi harga yang menurun, produksi yang melimpah dan berbagai tekanan negatif terhadap keberadaan industri kelapa sawit.

In the midst of the difficulties encountered throughout 2018, the Indonesian palm oil industry continues to struggle and strengthen itself to survive and thrive. The industry, as the largest foreign exchange earner in Indonesia, faces declining price fluctuations, abundant production, and various negative pressures on the existence of the palm oil industry.

Ekspor minyak sawit Indonesia secara keseluruhan (CPO dan produk turunannya, biodiesel dan oleochemical) membukukan kenaikan sebesar 8% atau dari 32,18 juta ton pada 2017 meningkat menjadi 34,71 juta ton di tahun 2018. Peningkatan yang paling signifikan secara persentase dicatatkan oleh biodiesel Indonesia yaitu sebesar 851% atau dari 164 ribu ton pada 2017 meroket menjadi 1,56 juta ton di tahun 2018. Peningkatan ekspor biodiesel tersebut disebabkan Indonesia memenangkan kasus tuduhan *anti-dumping* biodiesel oleh Uni Eropa di WTO.

Peningkatan ekspor juga diikuti oleh produk turunan CPO (refine CPO dan laurif oil) sebesar 7% atau dari 23,89 juta ton pada 2017 meningkat menjadi 25,46 juta ton di tahun 2018. Ekspor Olechemical juga mencatatkan kenaikan 16% atau dari 970 ribu ton pada 2017 meningkat menjadi 1,12 juta ton di tahun 2018. Sebaliknya, untuk produk CPO membukukan penurunan sebesar 8% atau dari 7,16 juta ton pada 2017 menurun menjadi 6,56 juta ton di 2018. Penurunan ekspor CPO menunjukkan bahwa Industri hilir sawit Indonesia terus berkembang, sehingga produk dengan nilai tambah/produk turunan lebih tinggi ekspor dibandingkan dengan minyak mentah sawit (CPO).

Sementara itu harga rata-rata CPO tahun 2018 tercatat US\$595,5/metrik ton atau menurun 17% dibandingkan dengan harga rata-rata tahun 2017 yaitu US\$714,3/metrik ton. Penurunan harga yang cukup signifikan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain melimpahnya stok minyak nabati dunia termasuk minyak sawit di Indonesia dan Malaysia, perang dagang antara China dan Amerika Serikat, daya beli yang lemah karena perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor dan beberapa regulasi negara tujuan ekspor juga turut andil dalam penurunan harga.

Rendahnya harga minyak sawit global ikut menggerus nilai devisa yang dihasilkan meskipun secara volume ekspor meningkat. Nilai sumbangan devisa minyak sawit Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan mencapai US\$20,54 miliar atau menurun 11% dibandingkan dengan nilai devisa tahun 2017 yang mencapai US\$22,97 miliar.

Overall, Indonesia's palm oil exports (CPO and its derivatives, biodiesel, and oleochemicals) recorded an increase of 8%, from 32.18 million tons in 2017 to 34.71 million tons in 2018. The most significant increase in percentage is recorded by Indonesian biodiesel, i.e. 851%, from 164 thousand tons in 2017 and skyrocketed to 1.56 million tons in 2018. The increase in biodiesel exports was because Indonesia won the case against the European Union's anti-dumping biodiesel at the WTO.

The increase in exports was also followed by CPO derivative products (refine CPO and laurif oil) by 7%, from 23.89 million tons in 2017 to 25.46 million tons in 2018. Oleochemical exports also increased by 16%, from 970 thousand tons in 2017 to 1.12 million tons in 2018. On the contrary, CPO products decreased by 8%, from 7.16 million tons in 2017 to 6.56 million tons in 2018. The decline in CPO exports shows that Indonesia's downstream palm oil industry continues to grow, thus the products with added value (derivative products) attracted more exports than the crude palm oil (CPO).

Meanwhile, the average CPO price in 2018 was recorded at US\$595.5/metric ton, which decreased by 17% compared to the average price in 2017, which was US\$714.3/metric ton. This significant price decline was caused by several factors, including the abundance of world vegetable oil stocks, which include palm oil in Indonesia and Malaysia, trade wars between China and the United States, weak purchasing power due to slowing economic growth in several export destination countries, and several state regulations from export destinations.

The low price of global palm oil has eroded the value of foreign exchange even though the volume of exports increased. In 2018, Indonesia's palm oil foreign exchange contributed to US\$20.54 billion, which decreased by 11% compared to the value of foreign exchange in 2017, which reached US\$22.97 billion.



Sepanjang tahun 2018, perusahaan perkebunan sawit terus berbenah diri dan bersiaga dalam menjaga terjadinya kebakaran lahan. Hampir tidak ada kasus kebakaran di perkebunan kelapa sawit.

Sepanjang tahun 2018, perusahaan perkebunan sawit terus berbenah diri dan bersiaga dalam menjaga terjadinya kebakaran lahan. Hampir tidak ada kasus kebakaran di perkebunan kelapa sawit.

Beralih kepada ekspor minyak sawit khusus CPO dan produk turunannya ke beberapa negara tujuan utama secara *year on year* (yoy) terjadi peningkatan khususnya China, Bangladesh, Pakistan, negara-negara Afrika dan Amerika Serikat. Tahun 2018, China membukukan peningkatan impor mencapai 4,41 juta ton atau naik 18% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 3,73 juta ton. Peningkatan impor diikuti Bangladesh 16%, negara-negara Afrika 13%, Pakistan 12% dan Amerika Serikat 3%. Di sisi berlawanan, penurunan impor minyak sawit Indonesia dibukukan oleh India 12% (2018 - 7,63 juta ton ; 2017 - 6,71 juta ton), negara-negara Timur Tengah 9% (2018 - 1,94 juta ton ; 2017 - 2,12 juta ton) dan Uni Eropa 5% (2018 - 4,78 juta ton ; 5,03 juta ton).

Penyebab turunnya impor India di 2018 sebagai akibat dari kebijakan pemerintah India yang menaikkan bea masuk impor CPO 44% dan *refined products* 54% yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2018. Pemberlakuan regulasi ini telah menyebabkan impor minyak Sawit India menurun tajam, khususnya di bulan April dan Mei. Keadaan mulai membaik setelah India mengalami perselisihan dagang dengan Amerika Serikat yang berujung pada India melaporkan kasus perselisihan dagang ke WTO dan menaikkan tarif bea masuk kedelai.

In terms of export of palm oil, specifically CPO and its derivatives, there has been an increase to several major destination countries, especially in China, Bangladesh, Pakistan, African countries, and the United States on the year on year (YoY). In 2018, China's imports increased by 18%, or 4.41 million tons, compared to 2017, which amounted to 3.73 million tons. The increase in imports was followed by Bangladesh of 16%, African countries of 13%, Pakistan of 12%, and the United States of 3%. On the contrary, the decline in Indonesia's palm oil imports was recorded by India of 12% (2018 - 7.63 million tons; 2017 - 6.71 million tons), Middle Eastern countries of 9% (2018 - 1.94 million tons; 2017 - 2.12 million tons), and the European Union of 5% (2018 - 4.78 million tons; 2017 - 5.03 million tons).

The decline in Indian imports in 2018 was a result of the Indian government's policy of increasing import duties on CPO by 44% and refined products by 54%, which was enacted on 1 March 2018. The enactment of this regulation has caused India's palm oil imports to decline sharply, especially in April and May. The situation improved after India experienced a trade dispute with the United States, which led to India reporting a case of trade disputes to the WTO and raising soybean import tariffs.

Beralih ke program biodiesel *mandatory* B20, kami mengapresiasi pemerintah yang mengambil langkah tepat dengan memberlakukan perluasan *mandatory* B20 kepada Non - PSO. Program ini cukup mendukung dalam penyerapan biodiesel di dalam negeri melalui program mandatori B20 mencapai 3,8 juta ton atau naik 72% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mampu mencapai 2,22 juta ton. Kinerja penyerapan biodiesel ini menunjukkan bahwa program *mandatory* B20 berjalan dengan konsisten.

Sepanjang tahun 2018, perusahaan perkebunan sawit terus berbenah diri dan bersiaga dalam menjaga terjadinya kebakaran lahan. Hampir tidak ada kasus kebakaran di perkebunan kelapa sawit. GAPKI dan perusahaan anggotanya terus meningkatkan upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di sekitar konsesi dengan pembentukan Desa Siaga Api di berbagai daerah dengan berbagai nama. Pelatihan antisipasi dan mitigasi karlahut juga dilaksanakan di berbagai daerah. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan dan dilanjutkan untuk ke depannya.

Di tahun 2018 sejumlah tantangan baik dalam dan luar negeri yang dihadapi industri sawit nasional adalah sebagai berikut:

In terms of the mandatory B20 biodiesel program, we appreciate that the government took the right step by implementing the expansion of mandatory B20 to Non-PSO. This program supports the absorption of biodiesel in the country through the mandatory B20 program, which achieved 3.8 million tons, increased by 72% compared to last year, which was 2.22 million tons. The biodiesel absorption performance shows that the mandatory B20 program is running consistently.

Throughout 2018, oil palm plantation companies continue to improve themselves and be prepared to prevent land fires. There are almost no cases of fire in oil palm plantations. IPOA and its member companies strive to increase efforts to prevent land and forest fires around the concession by establishing DesaSiagaApi (Fire Ready Village) in various regions under various names. Anticipatory training and mitigation of land and forest fires are also carried out in various regions. This activity will continue to be improved and continued in the future.

In 2018, the following are national and foreign challenges faced by the national palm oil industry:

1. Masih terdapat ketidakpastian hukum dalam keberlanjutan perkembangan industri sawit, antara lain karena regulasi yang kurang berpihak maupun " <i>conflicting regulation</i> ";	1. There are still legal uncertainties in the sustainability of the palm oil industry development, partly because of lack of impartiality of regulations and " <i>conflicting regulation</i> ";
2. Kondisi pasar global komoditi;	2. Global commodity market conditions;
3. Hambatan perdagangan di sejumlah kawasan/ negara tujuan ekspor;	3. Trade barriers in various regions/export destination countries;
4. Tekanan kampanye negatif yang makin gencar dan mengancam citra industri sawit;	4. Negative campaign pressure that is increasingly intense and threatens the image of the palm oil industry;
5. Penguatan pasar domestik dan implementasi kebijakan biodiesel yang belum memuaskan.	5. Domestic market strengthening and unsatisfactory biodiesel policy implementation.



Dampak Penerbitan dan Perubahan Regulasi terhadap Kinerja BDPKPS Impact of Regulatory Issuance and Changes on OPPFMA's Performance

BDPKPS terus berkomitmen dalam menjalankan setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh regulator. Selama tahun 2018, terdapat penerbitan baru dan perubahan peraturan sebagaimana dalam tabel berikut:

OPPFMA is committed to carrying out every legislation issued by the regulator. During 2018, there were new regulation and changes to the regulations as in the following table:

Tabel Penerbitan Baru dan Perubahan Peraturan di Tahun 2018
Table: New Regulation and Changes to Regulations in 2018

No	Nama Peraturan Regulation	Dampak terhadap BDPKPS yang Signifikan Significant impact on OPPFMA
1	Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018. Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKPS) Pada Menteri Keuangan.	The Government issued the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 152/PMK.05/2018 dated 4 December 2018 on the Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 81/PMK.05/2018. on the Service Tariffs for the Public Service Agency of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) of the Minister of Finance. Berdasarkan PMK 152/2018 tersebut, tarif pungutan atas ekspor <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dengan ketentuan sebagai berikut : • Harga <i>Crude Palm Oil</i> di bawah US\$570/ton, tarif US\$ 0. • Harga <i>Crude Palm Oil</i> mulai US\$570/ton s.d US\$619/ton, tarif bervariasi dari US\$5, US\$10, US\$15, US\$20, US\$25, sesuai dengan kode <i>Harmonized System</i> (HS). • Harga <i>Crude Palm Oil</i> di atas US\$619/ton, tarif bervariasi antara US\$20, US\$30, US\$40, US\$50, sesuai dengan kode <i>Harmonized System</i> (HS). Based on the PMK 152/2018, the export duties for Crude Palm oil (CPO) are determined based on the price limit layer of Crude Palm Oil (CPO) under the following conditions: • For Crude Palm Oil below US\$570/ton, the tariffs are US\$0. • For Crude Palm Oil at US\$570-US\$619 per ton, the rates vary from US\$5, US\$10, US\$15, US\$20, US\$25, in accordance with the Harmonized System (HS) code. • For Crude Palm Oil above US\$619 per ton, the rates vary from US\$20, US\$30, US\$40, US\$50, in accordance with the Harmonized System (HS) code.
2	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.	Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 103 of 2018 on the Stipulation of Export Benchmark Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duties. BDPKPS akan melakukan pungutan Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya apabila harga CPO sesuai referensi harga dari Kementerian Perdagangan diatas \$570/Ton. OPPFMA will collect Export duties on Palm Oil, CPO, and its derivatives, if the CPO price matches the reference price from the Ministry of Trade, i.e. above \$570/Ton.

No	Nama Peraturan Regulation	Dampak terhadap BDPKS yang Signifikan Significant impact on OPPFMA		
3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) pada Kementerian Keuangan.	Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 81/PMK.05/2018 dated 30 July 2018 on the Service Tariffs for the Public Service Agency of Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA) of the Minister of Finance.	Daftar tambahan produk yang dikenakan tarif pungutan oleh BDPKS	List of additional products subject to duty by OPPFMA
4	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.	Presidential Regulation No. 66 of 2018 dated 15 August 2018 on the Second Amendment to the Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the Palm Oil Fund Collection and Utilization.	Terjadi perubahan regulasi terkait tugas dan fungsi BDPKS yaitu Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.	There have been changes in regulations related to the duties and functions of OPPFMA, i.e. the Implementation of Research and Development of Palm Oil Plantations, Replantation of Palm Oil Plantations, and Infrastructure of Palm Oil Plantation.





Kontribusi BDPKS kepada Negara OPPFMA Contribution to the State

Kontribusi pada Industri Sawit Kelapa Sawit Contribution to the Palm Oil Industry

Kontribusi utama BDPKS dalam industri kelapa sawit tercermin pada kegiatan operasional yaitu meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

OPPFMA's main contribution to the palm oil industry is reflected in operational activities, by increasing prices, strengthening downstream industries, and building sustainable palm oil commodities.

Pada tahun 2018, BDPKS telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan kontribusi dalam dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. *Replanting* perkebunan kelapa sawit milik petani seluas 185.000 ha.
2. Menyelenggarakan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2018 dengan tema "Inovasi Teknologi Mendukung Sawit Indonesia Berkelanjutan" di Bandung, Jawa Barat.
3. Menyelenggarakan Program Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa 2018.
4. Menyelenggarakan Program Grant Riset Sawit 2018 Tingkat Nasional untuk semua kalangan masyarakat.

In 2018, OPFMA has carried out activities in an effort to increase contributions in the palm oil industry in Indonesia. The activities conducted are:

1. Replantation of palm oil plantations owned by farmers, covering an area of 185,000 ha.
2. Organized the 2018 Indonesian Palm Research Week (PERISAI) with the theme "Technology Innovation Supporting Indonesia's Sustainable Palm Oil" in Bandung, West Java.
3. Held the 2018 Palm Oil Research Competition Program for College Students.
4. Held the 2018 National Palm Research Grant Program for all members of the community.

5. Melakukan riset, pengembangan dan uji coba pemanfaatan bioavtur sebagai bahan bakar alternatif bagi armada pesawat komersial.
6. Menjadi salah satu bagian dari Tim Negosiasi yang dikirimkan Pemerintah Indonesia dalam Perundingan Pembatasan Penggunaan Produk Turunan Kelapa Sawit ke markas Uni Eropa di Brussel, Belgia.
7. Bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Universitas Jambi menyelenggarakan *Executive Oil Palm Program for Ambassadors* di Jambi.
8. Melaksanakan program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat tahap III di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
9. Menandatangani perjanjian dengan Badan Usaha Bahan Akar Nabati (BU BBN) dalam rangka pembiayaan pengadaan Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel untuk periode Mei-Oktober 2018.
10. Bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan pembekalan bagi peserta sekolah, staf dan pemimpin dinas luar negeri (Sesparlu) Kementerian Luar Negeri RI.
11. Mengirimkan perwakilan untuk menghadiri konferensi bertema "Pengentasan Kemiskinan Melalui Industri Pertanian dan Perkebunan untuk Memperkuat Perdamaian dan Kemanusiaan" di Roma, Italia.
12. Menyelenggarakan pertemuan dengan semua pemangku kepentingan di industri kelapa sawit nasional dalam kegiatan *Stakeholders Gathering* 2018.
13. Menandatangani perjanjian pendanaan penelitian dan pengembangan sawit dengan sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan.
14. Bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Pelatihan Pemahaman Peran Perkebunan dan Manajemen Teknologi *Good Agricultural Practices* Kelapa Sawit Berkelanjutan, diikuti guru SMK Pertanian se-Kalimantan Selatan.
5. Conducted research and development, and testing the use of bioavtur as an alternative fuel for commercial aircraft fleets.
6. Be a part of the Negotiation Team sent by the Indonesian Government in the Negotiation of Restrictions on the Use of Palm Oil Derived Products to the European Union headquarters in Brussels, Belgium.
7. Cooperated with the Ministry of Foreign Affairs and the University of Jambi, to hold the Executive Palm Oil Program for Ambassadors in Jambi.
8. Implemented the phase III rejuvenation program for palm oil plantation's smallholders in Rokan Hilir Regency, Riau.
9. Signed an agreement with the Business Unit for Vegetable Roots (BU BBN) to finance the procurement of biodiesel fuel for May-October 2018.
10. Cooperating with the Ministry of Foreign Affairs to organize briefing for students, staff, and foreign service leaders (Sesparlu) of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.
11. Sending representatives to attend a conference on "Poverty Alleviation through Agriculture and Plantation Industries to Strengthen Peace and Humanity" in Rome, Italy.
12. Organizing meetings with all stakeholders in the national palm oil industry in the 2018 Stakeholders Gathering.
13. Signed palm oil research and development agreements with numerous research and development institutions.
14. Collaborated with the Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University (IPB) to organize Training on Understanding the Role of Plantations and Management of Good Agricultural Practices of Sustainable Palm Oil Technology, attended by vocational teachers in Agriculture in South Kalimantan.



15. Menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) bersama Bank BNI, BRI, dan sejumlah lembaga tani kelapa sawit di Jambi untuk pembiayaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
16. Berpartisipasi sebagai salah satu pembicara dalam *The 6th International Oil Palm Conference and Exhibition (IOPC)* di Medan.
17. Menyelenggarakan Seminar Nasional Sawit Indonesia di Jakarta dengan tema "Menguatkan Pondasi Kelembagaan BDPKPS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan".
18. Menyelenggarakan lokakarya yang diikuti oleh beberapa wartawan dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
19. Meluncurkan layanan *Call Center* 14036 untuk informasi mengenai biodiesel B20.
20. Melakukan sosialisasi di sejumlah kota di Indonesia untuk memastikan kebijakan perluasan mandatori B20 dijalankan dengan baik.
15. Signed a cooperation agreement (CLA) with Bank BNI, BRI, and several palm oil farmer institutions in Jambi to finance the Public Palm Replantation (PSR) program.
16. Participated as one of the speakers at the 6th International Palm Oil Conference and Exhibition (IOPC) in Medan.
17. Held a National Seminar on Indonesian Palm Oil in Jakarta with the theme "Strengthening OPPFMA's Institutional Foundation to Support Indonesia's Sustainable Palm Oil, Reduce Poverty Rate, and Create Welfare".
18. Organized workshops attended by several journalists from various regions in Indonesia to increase understanding of the sustainable palm oil industry in Indonesia.
19. Launched 14036 Call Center for information on B20 biodiesel.
20. Conducted socialization in various cities in Indonesia to ensure the policy of expanding the mandatory B20 was carried out properly.

Kontribusi dalam Pembayaran Pajak Contribution to the Tax Payment

Terkait dengan hasil kinerja keuangan, BDPKPS memenuhi kewajiban melalui pembayaran pajak. BDPKPS berperan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak-pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi, PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan, dan PPh pasal 22 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Setoran pajak BDPKPS pada tahun 2018 adalah sebesar Rp558.504.297.871 menurun sebesar 41% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp961.560.386.576.

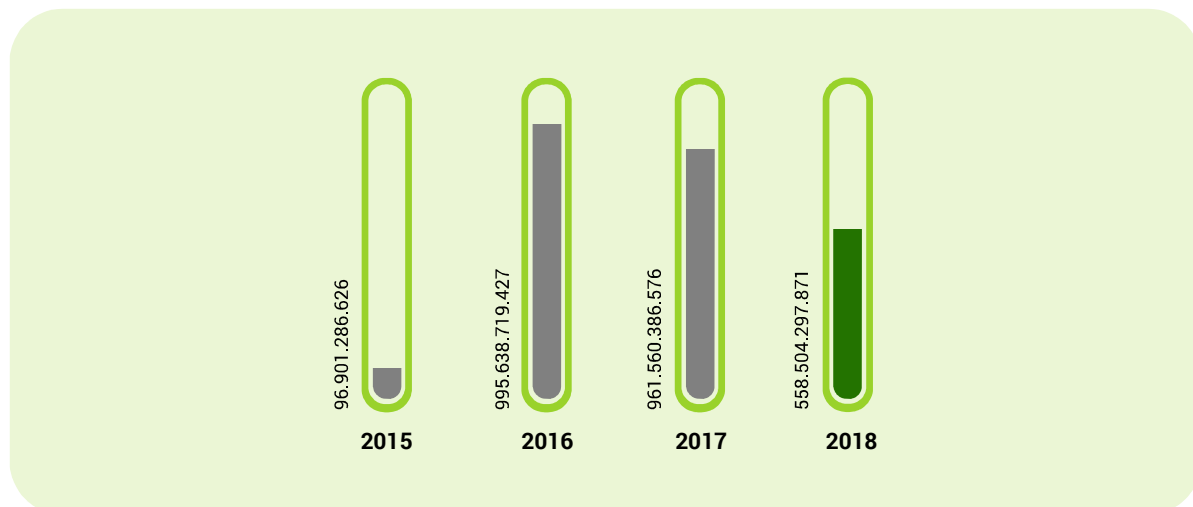
In terms of financial performance, OPPFMA fulfills obligations by paying taxes. OPPFMA has a role in deducting, depositing, and reporting taxes, such as Income Tax article 21 on income received by individual taxpayers, Income Tax article 23 on income received by corporate taxpayers, Income Tax article 22, and Value-Added Tax (PPN).

In 2018, OPPFMA deposited Rp558,504,297,871 of taxes, decreased by 41% compared to 2017, which was Rp961,560,386,576.

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2015-2018 (Rp)
Table: Tax Payment 2015-2018 (Rp)

Jenis Pajak <i>Type of Tax</i>		2015	2016	2017	2018
PPh Pasal 21	<i>PPh Article 21</i>	1.828.666.044	4.315.651.785	5.193.661.022	5.945.583.364
PPh Pasal 22	<i>PPh Article 22</i>	27.212.910	168.223.734	68.017.729	79.781.048
PPh Pasal 23	<i>PPh Article 23</i>	1.839.824.262	3.695.142.799	3.367.148.124	2.964.179.645
PPh Pasal 4	<i>PPh Article 4</i>	-	995.235.480	796.438.218	874.421.856
PPN	<i>VAT</i>	93.205.583.410	986.464.465.629	952.135.121.484	548.640.331.958
Jumlah	Total	96.901.286.626	995.638.719.427	961.560.386.576	558.504.297.871

Grafik Pembayaran Pajak Tahun 2015-2018 (Rp)
Graph: Tax Payment 2015-2018 (Rp)



BDPKPS tidak pernah terlambat dalam penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan dan Bulanan), serta tidak pernah terlambat dalam penyampaian dokumen wajib yang harus dilaporkan kepada regulator.

OPPFMA always submits mandatory taxation document (Annual and Monthly Tax Returns) on time, and always submits mandatory documents that must be reported to the regulator on time as well.



Analisis Kinerja Operasional

Operational Performance Analysis

Analisis Pencapaian Kinerja Utama

Key Performance Results Analysis

Berikut adalah pencapaian IKU BDPKPS selama tahun 2018:

The following is the OPPFMA's KPI achievement throughout 2018:

Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama BDPKPS Tahun 2018
Table: OPPFMA's Key Performance Indicator Achievements in 2018

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Strategic Objectives/Key Performance Indicator		Target Targets				Realisasi Realization			
		Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d. Q3 Q3/up to Q3	Q4/ Y-18	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d. Q3 Q3/up to Q3	Q4/ Y-18
1. Terwujudnya dana kelapa sawit yang sustainable The realization of sustainable palm oil funds									
1a	Persentase dana pendapatan yang sesuai RBA Percentage of income funds in accordance with RBA	25%	55%	80%	100%	30,96%	62,18%	106,76%	140,73%
1b	Deviasi target harga CPO CPO price target deviation	18%	18%	18%	18%	(10,62%)	(13,69%)	(24,67%)	(33,6%)
2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi High service user satisfaction									
2a	Indeks kepuasan pengguna layanan Service user satisfaction index	-	-	-	3,22	NA	NA	NA	3,42
3. Perencanaan kebijakan yang berkualitas Quality policy planning									
3a	Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan strategis Index of strategic policy completion timeline	-	-	-	3	NA	NA	NA	3
4. Penyelenggaraan penghimpunan dana yang optimal Optimal fundraising organization									
4a	Persentase imbal hasil dana kelolaan The percentage of return on managed funds	7% pa	7% pa	7% pa	7% pa	5,87% pa	5,92%	6,34%	6,71%
5. Penyelenggaraan penyaluran dana untuk petani dan pengembangan SDM Sawit Organizing fund disbursement for farmers and Palm Oil Human Resources development									
5a	Persentase penyelesaian program replanting sesuai RBA Percentage of replanting program completion in accordance with RBA	5%	25%	50%	100%	2,41%	3,77%	50,28%	63,11%
5b	Persentase penyelesaian pengembangan SDM Sawit Percentage of completion of Palm Oil HR development	5%	15%	60%	100%	10%	22%	62%	95%
5c	Persentase penyelesaian program pemenuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Percentage of completion of palm oil plantation infrastructure program	0%	5%	50%	100%	NA	NA	NA	NA

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama Strategic Objectives/Key Performance Indicator			Target Targets				Realisasi Realization			
			Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d. Q3 Q3/up to Q3	Q4/ Y-18	Q1	Q2/Smt I Q2/H1	Q3/s.d. Q3 Q3/up to Q3	Q4/ Y-18
6. Penyelenggaraan penyaluran dana untuk biodiesel dan pengembangan produk Organizing fund disbursement for biodiesel and product development										
6a	Persentase riset yang dibiayai	Percentage of research funded	6%	36%	76%	100%	6%	74%	76%	150%
6b	Persentase volume biodiesel yang disubsidi	Percentage of volume of subsidized biodiesel	15%	30%	50%	100%	18%	32%	52,19%	101%
7. Penyelenggaraan penyaluran dana untuk promosi dan kemitraan Organizing fund disbursement for promotion and partnership										
7a	Persentase persepsi positif dari media massa	Percentage of positive perceptions from the mass media	-	40%	-	50%	NA	67,74%	NA	44,9%
7b	Persentase tindak lanjut program kemitraan	Percentage of follow-up to the partnership program	-	50%	50%	60%	NA	55%	55%	75%
8. Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel Accountable fund management										
8a	Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	Timeliness of preparation of financial statements	-	3	-	3	NA	3	-	4
8b	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti	Percentage of recommendations from BPK and APIP audit results that have been followed-up	-	-	-	89%	NA	21,4%	21,4%	90,63%
9. SDM yang kompetitif Competitive HR										
9a	Rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	Average of employees' hard competency	-	-	-	75	NA	NA	NA	89
10. Organisasi yang kondusif Conducive organization										
10a	Persentase kematangan penerapan manajemen risiko	Percentage of risk management application maturity	-	-	-	75%	75%	75%	75%	75%
11. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern Optimum and modern facilities and ICT management										
11a	Persentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan	Percentage of office infrastructure provision as needed	20%	45%	70%	90%	23,81	52%	81%	100%
11b	Persentase modernisasi pengelolaan BLU	Percentage of Public Service Agency - modernization management	-	-	-	100%	NA	NA	NA	120%
12. Pengelolaan anggaran yang optimal Optimum budget management										
12a	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran internal Satker BDP Sawit sebagaimana <i>baseline</i>	Percentage of the quality of internal budget execution of OPPFMA work unit as per baseline	12%	29%	60%	95%	15,69%	32,84%	60%	75%

Status capaian IKU adalah sebagai berikut:
KPI's achievement status is as follows:

100% ≤ X ≤ 120%
Memenuhi Ekspektasi
Met Expectations

80% ≤ X ≤ 100%
Belum Memenuhi Ekspektasi
Did Not Meet Expectations Yet

X < 80%
Tidak Memenuhi Ekspektasi
Did Not Meet Expectations

Belum dapat diukur/realisasi bulanan
Unmeasurable/ monthly realization



Terwujudnya Dana Kelapa Sawit yang *Sustainable* The Realization of Sustainable Palm Oil Funds

Persentase Dana Pendapatan yang Sesuai RBA Percentage of Income Funds in Accordance with RBA

Target dana pendapatan yang sesuai RBA tahun 2018 terdiri dari Pendapatan Pungutan Dana Kelapa Sawit dan Turunannya sebesar Rp10.759.000.000.000 dan Pendapatan Imbalan Hasil Dana Kelolaan sebesar Rp233.000.000.000 dengan total target sebesar Rp10.992.000.000.000.

Realisasi Pendapatan sampai Desember 2018 adalah sebesar Rp15.468.775.590.532 atau sebesar 140,73% dari target tahun 2018, yang terdiri dari Pendapatan Pungutan sebesar Rp14.413.921.271.119 dan sisanya merupakan pendapatan imbal jasa hasil dana kelolaan sebesar Rp1.047.535.154.433 dan Pendapatan Lain-lain Rp7.319.165.080.

Income fund target as per 2018 RBA consists of Income from Palm Oil and Its Derivatives amounting to Rp10,759,000,000,000, and Return from the Management of Fund of Rp233,000,000,000 with a total target of Rp10,992,000,000,000.

Realized Income as of December 2018 amounted to Rp15,468,775,590,532 or 140.73% of the 2018 target, which consisted of Income from Fund Collection of Rp14,413,921,271,119, the Return of Managed Funds of Rp1,047,535,154,433, and Other Income of Rp7,319,165,080.

Tabel Pendapatan BPDP Sawit Tahun 2018
Table: OPPFMA's Income in 2018

Tahun 2018 2018		Pendapatan Pungutan Dana Sawit Income from Fund Collection of Palm Oil Plantation	Pendapatan atas Pengelolaan Dana Income from Fund Management	Pendapatan Lain-lain Other Revenues	Total Pendapatan Total Revenues
Januari	January	1.134.907.196.332	62.410.169.149	180.821.918	1.197.498.187.399
Februari	February	1.031.736.484.970	58.743.059.897		1.090.479.544.867
Maret	March	1.057.137.870.542	58.227.453.753	13.935.804	1.115.379.260.098
April	April	1.007.172.335.434	70.735.963.558	132.633	1.077.908.431.625
Mei	May	1.086.801.105.369	67.859.495.238	20.841.089	1.154.681.441.696
Juni	June	1.136.338.410.522	62.825.750.153		1.199.164.160.675
Juli	July	1.464.783.200.941	89.927.821.785	46.949	1.554.711.069.675
Agustus	August	1.676.361.495.784	96.544.477.082		1.772.905.973.611
September	September	1.463.968.512.671	101.848.506.776	6.629.327.292	1.572.446.346.739
Oktober	October	1.710.159.510.507	116.386.988.075	560.423,27	1.826.547.059.005
November	November	1.591.181.726.364	125.189.065.907	40.906	1.716.370.833.177
Desember	December	53.373.421.683	136.820.943.109	473.458.066	190.667.822.858
Total	Total	14.413.921.271.119	1.047.535.154.333	7.319.165.080	15.468.775.590.532

Dalam mencapai target tersebut, BDPKS didukung melalui upaya-upaya yang selalu dilakukan diantaranya adalah:

1. Kontrak dengan Sucofindo telah dilakukan, atas kontrak dimaksud telah disepakati bahwa tidak ada perubahan dalam melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi fisik;
2. Draft Peraturan Direktur Utama yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor dan SOP petunjuk teknis pelaksanaan rekonsiliasi data pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor, telah diajukan dan dalam proses menunggu Penetapan dari Direktur Utama;
3. Pengembangan Sistem Rekonsiliasi Data (Sired) Tahap II, dan diagendakan target penyelesaian adalah 20 Januari 2019;
4. Sistem Rekonsiliasi Data Tahap II antara data Pembayaran Pungutan Ekspor dengan Data Pemberitahuan Pabean Ekspor dimaksud, dipersiapkan agar data yang diterima maupun yang dikirimkan ke DJBC melalui SITP dapat dilakukan secara *host to host*;
5. *Update* sistem juga dilakukan untuk mengakomodir perubahan pungutan berdasarkan lapisan harga referensi sebagaimana PMK 152/2018.

Deviasi Target Harga CPO CPO Price Target Deviation

Realisasi rata-rata harga CPO (dari CIF Rotterdam Index) tahun 2018 adalah sebesar US\$497,55/ton sedangkan target rata-rata harga CPO tahun 2018 sebesar US\$750/ton, sehingga deviasi harga sebesar (33,66%).

Terjadi tren penurunan yang signifikan di Tahun 2018 dengan rata-rata harga CPO sebesar US\$596,9/ton atau mengalami penurunan sebesar 17% jika dibandingkan di tahun 2017 dengan harga CPO rata-rata US\$716/ton. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi besar di tahun 2018 dan tidak diimbangi oleh penyerapan di pasar luar negeri. Selain itu, data statistik menunjukkan harga minyak sawit bergerak mengikuti penurunan harga minyak kedelai di pasar Rotterdam.

In achieving these targets, OPPFMA always carries out various efforts, including:

1. For contract with Sucofindo, it has been agreed that there is no change in verification, both administrative and physical;
2. The Draft President Director's Regulation, which regulates the procedures for reconciling export duties payment data with export customs and excises declaration, and SOP technical guidelines for reconciliation of export duties payment data with export customs and excises declaration, has been submitted and is in the process of awaiting the Stipulation of the President Director;
3. Development of a Phase II Data Reconciliation System (Sired), with target completion on 20 January 2019;
4. The Phase II Data Reconciliation System between the Export Duties Payment data and the Export Customs and Excises Declaration is prepared to ensure that data received or sent to DJBC through SITP can be conducted host to host;
5. A system update was also carried out to accommodate changes in duties based on the reference price layer as per PMK 152/2018.

The realization of the average CPO price (from the CIF Rotterdam Index) in 2018 was US\$497.55/ton, while the average target CPO price in 2018 was US\$750/ton. Thus, the price deviation was (33.66%).

There was a significant downward trend in 2018 with an average CPO price of US\$596.9/ton or decreased by 17% compared to 2017, which was US\$716/ton. This was caused by a large increase in production in 2018 and was not matched by absorption in foreign markets. In addition, statistics show that palm oil prices follow soybean oil prices, which declines in the Rotterdam market.



Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi High Service User Satisfaction

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Service User Satisfaction Index

IKU Indeks kepuasan pengguna layanan diukur secara tahunan dan dilaksanakan pada Triwulan IV setiap tahunnya. Penilaian tingkat kepuasan dicapai dengan melakukan survei kepuasan atas layanan dari BDPKPS kepada *stakeholder*. Survei dilakukan dengan mekanisme melakukan kontak langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim BDPKPS dan konsultan. Survei dilakukan terhadap 108 *stakeholder* yang mewakili berbagai bidang tugas yang dilaksanakan oleh BDPKPS seperti penyaluran dana replanting, biodiesel, promosi dan penghimpunan dana.

Pada tahun 2018 indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 3,42 meningkat 6,21% dibandingkan tahun 2017 sebesar 3,22 (Skala 4). Hal ini menunjukkan semakin puasnya *stakeholder* dengan pelayanan yang diberikan oleh BDPKPS.

KPI of service user satisfaction index is measured annually and the assessment is conducted in Q4. The assessment of the satisfaction level is performed by conducting a satisfaction survey of OPPFMA's services to stakeholders. The survey was conducted with direct contact mechanism by asking questions that have been prepared by OPPFMA's team and consultants. The survey was conducted on 108 stakeholders who represent various fields of duties carried out by OPPFMA, such as the distribution of replanting funds, biodiesel, promotion, and fundraising.

In 2018, the service user satisfaction index is 3.42, increased by 6.21% compared to 2017, which was 3.22 (out of 4). This shows the increasingly satisfied stakeholders with the services provided by OPPFMA.

Perencanaan Kebijakan yang Berkualitas Quality Policy Planning

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Kebijakan Strategis Index of Strategic Policy Completion Timeline

Rencana Belanja Tahunan (RBT) tahun 2019 telah diselesaikan di Bulan Desember 2017 dan telah mendapatkan penetapan Komite Pengarah terkait dengan kebijakan alokasi aset. RBT tahun 2019 akan menjadi bahan pengajuan pagu indikatif TA 2019 dan RBA TA 2019.

The Annual Expenditures Plan (RBT) in 2019 was completed in December 2017 and has received the determination of the Steering Committee related to the asset allocation policy. 2019 RBT will be the submission of the indicative ceiling for the 2019 Fiscal Year and RBA.

Penyelenggaraan Penghimpunan Dana yang Optimal Optimal Fundraising Organization

Persentase Imbal Hasil Dana Kelolaan The Percentage of Return on Managed Funds

Imbal hasil dana kelolaan merupakan bagian dari kegiatan pengembangan dana sawit yang berkelanjutan meliputi pengelolaan kas dan investasi yang dilakukan BDPKS.

Imbal hasil dihitung berdasarkan jumlah hasil dana kelolaan dibagi jumlah keseluruhan dana perkebunan kelapa sawit yang diperhitungkan secara rata-rata.

Target dana pendapatan BDPKS dari hasil pengelolaan dana sesuai RBA tahun 2018 adalah tingkat imbal hasil atau ROI diatas 7,0% pa, sedangkan pencapaian annualized weighted average ROI sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 6,71% dari total dana kelolaan atau sebesar Rp20,919 triliun.

Pencapaian imbal hasil dana kelolaan yaitu 95,82% dari target disebabkan sejak bulan Oktober 2018 BI menaikkan secara bertahap tingkat suku bunga acuan BI (7 days *RR Rate*) disebabkan dengan adanya tekanan mata uang USD terhadap IDR, sehingga bank buku IV menyesuaikan tingkat suku bunga secara bertahap menjadi 7,68% pada bulan Desember 2018.

Dari sisi pendapatan BDPKS dari hasil pengelolaan dana sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp1.047 miliar atau lebih besar 107% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp505 miliar. Hal ini disebabkan karena outstanding deposito sampai dengan 31 Desember 2018 lebih besar yakni Rp20,919 triliun atau rata-rata sebesar Rp15,610 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu rata-rata sebesar Rp11,543 triliun untuk periode yang sama.

The return on managed funds is part of sustainable palm oil development activities, which include cash management and investment carried out by OPPFMA.

Return is calculated based on the amount of managed funds divided by the total amount of palm oil plantation funds on average.

OPPFMA's income target from the fund management in accordance with the 2018 RBA is the return or ROI above 7.0% pa, while the annualized weighted average ROI as of 31 December 2018 is 6.71% of the total managed funds or Rp20,919 trillion.

The return on managed funds was 95.82% of the target due to the gradual increase of the BI benchmark interest rate since October 2018 (7 days *RR Rate*), because of the pressure of the USD against IDR, thus the bank book IV adjusted the interest rate gradually to 7.68% in December 2018.

In terms of income, OPPFMA recorded Rp1,047 billion fund management up to 31 December 2018, or 107% higher compared to the same period in the previous year of Rp505 billion. This is because the outstanding deposits up to 31 December 2018 were greater, i.e. Rp20,919 trillion, or an average of Rp15,610 trillion compared to the previous year, which was an average of Rp11,543 trillion during the same period.



Penyelenggaraan Penyaluran Dana untuk Petani dan Pengembangan SDM Sawit Organizing Fund Disbursement for Farmers and Palm Oil Human Resources Development

Persentase Penyelesaian Program *Replanting* sesuai RBA

Percentage of Replanting Program Completion in Accordance with RBA

Sesuai dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2016 (perubahan Perpres Nomor 61 Tahun 2015), penyaluran dana *replanting* (peremajaan) kebun kelapa sawit merupakan bagian dari program sawit berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dan luasan lahan sawit yang diremajakan.

Target penyaluran dana peremajaan tahun 2018 sebesar Rp4.625.000.000.000 dengan target cakupan lahan seluas 20.000 ha. Realisasi Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat s.d. Desember tahun 2018 adalah 63,11% atau Rp315.548.380.000 dengan luas lahan 12.622 Ha.

Selain itu, telah dilakukan Pembayaran Tahap I Swakelola Dukungan Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 kepada Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM dan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI sebesar Rp50.546.575.600.

Tidak tercapainya target Q4 disebabkan rekomendasi teknis yang dikirimkan pada triwulan IV diterima paling banyak di akhir bulan Desember sebanyak 84 Rekomendasi. BDPKS memerlukan waktu untuk melakukan penelitian dan menyiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam pembayaran. Kecepatan Koperasi/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani untuk melengkapi data administrasi pembayaran sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2019, BDPKS mengusulkan agar Direktorat Jenderal Perkebunan dapat menggunakan Aplikasi PSR online yang telah dikembangkan.

In accordance with Presidential Regulation No. 24 of 2016 (Amendment to Presidential Regulation No. 61 of 2015), the disbursement of replanting funds for palm oil plantations is part of a sustainable palm oil program with the objective to increase the productivity of palm oil plantations and the area of replanted palm.

The target for the 2018 replantations fund disbursement is Rp4,625,000,000,000, under the target area of 20,000 ha. Realization of Palm Oil Replantation Fund Disbursement up to December 2018 was 63.11% or Rp315,548,380,000 with an area of 12,622 Ha.

In addition, Payment for Phase I Self-Management of the Palm Replanting Plantations in 2018 was made to the Task Force for Facilitating Rejuvenation of Palm Oil Farmers, Human Resources and Infrastructure Development of the Directorate General of Plantation of the Ministry of Agriculture, amounting to Rp50,546,575,600.

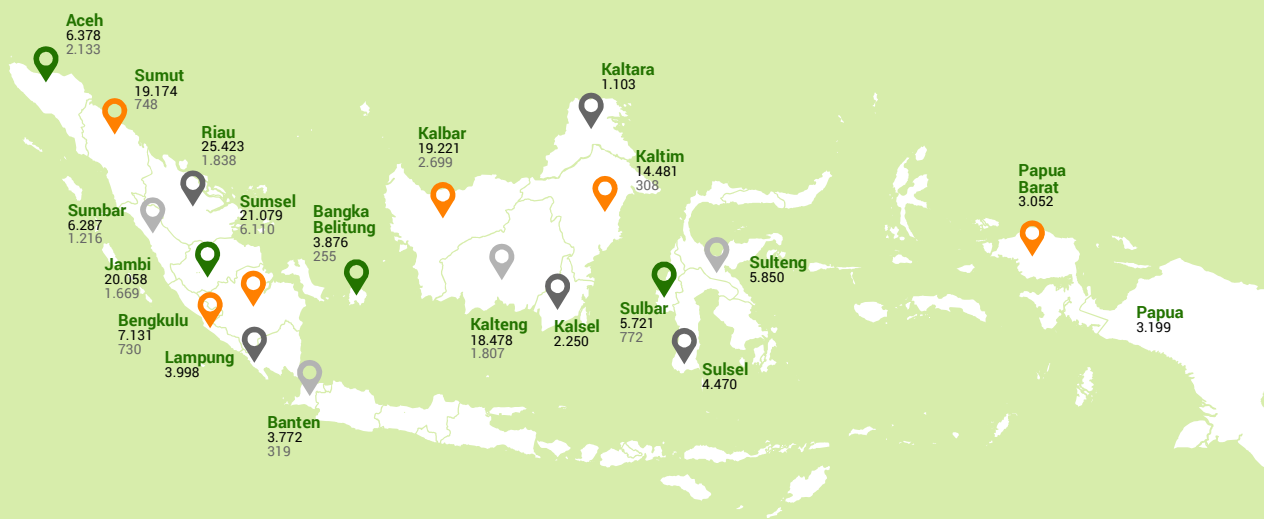
The Q4 target was not achieved because the technical recommendations sent in the fourth quarter were received at the end of December, i.e. 84 Recommendations. OPPFMA shall need time to conduct research and prepare the administration required for payment. Cooperative/Farmer Group/Combined Farmer Group will need to speed up the completion of administration data for payment.

In 2019, OPPFMA proposed that the Directorate General of Plantations shall use the online PSR Application that has been developed.

Target Program Peremajaan Sawit Rakyat 2018
Target Program Peremajaan Sawit Rakyat 2018

Program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan program nasional yang sangat progresif. Tahun 2018 sendiri targetnya sangat besar mencapai 185 ribu Ha di 20 provinsi.

Program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan program nasional yang sangat progresif. Tahun 2018 sendiri targetnya sangat besar mencapai 185 ribu Ha di 20 provinsi.



Provinsi Province	20	Total Target (Juta Ha) Total Target (Million Ha)	2.4	Target 2018 Target	185	Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan
----------------------	----	---	-----	--------------------------	-----	--

Target Program Peremajaan Sawit Rakyat 2017-2022
Target Program Peremajaan Sawit Rakyat 2017-2022





Penyaluran Dana Peremajaan Per Provinsi Periode Tahun 2018 Replantation Fund Disbursement by Province in 2018

No	Lembaga Tani Farmer Institution		Jumlah Petani Farmers	Luas Lahan (Ha) Area (Ha)	Penyaluran Dana ke Petani (Rp) Fund Disbursement To Farmers (Rp)
1	Provinsi Aceh	Aceh Province	491	642	16.060.682.500
2	Provinsi Sumatera Utara	North Sumatra Province	335	772	19.310.255.000
3	Provinsi Riau	Riau Province	1.409	3.485	87.125.000.000
4	Provinsi Jambi	Jambi Province	537	1.176	29.399.927.500
5	Provinsi Sumatera Selatan	South Sumatra Province	1.951	4.610	115.248.332.500
6	Provinsi Bengkulu	Bengkulu Province	221	332	8.299.460.000
7	Provinsi Kalimantan Tengah	Central Kalimantan Province	551	1.123	28.067.835.000
8	Provinsi Kalimantan Timur	East Kalimantan Province	189	481	12.036.887.500
Total		Total	5.684	12.622	315.548.380.000

Persentase Penyelesaian Pengembangan SDM Sawit Percentage of Completion of Palm Oil HR Development

Program beasiswa setara D1 angkatan 3 yang telah dibayarkan pada bulan Desember 2018 yaitu biaya Pendidikan semester 1 untuk kelas CWE dan biaya transportasi kedatangan peserta sebanyak 100 mahasiswa sebesar Rp1.554.538.591. Biaya buku semester 1 dan biaya hidup Oktober - November 2018 untuk kelas CWE (100 mahasiswa) sebesar Rp332.000.000. Biaya Hidup Oktober - November 2018 dan Biaya buku semester 1 untuk kelas Instiper (200 mahasiswa) sebesar Rp570.000.000.

Program beasiswa setara D1 angkatan 2 yaitu; Biaya transport kepulangan peserta D1 angkatan 2 untuk kelas CWE sebanyak 100 mahasiswa sebesar Rp127.473.624. Biaya transport kepulangan peserta D1 angkatan 2 untuk kelas Instiper sebanyak 200 mahasiswa sebesar Rp233.488.700. Total penyaluran dana beasiswa program setara D1 bulan Desember 2018 sebesar Rp2.817.500.915. Sementara periode Januari - Desember 2018 sebesar Rp 11.173.650.915.

Scholarship program equivalent to D1 batch 3 was paid in December 2018, consisting of the cost of Education for semester 1 CWE classes and transportation costs for the arrival of 100 students of Rp1,554,538,591. The cost of books for semester 1 and living costs for October-November 2018 for CWE classes (100 students) are Rp332,000,000. Living Costs for October-November 2018 and book for semester 1 for Instiper classes (200 students) are Rp570,000,000.

Scholarship program equivalent to D1 batch 2, i.e. Transport costs for D1 batch 2 participants CWE class (100 students) of Rp127,473,624. The cost of transports for D1 batch 2 participants for the Instiper class (200 students) is Rp233,488,700. The total scholarship fund disbursement for D1 program in December 2018 amounted to Rp2,817,500,915. The fund disbursement for January December 2018 amounted to Rp11,173,650,915.

Program beasiswa D3 yang telah dibayarkan pada bulan Desember 2018 yakni biaya hidup bulan Desember 2018 angkatan 1 LPP sebanyak 26 mahasiswa sebesar Rp28.600.000. Biaya hidup bulan Desember 2018 angkatan 2 LPP sebanyak 89 mahasiswa sebesar Rp66.750.000. Biaya Pendidikan Semester I D3 angkatan 3 LPP dan biaya transport kedatangan (90 mahasiswa) sebesar Rp1.312.042.600. Biaya hidup bulan Oktober - November 2018 dan biaya buku semester I angkatan 3 LPP sebesar Rp218.520.000. Biaya hidup bulan Desember 2018 angkatan 1 CWE sebesar Rp120.150.000. Total penyaluran dana beasiswa program D3 adalah Rp1.746.062.600. Sementara periode Januari - Desember 2018 sebesar Rp6.932.145.333.

The D3 scholarship program that was paid in December 2018 is the living costs in December 2018 for the LPP batch 1 (26 students) of Rp28,600,000. Living costs in December 2018 for LPP batch 2 (89 students) are Rp66,750,000. Education Cost for the Semester 1 D3 batch 3 LPP and transportation costs for arrival (90 students) amounting to Rp1,312,042,600. Living Costs for October-November 2018 and book for semester I LPP batch 3 are Rp218,520,000. Living costs in December 2018 for CWE batch 1 are Rp120,150,000. The total scholarship fund disbursement for D3 program is Rp1,746,062,600. The fund disbursement for January-December 2018 amounted to Rp6,932,145,333.

Total Pelatihan Guru dan Siswa sampai dengan Desember 2018 adalah 44 + 1 Pelatihan Auditor ISPO Apkasindo angkatan dengan total nilai PRJ/Kontrak Rp10.215.926.000. Total penyaluran dana bulan Desember termasuk uang saku dan transportasi peserta pelatihan sebesar Rp5.111.222.822. Sementara periode Januari - Desember 2018 sebesar Rp10.428.056.126.

The total number of Teacher and Student Training as of December 2018 is 44 + 1 ISPO Apkasindo Auditor Training with a total PRJ/Contract value of Rp10,215,926,000. Total fund disbursement in December including allowances and transportation for trainees amounted to Rp5,111,222,822. The fund disbursement for January-December 2018 amounted to Rp10,428,056,126.

Total penyaluran dana pengembangan SDM di atas adalah sebesar Rp22.294.921.574.

The total distribution of HR development funds amounted to Rp22,294,921,574.

Kegiatan Pengembangan SDM Sawit Tahun 2016-2020 HR Palm Oil Development Activities in 2016-2020

Jumlah SDM Sawit yang telah mengikuti kegiatan pengembangan SDM pada tahun 2016 s.d. Desember 2018.

Jumlah SDM Sawit yang telah mengikuti kegiatan pengembangan SDM pada tahun 2016 s.d. Desember 2018.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis



Persentase Penyelesaian Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Percentage of Completion of Palm Oil Plantation Infrastructure Program

Peraturan Direktur Utama dan SOP Penyaluran dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (SPPKS) yang menjadi dasar penyaluran dana masih menunggu penetapan dari Direktur Utama.

Saat ini masih menunggu rekomendasi dari Direktur Jenderal Perkebunan terkait prioritas, alokasi dan spesifikasi teknis tahun 2019. Selanjutnya terdapat konfirmasi terkait MoU dan Surat Perjanjian Kerja dengan Dirjen Perkebunan dalam rangka penyusunan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sebagai dasar penyaluran dana SPPKS.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit di Riau tgl 22-24 November 2018, antara lain:

- Jalan dan Jembatan,
- Pupuk dan Bibit,
- Mobil Layanan Klinik Kelapa Sawit,
- Excavator Mini dan PKS Mini,
- Tata Kelola Air di Lahan Gambut,
- Penguatan Kelembagaan,
- ISPO, dan
- Pendampingan/Jasa Konsultan.

Alokasi anggaran untuk sarana prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 adalah sebesar Rp213.000.000.000 dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana sarana prasarana sebesar Rp188.000.000.000.
- b. Dana Pendukung sarana prasarana sebesar Rp25.000.000.000.

Realisasi penyaluran dana sarana prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 sebesar Rp873.877.039 atau 0,41% dari Total yang dianggarkan Rp213.000.000.000.

Regulation of the President Director and SOP of the Palm Oil Plantation Facilities Fund Disbursement (SPPKS), which is the basis for fund disbursement, is still awaiting the stipulation of the President Director.

Currently, it is waiting for recommendations from the Director General of Plantations regarding 2019 priorities, allocations, and technical specifications. Further, there was confirmation regarding the MoU and the Work Agreement Letter with the Director General of Plantations in terms of preparing Technical Recommendations (Rekomtek) as the basis for SPPKS fund disbursement.

The Needs for Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure based on the results of the Focus Group Discussion (FGD) of Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure Fund Disbursement in Riau on 22-24 November 2018, include:

- Roads and Bridges,
- Fertilizers and Seeds,
- Palm Oil Clinic Car Service,
- Mini Excavators and Mini VFDs,
- Water Management on Peatlands,
- Institutional Strengthening,
- ISPO, and
- Assistance/Consultation Services.

The budget allocation for the Palm Oil Plantation infrastructure in 2018 is Rp213,000,000,000 with details of the ceiling as follows:

- a. Infrastructure fund disbursement of Rp188,000,000,000.
- b. Infrastructure Supporting Funds of Rp25,000,000,000.

Realization of Palm Oil Plantation infrastructure and facilities fund disbursement in 2018 amounted to Rp887,877,039 or 0.41% of the total budget of Rp213,000,000,000.



Tabel Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018
Table: Palm Oil Plantations Facilities and Infrastructure in 2018

2018	Beban Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Liabilities of Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure				Total Penyaluran Dana Program Pengembangan SDM Sawit Total Fund Distribution of the Palm Oil HR Development Program
	Penyaluran dana Sarpras Facilities fund disbursement	Perjalanan Dinas Penyaluran Dana Sarpras Business Trip for Facilities Fund Disbursement	Dukungan Penyaluran Dana Dukungan Support for Fund Disbursement	Jasa Profesional Professional Fee	
Januari January	-	34.877.568	-	-	34.877.568
Februari February	-	26.383.176	-	-	26.383.176
Maret March	-	-	-	-	-
April April	-	185.682.205	-	-	185.682.205
Mei May	-	-	-	-	-
Juni June	-	16.200.000	-	-	16.200.000
Juli July	-	21.200.000	-	-	21.200.000
Agustus August	-	-	-	-	-
September September	-	-	-	-	-
Oktober October	-	5.400.000	-	-	5.400.000
November November	-	65.672.600	-	-	65.672.600
Desember December	-	364.810.740	13.200.000	140.450.750	518.461.490
Total	-	720.226.289	13.200.000	140.450.750	873.877.039

Penyelenggaraan Penyaluran Dana untuk Biodiesel dan Pengembangan Produk Organizing Funds Disbursement for Biodiesel and Product Development

Persentase Riset yang Dibiayai Percentage of Research Funded

Total penelitian dan pengembangan yang dikelola sampai bulan September 2018 adalah sebanyak 75 penelitian, yaitu:

- 1 riset inisiatif mengenai mitigasi 3MCPDE dan GE dengan LPPM IPB;
- 32 penelitian lanjutan dari riset tahun 2015 dan 2016 (kelompok K18-1);
- 1 riset inisiatif dengan P3HH Kementerian LHK tentang pemanfaatan limbah sawit untuk produk perkayuan;
- 1 riset inisiatif tentang kajian Outlook Biodiesel dengan PT RPN dan 37 Penelitian baru dari hasil seleksi di tahun 2018 (kelompok K18-2);
- 1 riset inisiatif Kajian nilai densitas sebagai faktor perhitungan HIP Biodiesel oleh PPPTMGB LEMIGAS;
- 1 riset inisiatif Kajian Kelayakan investasi sarana dan prasarana di 10 titik pencampuran oleh PPPTMGB LEMIGAS;
- 1 riset inisiatif Kajian Potensi Pakistan sebagai hub pengembangan bisnis minyak sawit Indonesia di Kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah oleh ITAPS FEM IPB.

Alokasi anggaran untuk pembayaran selisih harga biodiesel Tahun 2018 adalah sebesar Rp213.000.000.000 dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Penyaluran dana pembayaran selisih harga biodiesel sebesar Rp208.000.000.000.
- Dukungan dana penyaluran Biodiesel sebesar Rp5.000.000.000.

Realisasi penyaluran Dana Program Riset Tahun 2018 sebesar Rp61.660.689.209 atau 29% dari total yang dianggarkan Rp213.000.000.000.

Total research and development managed up to September 2018 are 75 studies:

- 1 research on mitigating 3MCPDE and GE with LPPM IPB;
- 32 follow-up studies from 2015 and 2016 research (K18-1 group);
- 1 research with P3HH Ministry of Environment and Forestry on the use of palm oil waste for timber products;
- 1 research on the Biodiesel Outlook study with PT RPN and 37 new studies from the selection results in 2018 (K18-2 group);
- 1 research on the value of density as a calculation factor for Biodiesel HIP by PPPTMGB LEMIGAS;
- 1 Feasibility Study of investment in facilities and infrastructure in 10 mixing points by PPPTMGB LEMIGAS;
- 1 Pakistan Potential Study as a hub for the development of Indonesia's palm oil business in the South Asian and Middle East Region by ITAPS FEM IPB.

The budget allocation for biodiesel price variance in 2018 is Rp213,000,000,000 with details of the ceiling as follows:

- Fund disbursement for biodiesel price variance amounted to Rp208,000,000,000.
- Biodiesel fund disbursement support of Rp5,000,000,000.

Realization of Research Fund disbursement in 2018 amounted to Rp61,660,689,209 or 29% of the total budget of Rp213,000,000,000.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Tabel Penyaluran Dana Program Riset
Table: Research Program Fund Disbursement

2018	Beban Riset (dalam Rp) Research Liabilities (Rp)					Total Penyaluran Dana Program Riset Total Research Program Fund Disbursement
	Penyaluran Dana Riset Research Fund Disbursement	Honorarium Komite Riset Research Committee Honorarium	Perjalanan Dinas Business trip	Bahan Pendukung Penyaluran Dana Riset Support for Research Fund Disbursement	Jasa Profesional Professional Fee	
Januari January	387.577.850	-	20.501.950	-	-	408.079.800
Februari February			19.971.585	280.857.500	28.000.000	19.971.585
Maret March	1.250.675.631		1.001.802.795	376.552.000	174.453.500	2.561.335.926
April April			90.883.400			641.888.900
Mei May	10.151.646.195		215.051.940			10.366.698.135
Juni June	3.735.892.219		61.701.700			3.797.593.919
Juli July	2.158.365.150		129.442.800			2.287.807.950
Agustus August	1.685.454.486		174.878.250		14.850.000	1.875.182.736
September September	598.633.600		183.130.119			781.763.719
Oktober October	11.955.078.552	247.100.000	641.095.613		127.962.500	12.971.236.665
November November	21.398.446.521	1.950.000	65.985.223			21.466.381.744
Desember December	4.384.229.670	5.000.000	93.518.460			4.482.748.130
Total	57.705.999.874	254.050.000	2.697.963.835	657.409.500	345.266.000	61.660.689.209

Persentase Volume Biodiesel yang Bersubsidi Percentage of Volume of Subsidized Biodiesel

Untuk mencapai target volume biodiesel sebesar 3.220.000 KL, diperlukan penyerapan biodiesel dari sektor lain (Non-PSO). Mulai 1 September 2018 perluasan pemanfaatan biodiesel diterapkan di sektor Non-PSO dengan menyesuaikan regulasi (Perpres 66 Tahun 2018 dan Permen ESDM 41 Tahun 2018).

Perpindahan proses verifikasi yang sebelumnya dilakukan oleh Dirjen EBTKE menjadi Dirjen Migas, dan telah diputuskan *cut-off* kegiatan verifikasi oleh Dirjen EBTKE adalah penyaluran sampai dengan Agustus 2018. Perbedaan HIP Solar antara Jenis Bahan Bakar Umum (Non PSO) dan Jenis Bahan Bakar Tertentu (PSO) telah dilakukan penyamaan harga dan periode penetapannya (Permen ESDM No 45/2018).

Kondisi HIP Biodiesel *exclude* OA < HIP Solar menyebabkan dispute pada BU BBN dan BU BBM menyangkut Ongkos Angkut, sehingga baru beberapa dokumen tagihan yang telah disampaikan ke BDPKPS. Realisasi Volume penyaluran Biodiesel dengan mekanisme pengadaan melalui dana pembiayaan Biodiesel sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 3,26 juta kL.

Alokasi anggaran untuk penyaluran dana riset Tahun 2018 adalah sebesar Rp7.467.000.000.000 dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Penyaluran dana riset sebesar Rp7.463.000.000.000.
- Dukungan Dana riset sebesar Rp4.000.000.000.

Realization of 2018 Research Program Fund Disbursement amounted to Rp4,824,581,996,232 or 35% of the total budget of Rp4,467,000,000,000.

Biodiesel absorption from other sectors (Non-PSO) is required to achieve the biodiesel volume target of 3,220,000 KL. Since 1 September 2018, the expansion of biodiesel utilization will be implemented in the Non-PSO sector by adjusting regulations (Presidential Regulation 66 of 2018 and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation 41 of 2018).

The transfer of the verification process that was previously carried out by the Director General of EBTKE, is now carried out by the Director General of Oil and Gas, and the cut-off of verification activities by the Director General of EBTKE was up to August 2018. The difference of Solar HIP between General Fuel Type (Non-PSO) and Specific Fuel Type (PSO) has been determined under the same price and period (ESDM Regulation No. 45/2018).

The Biodiesel HIP excludes OA < HIP Solar condition causes dispute on the BU BBN and BU BBM regarding Transportation Costs. Thus, there were only a few invoices that have been submitted to OPFMA. Realization of Biodiesel distribution volume by procurement mechanism through Biodiesel financing funds up to 31 December 2018 amounted to 3.26 million kL.

The budget allocation for the research fund disbursement in 2018 is Rp7,467,000,000,000, with the details of the ceiling as follows:

- Research fund disbursement of Rp7,463,000,000,000.
- Research Fund Support in the amount of Rp4,000,000,000.

Realisasi penyaluran Dana Program Riset Tahun 2018 sebesar Rp4.824.581.996.232 atau 35% dari Total yang dianggarkan Rp4.467.000.000.000.



Tabel Penyaluran Dana Biodiesel
Table: Biodiesel Fund Disbursement

2018	Beban Pembayaran Selisih Harga Biodiesel (dalam Rp) Payment of Biodiesel Price Variance (Rp)				Total Penyaluran Dana Biodiesel Total Biodiesel Fund Disbursement
	Selisih harga biodiesel Biodiesel price variance	Bahan pendukung Supporting material	Perjalanan Dinas Business trip	Jasa Profesional Professional fee	
Januari January	658.409.442.012	-	-	-	658.409.442.012
Februari February	706.253.444.337	-	106.645.664	22.800.000	706.382.890.001
Maret March	711.878.110.587	-	83.400.000	7.800.000	711.969.310.587
April April	433.858.318.976	-	91.370.744	2.000.000	433.951.689.720
Mei May	622.164.415.876	-	184.720.184	4.000.000	622.353.136.060
Juni June	240.574.503.054	-	-	-	240.574.503.054
Juli July	543.836.849.147	-	103.832.400	6.000.000	543.946.681.547
Agustus August	562.516.895.386	-	24.863.573	8.000.000	562.549.758.959
September September	(170.743.073.053)	-	28.980.000	-	(170.714.093.053)
Oktober October	260.374.697.276	111.375.000	178.140.585	38.300.000	260.702.512.861
November November	250.534.111.237	-	671.346.545	48.000.000	251.253.457.782
Desember December	(1.633.253.723)	916.997.250	579.623.175	3.339.310.000	3.202.676.702
Total	4.818.024.461.112	1.028.372.250	2.052.922.870	3.476.210.000	4.824.581.966.232

Penyelenggaraan Penyaluran Dana untuk Promosi dan Kemitraan Organizing Fund Disbursement for Promotion and Partnership

Persentase Persepsi Positif dari Media Massa

Percentage of Positive Perceptions from Mass Media

Sasaran penyaluran dana promosi dan kemitraan perkebunan kelapa sawit adalah untuk menjalin kemitraan, pelaksanaan diplomasi & advokasi sawit, dan hubungan kelembagaan dengan mitra strategis. Penyaluran dana perkebunan kelapa sawit salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan citra nilai produk sawit. Pengukuran kinerja melalui perhitungan persentase net sentiment (positif - negatif) dari data sentiment masyarakat pada media massa dan media sosial di dalam negeri.

Target capaian promosi dan kemitraan tahun 2018 adalah peningkatan persepsi positif tentang sawit di media massa nasional. Untuk Triwulan II tahun 2018, target capaian kinerja adalah 40% , adapun realisasi s.d. triwulan II 2018 adalah sebesar 67,74% sedangkan untuk triwulan IV target capaian kinerja adalah 50% , dengan realisasi s.d. triwulan VI 2018 adalah sebesar 44,90%.

The objectives of promotional and partnership fund disbursement of palm oil plantation are to establish partnerships, and to implement palm oil diplomacy & advocacy, and institutional relationships with strategic partners. One of the objectives of palm oil plantation fund disbursement is to improve the image of the palm oil products' value. Performance is assessed through calculation of the percentage of net sentiment (positive - negative) from public sentiment data on the mass media and social media in the country.

The target of promotion and partnership in 2018 is to increase positive perceptions about palm oil in the national mass media. For Q2 2018, the performance target is 40%. The realization up to Q2 2018 is 67.74%. For Q4 2018, the performance target is 50%. The realization up to Q4 2018 is 44.90%.

Net Sentiment Juli - September 2018

Net Sentiment Juli - September 2018

Sentiment	Twitter	Online News	Blogs	Newspaper	Forum Facebook	Instagram	News Agency	Press Release	Total
Positif Positive	29.60%	5.70%	5.90%	7.00%	50.00%	27.70%	3.00%	3.80%	
Negatif Negative	20.40%	46.60%	46.40%	24.40%	14.30%	25.40%	25.40%	0.00%	
Selisih Difference	9.20%	-40.90%	-40.50%	-17.40%	35.70%	2.30%	-22.40%	3.80%	
% Net Sentiment	18.40%	-78.20%	-77.44%	-55.41%	55.52%	4.33%	-78.87%	100.00%	-111.68%



Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Net Sentiment Oktober - Desember 2018 Net Sentiment Oktober - Desember 2018

Sentiment	Twitter	Online News	Blogs	Newspaper	Forum Facebook	Instagram	News Agency	Press Release	Total
Positif Positive	34.70%	31.90%	18.30%	31.90%	20.00%	29.00%	25.00%	7.10%	
Negatif Negative	12.60%	21.70%	27.70%	24.20%	25.00%	19.40%	31.30%	0.00%	
Selisih Difference	22.10%	10.20%	-9.40%	7.70%	-5.00%	9.60%	-6.30%	7.10%	36.00%
% Net Sentiment	46.72%	19.03%	-20.43%	13.73%	-11.11%	19.83%	-11.19%	100.00%	156.58%

Alokasi anggaran untuk penyaluran dana riset Tahun 2018 adalah sebesar Rp107.000.000.000 dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Kegiatan Promosi sebesar Rp3 miliar
- Pembahasan Proposal Kegiatan Promosi sebesar Rp1,3 miliar
- Dukungan Pendanaan Pomosi kepada Mitra Strategis sebesar Rp54 miliar
- Pembuatan Media Promosi dan Publikasi melalui Media sebesar Rp25 miliar
- Keikutsertaan dalam Event Promosi sebesar Rp13 miliar
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Promosi sebesar Rp9 miliar

Realisasi penyaluran Dana Program Riset Tahun 2018 sebesar Rp25.148.792.536 atau 24% dari Total yang dianggarkan Rp107.000.000.000.

The budget allocation for the distribution of research funds in 2018 is Rp107,000,000,000 with the details of the ceiling of funds as follows:

- Preparation of Promotional Activity Plans of Rp3 billion
- Discussion of Promotional Activity Proposals of Rp1.3 billion
- Promotional Fund to Strategic Partners in the amount of Rp54 billion
- Printing of Promotional Media and Publication of Rp25 billion
- Participation in the Promotion Event amounted to Rp13 billion
- Monitoring and Evaluation of Promotional Activities amounting to Rp9 billion

Realization of 2018 Research Program Funds distribution in the amount of Rp25,148,792,536 or 24% of the total budget of Rp107,000,000,000.

Tabel Beban Promosi BDPKPS Tahun 2018
Table: OPPFMA's Promotional Expense in 2018

2018	Beban Promosi (dalam Rp) Promotional Expense (Rp)					Total Penyaluran Dana Promosi Total Promotional Fund Disbursement
	Event Sawit Palm Event	Perjalanan Dinas Business Trip	Media Promosi Sawit Palm Promotion Media	Bahan Pendukung Promosi Sawit Palm promotional supporting materials	Jasa Profesional Professional fee	
Januari January	174.828.500	-	-	-	-	174.828.500
Februari February	330.000.000	21.342.400	-	20.900.000	14.100.000	386.342.400
Maret March	860.623.000	52.303.269	-	504.685.000	-	1.417.611.269
April April	718.296.000	99.468.921	-	104.536.725	-	922.301.646
Mei May	1.147.888.750	148.019.750	-	192.593.300	-	1.488.501.800
Juni June	727.217.000	2.795.000	-	264.055.000	5.400.000	999.467.000
Juli July	90.458.000	12.039.800	-	-	-	102.497.800
Agustus August	263.629.125	-	-	169.671.500	-	433.300.625
September September	1.250.000.000	104.516.500	49.280.000	175.230.000	-	1.579.026.500
Oktober October	2.575.455.900	145.384.730	24.640.000	155.055.500	-	2.900.536.130
November November	2.089.035.784	250.531.502	-	532.520.100	-	2.872.087.386
Desember December	6.482.845.716	4.206.703.849	492.180.000	690.561.915	-	11.872.291.480
Total	16.710.277.775	5.043.105.721	566.100.000	2.809.809.040	19.500.000	25.148.792.536

Persentase Tindak Lanjut Program Kemitraan Percentage of Follow-up to the Partnership Program

Pengukuran IKU ini berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kemitraan yang ditindaklanjuti BDPKPS. Bentuk tindak lanjut dapat berupa kegiatan promosi sawit, kegiatan diplomasi dan advokasi sawit, pelaksanaan kajian/survei, usulan atau konsep kebijakan/regulasi terkait sawit dan lain-lain.

The KPI assessment is based on the number of recommendations of partnership activities that are followed up by OPPFMA. The follow-up may be in the form of palm oil promotional activities, palm oil diplomacy and advocacy activities, studies/surveys, proposals or policies/regulations concept related to palm oil, etc.



Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Adapun rekomendasi dapat berasal dari Kementerian/ Lembaga, Asosiasi Sawit, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi Sawit, Perusahaan Sawit, serta Lembaga Kemasyarakatan dan *Civil Society* yang berkenaan aspek promosi sawit yaitu: Peningkatan Citra Produk Sawit, Penyediaan Informasi Pasar Sawit, Perluasan Pasar Ekspor Sawit, Peningkatan Investasi Perkebunan Sawit, dan Menumbuhkembangkan Pusat Pemasaran Komoditas Perkebunan Sawit.

Rekomendasi juga dapat berhubungan dengan penanganan isu-isu sawit yang mencakup: *Sustainability* produk sawit dan turunannya, Aspek Lingkungan Perkebunan Sawit, Peningkatan Produktifitas Sawit, Aspek Kesehatan dan Keamanan Pangan Produk Sawit, dan/atau Aspek Pemasaran produk Kelapa Sawit dan Turunannya.

Untuk tahun 2018, target jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 20 rekomendasi. Adapun untuk triwulan IV, target capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Kegiatan Kemitraan sebesar 60% atau sebanyak 12 kegiatan. Adapun realisasi tindak lanjut rekomendasi s.d triwulan IV adalah sebanyak 15 rekomendasi atau presentase 75%.

Alokasi anggaran untuk penyaluran dana riset Tahun 2018 adalah sebesar Rp107.000.000.000 dengan rincian pagu dana sebagai berikut:

- Kerjasama dan Diplomasi Internasional sebesar Rp 46 miliar
- Kerjasama Pengembangan Sawit Dalam Negeri sebesar Rp 36 miliar
- Dukungan dana kemitraan sebesar Rp 22 miliar

Realisasi penyaluran Dana Program Riset Tahun 2018 sebesar Rp31.416.363.157 atau 29% dari Total yang dianggarkan Rp107.000.000.000.

The recommendations can be from Ministries/Institutions, Palm Oil Associations, Palm Oil Small and Medium Enterprises (SMEs) and Cooperatives, Palm Oil Companies, as well as Community and Civil Society Organizations with aspects of palm promotion: Palm Oil Product Image Improvement, Provision of Palm Oil Market Information, Expansion of Palm Oil Export Market, Increasing Investment in Palm Oil Plantations, and Establishing Palm Oil Commodity Marketing Centers.

Recommendations may relate to handling of palm oil issues, which include: Sustainability of palm oil products and its derivatives, Environmental Aspects of Palm Oil Plantation, Increased Productivity of Palm Oil, Health and Food Safety of Palm Products, and/or Marketing Aspects of Palm Oil Products and Its Derivatives.

In 2018, 20 recommendations were followed-up. In Q4 2018, the KPI achievement target for Follow-up of Partnership Activities is 60% or 12 activities. The realization of the follow-up recommendations in Q4 is 15 recommendations or 75%.

The budget allocation for the distribution of research funds in 2018 is Rp107,000,000,000 with the details of the ceiling of funds as follows:

- International Cooperation and Diplomacy of Rp46 billion
- Domestic Palm Oil Development Cooperation of Rp36 billion
- Partnership fund support of Rp22 billion

Realization of 2018 Research Program Fund Disbursement amounted to Rp31,416,363,157 or 29% of the total budget of Rp107,000,000,000.

Tabel Beban Kemitraan BDPKPS Tahun 2018
Table: OPPFMA's Partnership Expense in 2018

2018	Beban Kemitraan (dalam Rp) Partnership Expense (Rp)				Total Total
	Kemitraan Partnership	Perjalanan Dinas Business Trip	Bahan Pendukung Supporting Material	Jasa Profesional Professional Fee	
Januari January	-	-	-	-	0
Februari February	349.900.000	973.479.211	-	-	1.323.379.211
Maret March	-	201.056.953	-	22.900.000	223.956.953
April April	1.000.000	401.271.447	-	-	402.271.447
Mei May	721.932.359	808.923.442	-	41.335.000	1.572.190.801
Juni June	241.233.000	1.517.940.317	34.771.000	46.700.000	1.840.644.317
Juli July	100.000.000	694.605.154	133.845.000	-	928.450.154
Agustus August	971.275.819	896.611.805	5.500.000	10.000.000	1.883.387.624
September September	2.086.441.400	116.349.656	14.250.000	-	2.217.041.056
Oktober October	826.662.625	494.782.098	261.720.000	38.500.000	1.621.664.723
November November	4.332.256.177	1.362.166.242	667.672.000	3.400.000	6.365.494.419
Desember December	6.168.371.832	5.965.874.351	734.086.269	169.550.000	13.037.882.452
Total	15.799.073.212	13.433.060.676	1.851.844.269	332.385.000	31.416.363.157

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana yang Akuntabel

Accountability to Fund Management

Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan laporan Keuangan

Timeliness of Preparation of Financial Statements

- | | |
|---|--|
| <p>a. IKU Indeks ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan diukur tiap semesteran;</p> <p>b. Penyampaian laporan keuangan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya;</p> | <p>a. KPI of the timeliness of financial statement preparation is measured every six months;</p> <p>b. Financial statements must be submitted no later than the 20th of the following month;</p> |
|---|--|



Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

- | | |
|---|--|
| <p>c. Laporan keuangan BPDP Sawit berdasarkan SAP dan SAK disusun setiap bulan;</p> <p>d. Implementasi SAKTI pada penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAP;</p> <p>e. Penggunaan aplikasi e-rekon untuk rekonsiliasi Laporan Keuangan SAP.</p> | <p>c. OPPFMA's financial statements based on SAP and SAK are prepared monthly;</p> <p>d. SAKTI implementation in the preparation of Financial Statements based on SAP;</p> <p>e. Utilizing e-rekon application for reconciliation of SAP Financial Statements.</p> |
|---|--|

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang telah Ditindaklanjuti Percentage of Recommendations from BPK and APIP Audit Results that Have Been Followed-Up

- | | |
|--|--|
| <p>a. LHP DTT atas Pengelolaan Keuangan BDPKS untuk tahun 2015 - 2017 baru diterima oleh BDPKS dari BPK RI akhir Maret 2018 sehingga penyelesaian tindak lanjut atas LHP tersebut mundur 1 triwulan dari rencana semula.</p> | <p>a. LHP DTT on the Financial Management of OPPFMA for 2015-2017 was received by OPPFMA from BPK RI at the end of March 2018. Therefore, the completion of the follow-up to the LHP was delayed by 1 quarter from the original plan.</p> |
| <p>b. Penyelesaian tindak lanjut atas atas LHP DTT banyak bergantung dengan instansi lain di luar BDPKS bahkan diluar Kementerian Keuangan sehingga berisiko terhadap terlambatnya penyelesaian tindak lanjut LHP DTT</p> | <p>b. Follow-up completion on LHP DTT depends on external agencies outside OPPFMA, and external parties of the Ministry of Finance. Thus, there is a risk of late completion of LHP DTT</p> |
| <p>c. Temuan yang merekomendasikan untuk pengembalian dana ke kas BDPKS, diperlukan usaha yang maksimal bagi BDPKS untuk menagih pihak-pihak yang terkait agar mengembalikan/menyetorkan kelebihan atas temuan dimaksud ke kas BDPKS. Contoh: temuan pengembalian PPh 21, temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri, dan temuan kelebihan pembayaran ongkos angkut biodiesel.</p> | <p>c. Findings that must be followed-up by returning funds to OPPFMA need maximum effort. OPPFMA must charge the parties concerned to return/deposit the excess of such findings to OPPFMA. For example, the finding returns on Income Tax Article 21, findings on overpayment of overseas business trips, and findings on overpayment of biodiesel freight costs.</p> |

SDM yang Kompetitif Competitive HR

Rata-rata Hard Competency Pegawai Average of Employees' Hard Competency

- | | |
|---|---|
| <p>a. Capaian IKU Rata-rata nilai <i>hard competency</i> pegawai diukur dalam periode tahunan yang dilaksanakan pada triwulan IV. Pengukuran dilakukan dengan memberikan soal untuk semua pegawai secara <i>online</i>.</p> | <p>a. KPI Achievements on the Average of employees' hard competency is assessed annually, conducted in Q4. The assessment was conducted by providing questions to all employees online.</p> |
|---|---|

- b. Soal hard competency berupa pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan tugas perkantoran sehari-hari, pemahaman peraturan dan *update* terkini atas tugas-tugas di BDPKS.
- c. Rata-rata nilai *hard competency* pegawai BDPKS pada tahun 2018 ialah sebesar 89.

- b. Hard competency is in the form of employees' understanding of the daily office duties, understanding of regulations and the latest updates of their duties in OPPFMA.
- c. The average of employees' hard competency of OPPFMA in 2018 is 89.

Organisasi yang Kondusif Conducive Organization

Persentase Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Percentage of Risk Management Application Maturity

Dalam penilaian IKU Kematangan Penerapan Manajemen Risiko, BDPKS menggunakan pengukuran yang ditetapkan PMK 191/PMK.09/2008 terdapat Matriks Kematangan penerapan manajemen risiko.

In the KPI assessment of the Maturity of Risk Management Application, OPPFMA uses the measurement determined by PMK 191/PMK.09/2008, which is the Maturity Matrix for the risk management application.

Kolom Vertikal mengenai Tingkat Kematangan yaitu kriteria Belum Sadar Risiko sampai dengan Dapat Menangani Risiko, sedangkan Kolom Horizontal parameter penilaian Kepemimpinan sampai dengan Hasil Penerapan Manajemen Risiko.

The Vertical Column on the Maturity Level is the assessment of Risk Awareness up to Handling the Risk. The Horizontal Column parameter is the Leadership assessment up to the Implementation of Risk Management.





Analisis Kinerja Operasional Operational Performance Analysis

Tahun 2016 usulan target IKU MR ditetapkan 35%. Realisasi 60% dikarenakan pencapaian dimulai Pembuatan Pedoman MR, training pegawai belum sadar risiko sampai pegawai sudah mendapatkan Risiko yang Ditetapkan (*Risk Defined*) pada Profil Risiko yang sudah dibuat. Pada Tahun 2017 usulan target IKU MR 75%. MR sudah dapat melakukan Aktivitas Penanganan Risiko sehingga ada peningkatan penilaian dari 60% sampai dengan 75%.

Tahun 2018 usulan target IKU MR 75% dikarenakan diawal tahun dilakukan penyempurnaan yang sudah dilakukan berupa Pedoman, Prosedur dengan konsultan external sehingga target tetap sama, sifatnya *review* penyempurnaan yang sudah ada. Peningkatan sudah dapat melakukan laporan berkala triwulanan ke Perben.

IKU Kematangan penerapan manajemen risiko dapat mencapai target apabila pelaksanaan proses pengelolaan risiko di lingkungan BPD PKS yang termasuk penyusunan Profil Risiko BPD PKS setiap tahun, implementasi Pertemuan berkala bulanan dengan komite MR dan penyusunan Laporan Pemantauan Risiko Triwulanan, penyusunan kajian pengelolaan risiko, pelaksanaan kesadaran direktorat (unit pemilik risiko) untuk mengelola risiko, dapat terlaksana dengan baik.

In 2016, the proposed target for Risk Management KPI is 35%. The realization is 60% because the Risk Profile has been created, Risk Management Guidelines for employees (both who are aware of risks and Risk Defined) has also been created. In 2017, the proposed target for Risk Management KPI is 75%. Risk Management has been able to carry out Risk Management Activities. Thus, there is an increase in the assessment from 60% to 75%.

In 2018, the proposed target for Risk Management KPI is 75%. This is because, at the beginning of the year, improvements have been made in the form of Guidelines and Procedures with external consultants. Therefore, the targets remain the same, and the review has the objective to refine the system. Upgrade is in the form of quarterly reports to Perben.

KPI for Risk Management Application Maturity reaches the target if the risk management process within OPFMA includes OPFMA's Annual Risk Profile, monthly Meeting with Risk Management Committee, Quarterly Report of Risk Monitoring, review of risk management, directorate's awareness of risk (risk owners) to manage risk, have been carried out well.

Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal dan Modern Optimum and Modern Facilities and ICT Management

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sesuai Kebutuhan Percentage of Office Infrastructure Provision as Needed

Sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia sesuai kebutuhan akan sangat membantu kelancaran pelaksanaan tugas seluruh pegawai BPD PKS. Sarpras perkantoran tersebut berupa alat elektronik yang secara langsung membantu pelaksanaan pekerjaan pegawai seperti laptop, komputer dan printer maupun yang secara tidak langsung bisa menunjang pelaksanaan pekerjaan seperti televisi, dispenser, dan loker.

Office facilities and infrastructure availability in accordance with the needs will greatly assist the duties of all OPFMA's employees. Office infrastructure is in the form of electronic devices that directly assist the employee's works, such as laptops, computers, and printers, or indirectly assist the employees' works, such as televisions, dispensers, and lockers.

IKU Presentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan diukur tiap triwulan. Capaian IKU pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 100%. Hasil tersebut didapat dari realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebanyak 21 unit dari target 21 unit dalam setahun.

KPI for office facilities and infrastructure provision according to needs is measured quarterly. KPI in Q4 2018 amounted to 100%. The results were due to fulfillment of 21 units of facilities and infrastructure out of 21 target units in a year.

Persentase Modernisasi Pengelolaan BLU

Percentage of Public Service Agency Modernization Management

IKU modernisasi pengelolaan BLU dihitung secara tahunan yang diselesaikan pada akhir tahun. Sampai dengan saat ini, di BDPKS telah menyelesaikan seluruh tahapan pada proses modernisasi, yaitu:

- update* data pada aplikasi BIOS;
- website* yang *up to date*;
- database* telah terpusat;
- adanya *webservice* yang terhubung dengan kantor pusat;
- tersedianya aplikasi pembayaran yang terintegrasi;
- adanya *dashboard*.

KPI for the modernization of public service agency management is calculated on an annual basis, which is completed at the end of the year. To date, OPFMA has completed all stages of the modernization process:

- data update in the BIOS application;
- up to date website;
- centralized database;
- web services that are connected to the central office;
- availability of integrated payment applications;
- dashboard.

Pengelolaan Anggaran yang Optimal Optimum Budget Management

Pengelolaan Anggaran yang Optimal Optimum Budget Management

- Anggaran internal BDPKS ditetapkan sebesar 1.25% dari pagu total DIPA
- Pagu dana untuk anggaran internal sebesar Rp177.000.000.000
- Kualitas pelaksanaan anggaran internal diukur melalui persentase penyerapan anggaran internal ditambah dengan persentase keluaran (output)
- Terdapat 2 *output* dalam anggaran internal, yaitu:
 - output 003 (layanan dukungan manajemen)
 - output 951 (layanan internal)

- OPPFMA's internal budget is set at 1.25% of the total DIPA ceiling
- Fund ceiling for internal budget is Rp177,000,000,000
- The quality of internal budget execution is measured by the percentage of internal budget absorption and the output percentage
- There are 2 outputs in the internal budget:
 - output 003 (management support services)
 - output 951 (internal service)

Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, realisasi capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran internal sebesar 75%.

As of Q4 2018, the realization of KPI's achievement of the quality of the internal budget execution was 75%.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Analisis Operasi Per Aktivitas Usaha

Operation Analysis Per Business Activity



Berdasarkan Peraturan Presiden No.61 Tahun 2015 Pasal 20, kegiatan operasional BDPKS mencakup enam aktivitas yaitu melakukan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan dana, pengelolaan dana, penyaluran penggunaan dana, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Pelaksanaan kegiatan operasional BDPKS tersebut di bawah tanggung jawab lima Direktorat yang berkoordinasi dengan Direktur Utama. Keenam aktivitas tersebut dilaksanakan secara maksimal oleh BDPKS untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit nasional terutama sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Based on Presidential Regulation No.61 of 2015 Article 20, OPPFMA's operations include six activities, i.e. planning and budgeting, fundraising, fund management, fund disbursement, administering and accountability, and monitoring. The OPPFMA's operations are under the responsibility of five Directorates, who coordinate with the President Director. The six activities are carried out optimally by OPPFMA to support the development of the national palm oil industry, especially as an effort to increase prices, strengthen downstream industries, and build sustainable palm oil commodities.



Kegiatan Operasional BDPKS OPPFMA's Operations



Perencanaan dan Penganggaran Planning and Budgeting

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses awal yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi tentang gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan oleh BDPKS tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Tahunan (RBT) Tahun 2019;
2. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2019;
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2019.

Planning and budgeting is an initial process based on facts and assumptions about the description of activities to be carried out in achieving certain objectives. The planning and budgeting activities that have been carried out by OPPFMA in 2018 are as follows:

1. Preparation of the Annual Business Plan (RBT) in 2019;
2. Preparation of Business and Budget Plan (RBA) in 2019;
3. Formulation of Ministries/Institutions (RKA-K/L) Budget Work Plans in 2019.

Penghimpunan Dana Fund Raising

Sumber penghimpunan dana yang dilakukan BPDPKS terdiri dari Pelaku usaha perkebunan sawit dan turunannya, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah. Pelaku usaha perkebunan sawit dikenakan pungutan atas ekspor hasil perkebunan kelapa sawit dan iuran. Besarnya iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan BPDPKS dengan pelaku usaha. Iuran diterapkan secara berkala atau sewaktu-waktu dan hanya dikenakan untuk perusahaan perkebunan sawit bukan pekebun. Dana lembaga pembiayaan berupa pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Dana masyarakat berasal dari perseorangan, asosiasi, dan/atau lembaga masyarakat yang tidak mengikat. Dana yang diperoleh dari sumber lain yang sah berupa hibah, bantuan yang tidak mengikat dari pihak lainnya, dan/atau hasil pengelolaan Dana.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana BPDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Penghimpunan Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran *Crude Palm Oil* dan Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan. Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran *Crude Palm Oil* mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya ekspor *Crude Palm Oil* dan iuran berkala dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya dari ekspor produk turunan kelapa sawit dan iuran berkala dari pelaku usaha industri berbahan baku kelapa sawit.

Sampai dengan 31 Desember 2018, BPDPKS berhasil menghimpun dana sebesar Rp14.413.921.271.119 dengan volume sebanyak 40.291.489,70 ton. Jumlah penghimpunan dana ini meningkat 1,31% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp14.227.241.158.165.

Funding sources collected by OPPFMA consist of palm oil entrepreneurs and their derivatives, funds from funding institutions, community funds, and/or other legitimate funds. Palm oil entrepreneurs are subject to duties on exports of palm oil plantations products and contributions. The amount of contribution is determined based on the agreement of OPPFMA with the entrepreneurs. Contributions are applied periodically or at any time and are only charged to palm oil plantation companies, not farmers. Funds from funding institutions are in the form of financing from banks and/or non-bank financial institutions. Community funds come from non-binding individuals, associations and/or community institutions. Funds from other legitimate sources are in the form of grants, non-binding assistance from other parties, and/or return from Fund management.

The OPPFMA fundraising is under the responsibility of the Directorate of Fund Collection, which is carried out by the Crude Palm Oil Fund Collection and Contribution, and Palm Oil Derivative Product Fund Collection and Contribution. Crude Palm Oil Fund Collection and Contribution has the duty to collect and raise Funds in the form of Crude Palm Oil export costs and periodic contributions from palm oil plantation businesses. Palm Oil Derivative Product Fund Collection and Contribution has the duty to collect and raise Funds in the form of export costs from the export of palm oil derivative products and periodic contributions from business operators of palm-based raw materials.

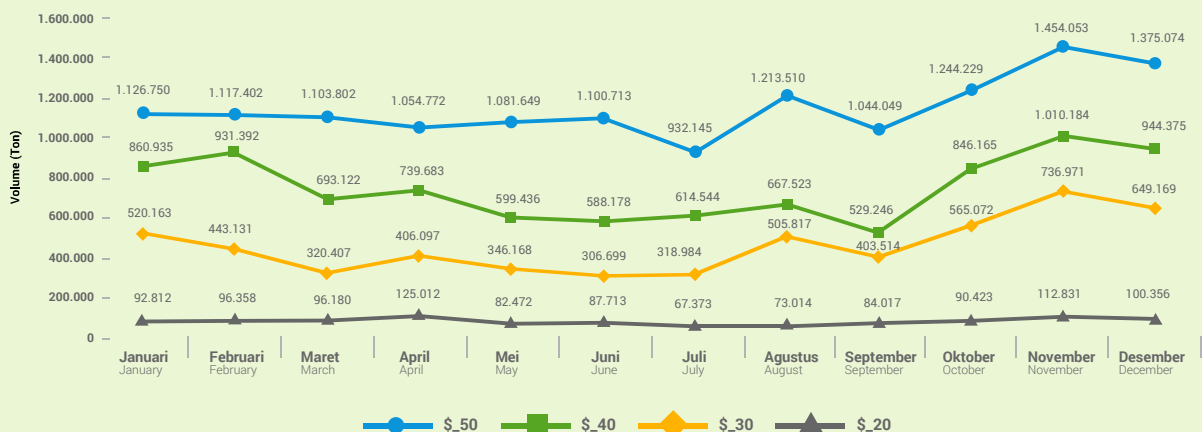
As of 31 December 2018, OPPFMA succeeded in raising funds amounting to Rp14,413,921,271,119, with a volume of 40,291,489.70 tons. The amount of funds collected increased by 1.31% compared to 2017, which was Rp14,227,241,158,165.



Analisis Operasi Per Aktivitas Usaha Operation Analysis Per Business Activity

Berikut disajikan besarnya volume ekspor kelapa sawit berdasarkan besaran pungutan.

The following is the amount of palm oil export volume based on the amount of duties.



Pungutan \$50 Pungutan \$50	Pungutan \$40 Pungutan \$40	Pungutan \$30 Pungutan \$30	Pungutan \$20 Pungutan \$20	Pungutan \$10 Pungutan \$10	Pungutan \$3 Pungutan \$3
Crude Palm Oil (CPO)	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/ atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam	Buah Sawit, Biji Sawit, Dan Kernel Kelapa Sawit	Tandan Kosong Sawit	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel >= 50 mesh
Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/ atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam	RBD Palm Oil	Tandan Kosong Sawit	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel >= 50 mesh
Crude Palm Olein			RBD Palm Stearin		
Crude Palm Stearin			RBD Palm Kernel Oil		
Crude Palm Kernel Olein		Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas >= 70%	RBD Palm Kernel Olein		
Crude Palm Kernel Stearin		Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas >= 70%	RBD Palm Kernel Stearin		
		Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas >= 70%	RBD Palm Olein dalam Kemasan Bermerk dan dikemas dengan berat netto > 25kg		
		Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas >= 70%	RBD Palm Olein dalam Kemasan Bermerk dan dikemas dengan berat netto > 25kg		
		(RBD) Palm Olein	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5% Volume		
			Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5% Volume		
			Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit		
			Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit		

Pengelolaan Dana Fund Management

Pengelolaan atas dana yang dihimpun digunakan untuk aktivitas pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BDPKPS dalam rangka pengembangan perkebunan sawit dan pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. BDPKPS menetapkan prioritas penggunaan dana untuk masing-masing kegiatan tersebut dengan memperhatikan program Pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BDPKPS di bawah tanggung jawab Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Pengembangan Biodiesel, Divisi *Replanting, Reforestation* dan Promosi Perkebunan; dan Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. Divisi Pengembangan Biodiesel mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait pengembangan biodiesel.

Divisi *Replanting, Reforestation* dan Promosi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengdolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait peremajaan perkebunan, *reforestation*, dan promosi perkebunan. Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pengalokasian Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data terkait pendidikan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

Management of funds raised is utilized for palm oil plantations human resource development, research and development of palm oil plantations, promotion of palm oil plantations, replantation of palm oil plantations, and facilities and infrastructure for palm oil plantations. OPPFMA carries out such activities to develop the palm plantations and fulfill the palm oil plantations products for food needs, downstream the palm oil plantation industry, and supply and utilize the biodiesel fuels. OPPFMA sets priorities for the use of funds for every activity, by taking into account the Government's programs and Steering Committee policies.

OPPFMA fund management is the responsibility of the Directorate of Fund Planning and Management, which is carried out by the Biodiesel Development Division, Replanting, Reforestation, and Plantation Promotion Division; and the Human Resources Education, Research and Development, and Facilities and Infrastructure Development. Biodiesel Development has the duties to plan fund allocation, prepare fund disbursement plans, research and manage data related to biodiesel development.

Replanting, Reforestation, and Promotional Plantations has the duties to plan fund allocation, manage funding cooperation, prepare fund disbursement plan, research and manage data related to plantation replantations, reforestation, and promotion. Human Resources Education, Research and Development, and Facilities and Infrastructure Development has the task to allocate Funds, manage funding collaboration, prepare fund disbursement plan, research and manage data related to human resource education, research and development, and development of facilities and infrastructure.



Penyaluran dan Penggunaan Dana Fund Disbursement and Utilization

Penyaluran dan penggunaan dana merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana pengelolaan dana yang diuraikan di atas. Penggunaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan fasilitasi. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Penggunaan dana untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan lembaga riset yang fokus pada teknologi, sektor industri, inovasi produk, skema pembiayaan, pengetahuan pasar, dan adopsi lingkungan.

Penggunaan dana untuk promosi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan sawit sebagai produk yang mempunyai nilai strategis. Pelaksanaan promosi tersebut dapat meningkatkan citra nilai produk, informasi pasar, memperluas pasar, meningkatkan investasi, menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan sawit. Penggunaan dana untuk peremajaan perkebunan sawit dilaksanakan sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sawit maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

The fund disbursement and utilization are carried out in the same manner as the fund management described above. The fund for the human resources development for palm oil plantations is carried out to increase knowledge, skills, professionalism, independence and competitiveness; and improve technical, managerial, and entrepreneurial skills. Human resource development is carried out through counseling, education, training, and facilitation assistance. Human resource development is carried out by formal and non-formal educational institutions.

The fund for research and development of palm oil plantations is carried out to increase knowledge about breeding, cultivation, post-harvest, and processing of products, industry, markets, value chains of plantation products from upstream to downstream, and the potential for business development. This activity is carried out through the establishment and strengthening of research institutes that focus on technology, industrial sector, product innovation, financing schemes, market knowledge, and environmental adoption.

The fund for promotion is carried out to increase knowledge of the significance of palm oil plantations as products with strategic value. Promotion improves the image of product value, market information, expands markets, increases investment, grows the marketing center of palm oil commodities. The fund for replantation of palm oil plantations is carried out as an effort to increase the productivity of palm oil plantations and maintain the area of palm oil plantations to be utilized optimally.

Penggunaan dana untuk sarana dan prasarana perkebunan sawit dilakukan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain benih; pupuk; pestisida; alat pasca panen dan pengolahan hasil; jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; alat transportasi; mesin pertanian; pembentukan infrastruktur pasar; dan verifikasi atau penelusuran teknis.

Pelaksanaan kegiatan penyaluran dan penggunaan dana BDPKS di bawah tanggung jawab Direktorat Penyaluran Dana yang dilaksanakan oleh Divisi Program Pelayanan dan Divisi Unit Penyaluran. Divisi Program Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penyaluran Dana, penilaian dan verifikasi terhadap proposal permohonan Dana, pengembangan Dana, penetapan usulan calon penerima Dana. Divisi Unit Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi penyaluran Dana, menjalankan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan penyimpanan Dana, dan laporan realisasi penyaluran Dana.

The fund for facilities and infrastructure for palm oil plantations is carried out to increase production, productivity, and quality of plantation products. Facilities and infrastructure consist of seeds, fertilizers, pesticides, post-harvest equipment, and processing, garden roads and access roads to public roads and/or ports, transportation equipment, agricultural machinery, the establishment of market infrastructure and verification or technical tracking.

OPPFMA's fund disbursement and utilization is the responsibility of the Directorate of Fund Disbursement, which is carried out by the Service Program Division and the Disbursement Unit Division. Service Program has the duties to compile plan for fund disbursement, evaluate and verify proposals for Fund requests, develop Funds, determine proposals of prospective Fund recipients. Disbursement Unit has the duties to conduct Fund disbursement to finance development, monitoring, and evaluation of Fund disbursement, perform custodial functions of Funds, including recording, monitoring, and reporting of Funds storage, and reports on the realization of Funds disbursement.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Administration and Accountability

Penatausahaan dan pertanggungjawaban senantiasa dilaksanakan oleh setiap pimpinan BDPKS dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan BDPKS serta dengan instansi lain di luar BDPKS sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, berkoordinasi dengan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Selain itu, setiap pimpinan juga wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Administration and accountability are carried out by each OPPFMA's leader, by applying the principles of coordination, integration, and synchronization, within and between organizational units in OPPFMA, as well as with external agencies in accordance with their respective duties. Each organizational unit leader is responsible for leading, coordinating with their subordinates, and providing guidance and assistance for the subordinate tasks. In addition, each leader must also comply with instructions and be responsible to their respective superiors and submit regular reports on time.



Pertanggungjawaban diwujudkan dengan kegiatan penyampaian laporan kepada atasan yang tembusannya wajib disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Laporan tersebut diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut sebagai petunjuk kepada bawahan. Para Direktur dan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama yang selanjutnya akan memerintahkan pejabat terkait untuk melaksanakan penatausahaan.

Accountability is actualized by reporting activities to superiors whose copies must be submitted to the leader of other organizational units with a working relationship. The report is processed and used as material to compile further reports as a guide to subordinates. The Directors and the Head of the Internal Audit Unit submit a report to the President Director who will then instruct the relevant officials to carry out the administration.

Pengawasan Supervision

BDPKPS melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit. Hasil pungutan tersebut disampaikan oleh BDPKPS kepada Menteri Keuangan yang disertai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa denda jika kewajiban Pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit tidak dipenuhi. Besarnya denda yang dibayarkan sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan menggunakan mata uang Rupiah. BDPKPS juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menunjuk surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis dalam pelaksanaan pembayaran pungutan tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam bentuk laporan surveyor.

OPPFMA supervises the implementation of mandatory levies on palm oil commodity exports. The levies obtained were submitted by OPPFMA to the Minister of Finance, accompanied by recommendations for the imposition of administrative sanctions in the form of fines in the event that the mandatory levy on palm oil plantation commodities exports were not fulfilled. The amount of the fine paid shall be in accordance with the rate set by the Minister of Finance using the Rupiah currency. OPPFMA coordinates with the Ministry of Trade to appoint surveyors in conducting verification or technical inquiry in the payment of export duties to comply with statutory provisions. The verification results that have been carried out by the surveyors as referred to are in the form of the surveyor's report.

Analisis Kinerja Keuangan

Financial Performance Analysis

Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Statements

Posisi keuangan BDPKPS tahun 2018 terdiri dari Aset sebesar Rp20.971.433.886.205, Liabilitas sebesar Rp8793.713.883.878 dan Ekuitas sebesar Rp20.971.433.886.205.

In 2018, OPFFMA's financial position consisted of Assets amounting to Rp20,971,433,886,205, Liabilities amounting to Rp8,793,713,883,878, and Equity amounting to Rp20,971,433,886,205.

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2018 (Rp)
Table: Financial Position in 2018 (Rp)

ASET ASSETS Rp.20.971.433.886.205	LIABILITAS LIABILITIES Rp.879.713.883.878	EKUITAS EQUITY Rp.20.971.433.886.205
--	--	---

Aset

Assets

Jumlah Aset BDPKPS tahun 2018 adalah sebesar Rp20.971.433.886.205 meningkat 76,74% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11.865.868.411.275. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tingginya pendapatan pungutan dan pengelolaan dana, serta berkurangnya selisih harga biodiesel yang menyebabkan beban biodiesel yang lebih kecil dari periode sebelumnya sehingga terjadi peningkatan aset yang signifikan.

In 2018, OPFFMA Total Assets amounted to Rp20,971,433,886,205, increased by 76.74% compared to 2017, which was Rp11,865,868,411,275. The increase was mainly due to high collection fees and fund management, as well as reduced biodiesel price differences which led to smaller biodiesel liabilities compared to the previous period, resulting in a significant increase in assets.



Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

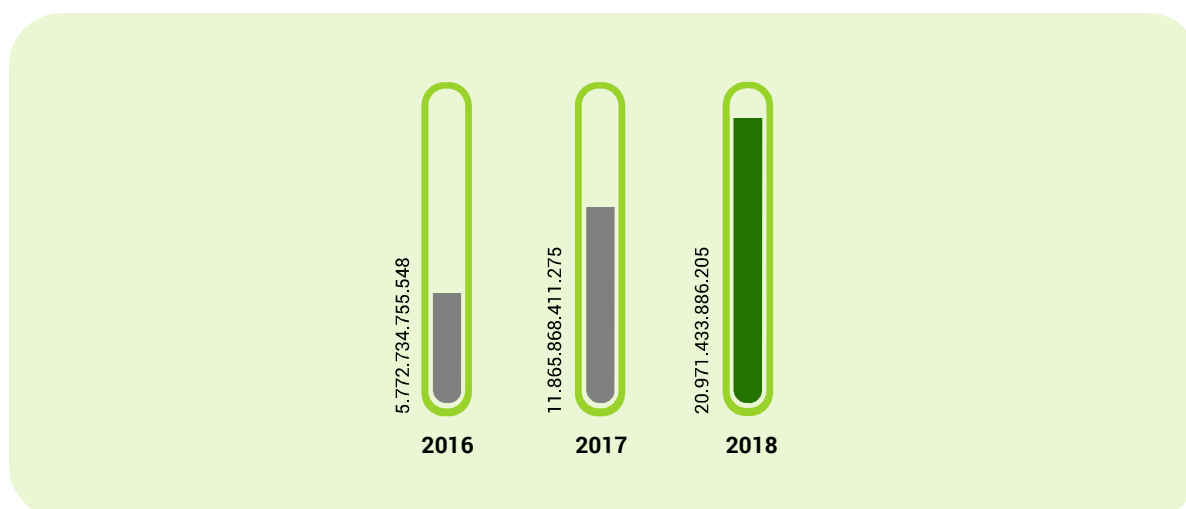
Tabel Aset Tahun 2016-2018 (Rp)

Table: Assets in 2016-2018 (Rp)

Uraian Description		2016	2017	2018	Perubahan (%) Delta (%)
Aset	Assets	5.772.734.755.548	11.865.868.411.275	20.971.433.886.205	76,74
Aset Lancar	Current Assets	5.757.640.522.316	11.851.159.824.294	20.959.252.287.096	76,85
Kas dan setara kas	Cash and Cash Equivalents	5.729.108.049.237	3.186.919.095.885	20.922.802.360.212	556,52
Investasi jangka pendek	Short-term investment	-	8.643.092.784.654	-	-
Piutang	Receivables	25.294.448.346	17.398.545.399	32.075.041.641	84,35
Aset Lancar lainnya	Other Current Assets	3.238.024.733	3.749.398.356	4.374.885.243	16,68
Aset Tidak Lancar	Non-Current Assets	15.094.233.232	14.708.586.981	12.181.599.109	(17,18)
Aset tetap - bersih	Fixed assets - net	13.975.498.859	12.929.303.608	11.130.486.041	(13,91)
Aset tidak lancar lainnya	Other non-current assets	1.118.734.373	1.779.283.373	1.051.113.068	(40,92)

Grafik Aset Tahun 2016-2018 (Rp)

Graph: Assets in 2016-2018 (Rp)



Aset Lancar

Current Assets

Aset lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang dan Aset Lancar Lainnya. Jumlah Aset Lancar BDPKPS pada tahun 2018 adalah sebesar Rp20.959.252.287.096 meningkat 76,85% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11.851.159.824.294. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas karena tingginya pendapatan dan penurunan beban.

Kas dan setara kas tahun 2018 sebesar Rp20.922.802.360.212 meningkat 556,52% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp3.186.919.095.885. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tingginya pendapatan pungutan dan pengelolaan dana, serta berkurangnya selisih harga biodiesel yang menyebabkan beban biodiesel yang lebih kecil dari periode sebelumnya sehingga terjadi peningkatan aset yang signifikan.

Piutang BDPKPS tahun 2018 utamanya adalah dari piutang bunga deposito. Piutang tahun 2018 sebesar Rp32.075.041.641 meningkat 84,35% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp17.398.545.399. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dana kelolaan BDPKPS karena peningkatan kas dan setara kas.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Aset tidak lancar terdiri dari Aset tetap dan Aset tidak lancar lainnya. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 adalah sebesar Rp12.181.599.109 menurun 17,18% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp14.708.586.981. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena hanya terdapat sedikit pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud dan tergerus oleh penyusutan dan amortisasi.

Current assets consist of Cash and cash equivalents, Short-term investments, Receivables, and Other Current Assets. In 2018, OPPFMA's Current Assets amounted to Rp20,959,252,287,096, increased by 76.85% compared to 2017, which was Rp11,851,159,824,294. The increase was mainly due to an increase in cash and cash equivalents due to high income and decreased expenses.

Cash and cash equivalents in 2018 amounted to Rp20,922,802,360,212, increased by 556.52% compared to 2017, which was Rp3,186,919,095,885. The increase was mainly due to high collection fees and fund management, as well as reduced biodiesel price differences which led to smaller biodiesel liabilities compared to the previous period, resulting in a significant increase in assets.

OPPFMA's Receivables in 2018 consisted mostly of receivable from time deposits. Receivables in 2018 amounting to Rp32,075,041,641, increased by 84.35% compared to 2017, which was Rp17,398,545,399. The increase was mainly due to an increase in OPPFMA's managed funds because of the increase in cash and cash equivalents.

Non-current assets consist of Fixed assets and Other non-current assets. In 2018, total non-current assets amounted to Rp12,181,599,109, decreased by 17.18% compared to 2017, of Rp14,708,586,981. The decrease was mainly due to the small purchases of fixed assets and intangible assets which were eroded by depreciation and amortization.



Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

Aset tetap tahun 2018 sebesar Rp11.130.486.041 menurun 13,91% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp12.929.303.608. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena hanya terdapat sedikit pembelian aset tetap dan tergerus oleh penyusutan.

Fixed assets in 2018 amounted to Rp11,130,486,041, a decline of 13.91% compared to 2017, which was Rp12,929,303,608. The decrease was mainly due to the small purchases of fixed assets which were eroded by depreciation.

Aset tidak lancar lainnya BDPKS tahun 2018 sebesar Rp1.051.113.068 menurun 40.92% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.779.283.373. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena hanya terdapat sedikit aset tidak berwujud dan tergerus oleh amortisasi.

In 2018, Other non-current assets of OPFMA amounted to Rp1,051,113,068 decreased 40.92% compared to 2017, which was Rp1,779,283,373. The decrease was mainly due to intangible assets that were eroded by amortization.

Liabilitas Liabilities

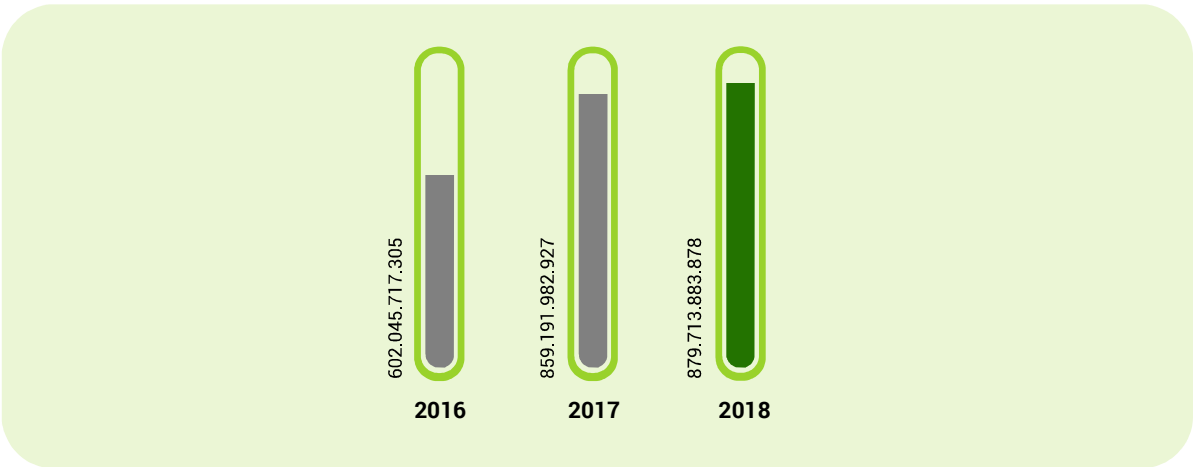
Jumlah Liabilitas tahun 2018 adalah sebesar Rp879.713.883.878 meningkat 2,39% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp859.191.982.927. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh terdapat pengakuan beban peremajaan yang lebih awal yaitu saat diterima rekomendasi teknis dari Ditjen BUN, Kementerian Pertanian.

In 2018, Total Liabilities amounted to Rp879,713,883,878, an increase of 2.39% compared to 2017, which was Rp859,191,982,927. The increase was mainly due to the recognition of an earlier replantation liabilities, when the Company received technical recommendation from the Directorate General of Plantations of the Ministry of Agriculture.

Tabel Liabilitas Tahun 2016-2018 (Rp)
Table: Liabilities in 2016-2018 (Rp)

Uraian Description	2016	2017	2018	Perubahan (%) Delta (%)
Liabilitas Liabilities	602.045.717.305	859.191.982.927	879.713.883.878	2,39

Grafik Liabilitas Tahun 2016-2018 (Rp)
Graph: Liabilities in 2016-2018 (Rp)



Ekuitas
Equity

Ekuitas tahun 2018 sebesar Rp20.091.720.002.327 meningkat 82,54% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp11.006.676.428.348. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tingginya pendapatan pungutan dan pengelolaan dana, serta berkurangnya selisih harga biodiesel yang menyebabkan beban biodiesel yang lebih kecil dari periode sebelumnya sehingga terjadi peningkatan ekuitas yang signifikan.

Equity in 2018 amounting to Rp20,091,720,002,327, increased by 82.54% compared to 2017, which was Rp11,006,676,428,348. The increase was mainly due to high collection fees and fund management, as well as reduced biodiesel price differences which led to smaller biodiesel liabilities compared to the previous period, resulting in a significant increase in equity.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BPDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

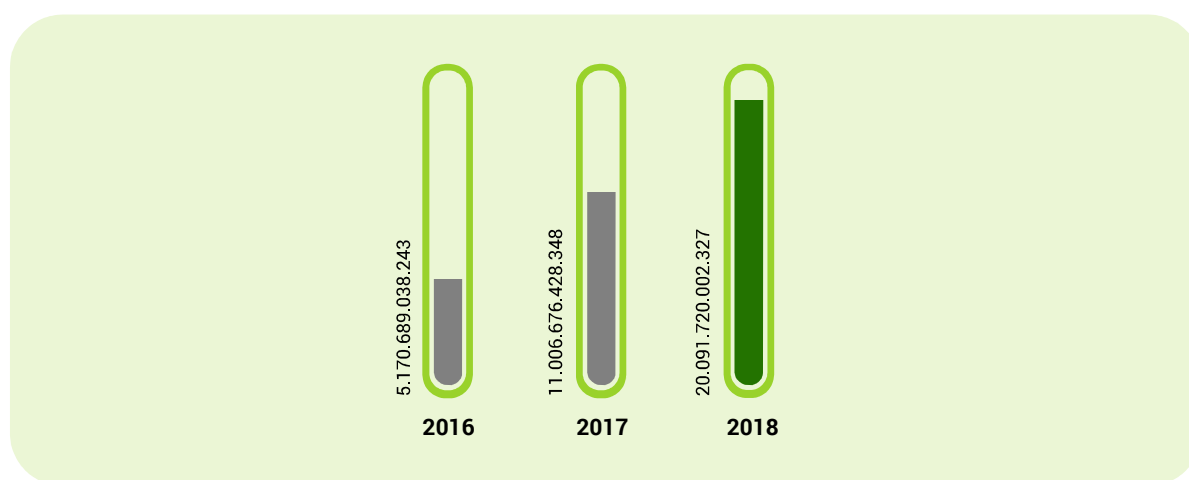
Tabel Ekuitas Tahun 2016-2018 (Rp)

Table: Equity in 2016-2018 (Rp)

Uraian Description		2016	2017	2018	Perubahan (%) Delta (%)
Ekuitas	Equity	5.170.689.038.243	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327	82,54

Grafik Ekuitas Tahun 2016-2018 (Rp)

Graph: Equity in 2016-2018 (Rp)



Laporan Aktivitas

Activities

Tahun 2018 BPDPKS membukukan Surplus setelah Setor ke Kas Negara sebesar Rp9.085.043.573.979 naik 55,67% dari tahun 2017 sebesar Rp5.835.998.035.105 kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya pendapatan pungutan dan pengelolaan dana, serta berkurangnya selisih harga biodiesel yang menyebabkan beban biodiesel yang lebih kecil dari periode sebelumnya.

In 2018, OPFMA recorded a Surplus after Deposit to the State Treasury at Rp9,085,043,573,979, increased by 55.67% from 2017, which was Rp5,835,998,035,105. The increase was mainly due to high collection fees and fund management, as well as reduced biodiesel price differences which led to smaller biodiesel liabilities compared to the previous period.

Tabel Laporan Aktivitas Tahun 2016-2018 (Rp)
Table: Activities in 2016-2018 (Rp)

Uraian Description		2016	2017	2018	Perubahan (%) Delta (%)
Pendapatan	Revenues	12.321.204.623.969	14.782.736.571.602	15.422.257.275.263	4,33
Beban	Expenses	(11.577.229.646.947)	(10.946.738.536.497)	6.337.213.701.284	(42,11)
Pengembalian setoran dari kas negara	Refund of deposit ffrom state treasury	-	2.000.000.000.000	-	-
Setoran ke kas Negara	Deposit to the State Treasury	(2.000.000.000.000)	-	-	-
Penyesuaian surplus tahun berjalan	Current year surplus adjustment	(3.027.019.999)	-	-	-
Kenaikan (penurunan) aset neto tidak terikat	Increase (decrease) in unrestricted net assets	(1.259.052.042.977)	5.835.998.035.105	9.085.043.573.979	55,67
Aset neto tidak terikat awal tahun	Unrestricted net assets at the beginning of the year	6.429.730.436.220	5.170.678.393.243	11.006.676.428.348	112,87
Aset neto tidak terikat akhir tahun	Unrestricted net assets at the end of the year	5.170.678.393.243	11.006.676.428.348	20.091.720.002.327	82,54

Pendapatan Revenues

Pendapatan BPDPKS berasal dari Pendapatan operasional jasa layanan yang terdiri dari Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan Pendapatan atas pengelolaan dana.

OPPFMA's income is derived from Operating Income of services consisting of Income from fund collection of oil palm plantations and Income from fund management.

Pada tahun 2018 BPDPKS membukukan pendapatan sebesar Rp15.422.257.275.263 meningkat 4,33% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp14.782.736.571.602. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh tingginya volume ekspor yang menyebabkan kenaikan pendapatan pungutan dan serta dana pengelolaan yang semakin besar yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan pengelolaan dana.

In 2018, OPFMA recorded revenues of Rp15,422,257,275,263, an increase of 4.33% compared to 2017, which was Rp14,782,736,571,602. The increase in revenue was due to the high export volume which caused an increase in fund collection and fund management, resulting in increased fund management revenues.



Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis

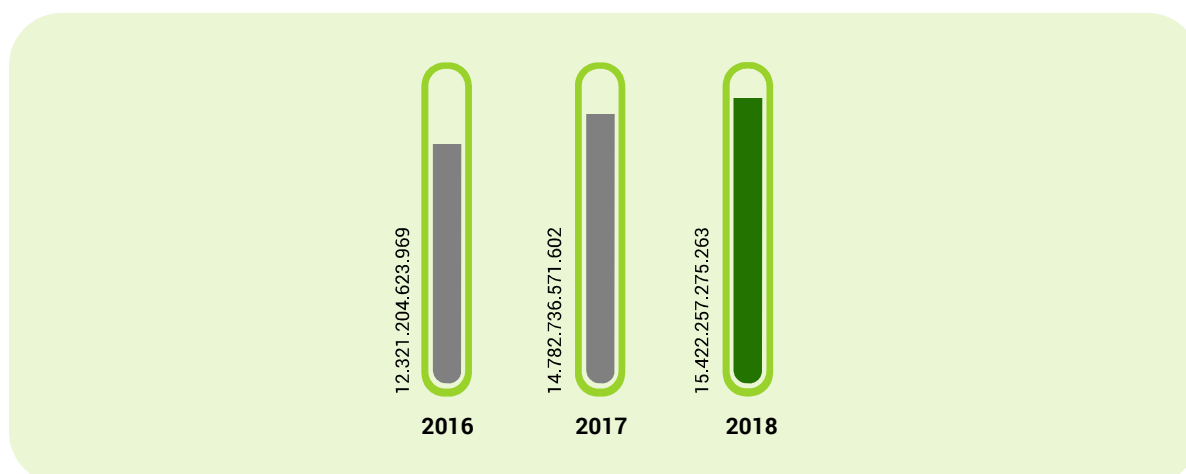
Tabel Pendapatan Tahun 2016-2018 (Rp)

Table: Revenues in 2016-2018 (Rp)

Uraian Description		2016	2017	2018	Perubahan (%) Delta (%)
Pendapatan Operasional Jasa Layanan	Service Operational Revenues				
Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit	Income from fund collection of oil palm plantation	11.690.819.130.021	14.277.241.158.165	14.367.402.955.848	0,63
Pendapatan atas pengelolaan dana	Income from fund management	630.385.493.948	505.120.147.304	1.047.535.154.334	107,38
Pendapatan lainnya	Other income	-	375.266.133	7.319.165.081	1850,39
Jumlah Pendapatan	Total Income	12.321.204.623.969	14.782.736.571.602	15.422.257.275.263	4,33

Grafik Pendapatan Tahun 2016-2018 (Rp)

Graph: Revenues in 2016-2018 (Rp)



Beban Usaha

Operating Expenses

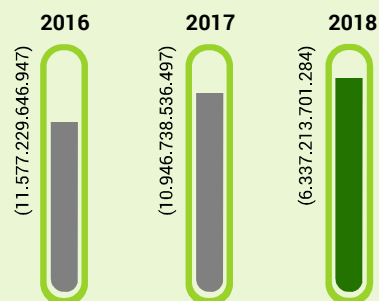
Beban usaha BDPKPS tahun 2018 sebesar Rp6.337.213.701.284 menurun 42,11% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp(10.946.738.536.497). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan selisih harga biodiesel yang menyebabkan penurunan beban pembayaran selisih harga biodiesel.

Operating expenses of OPFMA in 2018 amounted to Rp6,337,213,701,284, decreased by 42.11% compared to 2017, which was Rp(10,946,738,536,497). The decline was mainly due to a decrease in the biodiesel price variance, which caused a decrease in the payment for biodiesel liabilities.

Tabel Beban Usaha Tahun 2016-2018 (Rp)
Table: Operating Expenses in 2016-2018 (Rp)

Uraian Description	2016	2017	2018	Perubahan (%) Delta (%)
Pembayaran selisih harga biodiesel	(11.274.650.587.923)	(10.566.772.566.846)	(4.824.581.966.232)	(54,34)
Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	(9.311.029.449)	(78.296.222.696)	(1.141.435.770.389)	1357,84
Jasa surveyor	(103.108.856.431)	(121.484.745.241)	(130.776.470.674)	7,65
Dana riset	(52.760.887.446)	(37.270.833.248)	(61.660.689.209)	65,44
Promosi kelapa sawit	(35.366.464.339)	(40.042.947.942)	(56.565.155.693)	41,26
Pengembangan SDM kelapa sawit	(44.560.036.252)	(29.059.005.432)	(29.239.304.402)	0,62
Perencanaan dana pengelolaan dana	(601.027.349)	1.979.392.788	(2.290.041.744)	(215,69)
Sarana dan prasarana	-	348.830.956	(873.877.039)	(350,52)
Beban penyaluran dana	(11.520.358.889.189)	(10.875.254.545.149)	(6.247.423.275.382)	(42,55)
Gaji dan tunjangan	(37.470.710.066)	(40.503.522.066)	(43.503.008.279)	7,41
Sewa	(5.964.760.667)	(14.759.656.405)	(15.874.460.153)	7,55
Jasa profesional	(2.916.463.725)	(5.267.968.799)	(14.465.665.095)	174,60
Barang keperluan perkantoran	(3.953.442.713)	(5.646.757.730)	(9.675.434.637)	71,34
Lainnya	(6.565.380.587)	(5.306.086.348)	(6.271.857.738)	18,20
Beban dukungan layanan manajemen	(56.870.757.758)	(71.483.991.348)	(89.790.425.902)	25,61
Jumlah Beban	(11.577.229.646.947)	(10.946.738.536.497)	(6.337.213.701.284)	(42,11)

Grafik Beban Tahun 2016-2018 (Rp)
Graph: Expenses in 2016-2018 (Rp)





Laporan Arus Kas Statement of Cash Flows

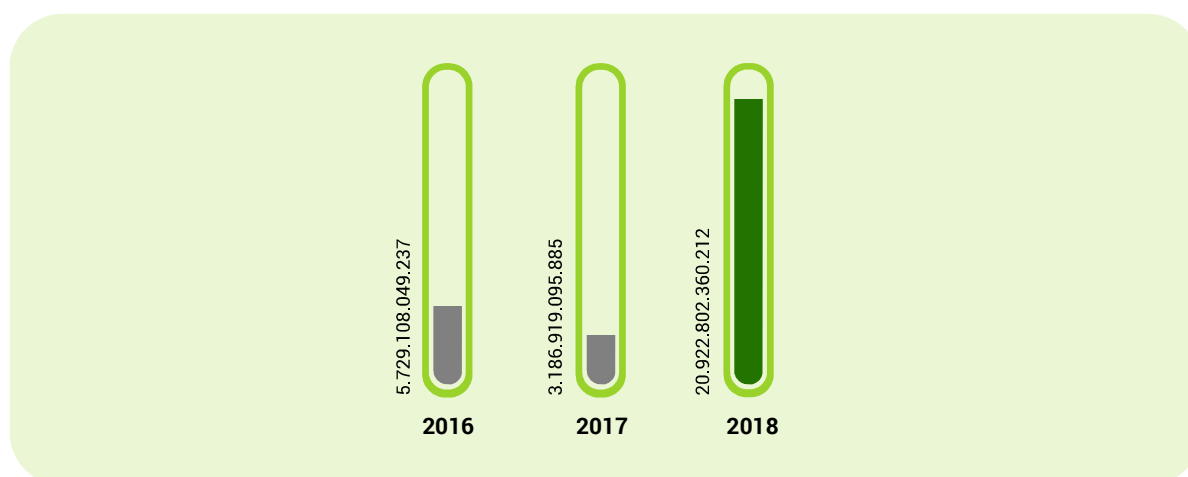
Jumlah Kas dan setara kas BDPKS tahun 2018 adalah sebesar Rp20.922.802.360.212 meningkat 556,52% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp3.186.919.095.885. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tingginya penerimaan dari pungutan dan pengelolaan dana serta penurunan penyaluran dana pembayaran selisih harga biodiesel.

In 2018, OPFMA's total Cash and cash equivalents amounted to Rp20,922,802,360,212, increased by 556.52% compared to 2017, which was Rp3,186,919,095,885. The increase was mainly due to the high revenue from fund collection and management, and the decrease in the fund disbursement for biodiesel price variance.

Tabel Arus Kas Tahun 2016-2018 (Rp)
Table: Cash Flows 2016-2018 (Rp)

Uraian Description		2016	2017	2018	Perubahan (%) Delta (%)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	Net Cash Flows Provided by Operating Activities	1.303.611.901.381	4.021.710.047.373	8.804.098.616.113	118,91
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	Net cash flows provided by (used in) investing activities	3.945.123.562.400	(8.563.899.000.725)	8.931.784.648.214	(204,30)
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	Net cash flows (used in) financing activities	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)	-	-
Kenaikan bersih pada kas dan setara kas	Net increase in cash and cash equivalents	3.248.735.463.781	(2.542.188.853.352)	17.735.883.264.327	(797,66)
Kas dan setara kas pada awal tahun	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	2.480.372.585.456	5.729.108.049.237	3.186.919.095.885	(44,37)
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	5.729.108.049.237	3.186.919.095.885	20.922.802.360.212	556,52

Grafik Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2016-2018 (Rp)
Graph: Cash and Cash Equivalents at the End of the Year 2016 -2018 (Rp)





Manajemen Struktur Modal

Capital Structure Management

Struktur Modal

Capital Structure

Struktur modal BDPKPS terdiri dari surplus yang diperoleh yaitu selisih antara pendapatan (pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan dana) dengan beban usaha.

The capital structure of OPPFMA consists of the surplus obtained, which is the difference between income (oil palm plantation fund collection and fund management) and operating expenses.

Berikut adalah perubahan ekuitas BDPKPS: The following is changes in OPPFMA's equity:

Tabel Arus Kas Tahun 2016-2018 (Rp)

Table: Changes in Equity in 2017-2018 (Rp)

		Penyertaan Modal Pemerintah Government Capital Investment	Akumulasi Surplus Surplus Accumulation	Jumlah Ekuitas Total Equity
Saldo Ekuitas pada 31 Desember 2017	Equity on 31 December 2017	-	-	11.006.676.428.348
Setoran ke kas negara	Deposit to the State Treasury	-	-	-
Penyesuaian surplus tahun berjalan	Current year surplus adjustment	-	-	-
Surplus tahun berjalan	Surplus for the year	-	-	9.085.043.573.979
Saldo Ekuitas pada 31 Desember 2018	Equity on 31 December 2018	-	-	20.091.720.002.327

Mekanisme Review Struktur Modal Review Mechanism for the Capital Structure

Pelaksanaan review struktur modal dilakukan BDPKPS melalui monitor pada kegiatan pemungutan dana perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan dana. Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit untuk tahun 2018 sebesar Rp14.367.402.955.848 meningkat 1,31% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp14.277.241.158.165. Sedangkan pendapatan atas pengelolaan dana BDPKPS pada tahun 2018 sebesar Rp1.047.535.154.334 menurun 107,38% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp505.120.147.304.

The capital structure review is carried out by OPPFMA through monitoring the oil palm plantation fund collection activities and fund management activities. Income from fund collection of oil palm plantation in 2018 amounted to Rp14,367,402,955,848, increased by 1.31% compared to 2017 of Rp14,277,241,158,165. Meanwhile, income from OPPFMA's fund management in 2018 amounted to Rp1,047,535,154,334, decreased by 107.38% compared to 2017, which was Rp505,120,147,304.





Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2018, serta Proyeksi 2019

Comparison between Target and Realization in 2018 and 2019 Forecast

Pendapatan BPDPKS tahun 2018 sebesar Rp15.422.257.275.263 atau tercapai 140,30% dari target RBA 2018 sebesar Rp10.992.000.000.000. Selanjutnya sesuai dengan RBA 2019, jumlah pendapatan diproyeksikan sebesar Rp11.438.000.000.000.

In 2018, OPPFMA's revenue amounted to Rp15,422,257,275,263, or 140.30% of the 2018 Business and Budget Plan (RBA) target of Rp10,992,000,000,000. Further, in accordance with the 2019 RBA, the projected total revenue is Rp11,438,000,000,000.

Beban usaha BPDPKS tahun 2018 sebesar Rp6.337.213.701.284 atau tercapai 57,65% dari target RBA 2018 sebesar Rp10.992.000.000.000. Selanjutnya sesuai dengan RBA 2019, jumlah beban usaha diproyeksikan sebesar Rp10.992.000.000.000.

In 2018, OPPFMA's operating expenses amounted to Rp6,337,213,701,284 or 57.65% of the 2018 Business and Budget Plan (RBA) target of Rp10,992,000,000,000. Further, in accordance with the 2019 RBA, the projected total Operating Expenses is Rp10,992,000,000,000.

Tabel Target dan Realisasi Aktivitas Tahun 2018 (Rp)

Table: 2018 Activities Target and Realization (Rp)

		Tahun 2018 2018			Proyeksi RBA 2019 Forecast RBA 2019
		RBA 2018 RBA 2018	Realisasi Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	
Pendapatan	Revenues	11.992.000.000.000	15.422.257.275.263	140,30	11.438.000.000.000
Beban Usaha	Operating Expenses	11.992.000.000.000	6.337.213.701.284	52,65	10.992.000.000.000

Asumsi Proyeksi Tahun 2019

Assumptions for 2019 Projections

Angka proyeksi RBA di tahun 2019 ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The projected RBA figure for 2019 is based on the following assumptions:

- | | |
|--|--|
| 1. Saldo awal tahun 2019 sebesar Rp19 triliun, termasuk dana cadangan sebesar Rp748 miliar; | 1. The initial balance in 2019 shall be Rp19 trillion, including reserve funds of Rp748 billion; |
| 2. Harga CPO berkisar antara US\$650 - US\$750 per ton; | 2. CPO price is around US\$650 - US\$750 per ton; |
| 3. Volume ekspor diperkirakan menurun dari tahun 2018 sebesar 36.000.000 ton menjadi 33.000.000 ton di tahun 2019 karena peningkatan penggunaan biodiesel (yaitu menurun 3.045.000 ton yang digunakan untuk menghasilkan 3.500.000 KL biodiesel dengan BJ 0,87 Kg/liter). Di tahun 2020-2022 kinerja ekspor kembali stabil di level 37 juta MT; | 3. Export volume is expected to decrease from 2018 by 36,000,000 tons to 33,000,000 tons in 2019 due to increased use of biodiesel (i.e. decreased 3,045,000 tons used to produce 3,500,000 KL biodiesel with BJ 0.87 Kg/liter). In 2020-2022, export performance shall be stabilized at 37 million MT; |
| 4. Dana yang disediakan untuk jasa verifikasi ekspor produk kelapa sawit oleh surveyor sebesar Rp146.000.000.000. Dana tersebut terdiri atas biaya surveyor Rp107.000.000.000 untuk ekspor sebesar 33.000.000 ton dengan rincian biaya surveyor per ton sebesar Rp2.950 ditambah PPN 10%. Dana sebesar Rp39.000.000.000 digunakan sebagai dana pendukung, biaya pengembangan sistem pungutan ekspor, dan cadangan apabila terjadi kenaikan ekspor; | 4. Funds provided for palm oil product export verification services by surveyors amounted to Rp146,000,000,000. The fund consists of surveyor fees of Rp107,000,000,000 for exports of 33,000,000 tons, with surveyor fees of Rp2,950 per ton plus 10% VAT. Funds of Rp39,000,000,000 are used as supporting funds, the cost of developing an export duties system, and reserves in the event of an increase in exports; |
| 5. Pengelolaan dana menggunakan investasi dengan yield return rata-rata 7% p.a; | 5. Fund management by investing with an average yield return of 7% p.a; |
| 6. Penerimaan berasal dari hasil pemungutan biaya ekspor CPO dan turunannya. Dari sektor hulu tarif pungutan sebesar \$50 untuk CPO dan CPKO, \$40 untuk PFAD dan PKFAD, \$35 untuk split crude oil dan \$10 untuk cangkang. Dari sektor hilir sebesar \$30 untuk RBD palm olein, \$20 untuk RBD oil, dan \$20 untuk biodiesel (kandungan metil ester > 96,5 volume); | 6. Revenues from the collection of CPO export costs and their derivatives. From the upstream sector, the duties are \$50 for CPO and CPKO, \$40 for PFAD and PKFAD, \$35 for split crude oil, and \$10 for shells. From the downstream sector, \$30 for RBD palm olein, \$20 for RBD oil, and \$20 for biodiesel (methyl ester content > 96.5 of volume); |



Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2018, serta Proyeksi 2019 Comparison between Target and Realization in 2018 and 2019 Forecast

7. Sesuai dengan arahan Komite Pengarah pada tanggal 20 Desember 2017, target dan persentase alokasi dana untuk penyaluran TA 2018 yang kemudian digunakan untuk alokasi TA 2019 adalah:
- Peremajaan sampai dengan 22%,
 - Sarana Prasarana sampai dengan 2%,
 - Pembayaran Selisih Harga Biodiesel sampai dengan 70%,
 - Dukungan Riset sampai dengan 2%,
 - Promosi dan Kemitraan sampai dengan 2%,
 - Pengembangan SDM sampai dengan 2%,
 - Dana Cadangan sampai dengan 4%.

Namun demikian untuk alokasi 2019 akan menggunakan angka alokasi sebesar alokasi pada Tahun 2018;

7. In accordance with the direction of the Steering Committee on 20 December 2017, the target and percentage of funds allocated for the 2018 fiscal year disbursement, which will then be used for the allocation of 2019 fiscal year are:
- Replanting up to 22%,
 - Infrastructure up to 2%,
 - Payment of Biodiesel Price Difference up to 70%,
 - Research support up to 2%,
 - Promotion and Partnership up to 2%,
 - HR Development up to 2%,
 - Reserve funds up to 4%.

However, the allocation for 2019 will use the same allocation as per the allocation in 2018;

8. Dana yang disediakan untuk program peremajaan perkebunan kelapa sawit sebesar Rp2,30 triliun dengan biaya program peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah Rp25 juta/Ha dan cakupan lahan seluas 90.000 Ha. Alokasi ini merupakan alokasi awal, yang akan disesuaikan dengan progress kinerja 2019. Hal ini dilakukan melihat capaian kinerja 2018 yang rendah yaitu sampai dengan Juli 2018 sebanyak 9.576 Ha;

8. The funds provided for the palm oil plantation replantation program amounted to Rp2.30 trillion with the cost of the palm oil plantation replantation program of Rp25 million/Ha and an area of 90,000 Ha. This is the initial allocation, which will be adjusted to the progress of 2019 performance. This is based on the 2018 low performance, up to July 2018, which was 9,576 Ha;

9. Dana yang disediakan untuk program sarana prasarana sebesar Rp214 miliar.

9. Funds provided for the infrastructure program amounted to Rp214 billion.

10. Dana yang disediakan untuk program riset sebesar Rp214 miliar dengan rata-rata pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000/riset;

10. Funds provided for the research program are Rp214 billion, with average financing of Rp1,500,000,000/research;

11. Dana yang disediakan untuk program pengembangan SDM Sawit sebesar Rp214 miliar yang terdiri atas program beasiswa diploma 1 dan 3 dengan biaya sebesar Rp50.000.000/orang per tahun dan pelatihan petani kelapa sawit. Peningkatan jumlah peserta setiap tahun meningkat sebesar 5% per tahun;

11. Funds provided for the Palm Oil HR development program amounted to Rp214 billion, consisting of Young Bachelor (D1 and D3) scholarship programs of Rp50,000,000/person per year, and training of palm oil farmers. Increase in the number of participants of 5% per year;

12. Dana yang disediakan untuk program promosi dan kemitraan adalah Rp214 miliar;	12. Funds provided for promotion and partnership program amounted to Rp214 billion;
13. Dukungan Manajemen, pengeluaran ini untuk membiayai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan operasional BDPKPS. Anggaran Dukungan Manajemen adalah maksimal sebesar 1,25% dari total dana penyaluran. Sementara dialokasikan sebesar Rp141 miliar;	13. Management's Support Fund, the expenditure is to finance all activities related to OPPFMA's operations. Management's Support Budget amounted to at most 1.25% of total fund disbursement. The Management's Support Fund is budgeted at Rp141 billion;
14. Batas atas penggunaan dana penghimpunan untuk dukungan pelaksanaan mandatori B-20 (biodiesel 20%) adalah 70%. Dengan target volume sebanyak 6.000.000 KL baik PSO maupun Non PSO;	14. The ceiling for the use of collection funds to support the mandatory B-20 (biodiesel 20%) is 70%. The volume is targeted at 6,000,000 KL for both PSO and non-PSO;
15. Untuk setiap penggunaan 1 KL Biodiesel, membutuhkan dana pembiayaan selisih harga HIP BBN jenis biodiesel dengan HIP minyak jenis solar dengan target tahun 2019 sebesar 6 juta KL. Namun demikian alokasi anggaran untuk 2019 dilalokasikan sebesar anggaran tahun 2018 karena selisih harga solar dan biodiesel mengecil.	15. For the use of 1 KL Biodiesel, funding is necessary for the difference in the price of biodiesel HIP and diesel oil HIP. The 2019 target is at 6 million KL. However, in 2019, the budget is allocated as per the 2018 budget due to the lower difference in the prices of diesel and biodiesel.

Informasi Keuangan Lainnya

Other Financial Information

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Pihak Afiliasi

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliated Parties

Sampai dengan 31 Desember 2018, BDPKPS tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

As of 31 December 2018, OPPFMA did not conduct any transaction with conflict of interest and/or with affiliated parties.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Fact and Information After the Accounting Reporting Date

Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan BDPKPS yang dapat mempengaruhi secara signifikan kewajaran penyajian laporan keuangan BDPKPS.

As of 31 December 2018, there were no significant events that occurred after the date of OPPFMA's financial statements that could significantly affect the fairness of OPPFMA's financial statement presentation.



Prospek dan Strategi Usaha

Business Prospects and Strategies



Prospek Usaha

Business Prospect

Prospek Perekonomian

Economical Prospect

Prospek perekonomian domestik 2019 akan tetap kuat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan stabilitas yang terjaga ditengah kondisi perekonomian global yang belum kondusif,. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap solid pada kisaran 5,0% - 5,4% ditunjang oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik konsumsi maupun investasi. Sementara itu, kinerja ekspor neto belum banyak dapat menopang peningkatan pertumbuhan ekononi 2019 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dunia yang melandai.

In 2019, the domestic economy is projected to remain strong, which shall be marked by better and more stable economic growth amidst the not conducive global economic conditions. Indonesia's economic growth in 2019 is predicted to remain solid at 5.0% - 5.4%, supported by strong domestic demand, both consumption and investment. Meanwhile, the net export performance was unable to sustain an increase in economic growth in 2019, in line with sluggish world economic growth.

Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh kuat, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,2% - 5,6% pada 2019 dipengaruhi tingginya konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap kuat didukung daya beli masyarakat yang terjaga, seiring dengan pendapatan yang membaik disertai inflasi yang rendah, serta dampak positif dari penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Peran stimulus fiskal pemerintah baik melalui bantuan sosial maupun instrumen fiskal lainnya juga berperan menopang kinerja konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi swasta juga bersumber dari peningkatan kinerja konsumsi LNPR sebagai dampak positif dari pengeluaran terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Private consumption is expected to grow strongly, to sustain economic growth in 2019. Private consumption is predicted to grow by 5.2% - 5.6% in 2019 due to high household consumption and consumption of nonprofit institutions serving households (LNPR). Growth in household consumption is expected to remain strong, supported by maintained public purchasing power, in line with improved income accompanied by low inflation, as well as the positive impact of General Election (Pemilu).

The government fiscal stimulus through social assistance and other fiscal instruments plays a role in sustaining the performance of household consumption. The private consumption performance is also influenced by an increase in LNPR consumption performance as a positive impact of expenditure related to the 2019 General Election.

Prospek Industri Crude Palm Oil (CPO) Crude Palm Oil (CPO) Industry Prospect

Prospek industri kelapa sawit diperkirakan lebih cerah pada tahun 2019. Kinerja akan ditopang oleh pelaksanaan mandatori kebijakan biodiesel 20 persen (B20). Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, ditambah beragam hambatan aturan dagang sejumlah negara, tak membuat pamor kelapa sawit sebagai komoditas andalan untuk devisa negara meredup. Prospek bisnis kelapa sawit masih sangat menjanjikan, tak lain karena kontribusi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya masih besar. Belum termasuk ke pasar non tradisional di luar Eropa yang masih terbuka lebar, mengingat kawasan seperti Timur Tengah dan Asia Selatan belum tergarap optimal.

Sejak berkembangnya sektor perkebunan di Indonesia, kelapa sawit merupakan komoditas yang digadag-gadag sebagai primadona sektor pertanian khususnya perkebunan. Selain itu, komoditas ini termasuk memiliki prospek yang paling cerah dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, seperti kakao, karet, kopi, dan lain-lain.

The palm oil industry is expected to perform better in 2019. The performance will be supported by the implementation of a mandatory 20 percent biodiesel policy (B20). In the midst of global economic conditions that are not yet stable, and various barriers to trade rules in numerous countries, the palm oil prestige as the mainstay commodity for foreign exchange has faded. The prospect of the palm oil business is still very promising, because the contribution of exports of crude palm oil (CPO) and its derivatives are still high. This does not include the non-traditional markets outside Europe that are still wide open, taking into account that regions such as the Middle East and South Asia have not been optimally exploited.

Since the development of the plantation sector in Indonesia, palm oil is the flagship commodity in the agriculture sector, especially plantations. In addition, this commodity has the brightest prospect compared to other plantation commodities, such as cocoa, rubber, coffee, etc.



Sejak berkembangnya sektor perkebunan di Indonesia, kelapa sawit merupakan komoditas yang digadang-gadang sebagai primadona sektor pertanian khususnya perkebunan. Selain itu, komoditas ini termasuk memiliki prospek yang paling cerah dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, seperti kakao, karet, kopi, dan lain-lain.

Since the development of the plantation sector in Indonesia, palm oil is the flagship commodity in the agriculture sector, especially plantations. In addition, this commodity has the brightest prospect compared to other plantation commodities, such as cocoa, rubber, coffee, etc.

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas areal/tanaman menghasilkan yang selalu meningkat setiap tahun dan kebijakan pemerintah yang selalu mengupayakan komoditas ini tetap eksis di pasar domestik maupun internasional. Minyak sawit diproduksi dalam jumlah besar berupa minyak mentah sawit (CPO) dan minyak kernel sawit (PKO). Di Indonesia sendiri, minyak sawit tersebut diproduksi oleh produsen dengan luas lahan yang diusahakan adalah 40,59% oleh perkebunan rakyat; 54,43% oleh perkebunan besar swasta; dan 4,98% oleh perkebunan besar negara dari 14,03 juta ha total lahan sawit di Indonesia.

Bisnis minyak kelapa sawit menguntungkan produsennya dengan beberapa alasan, di antaranya adalah margin laba yang besar, permintaan internasional yang besar yang diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia sebesar 9,6 miliar pada tahun 2050, tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibanding minyak nabati yang lain, dan gencarnya kampanye penggunaan biofuel secara global.

This is reflected in the area/crop yields development which increases every year, and government policies that strive to ensure these commodities' existence in the domestic and international markets. Palm oil is produced in large quantities in the form of crude palm oil (CPO) and palm kernel oil (PKO). In Indonesia, palm oil is produced by producers in the area of 40.59% managed by smallholder plantations; 54.43% by large private plantations; and 4.98% by state-owned plantations, with a total of 14.03 million ha of palm oil land in Indonesia.

The palm oil business benefits its producers from its large profit margins, large international demand, and an increase in the world population to 9.6 billion in 2050, higher levels of productivity compared to other vegetable oils, and the incessant campaign to use biofuels globally.

Selain itu, hasil penelitian Suharyono Turnip dan Marhadi tahun 2016 dengan menggunakan Teori Diamond Porter menyatakan faktor produksi, industri pendukung, peran pemerintah, dan kesempatan merupakan faktor yang mempengaruhi CPO sehingga memiliki daya saing di pasar Internasional. Apalagi dengan adanya diversifikasi produk CPO atau mandatori B20 oleh pemerintah akan berdampak pada permintaan CPO sekitar 4,1 juta ton (14% dari total ekspor CPO Indonesia).

Kemampuan Indonesia memenuhi permintaan ekspor CPO dalam jumlah banyak seperti ke India yaitu sebesar 6,714 ribu ton tahun 2018, menunjukkan bahwa komoditas ini layak untuk diperjuangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekspor CPO dari Indonesia beberapa bulan terakhir ini adalah tren harga CPO internasional naik 0,44% ; tren harga minyak kedelai internasional meningkat 0,90% ; dan stok persediaan CPO di Malaysia yang turun hingga 80%.

Produksi CPO juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi jumlah CPO yang diekspor. Data Badan Pusat Statistik, Ditjenbun, dan GAPKI menunjukkan pertumbuhan produksi CPO tahun 2018 adalah 11,28% dari tahun sebelumnya, dengan total produksi 47,39 juta ton. Seiring dengan hal tersebut, pertumbuhan eksportnya juga meningkat sebesar 3,02% dengan total ekspor 32,02 juta ton tahun 2018.

Data GAPKI meramalkan hasil produksi kelapa sawit pada rentang waktu 2019-2025 akan terus meningkat seiring dengan permintaan domestik dalam bentuk makanan, biodiesel, biohidrocarbon, dan tenaga listrik (PLN) yang juga meningkat. Disisi lain, International Monetary Fund (IMF) mengoreksi pertumbuhan ekonomi global yang melambat dari 3,5% menjadi 3,3%. Dalam situasi pelambatan ekonomi global, harga komoditas seperti sawit, apalagi karet dan kopi cenderung relatif rendah atau mengalami penurunan.

In addition, the results of Suharyono Turnip and Marhadi's study in 2016 using Diamond Porter's Theory stated that production, supporting industries, the role of government, and opportunities are factors that influence CPO to have its competitiveness in the international market. Under the diversification of CPO products or the mandatory B20 by the government, CPO demand will be impacted at around 4.1 million tons (14% of Indonesia's total CPO exports).

Indonesia's ability to meet the demand for CPO exports in large quantities, for example, to India, of 6,714 thousand tons in 2018, shows that this commodity is worth fighting for. Factors that have influenced the demand for CPO exports from Indonesia in the past few months are the increase of international CPO prices by 0.44%; increase of international soybean oil price by 0.90%; and decrease of CPO inventory in Malaysia by 80%.

CPO production is also one of the important factors that affects the amount of CPO exported. Data from Statistics Indonesia, the Directorate General of Plantations, and IPOA, show that CPO production growth in 2018 was 11.28% from the previous year, with a total production of 47.39 million tons. In line with this, export growth also increased by 3.02% with a total export of 32.02 million tons in 2018.

IPOA data predicts that palm oil production in 2019-2025 will continue to increase along with domestic demand for food, biodiesel, biohydrocarbons, and electric power (PLN), which also increases. On the other hand, the International Monetary Fund (IMF) corrected global economic growth, which slowed from 3.5% to 3.3%. In such a global economic slowdown, the prices of commodities (for example, palm oil), especially rubber and coffee tend to be relatively low or decline.



Tabel Proyeksi Produksi dan Penggunaan Minyak Sawit Tahun 2017-2020 (Ton)
Table: Palm Oil Production and Utilization Forecast in 2017-2020 (Tons)

Tahun Year	Total Produksi Total Production	Penggunaan Utilization							Total Penggunaan Total Utilization	
		Biodiesel Biodiesel		Minyak Goreng, Margarin, Shortening, RBD Oil Cooking Oil, Margarine, Shortening, RBD Oil		Oleochemical Oleochemical		CPO CPO		
		Domestik Domestic	Ekspor Export	Domestik Domestic	Ekspor Export	Domestik Domestic	Ekspor Export	Ekspor Export	Domestik Domestic	Ekspor Export
2017	36.525.294	9.189.373	1.500.000	6.301.724	14.139.665	657.524	1.178.513	3.558.495	16.148.621	20.376.673
2018	38.351.560	9.522.360	1.500.000	6.490.776	14.281.062	683.825	1.216.473	4.657.064	16.696.961	21.654.599
2019	40.269.138	9.855.347	1.500.000	6.685.499	14.423.872	711.178	1.255.631	5.837.611	17.252.024	23.017.114
2020	42.282.594	10.188.333	1.500.000	6.886.064	14.568.111	739.625	1.296.022	7.104.439	17.814.022	24.468.572

Sumber: data diolah GAPKI Source: data processed by IPOA

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan. Penggunaan minyak sawit domestik terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel. Minyak sawit yang diekspor terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan RBD oil sebagai bahan baku penting dalam pembuatan sabun mandi, sabun cuci, dan produk kebersihan dan perawatan diri lainnya.

Sampai dengan tahun 2020 luas area lahan perkebunan kelapa sawit diperkirakan juga akan mengalami peningkatan sebesar 5% setiap tahun. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut diperkirakan akan dikuasai terutama oleh rakyat dengan penguasaan terhadap lahan meningkat $\pm 7\%$ setiap tahun sehingga berkontribusi sebesar 50,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rakyat akan meningkat seiring dengan peran rakyat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ke depan. Proyeksi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam lima tahun ke depan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Based on the table above, it can be concluded that Indonesia's palm oil production has increased. The domestic palm oil is mainly used to meet biodiesel needs. Palm oil is exported mainly to meet food needs, such as cooking oil, margarine, shortening, and RBD oil, as important raw materials in the manufacture of bath soap, laundry soap, and other hygiene and personal care products.

Until 2020, the area of palmoil plantations is estimated to increase by 5% every year. The palm oil plantation land is estimated to be controlled mainly by the people, and control of the land will increase by $\pm 7\%$ every year, therefore contributing to 50.61%. This indicates that people's welfare will increase along with the people's role in the development of palm oil plantations in the future. The forecast for palm oil plantations development in the next five years are shown in the following table.

Tabel Proyeksi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2016-2020
Table: Forecast of Palm Oil Plantations Development in 2016-2020

Tahun Year	Penguasaan Lahan (ha) Land Tenure (ha)			Total Luas Area (ha) Total Area (ha)	Kontribusi (%) Contributions (%)		
	Rakyat People	Swasta Private	BUMN SOE		Rakyat People	Swasta Private	BUMN SOE
2017	5.585.049	5.524.182	711.153	11.820.384	47,25	46,73	6,02
2018	6.006.787	5.689.907	714.708	12.411.402	48,40	45,84	5,76
2019	6.453.087	5.860.604	718.282	13.031.973	49,52	44,97	5,51
2020	6.925.276	6.036.423	721.873	13.683.572	50,61	44,11	5,28

Sumber: data diolah GAPKI Source: data processed by IPOA

Pelaku usaha industri minyak sawit Indonesia khususnya GAPKI tetap optimis pada tahun 2019 industri sawit Indonesia tetap memiliki prospek yang baik. Hal ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik.

Indonesian palm oil industry entrepreneurs, especially IPOA, remain optimistic, that in 2019 the Indonesian palm oil industry will have good prospects. This is supported by Indonesia's improving economic growth.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor khususnya ke pasar non tradisional, meningkatkan produktivitas nasional dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi maka program kerja 2019 akan di fokuskan pada:

In accordance with the Government's policy to increase investment, increase exports especially to non-traditional markets, increase national productivity, and reduce poverty and economic inequality, the 2019 work program will focus on:

1. Melakukan perbaikan iklim usaha dalam negeri melalui advokasi sinkronisasi kebijakan dan regulasi pemerintah;
 2. Melakukan advokasi atas berbagai regulasi di daerah;
 3. Mendorong percepatan implementasi Sustainability/SPO;
 4. Mendorong peningkatan/pengembangan ekspor dan penanganan berbagai hambatan perdagangan di pasar global;
 5. Memperluas kampanye positif sawit, baik di dalam negeri maupun di berbagai Negara tujuan ekspor utama.
 6. Mendorong dan ikut menyukseskan program Replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan oleh pemerintah dengan mendorong para anggota melakukan replanting serta turut aktif membina swadaya melakukan PSR.
1. Improving the domestic business climate by advocating government policies and regulations synchronization;
 2. Advocating for various regulations in the regions;
 3. Encouraging the acceleration of the Sustainability/SPO implementation;
 4. Encouraging the increase/development of exports and handling various trade barriers in the global market;
 5. Expanding positive palm campaigns, both domestically and in various major export destination countries.
 6. Encouraging and participating in the success of the Replanting of palmoil (PSR) program launched by the government by encouraging members to carry out replanting and actively fostering self-help in carrying out PSR.



Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2018 serta berbagai langkah yang telah dilakukan, ke depan khususnya implementasi B20 dan ada kemungkinan akselerasi B30 di 2019 maka GAPKI optimis tahun 2019 industri kelapa sawit akan lebih baik dari tahun 2018.

Taking into account the various challenges faced in 2018 and the various steps that have been taken, in the future, the B20 implementation will be particularly specific and there is a possibility of B30 acceleration in 2019. Therefore, IPOA is optimistic that in 2019 the palm oil industry will perform better than in 2018.

Strategi Usaha Business Strategy

BDPKS melakukan analisis kondisi internal dan eksternal sebagai upaya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) dalam 5 tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut terdiri dari:

- Memastikan terbitnya peraturan-peraturan sebagai landasan untuk memberikan layanan yang prima dalam rangka pencapaian visi dan misi;
- Membangun komitmen dengan para pihak yang memiliki hubungan (termasuk semua pemangku kepentingan) dalam pemungutan biaya, pengalokasian, dan pengelolaan DPKS;
- Menerapkan standar pelayanan yang terukur dengan memperhatikan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta mempersiapkan sistem pemberian *reward* dan *punishment* yang kewenangan dalam pengelolaan DPKS;
- Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas kewenangan dalam pengelolaan DPKS;
- Meningkatkan koordinasi sinergi dan membangun kemitraan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan dan badan pengelolaan dana sejenis; dan
- Membangun sistem pelaksanaan tugas dan fungsi berbasis teknologi.

OPPFMA analyzes the internal and external conditions as an effort to identify challenges faced in managing the Oil Palm Plantation Fund (DPKS) in the next 5 years. These challenges consist of:

- Ensuring the issuance of regulations as a basis for providing excellent service to achieve the vision and mission;
- Building commitments with parties involved (including all stakeholders) in the collection, allocation, and management of DPKS;
- Implementing measurable service standards by taking into account the professionalism in carrying out their duties and functions;
- Improving the quality and quantity of human resources and preparing a reward and punishment system under the authority of DPKS management;
- Developing policies to strengthen and expand authority in managing DPKS;
- Improving synergies and building long-term partnerships with stakeholders and similar fund management bodies; and
- Establishing systems for implementing tasks and functions based on technology.

Strategi usaha BDPKPS dalam rangka menghadapi tantangan dan menangkap peluang pada industri kelapa sawit mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan, Rencana Strategis Kementerian pertanian dan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian yang disusun dalam Rencana Strategis Bisnis BDPKPS Tahun 2015-2019. Rencana Strategis BPPDPKS Tahun 2019 yaitu:

- Menyiapkan tata kelola, tegulasi eksternal maupun internal (SOP dan *manual*) untuk setiap aktivitas;
- Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan seluruh *stakeholders*;
- Melakukan pemilihan pola investasi dengan hasil pengembalian yang maksimal;
- Penggunaan saldo awal mencukupi kebutuhan dana penyaluran;
- Mengusulkan kepada Komite Pengarah agar penetapan alokasi dana berdasarkan kebutuhan setiap layanan penyaluran dan bukan berdasarkan proporsi dana.

In order to face challenges and seize opportunities in the palm oil industry, OPPFMA's business strategy refers to the Ministry of Finance's Strategic Plan, the Ministry of Agriculture's Strategic Plan, and the Ministry of Industry's Strategic Plan, formulated in the 2015-2019 OPPFMA's Strategic Business Plan. OPPFMA's 2019 Strategic Business Plans are:

- Preparing governance, both external and internal regulation (SOP and manual) for each activity;
- Conducting communication, coordination, and cooperation with all stakeholders;
- Selecting investment patterns with the maximum return;
- Managing initial balance to be sufficient for the fund disbursement;
- Proposing to the Steering Committee that the fund allocation is determined based on the needs of each disbursement service, and not based on the proportion of funds.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

05

Tata Kelola BDPKS

OPPFMA'S Corporate Governance



Sebagai wujud tanggungjawab BDPKS kepada stakeholder maupun Komite Pengarah, BDPKS senantiasa menerapkan Tata Kelola Badan yang Baik (*Good Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya, dalam rangka meningkatkan nilai BDPKS jangka panjang, baik bagi seluruh stakeholder maupun Komite Pengarah

As a form of OPPFMA's responsibility to stakeholders and the Steering Committee, OPPFMA implements Good Governance in every business activity in order to enhance the long-term OPPFMA's value, for all stakeholders and the Steering Committee





Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Tata Kelola BDPKS

OPPFMA'S Corporate Governance





Pendahuluan

Introduction

BPDPKS selalu berupaya untuk dapat menerapkan implementasi *Good Governance* pada setiap lini bisnisnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, kewajaran, independensi dan tanggung jawab) guna mempertahankan eksistensi BPDPKS dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang.

OPPFMA strives to implement Good Governance in every business line based on the Good Governance principles (transparency, accountability, fairness, independence, and responsibility) in order to maintain the OPPFMA in facing challenges and business competition in the future.

Struktur Tata Kelola BPDPKS

OPPFMA'S Governance Structure

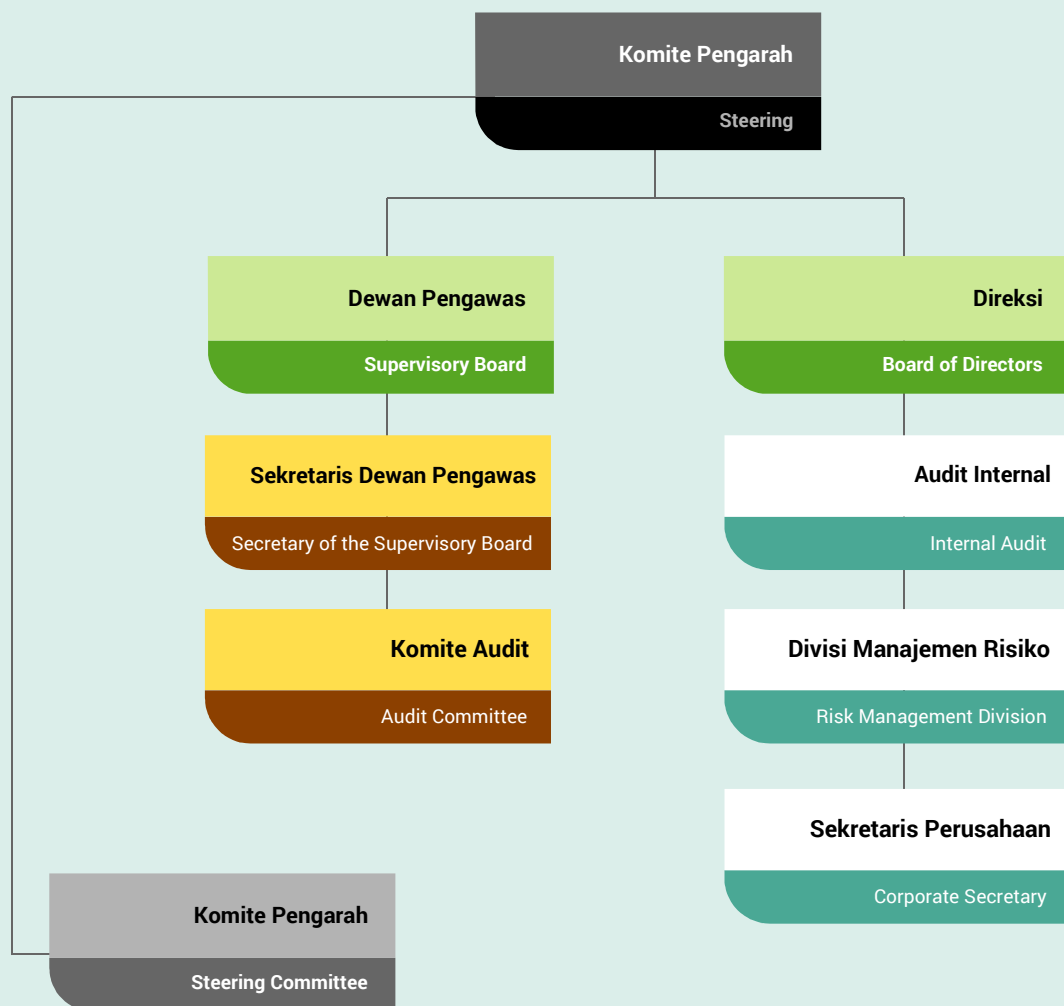
Organ tata kelola BPDPKS di dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola BPDPKS dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol check and balance. Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, telah dibentuk satu Komite yaitu Komite Audit dan Sekretaris Dewan Pengawas. Sedangkan organ pendukung Direksi terdiri dari Sekretaris BPDPKS, Divisi Pengawasan Internal Audit, Divisi Manajemen Risiko serta Divisi lainnya.

The OPPFMA's corporate governance is formed to ensure that the implementation of OPPFMA's governance principles shall be done effectively with clear roles and responsibilities to create check and balance control mechanism. To assist the execution of the Supervisory Board's duties, the Audit Committee and the Supervisory Board's Secretary have been established. The Board of Directors' supporting organs consist of the OPPFMA's Secretary, Internal Audit Monitoring, Risk Management, and other Divisions.



Gambar Struktur Tata Kelola BDPKPS

Figure: OPPFMA's Governance Structure



1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS;
2. Menteri Pertanian selaku anggota Komite Pengarah BPDPKS;
3. Menteri Keuangan selaku anggota Komite Pengarah BPDPKS;
4. Menteri Perindustrian selaku anggota Komite Pengarah BPDPKS;
5. Menteri Perdagangan selaku anggota Komite Pengarah BPDPKS;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku anggota Komite Pengarah BPDPKS;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku anggota Komite Pengarah BPDPKS;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional selaku anggota Komite Pengarah BPDPKS.

Selain pembentukan struktur tata kelola, BPDPKS juga sedang menyusun kebijakan-kebijakan operasional dalam rangka mendukung terlaksananya penerapan GG di BPDPKS. Tahun 2018, BPDPKS telah mengimplementasikan Sistem Keuangan yang Terintegrasi/ *Enterprise Resource Planning* (ERP), *e-billing* dan penerapan persuratan secara *paper less* (*e-office*).

1. The Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the OPPFMA's Steering Committee;
2. Minister of Agriculture as member of OPPFMA's Steering Committee;
3. Minister of Finance as member of OPPFMA's Steering Committee;
4. Minister of Industry as member of OPPFMA's Steering Committee;
5. Minister of Trade as member of OPPFMA's Steering Committee;
6. Minister of Energy and Mineral Resources as member of OPPFMA's Steering Committee;
7. Minister of State-Owned Enterprises as member of OPPFMA's Steering Committee;
8. Minister of National Development Planning/Head of the National Development Agency as a member of OPPFMA's Steering Committee.

In addition to establishing a governance structure, OPPFMA is also preparing operational policies in order to support the Good Governance implementation in OPPFMA. In 2018, OPPFMA has implemented an Integrated Financial System/Enterprise Resource Planning (ERP), e-billing, and paperless (e-office) correspondence.

Informasi Pengelolaan Keuangan BPDPKS OPPFMA's Financial Management Information

BPDPKS merupakan instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh.

OPPFMA is a government agency that implements BLU financial pattern through Minister of Finance's Decree No. 650/KMK.01/2015 on the Establishment of OPPFMA at the Ministry of Finance as a Government Agency Implementing Public Service Agency Financial Management (PK-BLU).



Komite Pengarah BDPKS

OPPFMA's Steering Committee



BDPKS merupakan organisasi non eselon yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan memiliki fungsi sebagai penghimpun, pengadministrasi, pengelola, penyimpan dan penyalur dana sawit. Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BDPKS termasuk penentu penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, maka dibentuk Komite Pengarah.

OPPFMA is a non-echelon organization within the Ministry of Finance and has the function of collecting, administering, managing, storing, and distributing palm oil funds. A Steering Committee was established to provide policy direction for OPPFMA's duties, including determining the use of palm oil plantation funds.



Pembentukan Komite Pengarah BDPKS ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

The establishment of OPPFMA's Steering Committee was stipulated in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 66 of 2018 on the Second Amendment to Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the Palm Oil Fund Collection and Utilization.

Komite Pengarah beranggotakan 8 (delapan) kementerian yang terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian selaku koordinator komite pengarah dan anggota dari yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian BUMN dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional.

The Steering Committee consists of eight (8) ministries, comprising the Coordinating Ministry for Economic Affairs as the coordinator of the steering committee, and members from the Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of SOEs, and Ministry of National Development Planning/Head of the National Development Agency.

Tugas dan Kewajiban Komite Pengarah Dana Perkebunan **Duties and Obligations of the Plantation Fund Steering Committee**

Tugas pokok Komite Pengarah ada dua yakni memberikan arahan kebijakan, visi, misi dan kebijakan dari penggunaan dana perkebunan kelapa sawit terutama menetapkan rancangan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kemudian, tugas utama berikutnya adalah menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas dan Direktur Eksekutif.

There are two main tasks of the Steering Committee, i.e. to provide policy direction, vision, mission, and policies for the use of palm oil plantation funds, especially in determining the design of sustainable palm oil development and management policies. The second task is to select and appoint the Supervisory Board and the Executive Directors.

Adapun tugas Komite Pengarah Dana Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit adalah sebagai berikut:

The duties of the Plantation Fund Steering Committee, as stipulated in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 66 of 2018 on the Second Amendment to Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the Palm Oil Fund Collection and Utilization are as follows:



Komite Pengarah BDPKPS OPPFMA's Steering Committee

1. Menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio;

1. Developing policies in the collection and utilization of funds, including asset allocation policies based on the portfolio approach; and

2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio.

2. Supervising the implementation of policies in the collection and utilization of funds, including asset allocation policies based on the portfolio approach.

Masing-masing Komite Pengarah berperan dalam perumusan kebijakan tentang dana perkebunan kelapa sawit. Adapun peranan masing-masing kementerian pada Dewan Pengarah sebagai berikut:

Each Steering Committee plays a role in the policy formulation related to the palm oil plantation funds. The roles of each ministry in the Steering Committee are as follows:

Lembaga Komite Pengarah Steering Committee's Institutions		Peranan Roles	
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Coordinating Ministry for Economic Affairs		Koordinator Komite Pengarah.	Coordinator of the Steering Committee.
Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture		Menetapkan peta jalan (<i>road map</i>) untuk kegiatan peremajaan, menetapkan pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit yang bersumber dari dana sawit, memberikan rekomendasi teknis dalam proses penyaluran dana sawit untuk kegiatan peremajaan.	Establishing the road map for replantation activities, setting guidelines for palm oil plant replanting sourced from the palm funds, providing technical recommendations in the process of disbursing palm funds for replantation activities.
Kementerian Keuangan Ministry of Finance		Menetapkan tarif pungutan, menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas.	Determining duties fee, determining the appointment and dismissal of the Supervisory Board.
Kementerian Perindustrian RI Kementerian Perindustrian RI		Menetapkan komoditas turunan perkebunan kelapa sawit yang dikenakan pungutan ekspor.	Determining commodities derived from palm oil plantations subject to export levies.
Kementerian Perdagangan RI Kementerian Perdagangan RI		Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana terkait dengan penunjukkan surveyor.	Coordinating with the related Fund Management Agency to appoint surveyor



Lembaga Komite Pengarah Steering Committee's Institutions	Peranan Roles	
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI 	Melakukan verifikasi terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk mendapatkan dana bagi kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Selain itu mengumpulkan laporan terkait kegiatan produksi dan distribusi (domestik maupun ekspor) jenis biodiesel oleh Badan Usaha Bahan Bakar nabati jenis biodiesel.	Verifying the Biofuel Type Business Entity to obtain funds for the benefit, supply, and utilization of biodiesel. In addition to collecting reports related to production and distribution activities (domestic and export) of biodiesel by the Biofuel Type Business Entity of biodiesel.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI 	Melakukan pembinaan terhadap perusahaan BUMN dan merancang proses bisnis dalam program dana sawit.	Developing SOEs and designing business processes in the palm oil program.
Kementerian PPN/ Bappenas RI Kementerian PPN/ Bappenas RI 	Menyusun rencana pembangunan nasional dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya; dan mengarahkan kebijakan program pemanfaatan dana sawit ke arah yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.	Formulating national development plans and drafting State Budget and evaluating its implementation; and directing the policy program for palm funds utilization that is consistent with national development policies.

Fungsi Komite Pengarah

Functions of the Steering Committee

Komite Pengarah Dana Perkebunan memiliki fungsi : The Plantation Fund Steering Committee has the functions to:

Mengarahkan strategi kebijakan umum pengelolaan DPKS oleh BDPKS;	Direct the general strategy policy for managing Palm Oil Plantation Fund (DPKS) by OPPFMA;
Menetapkan perencanaan jangka panjang serta tujuan BDPKS;	Establish OPPFMA's long-term planning and objectives;
Menetapkan kebijakan umum pengembangan dan penyaluran DPKS;	Establish general policies for the development and distribution of DPKS;
Menyetujui rencana umum target pemungutan biaya, penyaluran dana dan cadangan BDPKS;	Approve the general plan for the collection of fees, OPPFMA's fund disbursement and reserves;
Menetapkan proporsi alokasi DPKS terkait dana pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit, penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, promosi Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dan pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, dan hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit; dan	Determine the proportion of DPKS allocation related to human resources development funds for palm oil plantations, research and development of palm oil plantations, promotion of palm oil plantations, rejuvenation of palm oil plantations, facilities, and infrastructure of palm oil plantations, and fulfillment of the palm oil plantations for food needs, and downstreaming the Palm Oil Plantation industry; and
Mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan BDPKS.	Evaluate the performance of OPPFMA's achievement.



Komite Pengarah BDPKPS OPPFMA's Steering Committee

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

In carrying out its duties, the Steering Committee may perform the following:

Membentuk Sekretariat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKPS) yang selanjutnya disebut Sekretariat Komite Pengarah;

Establish the Secretariat of the Steering Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA), hereinafter referred to as the Secretariat of Steering Committee;

Melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan

Involve ministries, institutions, local governments, and other parties deemed necessary; and

Menunjuk narasumber utama (*prominent*) yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit, dan eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya.

Appoint prominent speakers from palm oil plantation business actors, industrial players with palm oil plantation products, and exporters of palm oil plantation commodities and/or their derivatives.

Rapat Komite Pengarah Steering Committee Meetings



Proses pengambilan keputusan pada Komite Pengarah dilakukan pada rapat reguler yang diselenggarakan dua kali setahun ataupun pada rapat yang diselenggarakan untuk membahas isu tertentu. Pertemuan komite pengarah merupakan high level meeting yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi masing-masing kementerian/ lembaga yang menjadi ketua dan anggota komite pengarah.

The decision making process at the Steering Committee is carried out at regular meetings, held twice a year, or at meetings held to discuss certain issues. The steering committee meeting is a high-level meeting that is attended by the highest leadership of each ministry/institution who is the chairman and member of the steering committee.

Sekretariat Komite Pengarah dan Perkebunan Secretariat of the Plantation Fund Steering Committee

Untuk mendukung kelancaran tugas Komite Pengarah Dana Perkebunan, dapat diangkat Sekretaris Komite Pengarah Dana Perkebunan dengan persetujuan Ketua dan Anggota Komite Pengarah Dana Perkebunan yang diputuskan melalui rapat Komite Pengarah Dana Perkebunan. Sekretaris Komite Pengarah Dana Perkebunan adalah Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

To support the execution of duties of the Plantation Fund Steering Committee, a Secretary of the Plantation Fund Steering Committee may be appointed, with the approval of the Chairman and Members of the Plantation Fund Steering Committee, which is decided through a Plantation Fund Steering Committee's meeting. The Secretary of the Plantation Fund Steering Committee is the Deputy for Food and Agriculture of the Coordinating Ministry of Economic Affairs.

Sekretariat Komite Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS);
2. Membantu Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam melakukan pengawasan dan penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS);
3. Memberikan dukungan teknis penyelenggaraan diseminasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS); dan
4. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite Pengarah dan/atau anggota Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS).

The Secretariat of the Steering Committee has the following tasks:

1. Providing technical and administrative support for the duties of the Steering Committee for the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA);
2. Assisting the Steering Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency in supervising and utilizing the Palm Oil Plantation Fund (DPKS);
3. Providing technical support for the dissemination of activities of the Steering Committee for the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA); and
4. Carrying out other related tasks instructed by the Chairman of the Steering Committee and/or members of the Steering Committee of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA).



Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komite Pengarah dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan serta pihak lain yang dipandang perlu. Selanjutnya Sekretariat Komite Pengarah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komite Pengarah BDPKPS secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

In carrying out the duties, the Secretariat of the Steering Committee may involve Ministries/Non-Ministry Government Agencies, Local Governments, Stakeholders, and other parties deemed necessary. Further, the Secretariat of the Steering Committee reports the results of its duties to the Chairman of OPPFMA's Steering Committee regularly or at any time if necessary.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah Dana Perkebunan

Report on the Plantation Fund Steering Committee Activities

Selama tahun 2018, Komite Pengarah Dana Perkebunan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam pengawasan terhadap BDPKPS, diantaranya adalah:

During 2018, the Plantation Fund Steering Committee has carried out various activities in monitoring OPPFMA:

- | | |
|---|--|
| 1. Rapat koordinasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); | 1. Smallholders' Palm Oil Replantation (PSR) coordination meeting; |
| 2. Rapat Komite Pengarah Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKPS); | 2. Steering Committee's Meeting of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA); |
| 3. Pembahasan monitoring pelaksanaan B20; | 3. Discussion on B20 monitoring; |
| 4. Rapat Komite Pengarah Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKPS); | 4. Steering Committee's Meeting of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA); |
| 5. Rapat koordinasi terbatas evaluasi dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); | 5. Limited coordination meeting to evaluate the support of People's Business Credit (KUR) for Smallholders' Palm Oil Replantation (PSR); |
| 6. Pembahasan evaluasi percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). | 6. Discussion on the evaluation of the Smallholders' Palm Oil Replantation (PSR) acceleration. |

Dewan Pengawas Supervisory Board



Dewan Pengawas merupakan organ utama BDPKS yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa BDPKS melaksanakan *Good Governance* secara baik.

The Supervisory Board is the main organ of OPPFMA with the duties and responsibilities to collectively supervise the management policies and provide advice to the Board of Directors, and to ensure that OPPFMA implements Good Governance properly.



Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Requirements, Appointment, and Dismissal of the Supervisory Board

Persyaratan Dewan Pengawas

Requirements of the Supervisory Board

Calon anggota Dewan Pengawas BDPKS wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BDPKS. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha BDPKS serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Adapun Persyaratan kepatutan terdiri dari integritas, dedikasi, ketersediaan waktu yang cukup, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Candidates of OPPFMA's Supervisory Board must fulfill the capability and suitability requirements as regulated in the OPPFMA's Articles of Association. The capability means having understanding of management issues related to one of the management's functions, having adequate knowledge in OPPFMA's field of business, and having adequate integrity, competence, and reputation. The suitability consists of integrity, dedication, adequate time, the said person has never been declared bankrupt, has never been not a member of the Board of Directors and the Supervisory Board who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt, and has never been convicted of a criminal offense that harms the state finances and/or related to the financial sector.

Pengangkatan Dewan Pengawas

Appointment of the Supervisory Board

1. Dewan Pengawas BDPKS dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan;
2. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya;
3. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi BDPKS;
4. Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua; dan
5. Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat Seorang Sekretaris Dewan Pengawas oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas.

1. OPPFMA's Supervisory Board is established based on the Decree of the Minister of Finance;
2. Service period of members of the Supervisory Board is five years and the said person may be reappointed for one more service period;
3. The appointment of member of the Supervisory Board shall not coincide with the appointment of OPPFMA's Board of Directors.
4. The Supervisory Board is chaired by a Chairman; and
5. A secretary of the Supervisory Board may be appointed by the President Director with the approval of the Supervisory Board to support the duties of the Supervisory Board.

Pemberhentian dan Penggantian Dewan Pengawas

Dismissal and Replacement of the Supervisory Board

1. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Menteri Keuangan setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir;
 2. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir dengan persetujuan Menteri Keuangan;
 3. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
 - a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan ;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BDPKPS;
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BDPKPS;
 - e. Berhalangan tetap;
 - f. Meninggal dunia; atau
 - g. Berhenti atas permintaan sendiri.
 4. Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang komposisi dan persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas;
 5. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
1. Members of the Supervisory Board are dismissed by the Minister of Finance after the tenure of the Supervisory Board's member ended;
 2. Members of the Supervisory Board may be dismissed before the end of his/her tenure with the approval of the Minister of Finance;
 3. The dismissal of the Supervisory Board's member shall be carried out in the event the said member of the Supervisory Board is proven:
 - a. Has failed their duties properly;
 - b. Has not carried out the statutory provisions;
 - c. To be involved in actions that are detrimental to OPPFMA;
 - d. Imprisoned for being found guilty of committing a criminal offense and/or error relating to his duty of carrying out OPPFMA's supervision;
 - e. Permanent obstruction;
 - f. Died; or
 - g. Resigned.
 4. If a member of the Supervisory Board is dismissed, the said member of the Supervisory Board may be replaced by taking into account the provisions regarding the composition and requirements of the Supervisory Board's member;
 5. The tenure of the substitution member of the Supervisory Board is set forth for the rest of the tenure of the replaced Supervisory Board.

Komposisi Dewan Pengawas

Composition of the Supervisory Board

Pada tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 untuk pelaksanaan pembinaan BLU dibentuk Dewan Pengawas BLU. Dewan Pengawas BDPKPS ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 tanggal 26 Juni 2015. Komposisi Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Kementerian keuangan terdiri dari Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas.

In 2018, as stipulated in Government Regulation No. 23 of 2005 for the implementation of BLU mentoring, BLU's Supervisory Board was established. OPPFMA's Supervisory Board was established through Decree of the Minister of Finance No. 714/KMK.05/2015 on 26 June 2015. The composition of the Supervisory Board, based on the Ministry of Finance's Decree, consists of the Chairman of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board.



Komposisi anggota Dewan Pengawas harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

The composition of the Supervisory Board must ensure effective, appropriate, and quick decision making, that can act independently, without conflict of interest that may interfere with their ability to carry out their duties independently and critically in relation to fellow Supervisory Board's members and Board of Directors.

Jumlah Dewan Pengawas BDPKS sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak 8 (delapan) orang dan unsur Profesional sebanyak 1 (satu) orang. Dewan Pengawas dari unsur pemerintah berasal dari pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas dan Bea & Cukai yang diusulkan oleh masing-masing Kementerian kepada Menteri Keuangan. Sedangkan Dewan Pengawas dari unsur profesional diusulkan oleh Komite Pengarah kepada Menteri Keuangan. Komposisi anggota Dewan Pengawas harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi.

Selama tahun 2018 terdapat 3 (tiga) periode pergantian komposisi Dewan Pengawas yaitu Periode 1 Januari - 6 Juni 2018, 6 Juni - 16 Oktober 2018 dan 16 Oktober - 31 Desember 2018.

There are nine (9) OPPFMA's Supervisory Board, comprising eight (8) Governmental elements and one (1) Professional. The Supervisory Board from the government originated from officials of the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Trade, and the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of National Development Planning (Bappenas), and Customs and Excise, which are proposed by each Ministry to the Minister of Finance. Whereas, the Supervisory Board from the professional element is proposed by the Steering Committee to the Minister of Finance. The composition of the Supervisory Board must ensure effective, appropriate, and quick decision making, that can act independently, without conflict of interest that may interfere with their ability to carry out their duties independently and critically in relation to fellow Supervisory Board's members and Board of Directors.

During 2018, there were three (3) periods of change of the Supervisory Board's composition, i.e. 1 January - 6 June 2018, 6 June 2018 - 16 October 2018, and 16 October- 31 December 2018.

Komposisi Dewan Pengawas BDPKPS Periode 1 Januari - 6 Juni 2018
Composition of the OPFMA's Supervisory Board for 1 January - 6 June 2018

Nama Pejabat Name	Jabatan Position		Representative Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015
Lukita Dinarsyah Tuwo	Anggota Member	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Coordinating Ministry for Economic Affairs	
Suhasil Nazara	Anggota Member	Kementerian Keuangan	Ministry of Finance	
Arlinda	Anggota Member	Kementerian Perdagangan	Ministry of Trade	
Rida Mulyana	Anggota Member	Kementerian ESDM	Ministry of EMR	
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian	Ministry of Industry	
Gamal Nasir	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	Ministry of National Development Planning/Bappenas	
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)	GAPKI (Indonesian Palm Oil Association/IPOA)	

Komposisi Dewan Pengawas BDPKPS Periode 6 Juni - 16 Oktober 2018
Composition of the OPFMA's Supervisory Board for 6 June - 16 October 2018

Nama Pejabat Name	Jabatan Position		Representative Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015
Arlinda	Anggota Member	Kementerian Perdagangan	Ministry of Trade	
Rida Mulyana	Anggota Member	Kementerian ESDM	Ministry of EMR	
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian	Ministry of Industry	
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	Ministry of National Development Planning/Bappenas	
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)	GAPKI (Indonesian Palm Oil Association/IPOA)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 Tanggal 6 Juni 2018 Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018
Musdhalifah Machmud	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	
Heru Pambudi	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	
Bambang	Anggota Member	Bea dan Cukai	Customs and Excises	



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Dewan Pengawas Supervisory Board

Komposisi Dewan Pengawas BDPKPS Periode 6 Juni - 16 Oktober 2018

Composition of the OPPFMA's Supervisory Board for 16 October - 31 December 2018

Nama Pejabat Name	Jabatan Position		Representative Representative	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Rusman Heriawan	Ketua Chairman	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015
Arlinda	Anggota Member	Kementerian Perdagangan	Ministry of Trade	
Panggah Susanto	Anggota Member	Kementerian Perindustrian	Ministry of Industry	
Loso Judijanto	Anggota Member	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	Ministry of National Development Planning/Bappenas	
Joko Supriyono	Anggota Member	GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)	GAPKI (Indonesian Palm Oil Association/IPOA)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 Tanggal 6 Juni 2018 Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018
Musdhalifah Machmud	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	
Bambang	Anggota Member	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture	
Heru Pambudi	Anggota Member	Bea dan Cukai	Customs and Excises	
Djoko Siswanto	Anggota Member	Kementerian ESDM	Ministry of EMR	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 692/KMK.05/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Minister of Finance's Decree No. 692/KMK.05/2018 dated 16 October 2018

Jumlah dan komposisi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan BDPKPS serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

The number and composition are adjusted to OPPFMA's needs so that the supervisory activity can be conducted effectively, objectively, and independently, and it does not have conflict of interest that could interfere with the ability to carry out their duties and responsibilities.

Dewan Pengawas Independen dan Independensi Dewan Pengawas Independence of the Supervisory Board and Independent Supervisory Board

Dewan Pengawas Independen merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau dengan Komite Pengarah atau hubungan lainnya dengan BDPKPS yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

The Independent Supervisory Board is a member of the Supervisory Board that has no financial, management, share ownership and/or familial relationship with other fellow members of the Supervisory Board and/or with the Steering Committee, or other relationship with OPPFMA that may affect his/her ability to act independently.

Keberadaan Dewan Pengawas Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan berbagai *stakeholder*.

Pada praktiknya BDPKPS telah memiliki Dewan Pengawas Independen yang dijabat oleh Sdr. Joko Supriyono, sehingga Jumlah Pengawas Independen Perusahaan adalah sebanyak 1 (satu) orang dari total jumlah Dewan Pengawas sebanyak 9 orang atau sebesar 11,11% dari jumlah Dewan Pengawas.

Kriteria Dewan Pengawas Independen sebagai berikut:

1. Bukan Anggota Manajemen BDPKPS;
2. Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
3. Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi BDPKPS atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Pengawas;
4. Bukan pemasok atau pelanggan utama dari BDPKPS atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama.
5. Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan BDPKPS atau perusahaan afiliasi.

The Independent Supervisory Board is intended to create a more objective and independent climate, maintain fairness, and provide balance between the interests of various stakeholders.

In practice, OPFMA has an Independent Supervisory Board, i.e. Mr. Joko Supriyono. Thus, the Company has one (1) member of Independent Supervisory Board out of nine (9) members of the Supervisory Board, or equal to 11.11% of the Supervisory Board.

Criteria for the Independent Supervisory Board are as follows:

1. Shall not be a Member of OPFMA's Management;
2. Shall be free from business and other relationships that can influence decision making;
3. Shall not be a professional principal advisor or consultant for OPFMA or affiliates, or an employee who deals directly with service providers, at least three (3) years before becoming a member of the Supervisory Board;
4. Shall not be a supplier or main customer of OPFMA or affiliates or an employee of/or who has direct or indirect contact with the main supplier or customer.
5. Shall not have an agreement with OPFMA or affiliates.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Badan Lain Affiliation and Management in Other Institutions

Hubungan afiliasi Dewan Pengawas dilihat dari sifat hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan di Badan lain (rangkap jabatan) yang menimbulkan benturan kepentingan

The affiliation of the Supervisory Board is considered in terms of familial, family, financial, share ownership, and management in other institutions (concurrent positions) that may lead to a conflict of interest.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Dewan Pengawas Supervisory Board



Sifat Afiliasi Dewan Pengawas Berdasarkan Sifat Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepemilikan Saham The Nature Relationship of Supervisory Board

Nama Anggota Dewan Pengawas Name of Supervisory Board's Member	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with			Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship with			Hubungan Kepemilikan Saham Share Ownership		
	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemilik Modal Capital Owners	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemilik Modal Capital Owners	Direksi Board of Directors	Dewan Pengawas Supervisory Board	Pemilik Modal Capital Owners
Rusman Heriawan	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Arlinda	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Panggah Susanto	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Loso Judijanto	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Joko Supriyono	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Musdhalifah Machmud	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Bambang	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Heru Pambudi	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Djoko Siswanto	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Selama tahun 2018, tidak terdapat hubungan afiliasi keuangan, keluarga dan kemilikan Saham Dewan Pengawas dengan Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Pengarah

During 2018, there was no financial, familial, and shareholding relationship of the Supervisory Board with the Board of Directors, Supervisory Board, and the Steering Committee.

Pedoman, Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Charter, Duties and Responsibilities of the Supervisory Board

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/KMK.05/2015 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas Dewan Pengawas BDPKPS adalah melakukan pengawasan terhadap:

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola;
2. Menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana oleh Pejabat Pengelola kepada Komite Pengarah; dan
3. Melaksanakan tugas terkait diberikan oleh Komite Pengarah.

Kewajiban Dewan Pengawas BDPKPS adalah:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan. Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum (BLU);
2. Melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberi pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU; dan
4. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Based on the Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 on the Establishment of a Supervisory Board at the Public Service Agency of Oil Palm Plantation Fund Management Agency, the OPPFMA's Supervisory Board shall:

1. Supervise and guide the duties of the Management Officers;
2. Submit recommendations for Fund collection and management policies by the Management Officer to the Steering Committee; and
3. Carry out related tasks instructed by the Steering Committee.

The OPPFMA's Supervisory Board has the responsibility to:

1. Provide opinions and advice to the Minister of Industry and the Minister of Finance regarding the Strategic Business Plan and Budget proposed by the Public Service Agency (BLU) Management Officer;
2. Report to the Minister of Industry and the Minister of Finance in the event of declining symptoms of BLU's performance;
3. Follow the development of BLU activities, provide opinions and advice to the Minister of Industry and the Minister of Finance regarding any issues deemed important for BLU management; and
4. Provide input, suggestions, or responses to the BLU's financial statements to the BLU Management Officer.

The Supervisory Board reports its duties to the Minister of Finance periodically, at least once every semester, and at any time if deemed necessary.



Program Pengenalan Dewan Pengawas Baru Supervisory Board's Induction Program

Mengingat latar belakang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari beberapa pihak yang merupakan representasi Komite Pengarah, maka BPDPKS senantiasa mengadakan Program Pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat agar para anggota Dewan Pengawas dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif dan sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi BPDPKS secara umum.

Because the background of the members of Board of Commissioners are representation of some of the Steering Committee, OPPFMA always provides Orientation Program for new appointed members of the Supervisory Board, with expectation that the members of Supervisory Board shall get to know each other and to work together as a solid, comprehensive, and effective team; and as an event to provide introduction to OPPFMA's general conditions.

Selama tahun 2018 terdapat pengangkatan Anggota Dewan Pengawas yang baru, yaitu Musdhalifah Machmud, Bambang, Heru Pambudi, Djoko Siswanto. Kepada Anggota Dewan pengawas yang baru tersebut telah diberikan program pengenalan yang meliputi antara lain:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* di BPDPKS;
- Gambaran mengenai BPDPKS berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan mengenai kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta hak-hak Direksi dan Dewan Pengawas.

During 2018, there were newly appointed Members of the Supervisory Board, i.e. Musdhalifah Machmud, Bambang, Heru Pambudi, Djoko Siswanto. The new members of the Board of Supervisors shall be given an induction program that include:

- Good Governance principles in OPPFMA;
- OPPFMA's overview on objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, internal control, and other strategic issues;
- Explanations on the obligations, duties, responsibilities, and rights of the Board of Directors and Supervisory Board.

Rapat Dewan Pengawas Supervisory Board's Meeting

Adapun keputusan Rapat Dewan Pengawas baik yang internal maupun gabungan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak, atau Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas telah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas. Selama tahun 2018, Dewan Pengawas telah melaksanakan rapat internal sebanyak 12 kali dan rapat bersama Direksi sebanyak 12 kali dengan rincian sebagai berikut:

The decision in the internal meeting of the Supervisory Board or in the Joint Meeting shall be taken based on deliberation. In the event that the deliberation is not reached, then the decision is taken based on the majority of votes agreed, or the Supervisory Board may take legal and binding decisions without holding a meeting, provided that all members of the Supervisory Board have approved the decision in writing and the writing is signed by all members of the Supervisory Board. In 2018, the Supervisory Board has conducted 12 internal meeting and Joint Meetings with the Board of Directors, with details as follows:

Tabel Agenda Rapat Internal Dewan Pengawas
Table: Agenda for the Internal Meetings of the Supervisory Board

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
29 Januari 2018 January 29, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
23 Februari 2018 January 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
23 Maret 2018 March 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
23 April 2018 April 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
25 Mei 2018 May 25, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Dewan Pengawas Supervisory Board

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
5 Juli 2018 July 5, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
25 Juli 2018 July 25, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi; Tindak lanjut hasil rapat Komite Pengarah tanggal 6 Juli 2018	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion; Follow-up on the results of the Steering Committee's meeting on 6 July 2018
23 Agustus 2018 August 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi, dan Pendalaman Perpres 66/2018 dan KMK 545/2018	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion, and In-Depth Study of Perpres 66/2018 and KMK 545/2018
21 September 2018 September 21, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
29 Oktober 2018 October 29, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
30 November 2018 November 30, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
27 Desember 2018 December 27, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion



Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi Joint Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	
29 Januari 2018 January 29, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Arlinda (Anggota Dewan Pengawas), Lukita Dinarsyah Tuwo (Anggota Dewan Pengawas), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Arlinda (Member of the Supervisory Board), Lukita Dinarsyah Tuwo (Member of the Supervisory Board), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
23 Februari 2018 February 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Arlinda (Anggota), Lukita Dinarsyah Tuwo (Anggota), Loso Judijanto (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Rida Mulyana (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Arlinda (Member), Lukita Dinarsyah Tuwo (Member), Loso Judijanto (Member), Gamal Nasir (Member), Rida Mulyana (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
23 Maret 2018 March 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Joko Supriyono (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Gamal Nasir (Member), Joko Supriyono (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
23 April 2018 April 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Arlinda (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Arlinda (Member), Gamal Nasir (Member), Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
25 Mei 2018 May 25, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Arlinda (Anggota), Loso Judijanto (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Joko Supriyono (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Arlinda (Member), Loso Judijanto (Member), Gamal Nasir (Member), Joko Supriyono (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Dewan Pengawas Supervisory Board

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	
5 Juli 2018 July 5, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Rida Mulyana (Anggota), Joko Supriyono (Anggota), Arlinda (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Musdhalifah Machmud (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Rida Mulyana (Member) Joko Supriyono (Member), Arlinda (Member), Gamal Nasir (Member), Musdhalifah Machmud (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement.
25 Juli 2018 July 25, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi; Tindak lanjut hasil rapat Komite Pengarah tanggal 6 Juli 2018 Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion; Follow-up on the results of the Steering Committee's meeting on 6 July 2018	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Joko Supriyono (Anggota), Heru Pambudi (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Musdhalifah Machmud (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Joko Supriyono (Member), Heru Pambudi (Member), Gamal Nasir (Member), Musdhalifah Machmud (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
23 Agustus 2018 August 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi, dan Pendalaman Perpres 66/2018 dan KMK 545/2018 Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion, and In-Depth Study of Perpres 66/2018 and KMK 545/2018	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Rida Mulyana (Anggota), Arlinda (Anggota), Musdhalifah Machmud (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Rida Mulyana (Member), Arlinda (Member), Musdhalifah (Member), Machmud (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
21 September 2018 September 21, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Arlinda (Anggota), Heru Pambudi (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Arlinda (Member), Heru Pambudi (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Partnership.
29 Oktober 2018 October 29, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Musdhakifah (Anggota), Joko Supriono (Anggota), Bambang (Anggota), Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Musdhalifah (Member), Joko Supriono (Member), Bambang (Member), Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
30 November 2018 November 30, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Musdhakifah (Anggota), Joko Supriono (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Musdhalifah (Member), Joko Supriono (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.



Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
27 Desember 2018 December 27, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Musdhalifah (Anggota), Joko Supriono (Anggota), Heru Pambudi (Anggota). Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Musdhalifah (Member), Joko Supriono (Member), Heru Pambudi (Member).

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas
Table: Frequency and Attendance of the Supervisory Board's Meetings

Nama Name	Rapat Internal Dewan Pengawas Supervisory Board's Internal Meeting			Rapat Gabungan Dewan Pengawas bersama Direksi Joint Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors		
	Jumlah Total	Kehadiran Attended	%	Jumlah Total	Kehadiran Attended	%
Rusman Heriawan	12	12	100%	12	12	100%
Arlinda Imbang Jaya	12	7	58%	12	7	58%
Rida Mulyana	10	3	30%	10	3	30%
Gamal Nasir	6	4	66%	6	4	66%
Panggah Susanto	12	0	0%	12	0	0%
Suahasil Nazara	6	0	0%	6	0	0%
Joko Supriyono	12	6	50%	12	6	50%
Lukita Dinarsya Tuwo	6	2	33%	6	2	33%
Loso Judijanto	12	10	83%	12	10	83%
Musdhalifah Machmud*	6	6	100%	6	6	100%
Heru Pambudi*	6	4	66%	6	4	66%
Bambang*	6	2	33%	6	2	33%
Djoko Siswanto**	2	1	50%	2	1	50%

Keterangan :

* Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.05/2018 tanggal 6 Juni 2018 Sdr Lukita Dinarsya Tuwo, Sdr. Suahasil Nazara, Sdr Gamal Nasir digantikan oleh Sdr. Musdhalifah Machmud, Sdr. Pambudi dan Sdr. Bambang.
 ** berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 692/KMK.05/2018 tanggal 16 Oktober 2018 Sdr. Rida Mulyana digantikan oleh Sdr. Djoko Siswanto.

Description :

* Based on the Minister of Finance's Decree No. 454/KMK.05/2018 dated 6 June 2018, Mr. Lukita Dinarsya Tuwo, Mr. Suahasil Nazara, Mr. Gamal Nasir were replaced by Mrs. Musdhalifah Machmud, Mr. Pambudi, and Mr. Bambang.
 ** Based on the Minister of Finance's Decree No. 692/KMK.05/2018 dated 16 October 2018, Mr. Rida Mulyana was replaced by Mr. Djoko Siswanto.

Rata-rata tingkat kehadiran Dewan Pengawas dalam Rapat Internal sebanyak 51% dan Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi sebanyak 51%.

The attendance rate of the Supervisory Board in the Internal Meetings is 51%, and 51% in the Joint Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors.



Program Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Supervisory Board's Competency Development Program

Dalam rangka mengembangkan kompetensi anggota Dewan Pengawas, BDPKS menyediakan program pelatihan bagi anggota Dewan Pengawas sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2018 Dewan Pengawas BDPKS telah mengikuti kegiatan pelatihan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan bagian Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko.

OPPFMA provides training for the Supervisory Board as necessary in order to develop the competence of members of the Supervisory Board. During 2018, OPPFMA's Supervisory Board participated in training as detailed in the Company Profile Chapter, Education and/Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Head of Corporate Divisions, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit/Division.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Supervisory Board's Performance Assessment

Sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 tanggal 26 Juni 2015 Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perindustrian dan Menteri,Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selama tahun 2018, Dewan Pengawas telah menyusun Laporan Tugas Pengawasan Tahunan 2018.

In line with the Minister of Finance's Decree No. 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015, the Supervisory Board reports directly to the Minister of Industry and the Minister of Finance periodically, at least once in one semester, and at any time if deemed necessary. During 2018, the Supervisory Board has prepared the 2018 Annual Supervisory Task Report.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Tahun Buku 2018 Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Supervisory Board for Fiscal Year 2018

Dewan Pengawas BDPKS secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi. Selama tahun 2018, Dewan Pengawas BDPKS telah melakukan fungsi, tugas, peran dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

OPPFMA's Supervisory Board proactively supervises and provides advice to the Board of Directors. Supervision is carried out directly, including monitoring the follow-up on the recommendations of the Supervisory Board to the Board of Directors. In 2018, OPPFMA's Supervisory Board has carried out its functions, duties, roles, and responsibilities as follows:

- Rapat Bulanan Dewan Pengawas dengan Direksi
- Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
- Monthly Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors
- Meeting of the Supervisory Board with the Board of Directors is held regularly every month.



Dalam rapat bulanan tersebut umumnya dibahas tindak lanjut arahan Komite Pengarah, pencapaian target indikator kinerja utama, program-program yang belum berjalan/belum optimal seperti program peremajaan kebun kelapa sawit, program bantuan sarana dan prasarana, temuan audit auditor eksternal seperti BPK RI dan Kantor Akuntan Publik serta monitoring atas tindak lanjut temuan tersebut juga aspek tata kelola yang membutuhkan perbaikan baik terkait struktur dan pengisian jabatan anggota Direksi maupun *Standard Operational Procedure* (SOP). Sebelum rapat dengan Direksi, Dewan Pengawas mengadakan rapat internal yang dihadiri oleh Komite Audit yang sebelumnya mengadakan rapat dengan manajemen untuk membahas laporan kinerja operasional dan laporan kinerja keuangan serta hal-hal yang material lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- Rapat Dewan Pengawas di Luar Rapat Bulanan
- Selain rapat rutin setiap bulan, Dewan Pengawas juga mengadakan rapat untuk memfasilitasi dan mendorong pencapaian program-program tertentu. Beberapa hal yang dibahas antara lain upaya sinkronisasi data bea cukai dengan data surveyor terkait pungutan ekspor CPO, persiapan perubahan kebijakan B20 menjadi B30 serta perubahan kebijakan terkait pungutan ekspor CPO.
- Pemantauan dan tinjauan lapangan serta partisipasi pada kegiatan BDPKPS dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pejabat pengelola maka untuk kegiatan tertentu yang dilakukan BDPKPS, Ketua dan atau anggota Dewan Pengawas juga melakukan peninjauan dan evaluasi ke lapangan, seperti mengikuti kegiatan *launching* program peremajaan kebun kelapa sawit, kegiatan kemitraan, sosialisasi sawit, serta sebagai nara sumber dalam pembentukan forum kelapa sawit berkelanjutan dan penyusunan rencana aksi provinsi. Dewan Pengawas juga berpartisipasi dalam promosi sawit di dalam dan beberapa di luar negeri, seperti mengikuti kegiatan ke Pakistan dan India serta ikut sebagai bagian dari delegasi Indonesia pada Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Swiss dalam rangka negosiasi Indonesia *European Free Trade Association* (EFTA) - *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).

The monthly meeting discusses the follow-up of the Steering Committee's directives, the achievement of the key performance indicator targets, programs that were not yet running/not optimal, such as the palm oil plantation replanting program, facilities and infrastructure programs, external auditor's audit findings, such as BPK RI and the Public Accountant Office, as well as monitoring of the follow-up of the findings. The meeting also discusses aspects of governance that require improvements, both related to the structure and filling the positions of members of the Board of Directors, as well as standard operating procedures (SOP). Before the meeting with the Board of Directors, the Supervisory Board held an internal meeting that was attended by the Audit Committee. Prior to that, the Audit Committee held a meeting with management to discuss operational performance reports and financial statements, as well as other material matters to be submitted to the Supervisory Board.

- Additional Supervisory Board's Meeting
- In addition to regular monthly meetings, the Supervisory Board also holds meetings to facilitate and encourage the achievement of certain programs. Several matters that were discussed include efforts to synchronize customs data with surveyor data related to CPO export duties, preparations to amend B20 to B30 policies, and changes in policies related to CPO export duties.
- Monitoring and site visitation, as well as participation in OPFFMA's activities in terms of conducting supervision and fostering the duties of the Management Officers are important. Thus, for certain OPFFMA's activities, the Chairman and/or members of the Supervisory Board conduct a review and evaluation to the field, such as attending the launching of the palm oil plantation replantation program, partnership activities, palm oil socialization, as well as being the speaker in the establishment of sustainable palm oil forums and the preparation of provincial action plans. The Supervisory Board also participates in the promotion of palm oil domestically and abroad, by participating in activities to Pakistan and India, and being the Indonesian delegation during the Minister of Trade's Working Visit to Switzerland to negotiate the European Free Trade Association (EFTA) - Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) for Indonesia.



Komite Audit Audit Committee



Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*) dan efektifitas atas pemeriksaan auditor eksternal dan internal serta memastikan BDPKPS dikelola dengan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik.

The Supervisory Board is assisted by the Audit Committee in carrying out its supervisory duties and functions in terms of financial statements, internal control systems, and the effectiveness of the external and internal audit, and in ensuring that OPPFMA has been managed consistently in accordance with the Good Governance implementation.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi menjaga efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dari segi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit (eksternal/ internal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

The Audit Committee is a committee established by the Supervisory Board to work collectively and function to maintain the effectiveness of its duties and responsibilities, particularly in terms of monitoring and evaluation of internal audit planning and implementation, as well as monitoring of the follow-up on audit results (external/internal) to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.



Pada tahun 2018, Komposisi Komite Audit tidak mengalami perubahan, Komite Audit yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota sesuai dengan Keputusan Direktur Utama BDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BDPKS.

In 2018, the composition of the Audit Committee did not change. The Audit Committee consists of 1 Chairman and 2 Members, in accordance with Decree of OPPFMA's President Director No. KEP-08/DPKS/2016 on the Establishment of the Audit Committee at OPPFMA.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit **Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee's Members**

BDPKS telah menentukan persyaratan dalam menentukan kualifikasi untuk dapat menjadi anggota Komite Audit, antara lain (1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan, (2) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan terhadap perusahaan, (3) mampu berkomunikasi secara efektif, (4) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, (5) memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

OPPFMA has determined the requirements in the qualifications of members of the Audit Committee, i.e. (1) have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/inspection, (2) do not have personal interests/relationships that may cause conflicts with the company, (3) able to communicate effectively, (4) can provide sufficient time to complete their duties, (5) have expertise in finance or accounting.

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit **Appointment and Dismissal of Audit Committee's Members**

Pengangkatan anggota Komite Audit diputuskan melalui Keputusan Keputusan Direktur Utama BDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BDPKS tanggal 22 Februari Tahun 2016. Anggota Komite Audit dapat berhenti atau diberhentikan meskipun jabatannya belum berakhir, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia.

The appointment of members of the Audit Committee is stipulated by Decree of the OPPFMA's President Director No. KEP-08/DPKS/2016 on the Establishment of the Audit Committee at OPPFMA on 22 February 2016. Audit Committee's members may resign or be dismissed even though their tenure has not ended, if the person concerned resigned and/or died.



Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Composition of the Audit Committee

Jumlah Komite Audit BPPKS pada tahun buku 2018 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri 1 orang Ketua dan 2 orang Anggota dengan komposisi sebagai berikut:

In the fiscal year 2018, OPPFMA's Audit Committee consists of 1 Chairman and 2 Members with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position
Loso Judijanto	Ketua/Anggota Dewan Pengawas Chairman/ Member of Supervisory Board
Hary Nugroho S.	Anggota Member
Moehammad Hatta	Anggota Member

Pedoman Kerja Komite Audit

Audit Committee Charter

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Keputusan Direktur Utama BDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 tanggal 22 Februari 2016. Cakupan dari keputusan Direktur Utama tersebut terdiri dari penetapan Susunan Komite Audit Tahun 2016, Tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Audit, Fungsi Komite Audit dan Honorarium bagi Komite Audit.

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Decree of the OPPFMA's President Director No. KEP-08/DPKS/2016 dated 22 February 2016. The scope of the President Director's decree consists of the establishment of the 2016 Audit Committee's Structure, Duties, and responsibilities as Audit Committee, Audit Committee's Function, and Honorarium for the Audit Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee's Duties and Responsibilities

Komite Audit BDPKS sesuai dengan arahan Dewan Pengawas dan Keputusan Direktur Utama adalah bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Dewan Pengawas BDPKS. Sejalan dengan Keputusan Direktur Utama BDPKS No.KEP-08/DPKS/2016, fungsi Komite Audit BDPKS adalah:

OPPFMA's Audit Committee, in accordance with the direction of the Supervisory Board and the Decree of the President Director, reports directly to the OPPFMA's Supervisory Board. In line with Decree of OPPFMA's President Director No. KEP-08/DPKS/2016, the functions of OPPFMA's Audit Committee are:

- Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas
- Melakukan supervisi atas pelaksanaan pengendalian internal BDPKS
- Melakukan tugas lainnya sebagaimana arahan Dewan Pengawas

- Reviewing the reports submitted by the Board of Directors to the Supervisory Board
- Supervising the internal control of OPPFMA
- Carrying out other duties as directed by the Supervisory Board

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, Komite Audit memiliki kewenangan untuk mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, data keuangan, aset serta sumber daya BPDPKS lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPDPKS yang diakses untuk keperluan tugas tersebut.

In order to carry out their duties and responsibilities optimally, the Audit Committee has the authority to access records or information about employees, financial data, assets, and other OPPFMA resources related to their duties. The Audit Committee must maintain the confidentiality of OPPFMA's documents, data, and information that are necessarily accessed for the task.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meetings

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala. Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Rapat dilakukan sedikitnya sebulan sekali, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BPDPKS. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak, dengan ketentuan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hasil pembahasan rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Dewan Pengawas. Sepanjang tahun 2018, Komite Audit Perusahaan telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali.

The Audit Committee holds regular meetings. As stipulated in the Audit Committee Charter, the Meeting is held at least once a month, in accordance with the needs of OPPFMA. Meetings are chaired by the Chairman of the Audit Committee or Audit Committee Members. Decisions in the Committee's meeting are made through deliberation. In the event that deliberation is not reached, the decision shall be made based on the majority of votes, provided that the decision is made based on the most votes. The results of the Audit Committee meeting are recommendations that can be used by the Supervisory Board. Throughout 2018, the Audit Committee has held 12 meetings.

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, Komite Audit memiliki kewenangan untuk mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, data keuangan, aset serta sumber daya BPDPKS lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPDPKS yang diakses untuk keperluan tugas tersebut.

In order to carry out their duties and responsibilities optimally, the Audit Committee has the authority to access records or information about employees, financial data, assets, and other OPPFMA resources related to their duties. The Audit Committee must maintain the confidentiality of OPPFMA's documents, data, and information that are necessarily accessed for the task.



Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Audit Committee's Duties and Responsibilities Report

Pelaksanaan tugas Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit dan program atau rencana kerja yang telah disusun agar berjalan efektif dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

The duties execution of the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter and work programs or plans that have been compiled to be conducted effectively and to achieve the predetermined targets. Throughout 2018, the Audit Committee has carried out the following activities:

1	Penelaahan dan pemantauan atas semua informasi keuangan yang disajikan Manajemen;	Reviewing and monitoring all financial information presented by Management;
2	Penelaahan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal;	Reviewing and monitoring the effectiveness of the internal control;
3	Penelaahan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan hasil pemeriksaan oleh unit Internal Audit;	Reviewing and monitoring the effectiveness of the audit results of the Internal Audit unit;
4	Penelaahan dan pemantauan atas: a. Independensi dan objektivitas kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan menjadi auditor eksternal; b. Biaya jasa audit dan cakupan audit yang diajukan oleh KAP terpilih; c. Pelaksanaan perkembangan audit yang dilakukan oleh KAP; dan d. Laporan hasil audit yang disampaikan oleh KAP.	Review and monitoring: a. Independence and objectivity of the Public Accountant Firm (KAP) that will be the external auditor; b. Audit service fees and audit coverage submitted by the selected KAP; c. Audit implementation conducted by KAP; and d. Audit report submitted by the KAP.
5	Penelaahan dan pemantauan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Reviewing and monitoring compliance with applicable laws and regulations;
6	Penelaahan dan pemantauan serta melaporkan berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.	Reviewing and monitoring and reporting various potential risks that might occur.

Sekretaris Dewan Pengawas

Secretary of the Supervisory Board

Sekretaris Dewan Pengawas dalam struktur tata kelola BDPKS merupakan organ pendukung yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan memastikan implemetasi Good Governance terkait fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas beserta organnya telah memadai.

In the OPPFMA's governance structure, the Secretary of the Supervisory Board is a supporting organ that reports directly to the Supervisory Board. The Secretary of the Supervisory Board has an important role in supporting the smooth administration and ensuring the adequacy of Good Governance implementation related to the supervisory function by the Supervisory Board and its organs.

Pada tahun 2018, Sekretaris Dewan Pengawas masih dijabat oleh Reni Kustiari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-22/DPKS/ 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas. Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

In 2018, the Secretary of the Supervisory Board was held by Reni Kustiari, in accordance with the Decree of the President Director No. KEP-22/DPKS/2015 dated 30 December 2015 on the Establishment of the Secretariat of the Supervisory Board. The appointment of the Secretary of the Supervisory Board has obtained the approval from the Supervisory Board.

Profil Kepala Sekretariat Dewan Pengawas sebagai berikut: Profile of the Head of Secretariat of the Supervisory Board:



Reni Kustiari

Sekretaris Dewan Pengawas Secretary of the Supervisory Board

Tempat Tanggal Lahir:
Bengkulu, 18 Oktober 1958
Pendidikan: *Doctor of Philosophy in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University, Bogor, 2001-2007; Master of Agricultural Economics, University of Missouri, USA, 1992-1994; Bachelor in Agricultural Statistics, Bogor Agricultural University, Bogor, 1979-1982.*

Place and Date of birth:
Bengkulu, 18 October 1958
Education: *Doctor of Philosophy in Agricultural Economics, Bogor Agricultural University, Bogor, 2001-2007; Master of Agricultural Economics, University of Missouri, USA, 1992-1994; Bachelor in Agricultural Statistics, Bogor Agricultural University, Bogor, 1979-1982.*



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Sekretaris Dewan Pengawas Secretary of the Supervisory Board

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas Tasks and Responsibilities of the Supervisory Board's Secretary

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas, antara lain:

Duties and Responsibilities of the Supervisory Board's Secretary, among others:

1	Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh data dan informasi terkait dengan Dewan Pengawas;	Administer and document all data and information related to the Supervisory Board;
2	Menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting tentang Rapat Dewan Pengawas kepada Manajemen BDPKPS;	Provide and deliver important information about the Supervisory Board's Meeting to OPFMA's Management;
3	Memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas guna memperlancar tugas-tugas Dewan Pengawas; dan	Provide support to the Supervisory Board to streamline the Supervisory Board's duties; and
4	Sebagai penghubung antara Dewan Pengawas dengan Direksi.	As a liaison of the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Pengawas Competency Development for the Supervisory Board's Secretary

Selama tahun 2018, Sekretaris Dewan Pengawas telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi berupa pelatihan, workshop atau seminar, sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas pelaksanaan tugas Sekretaris Pengawas.

During 2018, the Secretary of the Supervisory Board has participated in several competency development programs in the form of training, workshops/seminars, to improve the role and quality of the duties execution of the Supervisory Board's Secretary.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Supervisory Board's Secretary Duties Execution

Sekretaris Dewan Pengawas telah menjalankan berbagai kegiatan dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang juga merupakan bagian dalam implementasi GG BDPKS. Kegiatan yang telah dilakukan Sekretaris Pengawas adalah sebagai berikut:

The Secretary of the Supervisory Board has carried out various activities in assisting the Supervisory Board's duties, which are also part of the implementation of OPPFMA's Good Governance. Activities of the Supervisory Board's Secretary are as follows:

- | | |
|---|--|
| 1. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Pengawas dalam rangka pengambilan keputusan; | 1. Providing information for the Supervisory Board's needs in terms of decision making; |
| 2. Mempersiapkan rapat-rapat dalam lingkungan Dewan Pengawas baik yang bersifat rutin maupun non rutin dengan berbagai pihak; | 2. Preparing meetings within Supervisory Board both routine and non-routine with various parties; |
| 3. Membuat risalah rapat atas rapat-rapat rutin maupun non rutin Dewan Pengawas dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; | 3. Compiling minutes of meetings for routine and non-routine meetings of the Supervisory Board and submitting them to the parties concerned; |
| 4. Melaksanakan dan melaporkan hasil pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan operasional BDPKS, ketaatan terhadap ketentuan baik ketentuan intern maupun eksternal serta perundang-undangan lain yang berlaku; | 4. Conducting and reporting the results of supervision of the duties and responsibilities of the Board of Directors in terms of OPPFMA's operations, compliance with both internal and external provisions, and other applicable laws; |
| 5. Melaksanakan dan melaporkan hasil pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan dengan Pelaksanaan <i>Good Governance</i> (GG) BDPKS; | 5. Conducting and reporting the results of supervision of the duties and responsibilities of the Directors related to the OPPFMA's Good Governance (GG) Implementation; |
| 6. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Pengawas, baik untuk keperluan Dewan Pengawas dan Komite Audit, serta melakukan pengadministrasiannya. | 6. Carrying out activities in the secretarial field within the Supervisory Board, both for the needs of the Supervisory Board and the Audit Committee, and administering it. |



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Direksi

Board of Directors





Direksi bertanggung jawab penuh secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BDPKS dalam mencapai maksud dan tujuan BDPKS. Setiap Direktur wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BDPKS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab kepada Komite Pengarah yang merupakan perwujudan akuntabilitas BDPKS.

The Board of Directors is fully responsible collectively in carrying out its duties for the benefit of OPPFMA in achieving OPPFMA's targets and objectives. Every Director has the obligation in good faith and with full responsibility to carry out his duties for OPPFMA's interests and business, taking into account prevailing laws and regulations. The Board of Directors reports directly to the Steering Committee, which is the embodiment of OPPFMA's accountability.



Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Requirements, Appointment, and Dismissal of the Board of Directors

Calon anggota Direksi BDPKS wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam BDPKS. Persyaratan kemampuan mencakup memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Adapun persyaratan kepatutan terdiri dari pengalaman, keahlian, integritas, kepemimpinan, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Komite Pengarah melalui proses transparan, anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan Komite Pengarah dan pencalonan tersebut mengikat bagi Komite Pengarah. Pemberhentian anggota Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi Induk Badan melalui Komite Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Pengarah dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan;
2. Masa jabatan anggota Pejabat Pengelola ditetapkan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
3. Anggota Pejabat Pengelola sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan;
4. Anggota Pejabat Pengelola dapat mengundurkan diri dari jabatan direksi dengan mengirimkan surat pengunduran diri. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengunduran diri tersebut, jika tidak ada jawaban dari Kementerian Keuangan, berarti persetujuan diri tersebut disetujui.

Candidates of OPPFMA's Board of Directors must fulfill the capability and suitability requirements as regulated in OPPFMA. The capability means having understanding of management issues related to one of the management's functions, having adequate knowledge in the field of business of the company, and having adequate integrity, competence, and reputation. The suitability consists of experience, expertise, integrity, leadership, the said person has never been declared bankrupt, has never been not a member of the Board of Directors and the Supervisory Board who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt, and has never been convicted of a criminal offense that harms the state finances and/or related to the financial sector.

The members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the Steering Committee through a transparent process, members of the Directors are appointed from candidates proposed by the Steering Committee and the nomination is binding for the Steering Committee. Dismissal of members of the Board of Directors is entirely the authority of the Board of Directors of the Parent through the Steering Committee, in accordance with statutory provisions. The Steering Committee may dismiss members of the Board of Directors at any time for clear reasons. The appointment and dismissal of the Management Officer are as follows:

1. The Management Officer is appointed and dismissed by the Minister of Finance;
2. The tenure of a Management Officer is five (5) years, and afterward, the Officer may be reappointed for one (1) term of office;
3. Management Officers may be dismissed at any time before the end of their term of office;
4. Members of the Management may resign from the position at the Board of Directors by letter of resignation. If within thirty (30) days of the resignation date, there is no response from the Ministry of Finance, the resignation is approved.

Komposisi Direksi

Board of Directors' Composition

Direksi BDPKPS periode Januari sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 6 (enam) orang. Direksi BDPKPS telah melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh Komite Pengarah guna menjamin calon Direksi memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lainnya dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Selanjutnya Direksi terpilih diangkat dan diberhentikan oleh Komite Pengarah melalui proses yang transparan. Adapun komposisi dan susunan Direksi sebagai berikut:

From January up to 31 December 2018, OPFFMA has a Board of Directors consisting of six (6) people. The OPFFMA's Board of Directors has passed the fit and proper test by the Steering Committee to ensure candidates for the Board of Directors have integrity, competence, reputation, free from affiliation or other conflicts of interest, and experience and expertise needed in carrying out their respective functions and duties. Further, the selected Directors are appointed and dismissed by the Steering Committee through a transparent process. The composition of the Board of Directors is as follows:

Nama Pejabat Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Dono Boestami	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Tulus Budhianto	Direktur Kemitraan Director of Partnership	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Agustinus Antonius*	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Fund Planning and Management	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Herdrajat Natawidjaja	Direktur Penghimpun Dana Director of Fund Collection	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Edi Wibowo	Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2017 tanggal 2 Februari 2017 Minister of Finance's Decree No. 57/KMK.05/2017 dated 2 February 2017
Catur Ariyanto Widodo	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372/KMK.01/2016 tanggal 20 Mei 2016 Minister of Finance's Decree No. 372/KMK.01/2016 dated 20 May 2016

* Menjabat sampai dengan Juli 2018 Served until July 2018



Pedoman, Tugas dan Tanggungjawab, dan Fungsi Direksi

Guidelines, Duties and Responsibilities, and Functions of the Board of Directors

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Juni 2015.

Direksi BDPKPS bertanggung jawab penuh atas pengurusan BDPKPS untuk kepentingan dan tujuan BDPKPS. Direksi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan BDPKPS sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BDPKPS. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut merupakan tugas khusus masing-masing Anggota Direksi BDPKPS:

In carrying out the duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedures of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency dated 11 June 2015.

The OPPFMA's Board of Directors is fully responsible for managing OPPFMA for the interests and objectives of OPPFMA. The Board of Directors is responsible to the Minister of Finance as an embodiment of accountability of OPPFMA's management in accordance with OPPFMA's governance principles. The Board of Directors has clear duties and responsibilities in accordance with their respective functions. The following are the duties of each member of the Board of Directors of OPPFMA:

Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibility	
Direktur Utama President Director	Melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut Dana, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Carrying out the management of the Oil Palm Plantation Fund, hereinafter referred to as the Fund, in accordance with the policies stipulated by the Minister of Finance and based on statutory provisions.
Direktorat Penghimpunan Dana Directorate of Fund Collection	Direktorat Penghimpunan Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan dana lainnya.	The Directorate of Fund Collection has duties to coordinate the preparation of fund collection for replantation of palm oil plantations, research and development, promotion of palm oil, development of facilities and infrastructure of palm oil plantations from fees collection and contributions from business actors and other fund raising.
Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana Directorate of Fund Planning and Management	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan strategi bisnis, mengembangkan rencana pengalokasian dana, pengembangan dan penempatan dana yang dikelola pada instrumen investasi.	The Directorate of Fund Planning and Management is responsible for formulating business strategy planning policies, developing plans for allocating funds, developing and placing funds managed on investment instruments.
Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Directorate of Finance, General, Compliance, and Risk Management	Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (settlement), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.	The Directorate of Finance, General, Compliance, and Risk Management coordinates the preparation of strategic plans and business plans for the annual budget, work plans and work unit budgets, budget management, accounting and reporting, settlement, human resource management, public affairs, management organizational risk, and compliance with statutory provisions.



Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibility
Direktorat Penyaluran Dana Directorate of Fund Disbursement	Direktorat Penyaluran Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran Dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Dana, serta melakukan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan Dana. The Directorate of Fund Disbursement coordinates the preparation of Fund disbursement plans, verification and appraisal of proposals for the development of palm oil commodities, and disbursing Funds to fund development, monitoring, and evaluation of the Fund disbursement, as well as carrying out custodial functions of the Funds, including recording, monitoring, and reporting the Funds.
Direktorat Kemitraan Directorate of Partnership	Direktorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi perusahaan Lembaga Kemasyarakatan, dan civil society untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. The Directorate of Partnership has the task to prepare management plans for partnerships with Small and Medium Enterprises and Cooperatives, community organizations, and civil society for the development of sustainable palm oil.

Jabatan Position	Fungsi Function
Direktur Utama President Director	Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja; Penghimpunan Dana termasuk rencana dan strategi pemungutan biaya dan pengembangan dana; Pengelolaan dana yang meliputi penempatan/ investasi dana; Perencanaan dan penyaluran dana ; Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan penyelesaian transaksi (<i>settlement</i>) , serta pelaporan; Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas BDPKPS. Preparation of business strategic plans, Business and Budget Plan, and Work Program and Work Unit Budgets; Fund Collection includes plans and strategies for collecting and developing funds; Fund management, which includes the placement/investment of funds; Fund planning and disbursement; Budget preparation and implementation, accounting, settlement, and reporting; Internal control and risk management with the prudential principle in the OPFFMA's duties.
Direktorat Penghimpunan Dana Directorate of Fund Collection	Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; Pelaksanaan penghimpunan biaya dan iuran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan turunannya; Pelaksanaan penghimpunan dana lainnya; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; Pelaporan realisasi penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit. Material preparation and coordination for the plan for raising fund collection of palm oil plantation activities; Implementation of the fee collection and contributions of palm oil plantation businesses and their derivatives; Implementation of other fund raising; Monitoring and evaluating the implementation of fund raising for palm oil plantation activities; Reporting on the realization of fund raising for palm oil plantation activities.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Direksi Board of Directors

Jabatan Position	Fungsi Function	
Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana Directorate of Fund Planning and Management	Perumusan Kebijakan rencana usaha berupa rencana strategis bisnis;	Policy Formulation of business plans in the form of strategic business plans;
	Penyiapan bahan penyusunan alokasi dan rencana bisnis tahunan sebagai bahan penyusunan RBA tahunan;	Material for preparing annual allocations and business plans as materials for preparing annual RBA;
	Pengembangan rencana pengalokasian dana;	Development of funds allocation plans;
	Pengembangan dan penempatan dana yang dikelola dan pendapatan pada instrumen investasi;	Development and placement of managed funds and income on investment instruments;
	Pengelolaan kerjasama pengelolaan dana;	Fund collaboration management;
	Penyusunan rencana penyaluran dana terkait biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana;	Plan formulation for fund disbursement related to biodiesel, replantation, palm oil human resources development, research and development, promotion, facilities, and infrastructure;
	Pengelolaan riset, data, dan informasi	Management of research, data, and information.
Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Directorate of Finance, General, Compliance, and Risk Management	Penyusunan rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran;	Preparation of the annual strategic plan, business and budget plan (RBA), work plan and budget;
	Pengelolaan Anggaran dan Keuangan;	Budget and Financial Management;
	Penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi	Compilation of accounting systems and manuals, financial statements and performance reports, and accounting for each transaction
	Pelaksanaan setelmen;	Settlement;
	Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia;	Planning, human resources development and management;
	Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan;	Public and domestic affairs;
	Pengelolaan risiko dan kepatuhan internal.	Risk management and internal compliance.
Direktorat Penyaluran Dana Directorate of Fund Disbursement	Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran pengembangan kelapa sawit berkelanjutan;	Material preparation and coordination for plan to disburse sustainable palm oil development;
	Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan kelapa sawit dan penyaluran untuk kegiatan pengembangan kelapa sawit;	Verification and evaluation of proposals for palm oil activities and distribution for palm oil development activities;
	Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana kegiatan biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana;	Implementation for fund disbursement related to biodiesel, replantation, human resources development, research and development, promotion, facilities, and infrastructure;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan;	Monitoring and evaluating the fund disbursement for sustainable palm oil development;
	Pelaporan realisasi penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.	Reporting on the realization of the sustainable palm oil development funds.



Jabatan Position	Fungsi Function
Direktorat Kemitraan Directorate of Partnership	Penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan rencana kemitraan;
	Pelaksanaan identifikasi kemitraan kegiatan pengembangan kelapa sawit;
	Pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Perusahaan, Lembaga, Kemasyarakatan, dan <i>civil society</i> ;
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kemitraan kelapa sawit berkelanjutan;
	Pelaporan realisasi kemitraan kelapa sawit berkelanjutan.

Program Pengenalan Direksi Baru Board of Directors' Induction Program

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai BPDPKS. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai BPDPKS, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

Program pengenalan yang meliputi antara lain:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* di BPDPKS
- Gambaran mengenai BPDPKS berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya
- Keterangan mengenai kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta hak-hak Direksi dan Dewan Pengawas.

Directors' Member who is appointed for the first time shall be given orientation/introduction program about the OPPFMA. The program's objective is to provide understanding of OPPFMA's vision, mission, and values, code of conduct, organization structure, and Board Manual for Board of Directors.

The induction programs include:

- Good Governance principles in OPPFMA
- OPPFMA's overview of objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, internal control, and other strategic issues.
- Explanations on the obligations, duties, responsibilities, and rights of the Board of Directors and Supervisory Board.



Rapat Direksi Board of Directors' Meeting

Rapat internal Direksi selama tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 22 kali. Rapat gabungan bersama Dewan Komisaris selama tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 12 kali. Agenda dan peserta rapat internal Direksi dapat dilihat sebagai berikut :

In 2018, the Board of Directors held 22 internal meetings. In 2018, they held joint meetings with the Board of Commissioners 12 times. The agenda and participants of the Board of Directors' internal meetings are as follows:

Tabel Agenda Rapat Internal Direksi

Table: Board of Directors' Internal Meeting Agenda

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
29 Januari 2018 January 29, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, <i>Replanting</i> , Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
23 Februari 2018 January 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, <i>Replanting</i> , Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion



Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
20 Maret 2018 March 20, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
10 April 2018 April 10, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
17 April 2018 April 17, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
15 Mei 2018 May 15, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
21 Mei 2018 May 21, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
3 Juli 2018 July 3, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
9 Juli 2018 July 9, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
24 Juli 2018 July 24, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Direksi Board of Directors

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
15 Agustus 2018 August 15, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi, dan Pendalaman Perpres 66/2018 dan KMK 545/2018	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion, and In-Depth Study of Perpres 66/2018 and KMK 545/2018
21 Agustus 2018 August 21, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi, dan Pendalaman Perpres 66/2018 dan KMK 545/2018	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion, and In-Depth Study of Perpres 66/2018 and KMK 545/2018
30 Agustus 2018 August 30, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi, dan Pendalaman Perpres 66/2018 dan KMK 545/2018	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion, and In-Depth Study of Perpres 66/2018 and KMK 545/2018
18 September 2018 September 18, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
2 Oktober 2018 October 2, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
16 Oktober 2018 October 16, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
13 November 2018 November 13, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
29 November 2018 November 29, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
11 Desember 2018 December 11, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion
26 Desember 2018 December 26, 2018	Kemajuan Program Biodiesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi	Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion



Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi Joint Meeting of the Supervisory Board and the Board of Directors

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda		Peserta Rapat Meeting Participants
29 Januari 2018 January 29, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, <i>Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Arlinda (Anggota Dewan Pengawas), Lukita Dinarsyah Tuwo (Anggota Dewan Pengawas), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Arlinda (Member of the Supervisory Board), Lukita Dinarsyah Tuwo (Member of the Supervisory Board), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
23 Februari 2018 February 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, <i>Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Arlinda (Anggota), Lukita Dinarsyah Tuwo (Anggota), Loso Judijanto (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Rida Mulyana (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Arlinda (Member), Lukita Dinarsyah Tuwo (Member), Loso Judijanto (Member), Gamal Nasir (Member), Rida Mulyana (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
23 Maret 2018 March 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, <i>Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Joko Supriyono (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Gamal Nasir (Member), Joko Supriyono (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
23 April 2018 April 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, <i>Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Arlinda (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Arlinda (Member), Gamal Nasir (Member), Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
25 Mei 2018 May 25, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, <i>Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Arlinda (Anggota), Loso Judijanto (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Joko Supriyono (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Arlinda (Member), Loso Judijanto (Member), Gamal Nasir (Member), Joko Supriyono (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Direksi Board of Directors

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda		Peserta Rapat Meeting Participants
5 Juli 2018 July 5, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi <i>Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Rida Mulyana (Anggota), Joko Supriyono (Anggota), Arlinda (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Musdhalifah Machmud (Anggota), Direktur Utama BDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Rida Mulyana (Member) Joko Supriyono (Member), Arlinda (Member), Gamal Nasir (Member), Musdhalifah Machmud (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement.
25 Juli 2018 July 25, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi; Tindak lanjut hasil rapat Komite Pengarah tanggal 6 Juli 2018 <i>Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion; Follow-up on the results of the Steering Committee's meeting on 6 July 2018</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Joko Supriyono (Anggota), Heru Pambudi (Anggota), Gamal Nasir (Anggota), Musdhalifah Machmud (Anggota), Direktur Utama BDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Joko Supriyono (Member), Heru Pambudi (Member), Gamal Nasir (Member), Musdhalifah Machmud (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
23 Agustus 2018 August 23, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi, dan Pendalaman Perpres 66/2018 dan KMK 545/2018 <i>Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion, and In-Depth Study of Perpres 66/2018 and KMK 545/2018</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Rida Mulyana (Anggota), Arlinda (Anggota), Musdhalifah Machmud (Anggota), Direktur Utama BDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Rida Mulyana (Member), Arlinda (Member), Musdhalifah (Member), Machmud (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
21 September 2018 September 21, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi <i>Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Arlinda (Anggota), Heru Pambudi (Anggota), Direktur Utama BDP Sawit, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Arlinda (Member), Heru Pambudi (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Planning and Management, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Partnership.
29 Oktober 2018 October 29, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi <i>Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Musdhakifah (Anggota), Joko Supriono (Anggota), Bambang (Anggota), Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Musdhalifah (Member), Joko Supriono (Member), Bambang (Member), Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.
30 November 2018 November 30, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, <i>Replanting</i> , Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi <i>Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion</i>	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Musdhakifah (Anggota), Joko Supriono (Anggota), Direktur Utama BDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan.	Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Musdhalifah (Member), Joko Supriono (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.



Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
27 Desember 2018 December 27, 2018	Kemajuan Program Bio-diesel, Replanting, Sarana dan Prasarana, Riset, Kerja sama dan Promosi Progress on Biodiesel Program, Replanting, Facilities and Infrastructure, Research, Cooperation, and Promotion	Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas), Loso Judijanto (Anggota), Musdhalifah (Anggota), Joko Supriono (Anggota), Direktur Utama BPDP Sawit, Direktur Penghimpunan Dana, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Penyaluran Dana, Direktur Kemitraan. Rusman Heriawan (Chairman of the Supervisory Board), Loso Judijanto (Member), Musdhalifah (Member), Joko Supriono (Member), OPPFMA's President Director, Director of Fund Collection, Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management, Director of Fund Disbursement, Director of Partnership.

Frekuensi Rapat Internal Direksi Tahun 2018 Frequency of Board of Directors' Internal Meetings in 2018

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Frequency Attended	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Dono Boestami	Direktur Utama President Director	19	86%
Catur Ariyanto Widodo	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management	20	91%
Agustinus Antonius	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Fund Planning and Management	7	32%
Hendrajat Natawidjaja	Direktur Penghimpun Dana Director of Fund Collection	11	50%
Edi Wibowo	Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement	18	81%
Tulus Budhianto	Direktur Kemitraan Director of Partnership	22	100%
Rata-rata tingkat Kehadiran Rapat Internal Direksi Attendance at Board of Directors' internal meetings			73%

Frekuensi Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 Frequency of Joint Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2018

Nama Name	Jabatan Position	Frekuensi Kehadiran Frequency Attended	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Dono Boestami	Direktur Utama President Director	10	83%
Catur Ariyanto Widodo	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General, Compliance, and Risk Management	12	100%
Agustinus Antonius	Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Fund Planning and Management	5	42%
Hendrajat Natawidjaja	Direktur Penghimpun Dana Director of Fund Collection	11	92%
Edi Wibowo	Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement	12	100%
Tulus Budhianto	Direktur Kemitraan Director of Partnership	11	92%
Rata-rata tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Direksi Attendance at Board of Directors' Joint Meetings			85%



Direksi Board of Directors

Rata-rata tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Internal sebanyak 73% dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Pengawas sebanyak 85%.

The attendance rate of the Board of Directors in Internal Meetings is 73%, and 85% in the Joint Meeting of the Board of Directors and Supervisory Board.

Program Pengembangan Kompetensi Direksi Directors' Competency Development Program

BDPKS telah memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi bagi Direksi dalam rangka meningkatkan pengembangan dan kompetensi melalui kegiatan berupa pelatihan dan seminar. Direksi BDPKS telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi selama tahun 2018 sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Profil uraian Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Kepala Divisi Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit/Divisi Manajemen Risiko.

OPPFMA facilitates competency development for the Board of Directors to enhance development and competence through activities in the form of training and seminars. The OPPFMA's Board of Directors has participated in training activities and seminars to improve competence during 2018, as explained in the Profile, Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Heads of Corporate Divisions, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit/Division.





Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Remuneration Policy of the Supervisory Board and Board of Directors

BDPKKS dalam menentukan Remunerasi Bagi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum tanggal 16 Februari 2006.

In determining remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors, OPPFMA refers to the Minister of Finance Regulation No. 10/PMK.02/2006 on the Remuneration Determination for Managing Officers, Supervisory Board, and Employees of Public Service Agencies dated 16 February 2006.

Besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran remunerasi untuk Dewan Pengawas dan Direksi.

The amount of remuneration for the Supervisory Board and Board of Directors is proposed by the Minister/Institution Chairman to the Minister of Finance cq. Director General of Budget and Fiscal Balance. Afterward, the Minister of Finance shall stipulate Minister of Finance Regulation on the amount of remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors.



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Indicators to Determine the Remuneration of the Supervisory Board and Board of Directors

Besaran Remunerasi ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan;
2. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
3. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan;
4. Kinerja operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

The remuneration is determined by considering the following factors:

1. Proportion, a consideration of the size and number of assets managed by BLU and the level of service;
2. Equality, by paying attention to similar service industries;
3. Compliance, adjusting the ability of the BLU's income concerned;
4. The BLU's operational performance as determined by the Minister/Institutional Chairman, by taking into account at least financial, service, quality, and benefits indicators for the community.

Struktur Remunesari Dewan Pengawas dan Direksi

Remuneration Structure of the Supervisory Board and Board of Directors

No	Remunerasi Dewan Pengawas Supervisory Board's Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration
1	Honorarium Honorarium	Gaji Salary
2	Insentif Incentive	Insentif Incentive
3	Bonus atas prestasi Achievement bonus	Bonus atas prestasi Achievement bonus
4	Pensiun Pension	Pensiun Pension
5	Pesangon Severance Pay	Pesangon Severance Pay

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Non-Performance Bonuses and Stock Options of the Board of Commissioners and Directors

Tidak terdapat bonus non kinerja dan opsi saham yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

There are no non-performance bonuses and stock options provided to each member of the Supervisory Board and Directors.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi

Diversity Policy for The Composition of The Supervisory Board and Board of Directors

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPDPKS diangkat dengan pertimbangan aspek keberagaman pendidikan, pengalaman kerja, gender, usia dan keahlian. Sampai dengan tahun 31 Desember 2018, BPDPKS belum memiliki kebijakan keberagaman Dewan Pengawas dan Direksi secara khusus karena penetapan Dewan Pengawas dan Direksi menjadi hak mutlak Kementerian. Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Members of BPDPKS's Supervisory Board and Board of Directors are appointed with consideration for diversity in education, work experience, gender, age, and expertise. As of 31 December 2018, BPDPKS did not yet have a policy on diversity of the Supervisory Board and the Board of Directors specifically, because the establishment of the Supervisory Board and the Board of Directors was an absolute right of the Ministry. The composition of the Supervisory Board and the Board of Directors must enable effective, appropriate, and quick decision making, and the ability to act independently.

Selain itu, Komposisi anggota Dewan Pengawas BPDPKS yang berjumlah sembilan orang berasal dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/ Dewan Kawasan dan satu orang berasal dari unsur tenaga ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

In addition, the Composition of the members of OPFMA's Supervisory Board consists of nine people from the State Ministry/Institution/Regional Council officials; and one from the expert element as regulated in the Minister of Finance Regulation No. 95/PMK.05/2016 on the Supervisory Board of the Public Service Agencies.



Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi yang beragam diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dari berbagai bidang keilmuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi agar paradigma dalam pengambilan keputusan menjadi lebih luas. Keberagaman komposisi Dewan Pengawas dan Direksi BDPKS telah mempertimbangkan unsur keberagaman dari sisi pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BDPKS Tahun 2018 dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

The diverse composition of the Supervisory Board and Board of Directors is expected to provide alternative solutions to problems and encourage more objective and comprehensive decision making. Therefore, various scientific fields approach is necessary based on the competencies of each member of the Supervisory Board and Board of Directors to make decision in a broader sense. The diversity of the composition of OPPFMA's Supervisory Board and Board of Directors has taken into account the diversity element in education, expertise, work experience, gender, and age. The diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition of OPPFMA is as follows:

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas **Diversity of the Supervisory Board**

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Rusman Heriawan	Laki-laki Male	66 Tahun 66 Years	• S1 Ekonomi • S2 Perencanaan Wilayah dan Pedesaan • S3 Institut Pertanian Bogor • Bachelor of Economics • Master of Regional and Rural Planning • Doctoral Degree from Bogor Agricultural Institute	• Kepala Badan Pusat Statistik (2006-2011) • Deputi Bidang Statistik Sosial (2004-2006) • Direktur Statistik Perdagangan dan Jasa (2001-2004) • Peneliti Utama, Balitbang Pertanian-Kementerian Pertanian, (2006 s.d. sekarang) • Ketua Dewan Pengawas BDPKS
Arlinda	Perempuan Female	54 Tahun 54 Years	• S1 Institut Pertanian Bogor • S2 Degree in Economics • Bachelor from Bogor Agricultural Institute • Master of Economics	• Atase Perdagangan - KBRI di Washington DC USA (2006 - 2009) • Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan (2009 - 2011) • Direktur Impor, Dit. Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (2012) • Kepala Pusat Hubungan Masyarakat (2012 - 2013) • Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (2013 - 2015) • Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa (2015 - 2016 - sekarang)



Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Panggah Susanto	Laki-laki Male	59 Tahun 59 Years	• S1 Teknik Kimia • S2 Manajemen • Bachelor of Chemical Engineering • Master of Management	• Staf Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (1994 - 1996) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik (1996 - 2003) • Direktur Industri Maritim dan Jasa Keteknikan (2005 - 2008) • Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan (2008 - 2010) • Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (2010 - 2013) • Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur (2011 - 2014) • Plt Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (2014 - 2015) • Komisaris PT Petrokimia Gresik (2016) • Komisaris Utama PT Rekayasa Industri (2014 - 2016) • Direktur Jenderal Industri Agro (Juli 2013 - sekarang)
Loso Judijanto	Laki-laki Male	46 Tahun 46 Years	• S1 Sains • S2 Manajemen • Master of Statistics The University of New South Wales • Bachelor of Science • Master of Management • Master of Statistics from the University of New South Wales	• Peneliti Kebijakan Publik di <i>Center for Policy and Implementation Studies</i> (Oktober 1995 - Juni 1996) • Sekretaris Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (Januari 1999 - Desember 2003) • Partner and Managing Partner - SDP Corporate Governance Specialists (Januari 2001 - November 2004) • Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (November 2004 - Maret 2007) • Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Desember 2007 - Mei 2009) • Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Mei 2009 - Februari 2011) • Komisaris Independen PT Bank Bukopin Tbk (Maret 2009 - Maret 2010) • Ketua Komite Risk Management Oversight PT Bank Bukopin Tbk, Komisaris PT Telkomsel (Juli 2007 - Mei 2012)



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for The Composition of The Supervisory Board and Board of Directors

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
• Komite Audit PT Indonesia Infrastructure Finance (2012 - 2014) • PT Berau Coal Energy Tbk (2010 - 2014) • PT Trimegah Securities Tbk (2010 - 2014) • PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007 - 2009) • Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2014 - Agustus 2015) • Staf Khusus Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Agustus 2015 - Agustus 2016) • Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (Agustus 2016 - sekarang)				
• Audit Committee of PT Indonesia Infrastructure Finance (2012-2014) • PT Berau Coal Energy Tbk (2010 - 2014) • PT Trimegah Securities Tbk (2010 - 2014) • PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2007 - 2009) • Special Staff of the Coordinating Minister for Economic Affairs (October 2014 - August 2015) • Special Staff of the State Minister for National Development Planning/Head of Bappenas (August 2015 - August 2016) • Special Staff of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Defense Agency (August 2016-present)				
Joko Supriyono	Laki-laki Male	54 Tahun 54 Years	• S1 Pertanian • Bachelor of Agriculture	• Asisten Afdeling di PT Perkebunan II, Medan (1986 - 1994) • Tenaga Instruktur di PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986 -1994) • PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai <i>Departemen Head-Human Resources</i> (1995 - 1999) • <i>Division Head - Human Resources</i> (2000 - 2002) • <i>Area Director - Riau Region</i> (2002 - 2005) • <i>Deputy Director - Operation</i> (2005 - 2007) • <i>Director - Human Resources</i> (2007 - 2009) • <i>Director - Env & Social Responsibility</i> (2009 - 2011) • <i>Director in charge of Sustainability and Public Relation</i> • <i>President Director of Sumatera Operation</i> (2011 - 2015) • <i>Director in charge of Sustainability and Public Relation</i> • <i>President Commissioner of Sumatera Operation</i> (2015 - sekarang)
• Assistant Afdeling at PT Perkebunan II, Medan (1986-1994) • Instructor Staff at PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994) • PT Astra Agro Lestari Tbk as Head of Human Resources Department (1995-1999) • Division Head - Human Resources (2000 - 2002) • Area Director - Riau Region (2002 - 2005) • Deputy Director - Operation (2005 - 2007) • Director - Human Resources (2007 - 2009) • Director - Env & Social Responsibility (2009 - 2011) • Director in charge of Sustainability and Public Relation • President Director of Sumatera Operation (2011-2015) • Director in charge of Sustainability and Public Relation • President Commissioner of Sumatera Operation (2015-present)				



Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Musdhalifah Machmud	Perempuan Female	57 Tahun 57 Years	• S1 Manajemen Hutan • <i>Diploma of Monitoring Indonesian Environment di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC)</i> • S2 Pembangunan • Bachelor of Forest Management • Diploma of Monitoring of Indonesian Environment at the International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) • Bachelor of Development	• Dewan Pengawas Perum BULOG • Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian. • Anggota Dewan Pengawas BDPKPS • Supervisory Board of Indonesian Bureau of Logistics Public Corporation • Deputy for Food and Agriculture Coordination, Ministry of Economic Coordinator. • Member of the OPFMA's Supervisory Board
Bambang	Laki-laki Male	... Tahun ... Years	• S1 Pertanian • S2 Manajemen • Bachelor of Agriculture • Master of Management	• Pimpinan Proyek APBD Proyek Pengembangan Tanaman Industri (1992 - 1993) • Pimpinan Proyek APBN Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi Sultra (1993 - 1994) • Kepala Bagian Perencanaan TCSDP (1994 - 1995) • Kepala UPP TCSDP (1995 - 1997) • <i>Counterpart JICA</i> (1997 - 1998) • Kepala Seksi Pengembangan Teknologi (2001 - 2003) • Kepala Seksi Pengembangan Industri Primer (2003 - 2008) • Kasubdin. Pengolahan dan Pemasaran Hasil (2008 - 2009) • Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil (2009 - 2013) • Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura (2013 - 2016) • Direktur Jenderal Perkebunan (2016 - sekarang). • Project Leader of the Regional Industrial Plant Development Project (1992-1993) • Project Leader of the Southeast Sulawesi Regional Transmigration Development Project (1993-1994) • Head of TCSDP Planning Section (1994-1995) • Head of TCSDP UPP (1995-1997) • JICA Counterpart (1997-1998) • Head of Technology Development Section (2001-2003) • Head of Primary Industry Development Section (2003-2008) • Head of Sub-Department Results Processing and Marketing (2008-2009) • Head of Results Processing and Marketing (2009-2013) • Head of Plantation and Horticulture Service (2013-2016) • Director General of Plantations (2016-present).



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for The Composition of The Supervisory Board and Board of Directors

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Heru Pambudi	Laki-laki Male	48 Tahun 48 Years	• D3 STAN • S2 University Of Newcastle, Upon Tyne • Young Bachelor from STAN • Master degree from the University of Newcastle, Upon Tyne	• Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Dan Cukai pada tahun 2015 • Direktur Jenderal Bea Dan Cukai sejak tanggal 25-06-2015. • Anggota Dewan Pengawas BDPKKS • Director of Admissions and Customs and Excise Regulations in 2015 • Director General of Customs and Excise since 25 June 2015. • Member of the OPFMA's Supervisory Board
Djoko Siswanto	Laki-laki Male	54 Tahun 54 Years	• S1 Teknik Perminyakan • S2 MBA Program, Edinburgh <i>Business School</i> • S2 MBA Specialist Oil & Gas Management • S3 Teknik Perminyakan • Bachelor of Petroleum Engineering • MBA from Edinburgh Business School • MBA Specialist in Oil & Gas Management • Ph.D. In Petroleum Engineering	• PT. Sarana Putra Makmur : Petroleum Engineer. Melakukan analisa tekanan, volume dan temperatur minyak & gas bumi dengan menggunakan <i>software</i> Eclipse 100 dan 200. • Direktorat Teknik, Direktorat Jenderal Migas. Melakukan inspeksi lapangan kegiatan keselamatan kerja dan lingkungan pada kegiatan eksplorasi dan produksi migas. • Direktorat Explorasi & Produksi, Direktorat Jenderal Migas. Memantau produksi migas, membuat <i>Plan of Development</i> lapangan migas. • Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Migas. • Kepala Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Direktorat Jenderal Migas. • Anggota Pokja Direktorat BBM, BPH Migas. • Kepala Pokja Tarif, Iuran, Akun Pengaturan dan Harga Gas RumahTangga dan Pelanggan Kecil, Direktorat Gas Bumi, BPH Migas • Plh. Direktur Gas Bumi. • Direktur BBM • Direktur Gas Bumi BPH Migas • Komisaris PT DS-LNG dan PT. PLI • Direktur Hulu Migas, Ditjen Migas KESDM • Direktur Teknik Migas, Ditjen Migas KESDM • Deputy Pengendalian Pengadaan SKK Migas • Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi • PT. Sarana Putra Makmur: Petroleum Engineer. Analyzing the pressure, volume, and temperature of oil and gas using Eclipse 100 and 200 software. • Directorate of Engineering, Directorate General of Oil and Gas. Conducting field inspections of occupational work and safety and protection of the environment activities in oil and gas exploration and production activities. • Directorate of Exploration & Production, Directorate General of Oil and Gas. Monitoring oil and gas production, formulating oil and gas field Plan of Development. • Functional Position of Oil and Gas Inspector, Directorate General of Oil and Gas. • Head of Sub-Division of Oil & Gas Evaluation & Reporting, Secretariat of the Directorate General of Oil and Gas. • Member of the Oil Fuel Directorate Working Group, BPH Migas. • Head of the Working Group on Tariffs, Contribution, Regulations Accounts, and Gas Prices for Household and Small Customers, the Directorate of Natural Gas BPH Migas • Acting Director of Natural Gas • Director of Oil Fuel • Director of Natural Gas of BPH Migas • Commissioner of PT DS LNG and PT Acting • Director of Upstream Oil and Gas, Director General of Oil and Gas MEMR • Director of Oil and Gas Engineering, Director General of Oil and Gas MEMR • Deputy of SKK Migas' Procurement Control • Director General of Oil and Gas



Keberagaman Komposisi Direksi Diversity in the Board of Directors' Composition

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Dono Boestami	Laki-laki Male	54 Tahun 54 Years	• Bachelor of Science Civil Engineering • Master of Science Project & Construction Management dari Golden Gate University • Bachelor of Science Civil Engineering • Master of Science Project & Construction Management dari Golden Gate University	• Direktur Investment Banking pada PT Danareksa (Persero) (2001) • Direktur Utama PT Citigroup Securities Indonesia (2004) • Direktur PT Barclays Capital Securities Indonesia (2006) • Direktur Keuangan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2011) • dan Direktur Keuangan PT Atlas Resources Tbk (2012) • Anggota Komite Pencatatan Bursa Efek Indonesia (BEI) (2008-2011) • Direktur PT MRT (2013-2017) • Direktur Utama BDPKPS (2017-Sekarang).
Catur Ariyanto Widodo	Laki-laki Male	46 Tahun 46 Years Old	• D3 STAN • S1 Ekonomi • Young Bachelor from STAN • Bachelor of Economics	• Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Instansi III • Kepala Seksi Analisis Laporan Keuangan • Kabid Pembinaan Perbendaharaan • Kasubdit Pembinaan Kinerja BLU • Kasubdit PPK BLU II • Kabag Umum Kanwil DJPB Prov. Sulbar dan jabatan terakhir sebagai Kakanwil DJPB Prov. Sulbar sebelum diangkat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKPS.
Herdrajat Natawidjaja	Laki-laki Male	60 Tahun 60 Years	• S1 Proteksi Tanaman • S2 Nematology • Philosophy of Doctor in Plant Pathology (Major), Entomology and Development of Communication (Minor) • Bachelor of Plant Protection • Master of Nematology • Doctor of Philosophy in Plant Pathology (Major), Entomology and Development of Communication (Minor)	• Direktur Perlindungan Tanaman Perkebunan • Direktur Pembinaan Usaha dan Pascapanen • Direktur Tanaman Tahunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian • Kepala Sekretariat Komisi ISPO.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas dan Direksi Diversity Policy for The Composition of The Supervisory Board and Board of Directors

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience
Edi Wibowo	Laki-laki Male	51 Tahun 51 Years	• S1 Mekanisasi Pertanian • S2 Teknik Mesin • Bachelor of Agricultural Mechanization • Master of Mechanical Engineering	• Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Pemanfaatan Energi di Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional • Kepala SubDirektorat Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi-DJ EBTKE KESDM • Kepala SubDirektorat Pengusahaan dan Pengawasan Bioenergi DJ EBTKE KESDM • Kepala SubDirektorat Program Bioenergi DJ EBTKE KESDM sejak Juli 2016
Tulus Budhianto	Laki-laki Male	61 Tahun 61 Years	• S1 Pertanian • Masters of Arts di bidang International Development Studies • Bachelor of Agriculture • Master of Arts in International Development Studies	• Departemen Perindustrian tahun 1987-2000 • Atase Perdagangan tahun 2007-2010 • Sekretaris Ditjen 2010-2016 • Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan • Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan • Kepala Biro Perencanaan- Kementerian Perdagangan



Sekretaris Divisi Perusahaan

Corporate Secretary (OPPFMA)

BDPKS telah membentuk Divisi Sekretaris Perusahaan, berada di bawah Direktorat Kemitraan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pasal 24 ayat 2. Divisi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Divisi Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan untuk mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

OPPFMA established the Division of Corporate Secretary under the Directorate of Partnership. As stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 dated 10 June 2015 on the Organization and Work Procedure of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency Article 24 paragraph 2. The Corporate Secretary Division is conducted by the Corporate Division in charge of implementing partnership management with companies to support the development of sustainable palm oil.

Divisi Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi, dimana pengangkatannya telah berdasarkan pada pendidikan dan pengalaman kerja yang dapat dilihat pada profil Kepala Divisi Perusahaan sebagai berikut:

The Division is headed by a Head of Corporate, whose appointment is based on the education and work experience, as seen in the profile of the Head of Corporate as follows:



Tugas dan tanggung Jawab Divisi Perusahaan

Tasks and responsibilities of the Corporate Secretary

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Divisi Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pasal 24 ayat 2, sebagaimana telah diuraikan di atas.

In carrying out its duties and responsibilities, the Corporate Division refers to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 on the Organization and Work Procedures of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency Article 24 paragraph 2, as described above.



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Perusahaan
Report on the Corporate Division Activities

Selama tahun 2018, Divisi Perusahaan telah melakukan kegiatan, diantaranya:

Throughout 2018, the Corporate Division has conducted numerous activities, among others:



1	Hubungan dengan Media dan Akses Informasi. Divisi Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media <i>online</i> . Selama tahun 2018, Sekretaris Perusahaan tercatat telah menerbitkan 6 (enam) <i>press release</i> mengenai perkembangan kinerja, bisnis dan operasional BDPKPS.	Relations with Media and Access to Information. Corporate Division always strives to establish good relationships with the mass media, both electronic (TV, radio), printed media (newspapers, magazines), and online media. In 2018, the Corporate Secretary issued 6 (six) press releases on the development of the performance, business, and operations of OPPFMA.
2	Menyediakan sarana informasi melalui penyajian Laporan Tahunan yang menggambarkan kinerja BDPKPS dan disampaikan kepada seluruh <i>stakeholders</i> BDPKPS.	Providing information through the presentation of the Annual Report that describes OPPFMA's performance. The Report is delivered to all OPPFMA's stakeholders.
3	Menjadi Nara Sumber <i>Workshop</i> Jurnalistik Kelapa Sawit	Became the Speaker in the Palm Oil Journalism Workshop



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Audit Internal

Internal Audit



Audit internal BDPKS dijalankan oleh Divisi Satuan Pemeriksaan Internal (SPI). Pembentukan Divisi SPI ini dilakukan pada tahun 2016 dengan tujuan menentukan kehandalan informasi yang dibuat manajemen serta untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi atas berbagai kegiatan operasional BDPKS.

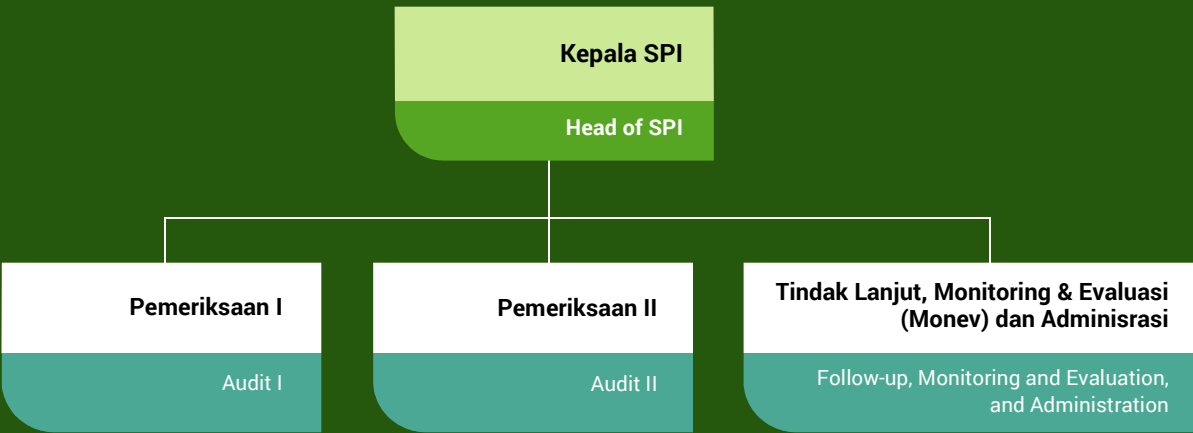
OPPFMA's internal audit is carried out by the Internal Audit Unit (SPI). SPI was established in 2016 to determine the reliability of information created by management and the level of effectiveness and efficiency of various OPPFMA's operations.

Selaras hal tersebut, BDPKS membentuk Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana Surat Keputusan Direktur Utama No.KEP-37/DPKS/2018 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Pemeriksa BPKS.

In line with this, OPPFMA established an Internal Audit that was appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, in accordance with the Decree of the President Director No. KEP-37/DPKS/2018 on the Appointment of the BPKS Internal Audit Unit.

Struktur dan Kedudukan
Structure and Position

Struktur SPI
SPI's Structure



Kedudukan SPI
SPI's Position

1. SPI merupakan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama;
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
1. SPI is an organization established based on the Minister of Finance's Regulation and is positioned directly under the President Director;
2. SPI is led by a Head who reports directly to the President Director;



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas BDPKPS; 4. Kepala SPI akan menjadi Mitra Kerja Manajemen yang Independen dan Profesional; 5. Personil SPI tidak diperbolehkan merangkap tugas ataupun bekerja yang ada pada Direktorat teknis dalam BDPKPS; 6. Direktur Utama memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya Independensi SPI dan wajib menjaga serta mengevaluasi kualitas fungsi SPI. | <ol style="list-style-type: none"> 3. The Head of the SPI is appointed and dismissed by the President Director based on the approval from OPPFMA's Supervisory Board; 4. The Head of SPI will become an Independent and Professional Management Partner; 5. SPI personnel are not permitted to concurrently work in the technical directorate within OPPFMA; 6. The President Director fully supports the SPI to ensure SPI Independence and must maintain and evaluate the quality of SPI functions. |
|---|---|

Ruang Lingkup SPI

Scope of SPI

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan audit operasional, audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan khusus; 2. Mitra (<i>Counterpart</i>) Auditor Eksternal; 3. Koordinasi dengan Komite Audit; 4. Monitor dan evaluasi tindak lanjut Hasil Audit (LHA); 5. Evaluasi program kerja guna memastikan apakah hasilnya konsisten dengan sasaran yang ingin dicapai Rencana Bisnis Anggaran; 6. Mengkaji ulang, menganalisis dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal BDPKPS telah memadai, serta berfungsi secara efektif; 7. Melakukan kegiatan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i>. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Carry out operational audits, financial audits, performance audits, and audits with special objectives; 2. External Auditor Counterpart; 3. Coordination with the Audit Committee; 4. Monitor and evaluate the follow up of Audit Results (LHA); 5. Evaluate work programs to ensure whether the results are consistent with the goals to be achieved by the Business Plan's Budget; 6. Review, analyze, and assess to ensure that the OPPFMA's internal control system is adequate and functioning effectively; 7. Conduct assurance and consulting activities. |
|---|---|

Pada tahun 2018, Kepala Divisi SPI BDPKPS dipimpin oleh Sdri. Triana Meinarsih dengan dibantu oleh 3 (tiga) auditor. Kedudukan Kepala Audit Internal dalam struktur BDPKPS berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

In 2018, the Head of the SPI of OPPFMA was Ms. Triana Meinarsih, assisted by three (3) auditors. In the OPPFMA, the Head of Internal Audit is responsible to the President Director.

Profil Kepala Satuan Pemeriksa Internal

Head of Internal Audit Unit Profile

Pengangkatan Kepala Audit Internal telah berdasarkan pada pendidikan dan pengalaman kerja yang dapat dilihat pada profil sebagai berikut:

The appointment of the Head of Internal Audit is based on education and work experience, which can be seen in the following profiles:



Triana Meinarsih

Kepala Audit Internal Head of SPI in 2018

Tempat Tanggal Lahir:
Pati, 25 Mei 1977

Place and Date of birth:
Pati, 25 May 1977

Domisili: Puri Bintaro Hijau Blok C1
No.10, Pondok Aren, Tangerang
Selatan

Domicile: Puri Bintaro Hijau Blok C1
No. 10, Pondok Aren, South Tangerang

Pendidikan:
S1 Ekonomi Akuntansi
S2 Akuntansi

Education:
Bachelor of Accounting Economics
Master of Accounting

Pengalaman Kerja:
Reporter (1999-2000), *Accounting and Finance Staff* PT Sarana Bakar Digdaya (2000-2002), *Medical Representative* PT Vitabiotics Utama Indonesia (2002-2003), *Senior Medical Representative* PT Merck Indonesia (2005-2007), *Senior Medical* PT Maju Ina Medika (2010-2011), *Special Staff for Research and Development* (2011-2012), *Finance, Accounting and Administration Coordinator* (2012), *Auditor & Senior Consultant of Accounting Information System* (2012-2014), *Lecturer of Accounting Graduate Program* (2014-sekarang), *Accounting, Finance, and Tax Manager* (2014-2017), *Finance Manager* (2017-sekarang), *Lecturer for Taxation Diploma III Program STAN* (2017-sekarang)

Work Experience:
Reporter (1999-2000), *Accounting and Finance Staff* of PT Sarana Bakar Digdaya (2000-2002), *Medical Representative* of PT Vitabiotics Utama Indonesia (2002-2003), *Senior Medical Representative* of PT Merck Indonesia (2005-2007), *Senior Medical* of PT Maju Ina Medika (2010-2011), *Special Staff for Research and Development* (2011-2012), *Finance, Accounting and Administration Coordinator* (2012), *Auditor & Senior Consultant of Accounting Information System* (2012-2014), *Lecturer of Accounting Graduate Program* (2014-present), *Accounting, Finance, and Tax Manager* (2014-2017), *Finance Manager* (2017-present), *Lecturer for Taxation Diploma III STAN Program* (2017-present)



Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Visi Vision

Menjadi Satuan Pemeriksa Internal yang Profesional, Independen, Mandiri dan Terpercaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi BDPKPS

To be the Professional, Independent, and Trusted Internal Audit Unit to support the achievement of OPPFMA's vision and mission

Misi Mission

1. Mewujudkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola BDPKPS (*good governance*);
2. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Menjadi *Strategic Business Partner* yang independent dan obyektif bagi manajemen BDPKPS;
4. Mewujudkan harmonisasi dan sinergi dengan Pemeriksa Eksternal lain.

1. Realizing the effectiveness of the risk management process, internal control, and good governance;
2. Encouraging compliance with laws and regulations;
3. Becoming an independent and objective Strategic Business Partner for OPPFMA's management;
4. Realizing harmonization and synergy with other External Auditors.

Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Satuan Pemeriksa Internal

Duties, Functions, and Responsibilities of the Internal Audit Unit

Tugas SPI berdasarkan PMK No. 200 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Internal BLU antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Pemeriksaan Intern;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;

The SPI's duties are based on PMK No. 200 of 2018 on BLU's Internal Control System, among others:

1. Developing and implementing an Internal Audit plan;
2. Testing and evaluating the internal control and risk management systems implementation;
3. Checking and evaluating the efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
4. Providing refinement suggestions and objective information on the activities audited to every level of management;



5. Membuat laporan hasil Pemeriksaan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan BLU dan Dewan Pengawas;
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pemeriksaan oleh SPI, aparat Pemeriksaan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan Pembina BLU;
8. Melakukan reviu laporan keuangan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penguasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PMK 113/PMK.01/2015 SPI dalam tugas melaksanakan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan tugas BDPKPS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan *audit charter* dan audit program;
2. pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. melakukan rivi terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Tanggung Jawab SPI :

1. Membantu Direktur Utama dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan BDPKPS melalui Pemeriksaan/pemeriksaan atas ketaatan, operasional, dan program/kegiatan;
2. Mementau kinerja seluruh kegiatan unit kerja BDPKPS secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dan pengendalian administrasi, akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya;
3. Membantu Direksi dan Dewan Pengawas dalam upaya meningkatkan terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kepatuhan;

5. Compiling report on the results of Internal Audit and submitting the said report to the Head of BLU and the Supervisory Board;
6. Providing recommendations on the improvement of governance process and efforts to achieve the BLU business strategy;
7. Monitoring, analyzing, and reporting the implementation of the follow-up of the SPI Audit, government internal audit apparatus, the government external audit apparatus, and the BLU Trustees;
8. Reviewing financial statements;
9. Conducting special audit if necessary;
10. Carrying out other duties based on the supervision in accordance with statutory provisions.

Based on PMK 113/PMK.01/2015, SPI, in carrying out the internal audit of the OPFMA's duties, carries out the following functions:

1. preparing and implementing tasks in accordance with audit charter and audit program;
2. the implementation of risk-based audits, especially in the business activities of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency; and
3. conducting reviews of financial statements to ensure that the contents, presentation, and disclosure, are in accordance with government accounting standards and applicable financial accounting standards.

SPI Responsibilities:

1. Assisting the President Director in fulfilling OPFMA's management responsibilities through audit of compliance, operations, and programs/activities;
2. Monitoring the performance of all OPFMA's working unit activities in an integrated manner on compliance, comprehensiveness and utilization of administration, accounting, financial, and other controls;
3. Assisting the Board of Directors and Supervisory Board to improve the realization of Governance and Compliance;



4. Membantu Direksi dan Dewan Pengawas memberikan informasi awal (*Early Warning Signal*) atas terjadinya risiko bisnis/kegiatan yang mungkin timbul;
 5. Mendorong unit-unit kerja pada BDPKPS untuk terus meningkatkan peran Pemeriksaan yang melekat pada Unit Kerja masing-masing (Waskat);
 6. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan kelemahan dalam sistem, cara kerja yang dapat mempengaruhi Kinerja BDPKPS;
 7. Mengidentifikasi, mengevaluasi berbagai kegiatan, unit kerja yang akan dilakukan pemeriksaan, menganalisis serta menilai tingkat GRC pada kegiatan-kegiatan dimaksud;
 8. Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan pemeriksaan serta laporan evaluasi disesuaikan dengan kecukupan SDM pada Unit Kerja SPI;
 9. Memberikan evaluasi, analisis dan rekomendasi perbaikan atas proses pengelolaan operasional dan kegiatan program pada BDPKPS;
 10. Memantau pelaksanaan dan ketepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan penyelesaian rekomendasi;
 11. Mengembangkan PKAT berbasis risiko dan menyampaikan kepada Direktur Utama BDPKPS untuk mendapatkan pengesahan;
 12. Melaksanakan PKAT yang dibuat oleh konsultan SPI dan telah ditetapkan oleh Direktur Utama serta melakukan :
 - Proses evaluasi hasil audit yang telah dilaksanakan;
 - Proses evaluasi atas hasil audit yang telah dilaksanakan.
 13. Melaksanakan pemeriksaan/Pemeriksaan tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan berdasarkan permintaan dari Direksi BDPKPS/APIP
4. Assisting the Board of Directors and Supervisory Board to provide Early Warning Signal on the occurrence of business risks/activities that may arise;
 5. Encouraging the work units in OPFMA to improve the role in the Audit, attached to each Work Unit (Waskat);
 6. Reporting important matters relating to weaknesses in the system, ways of working, that can affect OPFMA's Performance;
 7. Identifying and evaluating various activities at work units that will be examined, analyzing and assessing the level of GRC in these activities;
 8. Providing regular reports on the results of audit. The evaluation reports are adjusted to the adequacy of HR in the SPI Work Unit;
 9. Providing evaluation, analysis, and recommendations for improvement of the operational management process and program activities in OPFMA;
 10. Monitoring the implementation and accuracy of the follow-up to the Audit Report (LHP) and the completion of recommendations;
 11. Developing risk-based PKAT and submitting it to the Managing Director of OPFMA for approval;
 12. Carrying out the PKAT made by the SPI consultant that has been set forth by the President Director, and performing:
 - The process of evaluating the audit results that have been carried out;
 - The process of evaluating the audit results that have been carried out.
 13. Conducting unscheduled and/or confidential checks/audits based on requests from the Board of Directors of OPFMA/APIP

Pedoman Satuan Pemeriksaan Internal

Internal Audit Charter

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Satuan Pemeriksaan Internal memiliki beberapa pedoman antara lain:

1. Piagam SPI (Audit Charter) sebagai pedomannya dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab serta pelaksanaan lainnya.
2. Audit Program, berupa manual-manual pemeriksaan antara lain:
 - a. Pedoman Audit Kinerja;
 - b. Pedoman Audit Laporan Keuangan ;
 - c. Pedoman Umum SPI;
 - d. Pedoman Teknis SPI
 - e. Kode Etik yang dikeluarkan IIA Global.

In carrying out its duties and authorities the Internal Audit Unit has several guidelines, including:

1. SPI Charter (Audit Charter) as a guide in carrying out the duties, responsibilities and other implementation.
2. Audit Program, in the form of audit manuals:
 - a. Performance Audit Guidelines;
 - b. Financial Statement Audit Guidelines;
 - c. SPI General Guidelines;
 - d. SPI Technical Guidelines
 - e. Code of Conduct issued by IIA Global.

Program Pengembangan Auditor Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit's Auditor Development Program

Audit Internal telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai Audit Internal, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan antara lain melalui program sertifikasi nasional dan internasional, keikutsertaan dalam seminar nasional/internasional maupun pelatihan rutin internal. Berikut data sertifikasi yang telah diperoleh pegawai Audit Internal sampai dengan tahun 2018:

Internal Audit is committed to continuously improving the competence and knowledge of Internal Audit's employees, through continuous education and training, including through national and international certification programs, participation in national/international seminars, and routine internal training. The certification obtained by Internal Audit's employees in 2018 is as follows:

No	Pelatihan Training	Jumlah Auditor Auditors	Tanggal Date
1	<i>For Having Completed the Certified Internal Auditor Review Course</i>	2	14 Mei 2018 May 14, 2018
2	<i>National Conference: Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times</i>	2	27 Agustus 2018 August 27, 2018
3	Bimtek: Penyusunan Kontrak dan Strategi Pengadaan tanpa Tender serta Audit Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sesuai Pepres No.18 Tahun 2018	2	25 Oktober 2018 October 25, 2018
4	<i>Audit IT General Control</i>	2	29 Oktober 2018 October 29, 2018



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pemeriksaan Internal Tahun 2018

Report on the Internal Audit Unit Activities in 2018

BDPKPS memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan oleh PMK No.113/PMK.01/2015 antara lain:

1. Melakukan audit berdasarkan Piagam Audit dan Audit Program;
2. Mereviu Laporan Keuangan;
3. Dan tugas lain berdasarkan perintah manajemen.

Beberapa tugas yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa Antara lain sebagai berikut:

1. Reviu Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sebanyak 12 laporan reviu;
2. Penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK RI dengan capaian 90%;
3. Laporan Pendampingan kunjungan lapangan bersama eksternal auditor sebanyak 5 kunjungan;
4. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan 100%;
5. Penguatan kelembagaan SPI dengan mengikuti berbagai training SDM SPI sebanyak 6 training;
6. Melakukan reviu SOP BDPKPS;
7. Melakukan pendampingan dalam menjalankan fungsi consulting SPI berdasarkan permintaan Direktorat teknis.
8. Rapat bersama Komite Audit dilakukan tiap bulan (12 kali)

OPPFMA is committed to implementing its duties and functions as mandated by PMK No. 113/PMK.01/2015, including:

1. Conducting audits based on the Audit Charter and Audit Program;
2. Reviewing the Financial Statements;
3. And carrying out other tasks based on management's orders.

Some of the tasks that have been carried out by Internal Audit Unit are as follows:

1. Review Financial Statements based on Financial Accounting Standards, there were 12 review reports;
2. Completion of follow-up actions to Audit Report of BPK RI, with 90% achievement;
3. Report of 5 Site visitations with external auditors;
4. Completion of follow-up actions on the results of monitoring and evaluation conducted by the Directorate General of Treasury 100%;
5. Strengthening SPI's institutions by participating in 6 SPI HR training;
6. Reviewing the SOP of OPFMA;
7. Assisting in carrying out the SPI consulting function based on the request of the Technical Directorate.
8. Joint meetings with the Audit Committee every month (12 times)

Tabel Status tindak lanjut Audit Eksternal tahun 2018

Table: Status of External Audit's follow-up in 2018

Auditor Eksternal External Audit	Jumlah rekomendasi Number of recommendations	Tindak lanjut rekomendasi Follow-up on the recommendations		
		Selesai Finished	Dalam Proses In Progress	Belum Not yet
BPK - RI	16	12	4	0
Dit PPK BLU	17	17	0	0
Dit SMI	20	16	4	0

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKS

Compliance and Risk Management of OPPFMA



Divisi kepatuhan & Manajemen Risiko sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan penyusunan infrastruktur dan melakukan/menerapkan proses manajemen risiko (identifikasi, analisa, evaluasi, mitigasi dan monitoring) atas profil risiko yang sudah dibuat dan dijalankan setiap tahun berjalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Since 2016 to 2018, the Compliance & Risk Management Division has carried out infrastructure preparation and implemented risk management process (identification, analysis, evaluation, mitigation, and monitoring) of the risk profile that has been created annually.



Selanjutnya Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko telah melakukan evaluasi dan pengembangan berupa :

- Pedoman sesuai ISO 31000 yang lebih sesuai dengan BDPKPS dan sesuai dengan peraturan manajemen risiko dilingkungan kementerian keuangan;
- Tahun 2018 merencanakan pembentukan Komite Pemantau Risiko untuk diterapkan independennya pengawasan internal;
- Rencana pengadaan aplikasi IT untuk monitor langsung perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap proses bisnis divisi dalam BDPKPS.

Further, the Compliance & Risk Management Division has conducted an evaluation and development in the form of:

- Guidelines, in accordance with ISO 31000, which is more in line with OPPFMA and in accordance with the risk management regulations within the Ministry of Finance;
- In 2018, the Division plans to establish a Risk Monitoring Committee to be implemented independently of internal control;
- Plans for the procurement of IT applications to directly monitor changes that occur in each business process within OPPFMA.

Laporan Unit Manajemen Risiko BDPKPS **Report of the OPPFMA's Risk Management Unit**

Realisasi Program Kerja Divisi Manajemen Risiko **Realization of the Risk Management Work Program**

Selama tahun 2018, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang direncanakan. Realisasi atas Program Kerja Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Membuat Profil Risiko sesuai ketentuan Kementerian Keuangan, Peraturan Direktur Utama (manajemen) dan Peraturan Direktorat masing-masing sesuai sasaran pada kontrak kerja;
- Meningkatkan budaya risiko pada seluruh Direktorat di BDPKPS dengan melakukan Peningkatan *Capacity Building* Karyawan khusus Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
- Melakukan monitoring atas kinerja seluruh Direktorat pada sasaran kinerja profil risiko;
- Melakukan kajian atas kinerja masing-masing Direktorat sesuai sasaran yang telah ditetapkan pada Profil Risiko;
- Monitoring semua kegiatan divisi melalui kajian-kajian, sehingga dapat meminimalisir temuan-temuan BPK, Itjen dan Pembina Teknis;
- *Progress* pengajuan Komite Pemantau Risiko;
- *Progress* pengajuan Aplikasi Manajemen Risiko.

During 2018, Risk Management has carried out its duties and responsibilities in accordance with the planned work program. Realization of the Work Program for Compliance and Risk Management Division is as follows:

- Regulations of the President Director (management), and Regulations of each Directorate according to the targets in the work contract;
- Improving risk culture in all OPPFMA's Directorates by Capacity Building for employees, especially in the Compliance and Risk Management Division;
- Monitoring the performance of all Directorates on the risk profile performance targets;
- Reviewing the performance of each Directorate in accordance with the predetermined targets in the Risk Profile;
- Monitoring all divisions' activities through review to minimize findings of BPK, the Inspector General, and the Technical Advisor;
- Submission progress of the Risk Monitoring Committee;
- Submission progress of the Risk Management Application.

Profil-Profil Risiko BDPKPS dan Mitigasi Risiko OPPFMA's Risk Profiles and Mitigation

Pada tahun 2018, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKPS memfokuskan pengelolaan kualitas perbaikan dan mitigasi dari profil risiko tahun 2018 yang mengakibatkan potensi risiko-risiko yang bisa merugikan BDPKPS baik di bidang Keuangan, Kebijakan, Kepatuhan, Fraud, Operasional dan Reputasi. Jenis risiko (Profil Risiko) yang dihadapi Badan dan Upaya Pengelolaan Risiko (mitigasi) dapat dilihat pada tabel berikut:

In 2018, OPPFMA's Compliance and Risk Management focused on managing the quality of improvements and mitigation of the 2018 risk profile, which resulted in potential risks that could harm OPPFMA in Finance, Policy, Compliance, Fraud, Operations, and Reputation. The Risk Profile faced by the Risk Management and Mitigation Agency can be seen in the following table:

No	Kategori Risiko Risk Category	Kejadian Event	Mitigasi Mitigation
1	Keuangan Finance	Pada Desember 2018 tarif pungutan 0 (Nol) In December 2018, the levy is zero (0)	• Meningkatkan Promosi untuk meningkatkan harga CPO • Mempercepat investasi • Increasing Promotion to improve CPO prices • Accelerating investment
2	Kebijakan Policy	Peraturan Direktur Utama tidak sejalan dengan Peraturan dari Kementerian Pertanian mengenai peremajaan. The President Director's Regulation is not in line with the Ministry of Agriculture Regulation regarding replantation.	Sinkronisasi Peraturan dan Kebijakan untuk percepatan Program Peremajaan Synchronizing Regulations and Policies to accelerate the Replantation Program
3	Kepatuhan Compliance	SOP belum sesuai standar. SOP is not up to standard.	Penyusunan SOP disesuaikan dengan standar Kementerian Keuangan The SOP is adjusted to the Ministry of Finance standards
		Pelaksanaan proses bisnis belum sesuai SOP The business processes are not in accordance with the SOP	Pengawasan Pelaksanaan SOP Supervision of SOP Implementation
4	Legal	• Perjanjian Kerja sama tidak melalui review Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko. • Pengajuan rancangan peraturan tidak dilakukan oleh Divisi Teknis • Produk Hukum berubah Keputusan tidak melalui Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko • Cooperation Agreement was not reviewed by the Compliance & Risk Management Division. • Submission of draft regulations is not carried out by the Technical Division • Products from Legal that changed to Decree did not go through the Compliance & Risk Management Division	• Mensosialisasikan kepada Divisi Teknis dalam penyusunan perjanjian kerja sama untuk diajukan review kepada Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko • Koordinasi dengan Divisi Teknis untuk mengajukan rancangan peraturan sesuai dengan tugas Divisi yang bersangkutan • Rancangan keputusan harus melalui Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko • Disseminated to the Technical Division in the formulation of cooperation agreements to submit for review to the Compliance & Risk Management Division • Coordinating with the Technical Division to submit draft regulations in accordance with the tasks of the said Division • The draft of decree must go through the Compliance & Risk Management Division



No	Kategori Risiko Risk Category	Kejadian Event	Mitigasi Mitigation		
5	Fraud	Dana peremajaan yang telah disalurkan namun belum dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu belum ada pengaturan.	Replantation funds that have been disbursed but have not been implemented within a certain time period have not yet been regulated.	Menyusun Peraturan Direktur Utama yang mengatur ketentuan batas waktu pencairan dana peremajaan	Formulating President Director's Regulation that stipulates the deadline for disbursement of replantation funds
		Pengaturan terkait status kepemilikan atas bunga dari dana peremajaan yang telah disalurkan.	Regulation related to the ownership status of interest from the replantation funds that have been disbursed.	Menyusun Peraturan Direktur Utama yang mengatur ketentuan mengenai ha katas bunga dana peremajaan yang telah disalurkan.	Formulating President Director's Regulations which regulates the provisions on the interest rates for replantation funds that have been disbursed.
6	Reputasi Reputasi	Kelambatan proses penyelesaian penyaluran dana peremajaan	Delay in the completion of the replantation fund disbursement	Melakukan percepatan dengan melalui perubahan peraturan penggunaan teknologi IT/aplikasi	Accelerating through changes to regulations on the use of IT technology/applications
7	Operasional Operasional	Keterlambatan pembayaran tagihan dari pihak eskternal	Late payment of bills from external parties	Mengatur terkait norma waktu penyelesaian pembayaran tagihan.	Stipulate the settlement of bill payments.

Peta Risiko Risk Mapping

Berikut peta risiko perusahaan selama tahun 2018

The following is the company's risk map throughout 2018

1. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko Risk Analysis Matrix and Risk Level							
Matriks Analisis Risiko 5 x 5 5 x 5 Risk Analysis Matrix			Level Dampak Impact level				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan Not significant	Minor Minor	Moderate Moderate	Signifikan Significant	Sangat Signifikan Very Significant
Level Kemungkinan Possibility	5	Hampir Pasti terjadi Almost Certainly Will Happen	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi Often Occurs	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi Occur Sometimes	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi Rarely Happens	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi Almost Certainly Will Not Happen	1	3	5	8	20

2. Selera Risiko Risk Appetite

Matriks Analisis Risiko 5 x 5 5 x 5 Risk Analysis Matrix			Level Dampak Impact level				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan Not significant	Minor Minor	Moderate Moderate	Signifikan Significant	Sangat Signifikan Very Significant
Level Kemungkinan Possibility	5	Hampir Pasti terjadi Almost Certainly Will Happen	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi Often Occurs	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi Occur Sometimes	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi Rarely Happens	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi Almost Certainly Will Not Happen	1	3	5	8	20
			Area Penerimaan Risiko Risk Acceptance Area				

Area Risiko Yang Dimitigasi Mitigated Risk Areas

Keterangan Description

Tingkatan Tiers	Level Risiko Risk Level	Besaran Risiko Risk Magnitude	Warna Color
5	Sangat Tinggi Very High	20-25	
4	Tinggi High	16-19	
3	Sedang Moderate	12-15	
2	Rendah Low	6-11	
1	Sangat Rendah Very Low	1-5	



Peta Risiko BDPKS selama Tahun 2018 OPPFMA's Risk Map in 2018.

No	Sasaran Program/Kegiatan Program/Activity Target	Peta Risiko Risk Mapping						Peta Risiko Risk Mapping					
		49 Jenis Risiko 49 Risk Types						49 Jenis Risiko 49 Risk Types					
		Sangat Rendah Very Low	Rendah Low	Sedang Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High	Jumlah Total	Sangat Rendah Very Low	Rendah Low	Sedang Moderate	Tinggi High	Sangat Tinggi Very High	Jumlah Total
1	Terwujudnya pengelolaan dana kelapa sawit yang <i>sustainable</i> The realization of sustainable palm oil fund management			1	2		3		3				3
2	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi High service user satisfaction			3		1	4	1	2		1		4
3	Perencanaan kebijakan yang berkualitas Quality policy planning						-						-
4	Penyelenggaraan penghimpunan dana yang optimal Optimal fundraising organization					1	1		1				1
5	Penyelenggaraan penyaluran dana untuk petani dan pengembangan SDM sawit Organizing fund disbursement for farmers and palm oil Human Resources development			2	2	4	8		3	2	2	1	8
6	Penyelenggaraan penyaluran dana untuk biodiesel dan pengembangan produk Organizing fund disbursement for biodiesel and product development				1	5	6		1	1	4		6
7	Penyelenggaraan penyaluran dana untuk promosi dan kemitraan Organizing fund disbursement for promotion and partnership			4	4		8		6	2			8
8	Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel Accountable fund management					3	3			1	2		3
9	SDM yang kompetitif Competitive HR			2	1		3		2	1			3
10	Organisasi yang kondusif Conducive organization				1	4	5			2	3		5
11	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern Optimum and modern facilities and ICT management				4	2	6			5	1		6
12	Pengelolaan dana yang optimal Optimum fund management					2	2				2		2
JUMLAH RISIKO TOTAL RISKS				12	15	22	49	1	18	14	15	1	49

Peta Risiko Berdasarkan Sasaran Strategis Risk Mapping Based on Strategic Objectives

Risiko BDPKKS OPPFMA's Risks

Besaran Risiko (3) Risk Magnitude (3)	Besaran Risiko (24) Risk Magnitude (24)	Besaran Risiko (21) Risk Magnitude (21)	Besaran Risiko (19) Risk Magnitude (19)	Besaran Risiko (21) Risk Magnitude (21)
SS1 Harga CPO dengan devlasi 18% SS1 CPO price with 18% deflation	SS2 Program replanting yang diselesaikan SS2 Replanting program completed	SS3 Jumlah riset yang dibiayai SS3 Research financed	SS4 Volume biodiesel yang disubsidi SS4 Volume of subsidized biodiesel	SS5 Presentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU Completion of the Public Service Agency modernization management

Tingkatan Tiers	Level Risiko Risk Level	Besaran Risiko Risk Magnitude	Warna Color
5	Sangat Tinggi Very High	20-25	
4	Tinggi High	16-19	
3	Sedang Moderate	12-15	
2	Rendah Low	6-11	
1	Sangat Rendah Very Low	1-5	

No	Sasaran Strategis Strategic Target
1	Terwujudnya dana kelapa sawit yang <i>sustainable</i> The realization of sustainable palm oil funds
2	Penyelenggaraan penyaluran dana untuk petani dan pengembangan SDM Sawit Organizing fund disbursement for farmers and Palm Oil Human Resources development
3	Penyelenggaraan penyaluran dana untuk biodiesel dan pengembangan produk Organizing fund disbursement for biodiesel and product development
4	Penyelenggaraan penyaluran dana untuk biodiesel dan pengembangan produk Organizing fund disbursement for biodiesel and product development
5	Modernisasi pengelolaan BLU Public Service Agency modernization management



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKS Compliance and Risk Management of OPPFMA

Peta Risiko Berdasarkan Kategori Risiko Risk Mapping Based on Risk Category

Risiko BDPKS OPPFMA's Risks

Risiko Finansial Besaran Risiko (20) Financial Risk Risk Magnitude (20)	Risiko Kebijakan Besaran Risiko (25) Policy Risk Risk Magnitude (25)	Risiko Kepatuhan Besaran Risiko (24) Compliance Risk Risk Magnitude (24)	Risiko Legal Besaran Risiko (0) Legal Risk Risk Magnitude (0)	Risiko <i>Fraud</i> Besaran Risiko (0) Fraud Risk Risk Magnitude (0)	Risiko Reputasi Besaran Risiko (22) Reputational Risk Risk Magnitude (22)	Risiko Operasional Besaran Risiko (0) Operational Risk Risk Magnitude (0)
---	--	--	---	--	---	---

No	Kategori Risiko Risk Category	Definisi Definisi
1	Risiko Finansial Financial Risk	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan finansial BDPKS. Risks caused by anything that may cause financial pressure for OPPFMA.
2	Risiko Kebijakan Policy Risk	Risiko yang disebabkan oleh adanya kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. Risks caused by organizational policies or internal and external policies that have a direct impact on the organization.
3	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risks caused by external organizations or parties that do not fulfill and/or do not implement the prevailing laws and regulations.
4	Risiko Legal Legal Risk	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi. Risks caused by legal claims to the organization.
5	Risiko <i>Fraud</i> Fraud Risk	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara. Risks caused by intentional fraud by internal parties that are detrimental to the state finances.
6	Risiko Reputasi Reputational Risk	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi. Risk due to a declining level of external stakeholder's trust that is a result of negative perceptions of the organization.
7	Risiko Operasional Operational Risk	Risiko yang disebabkan oleh: 1) Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem; 2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Risks caused by: 1) Inadequacy and/or malfunction of internal processes, human errors, and system failures; 2) There are external events that affect the organization's operations.

Tingkatan Tiers	Level Risiko Risk Level	Besaran Risiko Risk Magnitude	Warna Color
5	Sangat Tinggi Very High	20-25	
4	Tinggi High	16-19	
3	Sedang Moderate	12-15	
2	Rendah Low	6-11	
1	Sangat Rendah Very Low	1-5	

Penilaian Kematangan Risiko BDPKPS

OPPFMA's Risk Maturity Assessment

Dalam rangka menentukan penilaian kematangan Risiko di BDPKPS, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah menerapkan peraturan Kematangan Risiko dan dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

In order to determine the Risk Maturity assessment in OPPFMA, the Compliance and Risk Management Division has implemented a Risk Maturity regulation and can be seen in the matrix as follows:

Tingkat Kematangan Maturity Level	PARAMETER PENILAIAN ASSESSMENT PARAMETERS			
	Kepemimpinan Leadership	Proses Manajemen Risiko Risk Management Process	Aktivitas Penanganan Risiko Risk Handling Activities	Hasil Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Results
Belum Sadar Risiko Risk Naive	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Manajemen risiko sangat rendah The commitment and understanding of leaders towards risk management is very low	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif The risk management process is carried out in a very incomplete and incomprehensive way.	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat rendah The mitigation implemented and the success of reducing the risk level are very low	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah The success of achieving strategic goals is very low
Sadar Risiko Risk Aware	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko rendah The commitment and understanding of leaders towards risk management is low	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif The risk management process is carried out in an incomplete and incomprehensive way.	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah The mitigation implemented and the success of reducing the risk level are low	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah The success of achieving strategic goals is low



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKPS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BDPKPS Compliance and Risk Management of OPPFMA

Tingkat Kematangan Maturity Level	PARAMETER PENILAIAN ASSESSMENT PARAMETERS			
	Kepemimpinan Leadership	Proses Manajemen Risiko Risk Management Process	Aktivitas Penanganan Risiko Risk Handling Activities	Hasil Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Results
Risiko Ditetapkan Risk Defined	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sedang The commitment and understanding of leaders towards risk management is moderate	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif The risk management process is carried out in a moderate and quiet comprehensive way.	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sedang The mitigation implemented and the success of reducing the risk level are moderate	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang The success of achieving strategic goals is moderate
Risiko Dikelola Risk Managed	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko tinggi The commitment and understanding of leaders towards risk management is high	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi komprehensif The risk management process is carried out in a good and comprehensive way.	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi The mitigation implemented and the success of reducing the risk level are high	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi The success of achieving strategic goals is high
Dapat Menangani Risiko Risk Enabled	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sangat tinggi The commitment and understanding of leaders towards risk management is very high	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif The risk management process is carried out in a very complete and comprehensive way.	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi The mitigation implemented and the success of reducing the risk level are very high	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi The success of achieving strategic goals is very high
Keterangan: pada tahun 2018 target 75% telah tercapai sebesar 80% Remarks: in 2018, the company targeted 75% and achieved 80%				

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen BDPKS secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh pejabat dan Pegawai BDPKS.

The Internal Control System is a monitoring process mechanism established by the OPPFMA's Management on an ongoing basis. The quality of design and implementation is influenced by the Supervisory Board, Board of Directors, and all OPPFMA's officials and Employees.

Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BDPKS mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 53. Sistem Pengendalian Internal merupakan serangkaian proses pengendalian terhadap kegiatan BDPKS pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen BDPKS dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman.

The internal control system carried out by OPPFMA refers to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 60 of 2008 on the Government's Internal Control System Article 53. The Internal Control System is a series of control processes for OPPFMA's activities at every level and unit in the organizational structure.

An effective Internal Control System is an important component in OPPFMA's management and forms the basis for healthy and safe operations.



Sistem Pengendalian Internal Internal Control

Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu menjaga aset BDPKS, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan managerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan BDPKS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspekkehati-hatian. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Pemeriksa Internal berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan, keputusan BDPKS dan seluruh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi BDPKS menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha BDPKS, manajemen risiko, perencanaan strategis yang akurat, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Sedangkan Dewan Pengawas mengawasi kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsipkehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit.

Sejalan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efektif, BDPKS memiliki Fungsi Internal Audit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengendalian Internal Audit secara keseluruhan. Konsep Sistem Pengendalian Internal sejalan dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* COSO dimana di dalamnya terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang efektif diperlukan dalam mendukung seluruh organ BDPKS dapat menjalankan semua aktivitasnya, mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai dan mengerti serta berkomitmen untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar.

An effective Internal Control System safeguards OPPFMA's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, increase OPPFMA's compliance with prevailing laws and regulations, and reduce the risk of loss, deviation, and breach of prudential aspects. Effective Internal Control System improves the Company's compliance with the prevailing rules and regulations. The Internal Audit Unit strives to ensure that OPPFMA's policies, decisions, and all business activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations.

The OPPFMA's Board of Directors applies the internal control system through consistent implementation of policy and procedures, in relation to OPPFMA's business activity, risk management, strategic planning, segregation of duties, and clear authority delegation, as well as adequate accounting policy. Whereas the Supervisory Board, assisted by the Audit Committee, monitors the adequacy and fairness in the preparation of financial statements, risk management, by taking into account the prudential principles.

In line with the effective implementation of the Internal Control System, OPPFMA has an Internal Audit Function as an integral part of Internal Audit control. The Internal Control System is in line with the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) framework, which consists of interrelated five main elements:

1. Control Environment

An effective control environment is necessary for supporting all OPPFMA's organs, to be able to carry out all their activities, understand their duties and responsibilities, have adequate knowledge and understanding, and commit to doing the right activities in the right way.



Lingkungan pengendalian BDPKS tergambarkan secara jelas melalui pembentukan Struktur Organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan tugas dari masing-masing organ.

OPPFMA's control environment is clearly illustrated through the establishment of an Organizational Structure that depicts the segregation of duties of each organ.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Identifikasi dan penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisa risiko yang relevan terkait pencapaian tujuan PDPKS dan menentukan respon yang tepat dalam menghilangkan, meminimalisasi, atau menentukan risiko yang dapat diterima. Pada tahun 2017 BDPKS telah melakukan pengelolaan manajemen risiko. Sistem Pengendalian Internal yang efektif mengharuskan BDPKS secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Penilaian risiko harus dilakukan oleh auditor intern melalui cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. (Dapat dilihat pada Bab Tata Kelola BDPKS bagian Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini).

2. Risk Assessment and Identification

Risk assessment and identification is the process of identifying and analyzing relevant risks related to achieving the objectives of OPPFMA and determining the appropriate response in eliminating, minimizing, or determining the acceptable risk. In 2017, OPPFMA has carried out risk management. An effective Internal Control System requires OPPFMA to continuously identify and assess risks that can affect the achievement of targets. Risk assessments must be carried out by internal auditors through a wider and more comprehensive audit scope. (Can be seen in detail in OPPFMA's Governance in the Risk Management section of this Annual Report).

3. Kegiatan Pengendalian

Dalam rangka menciptakan pengendalian yang efektif BDPKS melibatkan seluruh pegawai termasuk Direksi dalam kegiatan BDPKS sehari-hari dan risiko yang telah teridentifikasi serta memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian serta dilakukan proses verifikasi lebih dini untuk memastikan kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian BDPKS meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberi keyakinan pegawai BDPKS bahwa arahan Dewan Pengawas dan Direksi BDPKS secara efektif.

3. Control Activities

In creating effective control, OPPFMA involves all OPPFMA's personnel, including the Directors in the daily activities, identifies risks, and has control policies and procedures as well as an early verification process to ensure policies and procedures are consistently adhered to. OPPFMA control activities include policies, procedures, and practices that provide confidence to the OPPFMA's employees that the directives from the Supervisory Board and the Board of Directors are effective.

4. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi atas informasi telah dilakukan secara efektif baik dalam komunikasi di lingkungan BDPKS maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait dalam program, proyek, dan kegiatan lainnya termasuk penganggaran. Tahun 2017, BDPKS telah melakukan forum komunikasi internal antara lain melalui Rapat Dewan Pengawas, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Rapat Manajemen dan rapat-rapat lainnya atau melalui pelaporan formal.

4. Information and Communication

Communication of information has been carried out effectively both within the OPPFMA environment and outside parties involved in programs, projects, and other activities, including budgeting. In 2017, OPPFMA held an internal communication forum, through the Supervisory Board's Meeting, Board of Directors' Meeting, Audit Committee's Meeting, Management Meeting, and other meetings, or through formal reporting.



5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui bahwa sistem pengendalian intern telah dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan dan kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi sudah dibuatkan rencana perbaikan. BDPKS melakukan monitoring secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Monitoring dilakukan terhadap seluruh fungsi yang merupakan bagian dari kegiatan operasional BDPKS. Proses monitoring ini dilakukan oleh Fungsi Internal Audit yang dilaksanakan melalui kegiatan Audit maupun kegiatan Non Audit. Pelaksanaan monitoring selain dilakukan oleh Fungsi Internal Audit, dapat juga dilakukan oleh KAP yang ditunjuk dan ditetapkan oleh BDPKS, serta juga dapat dilakukan oleh lembaga tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Monitoring

Monitoring is carried out to assess that the internal control system has been carried out as planned and that identified weaknesses have been planned to be improved. OPPFMA continuously monitors the effectiveness of internal control. Monitoring is carried out on all functions that are part of OPPFMA's operations. This monitoring process is carried out by the Internal Audit Function, which is carried out through Audit activities and Non-Audit activities. Monitoring is carried out not only by the Internal Audit Function, but also by KAP appointed and determined by OPPFMA. Monitoring can also be carried out by certain institutions in accordance with prevailing regulations.





Kode Etik BDPKS

OPPFMA's Code of Conduct

Kode Etik BDPKS terdiri dari Etika Bisnis dan Etika Kerja yang merupakan tanggung jawab seluruh manajemen BDPKS mencakup pegawai, Direksi, Dewan Pengawas dan Komite di bawah Dewan Pengawas untuk bertindak laku sesuai dengan budaya BDPKS.

OPPFMA's Code of Conduct consists of Business Ethics and Work Ethics, as the responsibility of all OPPFMA's management, which includes employees, the Board of Directors, the Supervisory Board, and Committees reporting directly to the Supervisory Board, to behave in accordance with OPPFMA's culture.

Dalam menjalankan usahanya, BDPKS menerapkan etika bisnis/usaha dan etika kerja, dimana etika bisnis menjadi acuan bagi BDPKS dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan *stakeholder*. Sementara etika kerja merupakan sistem yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Pegawai dan BDPKS.

Penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan sikap disiplin Pegawai serta dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan rekan sekerja maupun para mitra kerja.

In conducting its business, OPPFMA applies business and work ethics, in which business ethics become references for OPPFMA in carrying out business activities, including interacting with stakeholders. Work ethic is a system adopted by every Leader and Employee in carrying out their duties, including the relations between employees and OPPFMA.

The consistent implementation of Business and Work Ethics is expected to increase employees' discipline and encourage professional, responsible, reasonable, appropriate, and trustworthy conduct in engaging the colleagues and partners in conducting business.



Kode Etik BDPKS OPPFMA's Code of Conduct

Kode Etik menuntun pegawai dalam bersikap dan berperilaku. Pegawai dapat dikenakan sanksi moral apabila melanggar kode etik yang penyampaian dilakukan secara tertutup atau terbuka. Untuk itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK.01/2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya BDPKS. Selama tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran kode etik, sehingga tidak ada informasi sanksi yang diberikan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Insan BDPKS berlandaskan pada nilai-nilai dan budaya BDPKS yaitu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Uraian lebih lengkap mengenai Budaya BDPKS telah diuraikan pada Bab Profil BDPKS bagian Nilai-Nilai dan Budaya BDPKS.

Dalam rangka penegakan kode etik, BDPKS membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi dengan melakukan sosialisasi Nilai-Nilai Budaya BDPKS pada Pegawai BDPKS melalui acara-acara besar BDPKS seperti *Employee Gathering* yang secara rutin dilakukan oleh BDPKS dalam rangka membangun menambah semangat dan kekompakan dalam bekerja.

The Code of Conduct guides how employees behave. Employees may be subject to moral sanctions if they violate a code of conduct openly or confidentially. Therefore, the Ministry of Finance stipulated the Minister of Finance's Decree No.293/KMK.01/2007 on the Delegation of Authority to Officials within the Ministry of Finance to Impose Moral Sanctions for Violations of the Civil Servants to the Code of Conduct within the Ministry of Finance including OPPFMA. During 2018, there were no violations of the code of conduct. Thus, there was no information related to sanctions.

In carrying out their duties and responsibilities, OPPFMA's Personnel has OPPFMA's values and culture as the basis: Integrity, Professionalism, Synergy, Service, and Perfection. Description of OPPFMA's Culture has been detailed in the OPPFMA's Profile in the OPPFMA's Values and Culture section.

In terms of upholding the code of conduct, OPPFMA develops a culture of compliance across all levels of the organization by disseminating OPPFMA's Cultural Values to the Employees through major events, such as Employee Gathering, which is regularly carried out by OPPFMA to build more enthusiasm and solidarity in work.

Perkara Hukum

Legal Cases

Perkara penting yang dimaksud adalah permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh BDPKS, serta anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang menjabat. BDPKS berupaya meminimalisir potensi munculnya permasalahan hukum serta menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dihadapi BDPKS.

Berikut perkara yang dihadapi oleh BDPKS, Dewan Pengawas dan Direksi baik pidana maupun perdata selama tahun 2016 sampai 2018:

Important cases are defined as the litigation case faced by OPPFMA, as well as member the Supervisory Board and the Board of Directors. OPPFMA strives to minimize the potential for any legal problems and resolve any legal problems faced by OPPFMA.

The cases faced by the OPPFMA, the Supervisory Board, and the Board of Directors, for both criminal and civil cases during 2016-2018:

Tabel Perkara Hukum
Table: Legal Case

Tergugat Defendant	Jumlah Perkara Cases					
	2016		2017		2018	
	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil
Perseroan The Company	0	0	0	0	0	0
Dewan Pengawas Supervisory Board	0	0	0	0	0	0
Direksi Board of Directors	0	0	0	0	0	0

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak
Important Case Faced by the Subsidiaries

Hingga saat ini, BDPKPS tidak memiliki entitas anak dan asosiasi sehingga tahun 2018 tidak terdapat informasi terkait perkara penting yang dihadapi entitas anak.

To date, OPFFMA has no subsidiaries and associations. Thus, in 2018, there is no information related to important cases faced by subsidiaries.

Perkara Penting yang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang Menjabat pada Periode Laporan Tahunan
Important Case Faced by the Supervisory Board and Board of Directors, who Serve in the Annual Report Period

Selama periode tahun 2018, tidak terdapat anggota Dewan Pengawas dan Direksi BDPKPS yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana. Sehingga tidak ada informasi terkait pokok perkara/gugatan, risiko, nominal gugatan dan saksi administrasi yang dikenakan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BDPKPS.

During 2018, there are no members of the Supervisory Board and Board of Directors of OPFFMA serving in the Company who are involved in lawsuits, both civil or criminal. Thus, there is no information regarding the case subject/lawsuit, risks, nominal claims, and administrative sanctions imposed on the members of the Supervisory Board and the Board of Directors of OPFFMA.



Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services

Untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu Badan Layanan Umum di Kementerian Keuangan, BDPKS telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melayani kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh unit-unit dalam BDPKS.

As one of the Public Service Agencies within the Ministry of Finance, OPFMA has established a Procurement Unit (ULP) to carry out its function to serve the procurement of goods and services for units in OPFMA.

ULP dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Utama No.30/DPKS/2016 tanggal 1 Juni 2016. Hal ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Pasal 5 ayat 1 dan 2.

ULP was established based on the President Director's Decree No. 30/DPKS/2016 dated 1 June 2016. This is in line with the Minister of Finance's Regulation No. 08/PMK.02/2006 on the Authority for Procurement of Goods/Services at the Public Service Agency Article 5 paragraphs 1 and 2

Struktur Organisasi dan Tugas ULP ULP's Organizational Structure and Duties

Untuk memastikan implementasi dan menjaga proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan secara baik dan dengan pengendalian yang efektif dan efisien, BDPKS membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terdiri dari Kepala, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Staf Pendukung.

To ensure the implementation and maintain the process of procurement of goods and services to run well with effective and efficient control, OPFMA established a Procurement Unit (ULP) consisting of the Head, Secretariat, Working Group, and Supporting Staff.



Tugas dan Kewenangan Unit Layanan Pengadaan BDPKKS

Duties and Authority of OPPFMA's Procurement Unit

ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai tugas:

1. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
3. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
4. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. menjawab sanggahan;
7. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;
8. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
9. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
10. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Direktur Utama;
11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
12. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
13. melaksanakan pengadaan barang/jas dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE Kementerian Keuangan;

ULP of Oil Palm Plantation Fund Management Agency has the tasks of:

1. reviewing the General Plan for the Procurement of Goods/Services with the Commitment-Making Officer (PPK);
2. preparing plans for selecting goods/service providers;
3. announcing the procurement of goods/services on the website of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency;
4. assessing the qualifications of goods/service providers through prequalification or post-qualification;
5. conducting administrative, technical, and price evaluations of incoming bids;
6. answering refutation;
7. submitting the results of the selection and submitting a copy of the document of the selection of goods/service providers to PPK;
8. maintaining the original documents of the selection of providers of goods/services;
9. proposing changes to the Owner Estimate, Terms of Reference/technical specifications of the work and draft contract to PPK;
10. compiling a report on the process and results of the Procurement to the President Director;
11. providing accountability for the implementation of Procurement of goods/services activities to Budget Users (PA)/Proxy of Budget User (KPA);
12. formulating and implementing the strategy of Procurement of Goods/Services within ULP of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency;
13. carrying out the procurement of goods/services using the electronic procurement system at LPSE of Ministry of Finance;



Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services

14. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
15. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.

ULP Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan dokumen pengadaan;
2. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
3. Dalam penetapan penyedia barang /jasa ULP terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. Pimpinan BLU untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan BLU untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
4. Mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
5. Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. evaluating the goods/services procurement process that has been carried out; and
15. managing a procurement management information system that includes procurement documents, price survey data, list of goods/services requirements, and blacklist of providers.

ULP of Oil Palm Plantation Fund Management Agency has the authorities of:

1. Establishing procurement documents;
2. Determining the nominal amount of the bid guarantee;
3. Before determining the provider of goods/services, ULP must obtain written approval from:
 - a. Head of BLU for Procurement of Goods/Services with a value above Rp50,000,000,000.00 (Fifty billion Rupiahs).
 - b. Other officials appointed by the Head of BLU for the procurement of goods/services with a value up to Rp50,000,000,000.00 (Fifty billion Rupiahs).
4. Proposing to the PA/KPA that the Goods/Services Provider who carries out acts and actions, such as fraud, forgery, and other violations to be subject to sanctions on the Black List; and
5. Providing administrative sanctions to Goods/Services Providers who committed violations, behaviors, or actions, as stipulated in the Presidential Regulation No. 54 of 2010 on the Procurement of Government's Goods/Services.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Guidelines for Procurement of Goods and Services

Dalam melaksanakan kegiatan terkait barang dan jasa, BDPKS menerapkan kebijakan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Keputusan Direktur Utama BDPKS No.30/DPKS/ 2016 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan tanggal 1 Juni 2016. Muatan dalam Keputusan Direktur Utama tersebut adalah terkait dengan tugas dan tanggung jawab Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

In carrying out activities related to goods and services, OPFMA implements a policy on the Procurement of Goods and Services by referring to Decree of the OPFMA's President Director No. 30/DPKS/2016 on the Establishment of Procurement Unit dated 1 June 2016. The President Director's Decree stipulates the duties and responsibilities of the Goods and Services Procurement Unit.



Konsep Pengadaan Barang dan Jasa BDPKPS

Concept of Procurement of Goods and Services of OPPFMA

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Principles of Procurement of Goods and Services

Pengadaan Barang dan Jasa di BDPKPS dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

Procurement of goods and services at OPPFMA is carried out with the following basic principles:

Adil dan Wajar Adil dan Wajar	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi syarat	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi syarat
Akuntabel Akuntabel	Mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan	Mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan
Efektif Effective	Pengadaan barang dan atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan	Mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan
Efisien Efficient	Pengadaan barang dan atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah	Pengadaan barang dan atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah
Kompetitif Competitive	Pengadaan barang dan atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan	Pengadaan barang dan atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan atau jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan
Akuntabel Akuntabel	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan atau jasa yang berminat	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan atau jasa yang berminat



Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Mechanism of Procurement of Goods and Services

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Proses pengadaan barang/jasa BDPKPS dilaksanakan melalui metode Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Kontes/Sayembara.

Referring to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 4 of 2015 on the Procurement of Government's Goods/Services, the process of procurement of goods/services in OPFMA is carried out through Public Auction, Simple Auction, Direct Appointment, Direct Procurement, and Competition/Contest.

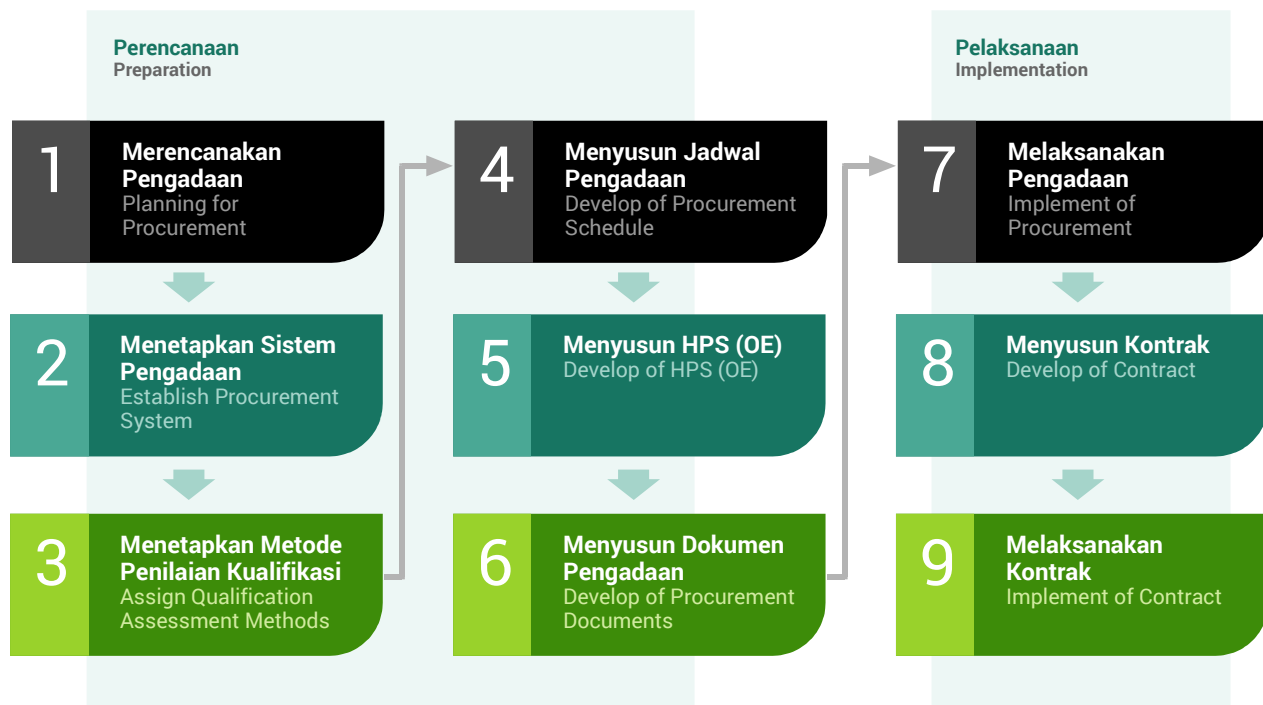
No	Mekanisme Mechanism	Definisi Definition
1	Pelelangan Umum Public Auction	Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Method of selecting Other Goods/Services Providers for work that can be conducted by all Other Goods/Construction Services/Services Providers who fulfill the requirements.
2	Pelelangan Sederhana Simple Auction	Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Method of selecting Other Goods/Services Providers for work up to Rp5,000,000,000 (five billion rupiahs).
3	Penunjukan Langsung Direct Appointment	Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Method of selecting Goods/Services Providers by appointing one (1) Goods/Services Provider directly.
4	Pengadaan Langsung Direct Procurement	Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan langsung/seleksi/penunjukan langsung. Procurement of Goods/Services directly to Provider of Goods/Services, without going through a direct auction/direct selection/appointment.
5	Sayembara Competition	Metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan sedangkan Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. The method of selecting Service Providers who compete for their original ideas, creativity, and certain innovations, for which the prices/costs cannot be determined based on the Unit Prices. Contest is a method of providing specific good/service which cannot be determined based on the Unit Price.

Siklus Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Process Cycle

Pengadaan adalah seluruh proses akuisisi dari pihak lain (termasuk aspek logistik) dan mencakup barang, jasa, dan pekerjaan. Proses ini mencakup seluruh daur hidup sejak konsepsi awal dan penentuan kebutuhan hingga ke akhir masa manfaat atau akhir kontrak jasa. Siklus proses pengadaan barang dan jasa BDPKPS memiliki 9 tahapan yang digambarkan dalam skema berikut ini :

Procurement is the entire acquisition process from other parties (including logistical aspects), which includes goods, services, and works. This process covers the entire life cycle, from the initial concept and the determination of needs, up to the end of the use or the end of service contracts. The cycle for the procurement of goods and services of OPFMA has 9 stages as described in the following scheme:



Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Activities

Selama tahun 2018, Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi BDPKPS baik yang menggunakan metode pelelangan umum, sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara adalah sebagai berikut:

During 2018, the number of procurement of goods and services packages that have been completed to meet the needs of OPPFMA operations using the method of public auction, simple auction, direct appointment, direct procurement, and competition are as follows:

No	Metode Pelelangan Method Auction	Jumlah Total
1	Pelelangan Umum Public Auction	1 Paket Package
2	Pelelangan Sederhana Simple Auction	1 Paket Package
3	Penunjukan Langsung Direct Appointment	180 Paket Packages
4	Pengadaan Langsung Direct Procurement	250 Paket Packages
5	Swakelola Self-managed	1 Paket Package
Jumlah Total		433 Paket Packages



Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Reporting Mechanism



Salah satu perwujudan dari komitmen BDPKS dalam upaya pengendalian internal adalah dijalankannya kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing system*). Sistem pelaporan pelanggaran BDPKS mengacu pada *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan. *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi individu yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

One manifestation of OPPFMA's commitment to internal control is the Whistleblowing system policy implementation. OPPFMA's violation reporting system refers to the Ministry of Finance's Whistleblowing System. The Ministry of Finance's Whistleblowing System is an application provided by the Ministry of Finance for individuals who have information and want to report an act that indicates violations that occur within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.



Sistem pelaporan pelanggaran adalah sistem yang mengelola pengaduan, penyingkapan mengenai korupsi, kecurangan (*fraud*), pencurian, menyuap dan atau menerima suap, gratifikasi, benturan kepentingan, pembocoran rahasia BDPKS, pelanggaran etika, penggelapan aset, penipuan, pemerasan, tindakan melanggar hukum dan kebijakan prosedur perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BDPKS dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BDPKS.

Pelapor dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui alamat:

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 6
JALAN DR. WAHIDIN NO.1 JAKARTA 10710,
KOTAK POS 21
Telepon : (021) 345-4236
Fax : (021) 352-3252
SMS : 0815-99-6666-2
e-Mail : pengaduan.itjen@depkeu.go.id

Semua laporan pelanggaran akan diteruskan kepada Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang merupakan pihak eksternal BDPKS. Seluruh organ BDPKS, yaitu Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh elemen maupun pegawai BDPKS hingga pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan adanya pelanggaran. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran adalah Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai.

The whistleblowing system is a system that manages complaints, disclosures about corruption, fraud, theft, bribery and/or accepting bribes, gratuities, conflicts of interest, confidentiality breach, ethical violations, asset embezzlement, fraud, extortion, illegal actions and policies procedures against unlawful, unethical/improper conduct in a confidential, anonymous, and independent manner. The system is utilized to optimize the participation of OPPFMA's Personnel and other parties in disclosing violations within OPPFMA.

Whistleblower can report violations at:

DJUANDA BUILDING II 6TH FLOOR
JALAN DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA 10710,
PO BOX 21
Telephone: (021) 345-4236
Fax : (021) 352-3252
Text: 0815-99-6666-2
e-Mail : pengaduan.itjen@depkeu.go.id

All reports will be forwarded to the Inspectorate for Investigation (IBI), which is an external party of OPPFMA. All OPPFMA's organs, i.e. the Supervisory Board, the Board of Directors, all elements and employees of OPPFMA, and other stakeholders can report any violations. The parties that can be reported as violators are the Supervisory Board, the Board of Directors, and all employees.



Perlindungan Bagi Pelapor Whistleblower's Protection

Proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme, oleh karenanya BDPDKS mengatur kebijakan perlindungan terhadap pelapor yang meliputi aspek sebagai berikut:

1. Menjamin perlindungan kerahasiaan atas identitas dari pelapor dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di BDPDKS dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.
2. Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh BDPDKS. Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas ia juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini sebagai bukti komitmen BDPDKS dalam melindungi pelapor.
3. Perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya
4. Pemecatan yang dilakukan secara tidak adil;
5. Penurunan jabatan atau pangkat;
6. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
7. Catatan yang merugikan dalam dokumen data pribadi pelapor (*personal file record*).

Selain itu, mengacu pada Pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, perlindungan diberikan kepada pelapor berupa:

1. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata.
2. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.
3. Perlindungan terhadap harta Pelapor.
4. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor.
5. Pemberian keterangan tanpa bertatap.

Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU No.13 tahun 2006.

The follow-up process for each complaint prioritizes confidentiality, the presumption of innocence, and professionalism. Therefore, OPPFMA regulates the whistleblower's protection policy, which includes the following aspects:

1. Ensuring the confidentiality of the whistleblower's identity and use various methods to maintain the said confidentiality. This is carried out to encourage reporting of violations that occur at OPPFMA and ensure the safety of the whistleblower and the whistleblower's family.
2. All reports of violations will be confidential and secure, guaranteed by OPPFMA. If the whistleblower provides his clear identity, he has the right to obtain information about the follow-up to his report. This is OPPFMA's commitment to protecting the whistleblower.
3. Protection of adverse records in his personal data file
4. Firing the whistleblower unfairly;
5. Demotion of rank;
6. Harassment or discrimination in all forms;
7. An adverse record in the personal file record of the whistleblower.

In addition, referring to Article 5 PP No. 57 of 2003 on the Special Protection Procedures for Whistleblower and Witnesses in the Criminal Act of Money Laundering, protection is provided to the whistleblower in the form of:

1. Protection from criminal and/or civil charges.
2. Protection for the whistleblower and/or whistleblower's family from physical and/or mental threats.
3. Protection of Whistleblower's assets.
4. Confidentiality and disguising the Whistleblower's identity.
5. Provision of information without having to meet.

Whistleblower can also request assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), in accordance with Law No. 13 of 2006.

Kebijakan perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan merupakan laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan internal BDPKPS.

Protection and confidentiality policy is not provided for Whistleblowers who are proven to provide false information. If the investigation concludes that the Whistleblower's Report is false, without a clear basis, then the Whistleblower may be sued back or subject to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations or internal regulations of OPPFMA.

Pihak Pengelola Pengaduan Reporting Management

Pengelolaan pelaporan tindak kejahatan dan pelanggaran ditangani oleh unit yang telah ditunjuk dan Deloitte sebagai mitra BDPKPS dalam menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Management of crime and violation reporting is handled by the designated unit and Deloitte as OPPFMA's partner in implementing the Whistleblowing System.

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Complaint Handling

Selama tahun 2018, tidak terdapat pelaporan pelanggaran sehingga tidak ada informasi terkait dengan Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai.

During 2018, there were no reports of violations. Thus, there was no information related to sanctions/follow-up on complaints that have been completed.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System* Monitoring and Evaluation of Whistleblowing System

BDPKPS melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Pelaporan Pelanggaran secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan WBS. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direksi melalui Satuan Pengawasan Intern atau dapat menggunakan pihak luar yang independen. Monitoring dan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan implementasi WBS di lingkungan BDPKPS. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

OPPFMA monitors and evaluates the Whistleblowing System regularly, at least once a year. This is done to ensure the effectiveness of WBS implementation. Monitoring and evaluation are carried out by the Board of Directors through the Internal Audit Unit, or it can be carried out independently by external parties. The monitoring and evaluation shall improve the WBS implementation within OPPFMA. The report of the results of monitoring and evaluation is delivered to the Board of Directors.



Sistem Manajemen Mutu Quality Management System



BDPKKS berkomitmen untuk memberikan jaminan mutu yang terbaik kepada para *stakeholder*. Untuk itu BDPKKS telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKKS). Standar Pelayanan Minimum pedoman dalam memberikan layanan minimum atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BDPKKS.

OPPFMA is committed to providing the best quality to stakeholders. Therefore, OPPFMA has adopted the Financial Management of the Public Service Agency using the Minimum Service Standards (SPM) in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 80/PMK.05/2016 on the Minimum Service Standards of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (OPPFMA). Minimum Service Standards provide guidelines in providing services for the implementation of sustainable palm oil development fund management by OPPFMA.



SPM merupakan pedoman dalam memberikan layanan minimum yang diberikan kepada masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BDPKS. Dalam pelaksanaannya Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BDPKS yang dilakukan oleh Direksi.

SPM is a guideline in providing minimum services to the community on the implementation of sustainable palm oil development fund management by OPPFMA. In its implementation, the Supervisory Board supervises OPPFMA's management, conducted by the Board of Directors.

Kebijakan terkait Sistem Pelayanan Minimum BDPKS, meliputi:

- a. Pengelolaan Dana;
- b. Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
- d. Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya;
- e. Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
- f. Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- g. Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan
- h. Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan.

Policies related to the OPPFMA's Minimum Service System include:

- a. Fund Management;
- b. Fund Disbursement for Human Resources Development
- c. Fund Disbursement for Research and Development;
- d. Fund Disbursement for Promotion of Oil Palm and Its Derivatives;
- e. Fund Disbursement for Replantations;
- f. Fund Disbursement for Plantation Facilities and Infrastructure;
- g. Fund Disbursement for Biodiesel Financing; and
- h. General Affairs and Housekeeping.

Tujuan Sistem Pelayanan Minimum BDPKS, antara lain:

1. Menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; dan
3. Menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

The objectives of OPPFMA's Minimum Service System include:

1. Guaranteeing the procedure implementation for the management of the Oil Palm Plantation Fund in accordance with applicable regulations;
2. Ensuring the service quality in the management of sustainable palm oil development funds; and
3. Ensuring the consistency of planning, implementation, monitoring, and evaluation of the sustainable palm oil development fund management.



Selanjutnya untuk melihat pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BDPKS, maka dilakukan evaluasi meliputi secara berkala dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan BDPKS.

Selanjutnya untuk melihat pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BDPKS, maka dilakukan evaluasi meliputi secara berkala dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan BDPKS.

Pemantauan dan Evaluasi **Monitoring and Evaluation**

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pengembangan BDPKS telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima layanan.

Pelaksanaan pemantauan meliputi:

- Membandingkan layanan yang diberikan dengan indikator SPM yang ditetapkan;
- BLU BDPKS yang berkoordinasi dengan unit/ lembaga terkait;
- Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala.

Selanjutnya untuk melihat pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BDPKS, maka dilakukan evaluasi meliputi secara berkala dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan BDPKS.

Monitoring is carried out to ensure that the implementation of OPPFMA's development services has been carried out in accordance with established standards. The monitoring methods include site visitation, studies, and meetings with implementers and service recipients.

The monitoring implementation includes:

- Comparing services provided with the established SPM indicators.
- OPPFMA Public Service Agency that coordinates with related unit/institution;
- Monitoring is carried out regularly.

Further, in order to improve the OPPFMA's performance and to observe the achievements and impacts of the program that was carried out based on the monitoring, evaluation was carried out regularly by site visitations, interviews, observations, and studies. The evaluation results are used as input to improve the performance of OPPFMA's services.



Akuntan Publik Public Accountant

BPDPKS menyadari bahwa akuntabilitas informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Audit sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Untuk memberikan keyakinan yang memadai akan laporan keuangan dan operasional BPDPKS, BPDPKS secara rutin menunjuk pihak eksternal (independen) untuk melakukan audit terkait laporan tersebut. Upaya tersebut dilakukan BPDPKS dalam rangka menunjang sistem pengendalian internal BPDPKS dan untuk memperoleh informasi yang memadai sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi pengembangan Perusahaan kedepan.

BPDPKS menunjuk akuntan publik sebagai auditor eksternal untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi BPDPKS sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK). Selain itu, laporan yang disusun menyajikan informasi terkait posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan BPDPKS tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku. Auditor eksternal juga diberikan wewenang dalam melakukan penilaian yang dianggap penting.

Pemilihan auditor eksternal telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan dilakukan melalui mekanisme tender pengadaan jasa audit, dengan peserta tender sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh BPDPKS. Dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dari hasil pemilihan KAP yang telah dilakukan pada tahun 2018, telah ditetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit keuangan untuk Tahun Buku 2018 dengan *fee audit* sebesar Rp191.510.000,- Informasi Akuntan Publik terkait Nama Akuntan, Nama Kantor Akuntan Publik, dan Jasa Lain yang Diberikan selama kurun waktu 2015 - 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

OPPFMA realizes that information accountability resulted from the audits is essential for business continuity. OPPFMA regularly appoints an external (independent) party to conduct audits related to the OPPFMA's financial and statements and operational reports to provide adequate confidence. OPPFMA carries out the activity to support the OPPFMA's internal control system and to obtain adequate information as consideration in developing the Company's future development strategy.

OPPFMA shall appoint public accountant as external auditors to ensure that OPPFMA's accounting reports are in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS). In addition, the report compiled presents information related to the financial position, results of operations in a reasonable manner, and informed that business operations carried out by OPPFMA do not violate the prevailing regulations. External auditors are also given the authority to provide important assessments.

The selection of external auditors has fulfilled the provisions of Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 on the Public Accountant Services and was conducted through a tender for procurement of audit services, with tender participants in accordance with the qualifications set by OPPFMA. Public Accountant Firm (KAP) may only perform audit for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years, and Public Accountant may only perform audit for a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

From the results of the KAP selection in 2018, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan is selected to conduct financial audits for Fiscal Year 2018 with an audit fee of Rp191,510,000. Public Accountant Information related to the Name of the Accountant, Name of the Public Accountant, and Other Services Provided during 2015 - 2018 can be seen in the following table:



Tabel Auditor Eksternal BDPKKS Tahun 2015-2018

Table: 2015-2018 OPPFMA's External Auditors

Tahun Buku Fiscal Year	Akuntan Publik Public Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Jasa Lain Other Services	Opini Opinion
2018	Eddy Rintis, SE, CPA	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tidak Ada None	Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The attached financial statements present Unqualified Opinion for the financial position of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency as of 31 December 2018, and their financial activities and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
2017	Eddy Rintis, SE, CPA	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tidak Ada None	Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2017, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The attached financial statements present Unqualified Opinion for the financial position of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency as of 31 December 2017, and their financial activities and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
2016	Rudi M, Tambunan, CA, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	- Penyusun Pedoman Akuntansi Formulation of Accounting Guidelines - Laporan Financial Managerial Financial Managerial Statements	Laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BLU-BDPKKS tanggal 31 Desember 2015, dan aktivitas usaha serta arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The attached financial statements present unqualified opinion. BLU OPPFMA's financial position as of 31 December 2015, and business activities and its cash flows, for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2015	Rudi M, Tambunan, CA, CPA	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Tidak Ada None	Laporan keuangan terlampir disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BLU-BDPKKS tanggal 31 Desember 2015, dan aktivitas usaha serta arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The attached financial statements present unqualified opinion. BLU OPPFMA's financial position as of 31 December 2015, and business activities and its cash flows, for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Teknologi Informasi

Information Technology

Teknologi informasi yang andal menjadi *enabler* proses pengembangan bisnis dan sinergi dengan stakeholder dan mitra terkait. BDPKS terus berupaya melaksanakan pengelolaan teknologi informasi secara optimal melalui penyusunan dan penerapan *Road Map IT* yang telah didesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.

Reliable information technology is an enabler of business development processes and synergies with relevant stakeholders and partners. OPPFMA strives to optimally manage information technology through the preparation and implementation of IT Road Maps that have been designed up to the level of data and its security system.

Pengelolaan Informasi

Information Management

Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi BDPKS dikelola oleh Divisi Umum dan SDM yang dipimpin oleh Bapak Suharman dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang pegawai.

The Information Technology Management Function of the OPPFMA is managed by the General Affairs and HR Division, headed by Mr. Suharman, assisted by three (3) employees.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Sistem Informasi

Duties and Responsibilities of Information System Management

1. Mengkoordinir, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan transaksi elektronik yang terintegrasi dan mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BDPKS.
2. Mengkoordinir penyiapan data/informasi yang dibutuhkan baik untuk kepentingan pencatatan seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh BDPKS Sawit maupun untuk menunjang kebutuhan laporan kepentingan internal maupun eksternal.
3. Membuat dan menganalisa atas permintaan kebutuhan teknologi informasi pada setiap unit BDPKS.
4. Pengembangan SDM di Deputi Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan & Manajemen Risiko.
1. Coordinating, building, and developing integrated information systems and electronic transactions that cover all activities carried out by OPPFMA.
2. Coordinating the preparation of data/information needed for records of all transactions carried out by OPPFMA, and to support the needs of internal and external reports.
3. Formulating and analyzing demand for information technology in each OPPFMA's unit.
4. HR Development at the Deputy Directorate for Finance, General Affairs, Compliance & Risk Management.



Roadmap Teknologi Informasi

Information Technology Roadmap

Target yang ingin dicapai oleh BDPKPS dari penerapan Teknologi Informasi untuk tahun 2018 adalah Peningkatan dan pemeliharaan sistem informasi/ infrastruktur. Saat ini Teknologi Informasi BDPKPS masih berada pada tahap pengembangan system informasi dan infrastruktur. Roadmap Divisi Pengelolaan Sistem Informasi BDPKPS Tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

OPPFMA wants to achieve the Improvement and maintenance of the information system/infrastructure in 2018 Information Technology. Currently, OPFMA Information Technology is still in the stage of the development of information systems and infrastructure. Roadmap for OPFMA Information System Management in 2016-2018 is as follows:

2018 | IMPLEMENTASI IT GOVERNANCE

IT GOVERNANCE IMPLEMENTATION

- Standarisasi Prosedur dan Manajemen IT (ISO 20000)
- Standarisasi Keamanan Informasi (ISO 27001)
- IT Procedures and Management Standardization (ISO 20000)
- Information Security Standardization (ISO 27001)

2017 | PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI/INFRASTRUKTUR

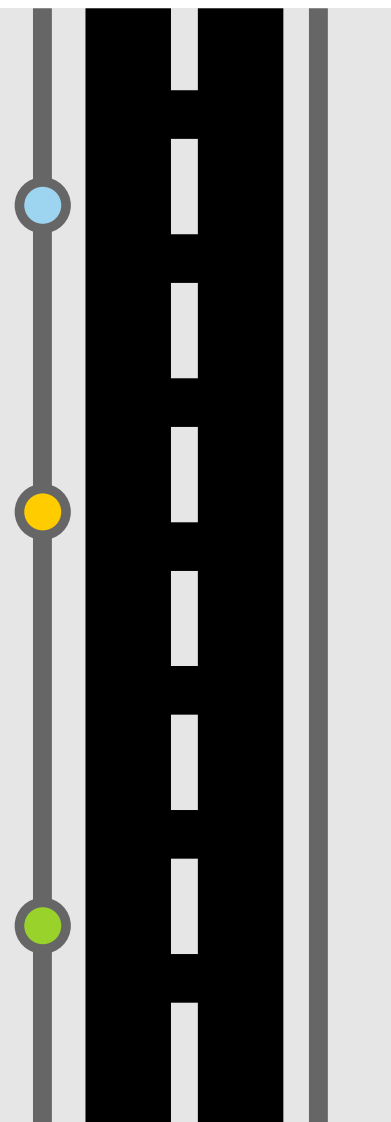
IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF INFORMATION SYSTEMS/INFRASTRUCTURE

- Dukungan berkelanjutan terhadap ERP System
- Dukungan Sistem Operasional Harian
- Dukungan Infrastruktur Operasional
- Portal Informasi dan Publikasi BPDP Sawit
- Continuous support for ERP systems
- Daily Operational System Support
- Operational Infrastructure Support
- OPFMA Information and Publication Portal

2016 | SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR

INFORMATION SYSTEMS AND INFRASTRUCTURE

- Q2: Jaringan *Wireless*, *Server File Sharing*, *Internet Provider*, Ruang Server Operasional, PABX
- Q3: *Server Anti Virus*, *Server Active Directory*, *Server Backup*, *Server Mgmt & Monitoring*
- Q4: Lisensi Tambahan untuk Office 365, Call Center 14036
- Q2: Wireless Network, File Sharing Server, Internet Provider, Operational Server Room, PABX
- Q3: Anti Virus Server, Active Directory Server, Backup Server, Management & Monitoring Server
- Q4: Additional License for Office 365, Call Center 14036



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Divisi Pengelolaan Informasi Tahun 2018

Report on the Information Management Activities in 2018

Pada tahun 2018, Divisi Umum dan SDM bagian Pengelolaan Informasi telah melakukan Pengembangan Infrastruktur terhadap:

1. Pemeliharaan terjadwal dalam *Data Center* BDPKS, *PABX System*, *Integrated UPS*, & Infrastruktur Jaringan Internet
2. Pemeliharaan terhadap Sistem Keamanan IT
 - *Antivirus Server*
 - *Firewall*
 - *Internet Management System*
3. Kajian terhadap pengembangan infrastruktur yang telah dilakukan
4. Pembangunan *Call Center* 14036

In 2018, the Information Management as part of General Affairs and Human Resources, has conducted Infrastructure Development on:

1. Scheduled maintenance in the OPPFMA's Data Center, PABX System, Integrated UPS, & Internet Network Infrastructure
2. Maintenance of IT Security Systems
 - Antivirus Server
 - Firewall
 - Internet Management System
3. Study on the established infrastructure development
4. Developing Call Center 14036

Pencapaian Pengembangan Sistem Informasi BDPKS Tahun 2018

Achievement of OPPFMA's Information System Development in 2018

1. Telah dikembangkan Sistem Peremajaan Sawit Rakyat yang berfungsi sebagai pemberkasan dari proposal peremajaan kebun sawit dari lembaga pekebun serta persetujuan secara digital dengan alamat yang dapat diakses di <http://program-psr.bdpdp.or.id>
2. Telah diimplementasikan sistem manajemen persuratan yang berfungsi untuk mengadministrasikan surat dinas secara digital dan informasi disposisi dilengkapi dengan tindak lanjut.
3. Pengembangan lanjutan terhadap sistem rekonsiliasi data pungutan Ekspor Kelapa Sawit guna melakukan rekonsiliasi antara data rekening koran Bank dengan data LS dari Sucofindo
4. Telah diimplementasikan pembuatan *Call Center* 14036 dengan Operator Bersama Jasnita
5. Telah diimplementasikan *Website* informasi Program B20 Biodiesel dengan alamat yang dapat diakses di <http://b20.bdpdp.or.id>

1. The Public's Palm Oil Replantation System has been developed to function as filing of the proposal for the replantation of oil palm plantations from smallholders, to obtain approval digitally, at <http://program-psr.bdpdp.or.id>
2. A correspondence management system has been implemented which functions to administer letters digitally to be followed-up for disposition information.
3. Further development will be the reconciliation system for Palm Oil Export Duties data to reconcile the Bank's checking account data with Surveyor's Report data from Sucofindo
4. Call Center 14036 has been implemented, and Jasnita will be the Joint Operator
5. A B20 Biodiesel Program information website has been implemented at <http://b20.bdpdp.or.id>



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Akses Informasi dan Data BDPKS

Access to the OPPFMA's Information and Data





Ketersediaan informasi kepada *Stakeholder* dan seluruh Pemangku Kepentingan menjadi komitmen BDPKS demi kelancaran komunikasi dan pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

The availability of information to Stakeholders and all Stakeholders becomes the OPPFMA's commitment to smooth communication and fulfillment of the required information.

Penyediaan akses informasi dan data BDPKS kepada publik merupakan salah satu implementasi BDPKS dalam aspek transparansi. BDPKS menyadari bahwa publik adalah *strategic partner* dalam menjaga keberlangsungan usaha. BDPKS senantiasa memberikan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pengelolaan media informasi BDPKS. Kebijakan tersebut disusun untuk melindungi keamanan informasi dan memastikan BDPKS mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara transparan dan fair sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BDPKS senantiasa melakukan pembaharuan informasi dan data yang dapat di akses oleh publik. Dalam hal publikasi informasi BDPKS baik bagi internal maupun eksternal, BDPKS menggunakan media antara lain sebagai berikut:

Provision of access to information and data of OPPFMA to the public is one of the implementations in the aspect of transparency. OPPFMA realizes that public is a strategic partner in maintaining business sustainability. OPPFMA always provides information in an integrated, timely, and targeted manner in accordance with OPPFMA's information media management policies. The policy was developed to protect information security and ensure that OPPFMA discloses information to interested parties in a transparent and fair manner, in accordance with applicable regulations.

OPPFMA always updates the information and data accessible to the public. In terms of publishing OPPFMA's information, both to internal and external parties, OPPFMA uses media as follows:



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Akses Informasi dan Data BDPKKS Akses Informasi dan Data BDPKKS

1

Website : <https://www.bdpd.or.id>



Stakeholders dapat mengakses informasi komprehensif mengenai kegiatan operasional dan kinerja BDPKKS serta berbagai informasi lain yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengakses situs <https://www.bdpd.or.id>. Informasi dalam *website* disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mencakup informasi antara lain terkait dengan Profil BDPKKS secara lengkap, kegiatan BDPKKS yang memuat informasi kegiatan operasional BDPKKS serta berbagai informasi penting lainnya.

Stakeholders can access comprehensive information related to the OPPFMA's operational activities and performance, as well as other information required by shareholders and other interested parties by accessing <https://www.bdpd.or.id>. Information on the website is presented in Indonesian and English, which includes information such as OPPFMA's complete profile, OPPFMA's activities that contain information on OPPFMA's operations and various other important information.

2

Press Release tahun 2018 Press Release in 2018

Selama tahun 2018, BDPKKS telah mengeluarkan *Press Release*, sebagai berikut:

- Program pendanaan Biodiesel untuk *sustainability* Industri Kelapa Sawit Indonesia (6 Februari 2018)
- BDPKKS Selenggarakan *Sawit Goes to Campus* di Universitas YARSI 2018 (23 Februari 2018)
- BDPKKS gelar Pekan Riset Sawit Indonesia 2018 (25 Februari 2018)
- Presiden resmikan Program Peremajaan Sawit Rakyat tahap tiga di Riau (9 Mei 2018)
- BDPKKS tandatangani perjanjian pembiayaan insentif Biodiesel (25 Mei 2018)

During 2018, OPPFMA issued Press Releases as follows:

- Biodiesel funding program for the sustainability of the Indonesian Palm Oil Industry (6 February 2018)
- OPPFMA Held Palm Goes to Campus at YARSI University 2018 (23 February 2018)
- OPPFMA held 2018 Indonesian Palm Research Week (25 February 2018)
- President inaugurated third stage of the Palm Oil Replantation Program in Riau (9 May 2018)
- OPPFMA signed Biodiesel incentive financing agreement (25 May 2018)



- *Stakeholder* pastikan kelancaran implementasi mandatori B20 (26 September 2018)
- Tarif layanan Badan Layanan Umum BDPKS pada Kementerian Keuangan (5 Desember 2018)
- Stakeholders ensured smooth implementation of mandatory B20 (26 September 2018)
- Tariffs for the OPPFMA Public Service Agency at the Ministry of Finance (5 December 2018)

3

Surat Edaran Circular Letter

BDPKS menggunakan surat edaran sebagai salah satu media komunikasi yang digunakan dalam rangka menyampaikan keputusan, peraturan, pemberitahuan dan lain-lain.

OPPFMA uses circular letters as one of the communication media in delivering decisions, regulations, notifications, etc.

4

Forum Komunikasi Internal Internal Communication Forum

BDPKS menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi pegawai dengan manajemen yaitu *sharing knowledge*, siraman rohani, *family gathering / team building* yang dilaksanakan setiap tahun dll.

OPPFMA provides a means of communication for employees to hold a discussion with management, i.e. knowledge sharing, spiritual gathering, family gathering/team building, which is held annually, etc.

5

Laporan Tahunan Annual Report

BDPKS menyediakan sarana informasi melalui laporan tahunan yang menggambarkan kinerja BDPKS. Laporan ini disusun setiap tahun dan disampaikan kepada seluruh *stakeholders* BDPKS.

OPPFMA provides information through annual reports that describe OPPFMA's performance. This report is prepared annually and is submitted to all of OPPFMA's stakeholders.

6

Media Sosial Social Media

BDPKS juga menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi. Saat ini BDPKS memiliki 4 (empat) akun media sosial antara lain:

- Facebook : www.facebook.com/bpdpsawit
- Twitter : www.twitter.com/bdpd_sawit
- Youtube : BLU BDPDsawit
- Instagram : www.instagram.com/bdpdkelapasawit

OPPFMA also uses social media as a communication channel to convey information. Currently, OPPFMA has four (4) social media account:

- Facebook : www.facebook.com/bpdpsawit
- Twitter : www.twitter.com/bdpd_sawit
- Youtube : BLU BDPDsawit
- Instagram : www.instagram.com/bdpdkelapasawit



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

06

Tanggung Jawab Sosial BDPKS OPPFMA Social Responsibility





Bagi BDPKS, tanggung jawab sosial merupakan perwujudan komitmen BDPKS untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Oleh karena itu konsep tanggung jawab sosial dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab BDPKS untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. For OPPFMA, social responsibility is a manifestation of OPPFMA's commitment to supporting the creation of sustainable development. Therefore, the concept of social responsibility is interpreted as a form of OPPFMA's responsibility to create a harmonious, balanced, and proper relationship with the environment, values, norms, and culture of the local community.





Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial

Corporate Social Responsibility



Komitmen Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Commitment to Implementing Corporate Social Responsibility

Salah satu cara sebuah lembaga membangun reputasi serta image yang baik dapat dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*. Selain dapat meningkatkan citra positif di mata masyarakat juga dapat memberikan image positif di mata pemerintah. Manfaat tanggung jawab sosial bagi masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan suatu lembaga akan lebih erat. Adapun manfaat bagi pemerintah adalah pemerintah akan merasa memiliki *partner* dalam menjalankan misi sosialnya dalam hal tanggung jawab sosial.

One of the measures of how an institution builds a good reputation and image is by its Corporate Social Responsibility program. The program shall enhance positive image in the public's perspective and the government. For the community, the benefits of social responsibility for is the fulfillment of the community's interest and the improvement of relationship between the community and an institution. The benefit for the government is the government will have a partner in carrying out its social mission in terms of social responsibility.

Bagi BDPKS, tanggung jawab sosial merupakan perwujudan komitmen BDPKS untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Oleh karena itu konsep tanggung jawab sosial dimaknai sebagai sebagai bentuk tanggung jawab BDPKS untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

For OPPFMA, social responsibility is a manifestation of OPPFMA's commitment to supporting the creation of sustainable development. Therefore, the concept of social responsibility is interpreted as a form of OPPFMA's responsibility to create a harmonious, balanced, and proper relationship with the environment, values, norms, and culture of the local community. This is in line with the provisions in Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.



Saat ini, BDPKPS tengah membangun pondasi tata kelola BDPKPS termasuk juga aspek tanggung jawab sosial yang menjadi perannya. Komitmen BDPKPS dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan ini sejalan dengan nilai-nilai dan budaya BDPKPS yaitu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial merupakan bentuk tanggung jawab BDPKPS terhadap segenap *stakeholder* BDPKPS.

Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan terhadap BDPKPS yang dikelompokkan menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal meliputi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai BDPKPS. Sedangkan *stakeholder* eksternal BDPKPS merupakan bagian yang paling berperan dalam perumusan kebijakan tentang dana perkebunan kelapa sawit serta memiliki peranan yang cukup besar terhadap penggunaan dana sawit. Para pihak tersebut berasal dari berbagai sektor diantaranya yaitu pemerintah, swasta, asosiasi, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

To date, OPPFMA is building a foundation for corporate governance, including social responsibility as part of its role. OPPFMA's commitment to implementing social and environmental responsibility programs is in accordance with OPPFMA's values and culture: Integrity, Professionalism, Synergy, Service, and Perfection. The social responsibility activities are OPPFMA's responsibility towards all the stakeholders.

Stakeholders are groups of people who have an interest in OPPFMA, divided into two categories, i.e. internal and external stakeholders. Internal stakeholders include the Supervisory Board, Board of Directors, and OPPFMA's Employees. OPPFMA's external stakeholders are the most instrumental part in the formulation of policies regarding palm oil plantation funds and have significant roles in the utilization of palm oil funds. The stakeholders came from various sectors, including government, private sector, associations, communities, and non-governmental organizations.

Tanggung Jawab Sosial Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)

Social Responsibility in Human Rights (HAM) Implementation

BPDPKS terus mengembangkan dan memastikan bahwa aktivitas operasional yang dijalankan telah memenuhi aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang diwujudkan melalui pelaksanaan praktik ketenagakerjaan yang memperhatikan prinsip kemanusiaan, memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia termasuk tindakan diskriminasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pedoman Tata Kelola (*Good Governance Code*) BPDPKS, Kode Etik (*Code Of Conduct*) dan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan BPDPKS.

OPPFMA strives to develop and ensure that operations that are carried out fulfill human rights protection aspects, which is realized through the implementation of labor practices with due regards to humanitarian principles, thereby ensuring there are no human rights violations, including acts of discrimination. These provisions are listed in OPPFMA's Good Governance Code, the Code of Conduct, and HR management policies within OPPFMA.

Dalam berinteraksi dengan pegawai, BPDPKS mengedepankan prinsip menghormati hak asasi manusia, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai serta menghindari intimidasi dan diskriminasi. Isu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka perlindungan hak pegawai, mencakup namun tidak terbatas pada aspek jenjang karir dan penilaian kinerja, anti praktik diskriminasi; kesejahteraan pegawai beserta keluarga terjamin; serta suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman. Oleh karena itu, program tanggung jawab sosial bidang HAM yang direncanakan oleh BPDPKS diantaranya kesetaraan dalam kesempatan kerja dan pengembangan kompetensi, keadilan dalam pengupahan dan penghapusan diskriminasi, serta perlindungan penyaluran aspirasi dan pengaduan pegawai, sosialisasi kebijakan baik *Code of Conduct* secara berkala.

In interacting with employees, OPPFMA promotes the principle of respecting human rights, providing equal opportunities to all employees, and avoiding intimidation and discrimination. In protecting employee rights, issues in the Human Resources (HR) management include, but not limited to career path and performance appraisal, anti-discrimination practices; secure employee and family welfare; and a conducive, healthy, and safe working environment. Therefore, OPPFMA plans social responsibility program in human rights that includes equal opportunities and competency development, fairness in wages, elimination of discrimination, protection of channeling aspirations and complaints of employees, and dissemination of policies (*Code of Conduct*) regularly.



Program tanggung jawab sosial bidang HAM yang telah direncanakan menjadi upaya BDPKPS untuk mengantisipasi dampak dan risiko berupa pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh BDPKPS. BDPKPS telah menerapkan aspek HAM terutama pada program tanggung jawab sosial kepada pegawai melalui kegiatan sebagai berikut:

The program of social responsibility in human rights that has been planned is OPPFMA's effort to anticipate the impacts and risks of human rights violations that may be carried out. OPPFMA has implemented aspects of human rights, especially in the social responsibility program for employees through the following activities:

1

Penghormatan Hak Dasar Pegawai (Penghapusan Diskriminasi, Standar Pengupahan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pengembangan Kompetensi)

Respect for Employees Rights (Elimination of Discrimination, Standard of Wages, Occupational Health and Safety, and Competence Development)

BDPKPS melaksanakan sejumlah praktik ketenagakerjaan yang menjadi bagian tanggung jawab kepada pegawai, yaitu menghormati keberagaman dan melarang segala bentuk diskriminasi karena gender, usia, suku, ras, agama, asal-usul, dan hambatan fisik sebagaimana diatur dalam *Code Of Conduct* maupun mematuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan Insan BDPKPS dapat berinteraksi dengan adil, sopan, dan penuh rasa hormat. Prinsip kesetaraan pun diterapkan dalam pemberian kompensasi sesuai dengan kompetensi individu, tanggung jawab dalam jabatan dan prestasi kerja. Selain itu, setiap pegawai memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuannya melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Program tanggung jawab sosial terhadap pegawai dalam bidang HAM merupakan wujud peran dan kontribusi BDPKPS dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berupa pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

OPPFMA carries out various labor practices as a part of its responsibilities to employees, i.e. respecting diversity and prohibiting all forms of discrimination based on gender, age, ethnicity, race, religion, origin, and physical disabilities, as regulated in the Code of Conduct, and in compliance with the provisions of the Law No. 13 of 2003 on Employment. This effort is expected to create a harmonious work environment and OPPFMA's personnel can interact fairly, politely, and with respect. The equality principle is also applied in the provision of compensation, in accordance with individual competence, position's responsibilities, and work performance. In addition, every employee has an equal opportunity to develop his/her abilities through an organized education and training program. The social responsibility program to employees in human rights is a form of OPPFMA's role and contribution in achieving the sustainable development goal of decent work and economic growth, as well as health and welfare.

2

Larangan Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa
Prohibition of Child Labor and Forced Labor

BPDPKS melaksanakan proses rekrutmen dengan persyaratan kandidat pegawai minimal lulusan SLTA dengan usia di atas 17 tahun sehingga tidak terdapat praktik pekerja anak di bawah umur. Hal tersebut menjadi bukti komitmen BPDPKS dalam memenuhi Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur larangan mempekerjakan anak yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

OPPFMA carries out the recruitment process, requiring all employee candidates to be at least of high school graduates, older than 17 years old. Thus, there is no practice of underage employees. This is evidence of OPPFMA's commitment to fulfilling Article 68 and Article 69 of Law No. 13 on Employment, which regulates the prohibition of child labor, i.e. anyone below the age of 18.

3

Sosialisasi Terhadap Kode Etik Kepada Insan BDPKPS
Dissemination of the Code of Conduct to OPPFMA's Employees.

BPDPKS mengadakan sosialisasi kepada seluruh insan BPDPKS terhadap Code of Conduct yang berlaku. Sosialisasi ini turut memuat aspek Etika Bekerja Insan BPDPKS yang mencakup komitmen pengembangan diri, kemajuan dan perkembangan perusahaan, serta komitmen anti diskriminasi. *Code of Conduct* disosialisasikan melalui kegiatan pembagian buku saku. Untuk tahun 2018, ada/tidak pelanggaran terkait dengan *Code of Conduct* sebagai bentuk dipahami dan dipatuhinya ketentuan tersebut secara efektif.

OPPFMA conducts dissemination of the Code of Conduct to all OPPFMA's personnel. This socialization also included aspects of the OPPFMA's Work Ethics that included commitments for personal development, company progress and development, and anti-discrimination. Code of Conduct is disseminated through the distribution of pocket books. In 2018, the existence of violations related to the Code of Conduct is a form of effective understanding and compliance with these provisions.

Selama tahun 2018 tidak terdapat terkait pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan BPDPKS, baik terkait dengan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran maupun insiden kerja paksa yang dialami pegawai. Hal ini dipengaruhi oleh upaya penerapan dan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan telah dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran insan BPDPKS.

During 2018, there were no complaints related to human rights violations within OPPFMA in terms of acts of discrimination, incidents of violations, or incidents of forced labor experienced by employees. This is influenced by the efforts to implement and monitor labor practices that have been carried out well by all OPPFMA's personnel.



Tanggung Jawab Sosial Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) Social Responsibility in Human Rights (HAM) Implementation

Penerapan keseluruhan program tersebut telah memberikan manfaat bagi segenap Insan BDPKPS diantaranya terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan nyaman sehingga meningkatkan loyalitas pegawai dan membentuk citra positif BDPKPS sebagai BLU yang turut serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menyediakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

The implementation of the program has benefited all OPPFMA's personnel, including the creation of a conducive, safe, and comfortable working environment, which increases employee loyalty and form OPPFMA's positive image as a BLU that participates in supporting sustainable development goals, i.e. providing decent work and economic growth.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Operasi yang Adil Social Responsibility to Fair Operations

Praktik operasi yang adil menunjukkan bahwa dalam berinteraksi dengan organisasi lainnya, BDPKPS menerapkan etika dan perilaku yang etis dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan agar tercipta keseimbangan atas kepentingan seluruh *stakeholder*. Beberapa pemangku kepentingan yang relevan dengan praktik operasi yang adil adalah pengusaha, petani, pemerintah/sector industri. Wujud kegiatan operasional yang adil di BDPKPS yaitu praktik bebas dari korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, menghormati kekayaan intelektual, berkompetisi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi.

Fair operations show that in interacting with other organizations, OPPFMA applies ethics and ethical behavior with due regard to the stakeholders' rights to create balance for the interests of all stakeholders. Some relevant stakeholders in fair operations are entrepreneurs, farmers, government/industrial sectors. The form of fair operations in OPPFMA includes the free from corruption and bribery practices, neutrality in political issues, respects for intellectual property, fair competition, and compliance with laws and regulations.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan

Social Responsibility to the Environment



Adapun implementasi kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan hidup diuraikan sebagai berikut:

The environmental social responsibility activities are described as follows:

1

Upaya Mitigasi Emisi Karbon

Carbon Emissions Mitigation

BDPKS melakukan serangkaian inisiatif secara konsisten dan terarah untuk mengurangi pemakaian energi listrik dalam operasional dengan mengimplementasikan peralatan dengan efisiensi tinggi dan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan, antara lain penggunaan AC berteknologi inverter, mengganti lampu TL dengan lampu LED yang memiliki tingkat efisiensi rendah, mematikan lampu dan Komputer pada jam istirahat maupun sepulang kerja bila tidak diperlukan. Selain mendukung upaya mitigasi emisi karbon, berbagai inisiatif program di atas juga berhasil menghemat pemakaian energi listrik tersebut juga telah berdampak pada penghematan biaya operasional dan beban pemeliharaan, serta mengurangi *down time* perangkat akibat kegagalan sistem pendingin udara.

OPPFMA conducts a series of initiatives that are consistent and directed to reduce the use of electrical energy in operations by implementing equipment with high efficiency and new technologies that are more environmentally friendly, including the use of AC inverter technology, replacing TL lamps with LED lamps that have low-efficiency levels, turning off lights and Computers during recess or after work when not needed. In addition to supporting efforts to mitigate carbon emissions, the various program initiatives have also succeeded in saving electricity consumption, which also saved operational and maintenance costs, as well as reducing device down-time due to the failure of the air conditioning system.



2

Efisiensi Energi Gedung Kantor **Office Building Energy Efficiency**

Sistem energi di gedung kantor BDPKS telah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efisien. Berbagai langkah strategis yang diterapkan antara lain:

- Penerapan secara ketat dan tepat, tanpa mengganggu kenyamanan dan keamanan penghuni gedung, jadwal pengoperasian penerangan maupun perangkat guna menekan pemborosan pemakaian listrik.
- Memberikan sosialisasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan kepada seluruh penghuni gedung mengenai penghematan energi, termasuk penempatan papan peringatan dan stiker di berbagai lokasi yang strategis guna mengingatkan pegawai untuk menghemat listrik dan air.

OPPFMA's energy system in the office building has been arranged to ensure the energy to be more efficient. Various strategic steps implemented include:

- Strict and precise lighting operation schedules, without disrupting the comfort and safety of building occupants, equipped with devices to reduce electricity usage.
- Providing ongoing and continuous socialization to all building occupants on energy savings, including placing bulletin boards and stickers in various strategic locations to remind employees to save electricity and water.

3

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) **Hazardous and Toxic (B3) Waste and Waste Management**

Pengelolaan sampah dilakukan bersama Dinas Kebersihan setempat. Pengawasan rutin diterapkan guna menekan jumlah sampah yang tercecer. Kami juga melakukan pengelolaan sampah dan pembuangan secara bertanggung jawab di seluruh kantor operasional.

Waste management is carried out in collaboration with the local Sanitation Department. Routine supervision is implemented to reduce the amount of scattered waste. BAKTI also carries out responsible waste management and disposal in all operational offices.

4

Earth Hour **Earth Hour**

Secara rutin setiap tahunnya BDPKS berpartisipasi dalam kegiatan "Earth Hour" yang diadakan oleh WWF, bertujuan melestarikan lingkungan hidup dengan mengurangi konsumsi energi listrik. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pemadaman listrik selama 1 jam pada hari Sabtu, minggu keempat bulan Maret setiap tahun pada pukul 20.30 sampai dengan 21.30.

Every year, OPFMA participates in "Earth Hour" activities organized by WWF, with the objective to preserve the environment by reducing electricity consumption. This activity is carried out by 1-hour power outage on Saturday, the fourth week of March, annually, from 8.30-9.30PM.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pegawai, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Social Responsibility to Employees, Occupational Health and Safety

BDPKS terus berupaya mengarahkan pengelolaan SDM untuk mencapai visi, misi dan sasaran BLU serta sasaran pengelolaan SDM untuk membentuk pegawai dengan produktivitas di atas standar produktivitas di industri sejenis serta tingkat keterikatan (*engagement*) yang tinggi dalam menjalankan layanan yang menjadi amanahnya.

OPPFMA strives to direct HR management to achieve BLU's vision, mission, and objectives, as well as HR management goals to establish employees with above-standard productivity in the industry, equipped with high level of engagement in carrying out services that are mandated.

Kegiatan tanggung jawab sosial terhadap pegawai dilaksanakan melalui kegiatan operasional BDPKS secara rutin sehari-hari dan juga program khusus, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Social responsibility to employees is carried out through OPFMA's daily routine operations, and special programs, as follows:

1 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Employee Welfare Improvement

Program peningkatan kesejahteraan pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain melalui pemberian fasilitas kepada pegawai berupa kompensasi, seperti uang transport, uang makan, uang pensiun, tunjangan hari raya, uang jabatan, bonus, uang pendidikan, uang pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian.

Employee welfare improvement programs that have been implemented in 2018 include the provision of facilities to employees in the form of compensation, such as transportation allowances, food allowances, pensions, holiday allowances, position allowances, bonuses, education fees, medical allowances, official clothing, leave allowances, and death insurance.



2

Persamaan Hak Kerja Equal Work Rights

BDPKPS senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria atau wanita tanpa memandang perbedaan etnik agama, ras, gender ataupun kondisi fisik untuk mengikuti rekrutmen pekerja. Pengangkatan calon pekerja di lingkungan BDPKPS didasarkan atas hasil seleksi, evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

OPPFMA provides equal opportunity for all people, both men and women, regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition to participate in its employee recruitment. The appointment of candidates within OPFMA is based on the results of the selection, evaluation results on probation and employee orientation.

3

Pengembangan Pegawai Berkelanjutan Sustainable Employee Development

Terkait dengan pengembangan karir, BDPKPS memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai pria dan wanita. BDPKPS membuat sistem jenjang karir (*career path*) yang didasarkan pada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. BDPKPS secara konsisten berupaya mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, training, maupun studi banding serta pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan BDPKPS.

In terms of career development, OPFMA provides equal opportunities for male and female employees. OPFMA has a career path based on job qualifications and employee competencies integrated with the performance appraisal system. OPFMA strives to develop employee competencies through various education and training programs, as well as comparative studies and management and technical training tailored to the needs of OPFMA.

4

Program Kesehatan Health Program

Demi terwujudnya tenaga kerja yang kuat dan produktif serta dan menjaga agar kondisi pegawai selalu dalam kondisi terpantau kesehatannya, BDPKPS menyediakan dan memberikan fasilitas kesehatan kepada pegawainya. BDPKPS mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kepada seluruh pekerja berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

For the actualization of a strong and productive workforce, as well as to maintain the employees' health condition, OPFMA provides and facilitates health facilities to their employees. OPFMA ensures that all employees participate in the BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Employment) program to provide guarantees to all employees in the form of Old Age Insurance, Work Accident Insurance, Death Insurance, and Pension Insurance.

Tanggung Jawab Sosial Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Social Responsibility to Social and Community Development



BPDPKS meyakini bahwa kinerja lembaganya harus memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan diharapkan akan memberikan dampak yang positif pula untuk pengembangan bisnis BPDPKS secara berkelanjutan. Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang berperan besar dalam menjamin kelangsungan usaha BPDPKS dalam jangka panjang.

OPPFMA believes that the institution's performance shall have a positive impact on society and the sustainable development of OPFMA's business. The community is one of the stakeholders who play a major role in ensuring the long-term sustainability of OPFMA's business.



Bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas adalah diantaranya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Sawit, hal ini merupakan komitmen BPDPKS dalam berbagi ilmu kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan *Sawit Goes to Campus* di Universitas YARSI, pada 21 - 25 Februari 2018 di Grand Cempaka Hotel, Jakarta. *Sawit Goes to Campus* di Universitas YARSI merupakan Side Event di kegiatan 6th Indonesian *Medical Student Summit* (6th IMSS) yang diadakan oleh BPDPKS. 6th IMSS dihadiri kurang lebih 300 peserta dari perwakilan mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia. Tujuan dari diadakannya *Sawit Goes to Campus* oleh BPDPKS adalah untuk mengenalkan mitos dan fakta Sawit Indonesia kepada perwakilan mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa untuk memahami kebenaran tentang Sawit dilihat dari sisi kesehatan.

Social responsibility to the community is in the form of provision of education about Palm. This is OPPFMA's commitment to sharing knowledge with the community. One of the activities is *Palm Goes to Campus* at YARSI University, on 21-25 February 2018 at the Grand Cempaka Hotel, Jakarta. *Palm Goes to Campus* at YARSI University is a Side Event of 6th Indonesian *Medical Student Summit* (6th IMSS) held by OPPFMA. 6th IMSS was attended by approximately 300 participants from medical student representatives throughout Indonesia. *Palm Oil Goes to Campus* held by OPPFMA has the objective to introduce the Indonesian Palm Oil facts and dismiss the myths to representatives of medical students throughout Indonesia who are the nation's next-generation that will see the benefit of Palm in health.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Mitra

Social Responsibility To Partners

Badan telah menyusun dan melaksanakan beberapa program terkait tanggung jawab terhadap pelanggan secara konsisten untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Sepanjang tahun 2018 program yang dijalankan oleh BPDPKS adalah :

The Agency has compiled and implemented several programs related to responsibility to customers consistently to increase customer satisfaction and trust. Throughout 2018, OPPFMA carried out several programs:

A

Pengaduan Pelanggan

Customer Complaints

Bentuk tanggung jawab BPDPKS kepada mitra, BPDPKS menyediakan sarana pengaduan guna memenuhi harapan mitra. Pengaduan atau keluhan mitra merupakan informasi penting yang dapat ditindaklanjuti dalam meningkatkan kualitas pelayanan BPDPKS serta memenuhi tuntutan bisnis dan harapan mitra.

As a form of responsibility to partners, OPPFMA provides a means of complaints to meet the partners' expectations. Partner complaints are important information that can be followed up in improving OPPFMA's service quality as well as to meet the partners' business demands and expectations.

Mitra dapat menyampaikan saran, masukan dan keluhan melalui saluran antara lain:

Partners shall submit suggestions, input, and complaints through several channels:

Kantor:
Graha Mandiri Lt.5 , Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Office:
Graha Mandiri 5th Floor, Jl. Imam Bonjol No. 61,
Menteng, Central Jakarta, DKI Jakarta 10310

Telepon/HP: (021) 3983 2091
Fax: (021) 3983 2095
Email: info@bpdp.or.id
Website: www.bpdp.or.id
Media Sosial: Facebook BDP SAWIT, Twitter
[@infosawit](https://twitter.com/infosawit), instagram [bpdkelapasawit](https://www.instagram.com/bdpkelapasawit)

Telephone/HP: (021) 3983 2091
Fax: (021) 3983 2095
Email: info@bpdp.or.id
Website: www.bpdp.or.id
Social Media: Facebook BDP SAWIT, Twitter
[@infosawit](https://twitter.com/infosawit), instagram [bpdkelapasawit](https://www.instagram.com/bdpkelapasawit)

Melalui program pengaduan yang disediakan, BDPKS telah memberikan respon yang cepat atas keluhan yang masuk dan menyelesaikannya dengan baik.

OPPFMA provides quick response for reports submitted and settles the reports through the reporting center.

Selain itu Untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait program mandatori B20, BDPKS menyediakan layanan Call Center 14036 B20 yang bisa diakses baik melalui sambungan telepon langsung ke nomor 14036 maupun secara *online* melalui situs <http://b20.bdpd.or.id>.

In addition, OPFMA provides 14036 B20 Call Center to meet the information needs related to the B20 mandatory program, that can be accessed through direct telephone lines to number 14036 or online through the site <http://b20.bdpd.or.id>.



Mandatori B20 merupakan program nasional Pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Bakar untuk mesin jenis Diesel yang merupakan hasil pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel/FAME 20% dengan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar 80% . Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Biosolar. Program mandatori B20 dimulai sejak Januari 2016 untuk penggunaan di sektor bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO). Mulai 1 September 2018, penggunaannya diperluas ke sektor non-PSO.

B20 Mandatory is the Government's national program in the supply and distribution of Biodiesel Fuels for Diesel engines, which are the result of mixing 20% Biodiesel/FAME with 80% Solar Oils. Society refers to the mix as Biosolar. B20 mandatory program began in January 2016 for use in the subsidized sector or Public Service Obligation (PSO). Since 1 September 2018, B20 is extended to the non-PSO sector.



Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

07

Laporan Keuangan *Audited* **Audited Financial Statements**







Pendahuluan
Introduction



Laporan Kepada Regulator dan Pemangku Kepentingan
Report to Regulators and Stakeholders



Profil BDPKS
OPPFMA Profile



Analisa Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan
Analysis of Discussion on Operational and Financial Performance

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS

**31 DESEMBER 2018/
31 DECEMBER 2018**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

GEDUNG GRAHA MANDIRI, JALAN IMAM BONJOL 61, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 39832091-94, FAKSIMILE (021) 39832095.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

**DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT
AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2018**

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Dono Boestami
Alamat Kantor : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Alamat Rumah : Jl. Kebun Anggrek No. 16 Unit 7
RT 001/RW 005, Cipete Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-3983 2091
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Catur Ariyanto Widodo
Alamat Kantor : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Alamat Rumah : Jl. Kostrad No. 43,
RT 006/ RW 004
Petukangan Utara, Pesanggrahan
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-3983 2091
Jabatan : Direktur Keuangan, Umum,
Kepatuhan, dan Manajemen Risiko

1. Name : Dono Boestami
Office address : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Residential Address : Jl. Kebun Anggrek No. 16 Unit 7
RT 001/RW 005, Cipete Selatan,
Cilandak, Jakarta Selatan
Telephone Title : 021-3983 2091
President Director
2. Name : Catur Ariyanto Widodo
Office address : Graha Mandiri Lantai 5,
Jl. Imam Bonjol Nomor 61
Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10310
Residential Address : Jl. Kostrad No. 43,
RT 006/ RW 004
Petukangan Utara, Pesanggrahan,
Jakarta Selatan
Telephone Title : 021-3983 2091
Director of Finance, General Affairs,
Compliance, and Risk Management

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS");
2. Laporan keuangan BPDPKS telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan BPDPKS telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan BPDPKS tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal BPDPKS.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS");
2. BPDPKS' financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the BPDPKS' financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. BPDPKS' financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for the BPDPKS' internal control system.

8/



Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

JAKARTA, 25 Maret/March 2019

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Dono Boestami
Direktur Utama/
President Director

Catur Ariyanto Widodo
Direktur Keuangan, Umum,
Kepatuhan, dan Manajemen Risiko/
*Director of Finance, General Affairs,
Compliance, and Risk Management*



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA DEWAN PENGAWAS

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF SUPERVISORS

We have audited the accompanying financial statements of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2018, and the statement of activities and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,
T: +62 21 5212901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit as at 31 December 2018, and their financial activities and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
25 Maret/March 2019

Eddy Rintis, S.E., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0230

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	20,922,802,360,212	4	3,186,919,095,885	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	5	8,643,092,784,654	Short-term investment
Piutang	32,075,041,641	6	17,398,545,399	Receivables
Aset lancar lainnya	4,374,885,243		3,749,398,356	Other current assets
Jumlah aset lancar	20,959,252,287,096		11,851,159,824,294	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset tetap - bersih	11,130,486,041		12,929,303,608	Fixed assets - net
Aset tidak lancar lainnya	1,051,113,068		1,779,283,373	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	12,181,599,109		14,708,586,981	Total non-current assets
JUMLAH ASET	20,971,433,886,205		11,865,868,411,275	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Akrual dan utang lainnya	879,713,883,878	7	859,191,982,927	Accruals and other payables
JUMLAH LIABILITAS	879,713,883,878		859,191,982,927	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto tidak terikat	20,091,720,002,327		11,006,676,428,348	Unrestricted net assets
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	20,971,433,886,205		11,865,868,411,275	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 2 - Schedule

LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF ACTIVITIES FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit	14,367,402,955,848	8	14,277,241,158,165	Income from fund collection of oil palm plantation
Pendapatan atas pengelolaan dana	1,047,535,154,334	9	505,120,147,304	Income from fund management
Pendapatan lainnya	7,319,165,081		375,266,133	Other income
Jumlah pendapatan	15,422,257,275,263		14,782,736,571,602	Total income
BEBAN				EXPENSES
Beban penyaluran dana	(6,247,423,275,382)	10	(10,875,254,545,149)	Fund disbursement expenses
Beban dukungan layanan manajemen	(89,790,425,902)	11	(71,483,991,348)	Management services support expenses
Jumlah beban	(6,337,213,701,284)		(10,946,738,536,497)	Total expenses
Pengembalian setoran dari kas negara	-		2,000,000,000,000	Refund of deposit from state treasury
Kenaikan aset neto tidak terikat	9,085,043,573,979		5,835,998,035,105	Increase in unrestricted net assets
Aset neto tidak terikat awal tahun	11,006,676,428,348		5,170,678,393,243	Unrestricted net assets at the beginning of the year
Aset neto tidak terikat akhir tahun	20,091,720,002,327		11,006,676,428,348	Unrestricted net assets at the end of the year

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 3 - Schedule

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:			Cash received from:
Pungutan dana perkebunan kelapa sawit	14,413,921,271,119	14,277,241,158,165	Collection of oil palm plantation fund
Pengelolaan dana	745,879,089,056	431,728,821,321	Fund management
Pendapatan lainnya	7,243,473,738	375,266,133	Other income
Pengeluaran kas untuk:			Cash disbursement for:
Penyaluran dana	(6,277,994,284,706)	(10,621,498,126,460)	Fund distribution
Gaji dan tunjangan	(41,955,367,285)	(37,136,859,813)	Salaries and allowances
Pemasok	(42,995,565,809)	(29,000,211,973)	Supplier
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	8,804,098,616,113	4,021,710,047,373	Net cash flows provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan/(penambahan) pada investasi jangka pendek	8,643,092,784,654	(8,643,092,784,654)	Liquidation/(addition) on short-term investment
Pendapatan investasi jangka pendek	289,436,583,278	81,287,228,930	Income from short-term investment
Pembelian aset tetap	(666,214,091)	(1,262,910,001)	Acquisition of fixed assets
Pembelian aset tidak lancar lainnya	(78,505,627)	(830,535,000)	Acquisition of other non-current assets
Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	8,931,784,648,214	(8,563,899,000,725)	Net cash flows provided from/ (used for) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pengembalian setoran dari kas negara	-	2,000,000,000,000	Refund of deposit from state treasury
Kenaikan/(penurunan) bersih pada kas dan setara kas	17,735,883,264,327	(2,542,188,953,352)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	3,186,919,095,885	5,729,108,049,237	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	20,922,802,360,212	3,186,919,095,885	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS") merupakan unit organisasi non-eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BPDPKS dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

Badan Layanan Umum didirikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

BPDPKS berkedudukan di Graha Mandiri, Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat.

BPDPKS melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
5. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, beserta perubahannya terhadap Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015.
6. Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

1. GENERAL INFORMATION

Oil Palm Plantation Fund Management Agency or Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS") is a non-echelon unit reporting to the Minister of Finance through Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. BPDPKS was established based on the Decision of Minister of Finance No. 650/KMK.01/2015 regarding the Establishment of BPDPKS at the Ministry of Finance as a Government Agency that fully implements the Financial Management of Public Service Agency.

Public Service Agency was established to improve the services given to public in order to improve general welfare and educating nation by providing flexibility in financial management based on the economic and productivity principles and implementation of healthy business practice.

BPDPKS is located at Graha Mandiri, 5th Floor, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Central Jakarta.

BPDPKS carries out its duties based on the following laws and regulations:

1. *Constitution Law No. 17 of 2003 on State Finances*
2. *Constitution Law No. 1 of 2004 on State Treasury*
3. *Constitution Law No. 39 of 2014 on Plantations.*
4. *Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 24 of 2015 on Collection of Plantation Fund.*
5. *Presidential Decree No. 61 of 2015 on Collection and Utilisation of Oil Palm Plantation Funds, with its amendment to Presidential Decree No. 24 of 2015.*
6. *Presidential Decree No. 66 of 2018 regarding the Second Amendment to Presidential Decree No. 61 of 2015 on Collection and Utilisation of Oil Palm Plantation Funds.*

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/2 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

BDPKPS dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut (lanjutan):

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BDPKPS pada Kementerian Keuangan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BDPKPS pada Kementerian Keuangan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BDPKPS pada Kementerian Keuangan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 30/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 133/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BDPKPS pada Kementerian Keuangan.
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 29 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BDPKPS.
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 650/KMK.05/2015 tentang Penetapan BDPKPS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

BDPKPS is executed based on the following laws and regulations (continued):

7. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 133/PMK.05/2015 on Tariff of Service of Public Service Agency of BDPKPS at the Ministry of Finance.
8. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 81/PMK.05/2018 on Tariff of Service of Public Service Agency of BDPKPS at the Ministry of Finance.
9. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 152/PMK.05/2018 on Amendment for Regulation of the Minister of Finance No. 81/PMK.05/2018 on Tariff of Service.
10. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 136/PMK.010/2015 regarding the Fourth Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 75/PMK.011/2012 on Stipulation of Export Goods Subject to Export Levy and Export Duty Tariff.
11. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 30/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 133/PMK.05/2015 on Tariff of Service of Public Service Agency of BDPKPS at the Ministry of Finance.
12. Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 29 of 2015 on Supply and Utilisation of Biofuels with Biodiesel Type in the Financing Framework by BDPKPS.
13. Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 18/Permentan/KB.330/5/2016 on Guidelines for Rejuvenation of Oil Palm Plantation.
14. Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 650/KMK.05/2015 on the Establishment of BDPKPS at the Ministry of Finance as a Government Agency Implements the Financial Management of Public Service Agency.



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/3 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

BDPKS dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut (lanjutan):

15. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 748/M-DAG/DEP/7/2015 tentang Penetapan PT Sucofindo (Persero) sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya.

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BDPKS.

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BDPKS.

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum BDPKS.

Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi BDPKS pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

BDPKS is executed based on the following laws and regulations (continued):

15. *Decision of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 748/M-DAG/DEP/7/2015 on the Determination of PT Sucofindo (Persero) as the Executor of Verification or Technical Inquiry on Export of Oil Palm, Crude Palm Oil (CPO) and its Derivative Products.*

16. *Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 26 of 2016 on the Supply and Utilisation of Biofuel with Biodiesel Type in the Financing Framework by BDPKS.*

17. *Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 41 of 2018 on the Supply and Utilisation of Biofuel with Biodiesel Type in the Financing Framework by BDPKS.*

18. *Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 84/PMK.05/2017 on use of Rejuvenation of Oil Palm Plantations of Public Service Agency of BDPKS.*

The composition of BDPKS' Board of Supervisors and Directors as at 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017	
Dewan Pengawas:			Board of Supervisors:
Ketua	Rusman Heriawan	Rusman Heriawan	Chairman
Anggota	Musdhalifah Machmud	Lukita Dinarsyah Tuwo	Member
Anggota	Heru Pambudi	Suhasil Nazara	Member
Anggota	Arlinda	Arlinda	Member
Anggota	Djoko Siswanto	Rida Mulyana	Member
Anggota	Panggah Susanto	Panggah Susanto	Member
Anggota	Bambang	Gamal Nasir	Member
Anggota	Loso Judijanto	Loso Judijanto	Member
Anggota	Joko Supriyono	Joko Supriyono	Member
Dewan Direksi:			Board of Directors:
Direktur Utama	Dono Boestami	Dono Boestami	President Director
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Catur Ariyanto Widodo	Catur Ariyanto Widodo	Director of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana	-	Agustinus Antonius	Director of Planning and Fund Management
Direktur Penghimpunan Dana	Herdrajat Natawidjaja	Hendrajat Natawidjaja	Director of Fund Raising
Direktur Penyaluran Dana	Edi Wibowo	Edi Wibowo	Director of Fund Distribution
Direktur Kemitraan	Tulus Budhianto	Tulus Budhianto	Director of Partnership

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/4 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI PENTING (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The composition of BDPKPS' Audit Committee as at 31 December 2018 and 2017 are as follows:

2018 dan/and 2017

Ketua Anggota
Anggota
Anggota

Loso Judijanto
Mohammad Hatta
Hary Noegroho Soelistianto

Chairman
Member
Member

Pada tanggal 31 Desember 2018, BDPKPS mempunyai 88 pegawai (tidak diaudit).

As of 31 December 2018, BDPKPS has a total of 88 employees (unaudited).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan BDPKPS diselesaikan dan diotorisasi oleh Dewan Direksi pada 25 Maret 2019.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan BDPKPS telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional BDPKPS.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the BDPKPS were prepared and authorised by the Board of Directors on 25 March 2019.

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of the BDPKPS have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements have been prepared on the basis of the historical cost concept and the accrual concept, except for the statements of cash flows. The statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with a maturity of three months or less.

The presentation currency used in the financial statements is Rupiah, which is the BDPKPS' functional currency.



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/5 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar baru, amandemen dan interpretasi berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018 dan relevan, namun tidak menimbulkan dampak terhadap jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Amandemen PSAK 2, "Laporan arus kas"
- Amandemen PSAK 16, "Aset tetap"

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, BDPKPS sedang mempelajari dampak dari standar baru dan amandemen berikut, yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2020 dan relevan bagi BDPKPS, terhadap laporan keuangan BDPKPS:

- PSAK 71, "Instrumen keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"

c. Instrumen keuangan

BDPKPS mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2018, BDPKPS hanya memiliki aset keuangan dalam bentuk pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar; kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang BDPKPS terdiri dari kas dan setara kas dan piutang dalam laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS")

The adoption of these new and amended standards and interpretations that are effective beginning 1 January 2018 and relevant, but did not result in substantial changes to the BDPKPS' accounting policies and had not material effect on the amount reported for the current or prior financial years:

- Amendment to PSAK 2, "Statements of cash flows"
- Amendment to PSAK 16, "Fixed assets"

As at the authorisation date of these financial statements, BDPKPS is assessing the impact of the following new standards and amendments, which are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2020 and relevant to BDPKPS operations, on BDPKPS' financial statements:

- PSAK 71, "Financial instruments"
- PSAK 72, "Revenue from contract with customers"
- PSAK 73, "Leases"

c. Financial instruments

BDPKPS classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

As at 31 December 2018, BDPKPS only has financial assets classified as loans and receivables.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets for maturities shorter than 12 months after the end of reporting period; otherwise, they are classified as non-current assets. BDPKPS' loans and receivables comprise of cash and cash equivalents and receivables in the statement of financial position.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/6 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan BDPKPS telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Liabilitas keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2018, BDPKPS hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari akrual dan utang lainnya. Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, BDPKPS mengukur seluruh liabilitas keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi yang menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika sudah ditebus, dibatalkan atau telah dibayar.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, BDPKPS mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai terjadi jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the assets have ceased to exist or have been transferred and BDPKPS has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

Financial liabilities

As at 31 December 2018, BDPKPS only has financial liabilities measured at amortised cost that comprise of accruals and other payables. After initial recognition which is at fair value plus transaction costs, BDPKPS measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method. Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed, cancelled or otherwise extinguished.

Impairment of financial assets

At each reporting date, BDPKPS assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/7 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, kas pada bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

e. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

f. Pengakuan pendapatan

Pendapatan BDPKPS terdiri dari pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit dan pendapatan atas pengelolaan dana. BDPKPS mengakui pendapatan pada saat jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kepada BDPKPS.

g. Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadi dengan menggunakan dasar akrual.

h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with original maturity of three months or less.

e. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment, if any.

f. Income recognition

BDPKPS' income consist of income from fund collection of oil palm plantations and income from fund management. BDPKPS recognises income when the amount of income can be reliably measured and it is probable that future economic benefits will flow to BDPKPS.

g. Expenses recognition

Expenses are recognised when they are incurred on an accrual basis.

h. Transactions with related parties

The Company enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 (revised 2015) "Related party disclosures".

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/8 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah aset dan liabilitas adalah sehubungan dengan akrual.

Pertimbangan yang signifikan terutama diperlukan untuk menentukan akrual peremajaan kebun kelapa sawit, akrual selisih harga biodiesel, akrual pengembalian pungutan dana perkebunan kelapa sawit, dan akrual lainnya. Akrual diakui ketika BDPKPS memiliki kewajiban masa kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi serta estimasi yang handal mengenai akrual tersebut dapat dibuat. BDPKPS memperkirakan jumlah akrual dengan mempertimbangkan peraturan yang mengatur dan data yang diperoleh dari pihak terkait yang dapat diandalkan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Estimates and judgments used in preparing the financial statements are periodically evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that may occur. Actual results may differ from these estimates. Significant estimates and assumptions that have significant effect on the amounts of assets and liabilities is related to accruals.

Significant judgment is required mainly in determining the accruals for palm oil plantation replanting, accruals for biodiesel price variance, accruals for restitution of fund collection of oil palm plantation and other accruals. Accruals are recognised when BDPKPS has a present obligation (legal as well as constructive) as a result of past events and it is more likely than not that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. BDPKPS estimates accrual with consideration of governing regulations and reliable data obtained from respective parties.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2018	2017	
Kas	176,735,241	160,816,609	Cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,604,684,852	285,977,580,377	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,940,115	760,079,800	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10,000,000	20,619,099	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	3,625,624,967	286,758,279,276	
Deposito berjangka			Time deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,320,000,000,000	2,900,000,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,549,000,000,002	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,050,000,000,002	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	20,919,000,000,004	2,900,000,000,000	
	20,922,802,360,212	3,186,919,095,885	



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/9 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan penempatan deposito berjangka dengan jangka waktu diatas tiga bulan pada bank-bank berikut:

	2018	2017
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	3,949,092,784,654
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	3,049,000,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1,645,000,000,000
	-	8,643,092,784,654

5. SHORT-TERM INVESTMENT

This account represents time deposits with maturity more than three months placed in the following banks:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

6. PIUTANG

Piutang sebagian besar merupakan piutang bunga dari bunga deposito. BDPKS tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. RECEIVABLES

Receivables mainly represent the interest receivable from time deposits. BDPKS does not provide an allowance for impairment losses of receivables since Management believes that the receivables are collectible.

7. AKRUAL DAN UTANG LAINNYA

	2018	2017
Peremajaan kebun kelapa sawit	807,177,522,500	-
Pengembalian pungutan dana perkebunan kelapa sawit	46,518,315,271	-
Jasa surveyor	14,814,401,215	10,422,696,207
Selisih harga biodiesel	5,556,855,810	845,315,769,743
Insentif pegawai	4,914,303,247	3,366,662,253
Lainnya	732,485,835	86,854,724
	879,713,883,878	859,191,982,927

7. ACCRUALS AND OTHER PAYABLES

Palm oil plantation replanting
Restitution of fund collection of oil palm plantation
Surveyor fee
Biodiesel price variance
Employee incentives
Others

8. PENDAPATAN PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit adalah pendapatan yang berasal dari pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya.

8. INCOME FROM FUND COLLECTION OF OIL PALM PLANTATION

Income from fund collection of oil palm plantation is income which derived from levies on the export of oil palm products and its derivatives.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/10 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PENDAPATAN PUNGUTAN DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BDPKS pada Kementerian Keuangan, mulai tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan seterusnya (lihat Catatan 14), tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya adalah sebagai berikut:

- US\$ 0 untuk Harga CPO di bawah US\$ 570
- Bervariasi antara US\$ 5 – US\$ 25 untuk Harga CPO antara US\$ 570 – US\$ 619
- Bervariasi antara US\$ 20 – US\$ 50 untuk Harga CPO di atas US\$ 619

Penentuan Harga CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

8. INCOME FROM FUND COLLECTION OF OIL
PALM PLANTATION (continued)

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 152/PMK.05/2018 on Amendments to Regulation of Minister of Finance No. 81/PMK.05/2018 on Tariff of Service of Public Service Agency of BDPKS at the Ministry of Finance, starting 4 December 2018 onwards (see Note 14), levies on the export of oil palm products and its derivatives were determined as follows:

- US\$ 0 for CPO Prices below US\$ 570
- Varies between US\$5 – US\$ 25 for CPO Prices between US\$ 570 – US\$ 619
- Varies between US\$ 20 – US\$ 50 for CPO Prices above US\$ 619

Determination of CPO Prices refers to the reference price stipulated by the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia.

9. PENDAPATAN ATAS PENGELOLAAN DANA

9. INCOME FROM FUND MANAGEMENT

	2018	2017	
Pendapatan bunga dari deposito berjangka	746,009,166,695	406,722,505,666	Interest income from time deposit
Pendapatan bunga dari investasi jangka pendek	289,436,583,278	88,385,274,329	Interest income from short-term investment
Pendapatan jasa giro	12,089,404,361	10,012,367,309	Bank interest income
	<u>1,047,535,154,334</u>	<u>505,120,147,304</u>	

10. BEBAN PENYALURAN DANA

10. FUND DISBURSEMENT EXPENSE

	2018	2017	
Pembayaran selisih harga biodiesel	4,824,581,966,232	10,566,772,566,846	Biodiesel price variance payment
Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	1,141,435,770,389	78,296,222,696	Oil palm plantation replanting fund
Jasa surveyor	130,776,470,674	121,484,745,241	Surveyor fee
Dana riset	61,660,689,209	37,270,833,248	Research fund
Promosi kelapa sawit	56,565,155,693	40,042,947,942	Oil palm promotion
Pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit	29,239,304,402	29,059,005,432	Oil palm human resource development
Perencanaan dan pengelolaan dana	2,290,041,744	1,979,392,788	Planning and fund management
Sarana dan prasarana	873,877,039	348,830,956	Infrastructure
	<u>6,247,423,275,382</u>	<u>10,875,254,545,149</u>	



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/11 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. BEBAN DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN

11. MANAGEMENT SERVICES SUPPORT EXPENSES

	2018	2017	
Gaji dan tunjangan	43,503,008,279	40,503,522,066	Salaries and allowances
Sewa	15,874,460,153	14,759,656,405	Rent
Jasa profesional	14,465,665,095	5,267,968,799	Professional fee
Lainnya	9,675,434,637	5,306,086,348	Others
Barang keperluan perkantoran	6,271,857,738	5,646,757,730	Office supplies
	<u>89,790,425,902</u>	<u>71,483,991,348</u>	

12. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI

12. RELATED PARTIES INFORMATION

Personil manajemen kunci

Key management personnel

Kompensasi kepada personil manajemen kunci (terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Compensation of the key management personnel (consist of Board of Supervisors and Directors) for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	2018	2017	
Imbalan kerja jangka pendek	<u>15,803,190,643</u>	<u>13,670,847,120</u>	Short-term employee benefits

13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Faktor risiko keuangan

Financial risk factors

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan BDPKPS adalah risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. BDPKPS menerapkan kebijakan manajemen risiko keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar keuangan terhadap kinerja keuangan BDPKPS. Berikut ini ringkasan kebijakan manajemen risiko tersebut:

The main risks arising from the BDPKPS' financial instruments are interest rate risk, credit risk and liquidity risk. Management review and determine policies for managing each of these risks. BDPKPS applies financial risk management policies to minimise impact of unpredictability financial markets on BDPKPS' financial performance. Summary of financial risk management policies are as follows:

(1) Risiko tingkat suku bunga

(1) Interest rate risk

Pada tanggal 31 Desember 2018, BDPKPS tidak memiliki risiko tingkat suku bunga yang signifikan. Aset keuangan BDPKPS yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi BDPKPS terdiri dari deposito berjangka dengan pendapatan tetap.

As at 31 December 2018, BDPKPS has no significant interest rate risk. BDPKPS' financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. BDPKPS' investments consist of time deposits with fixed income.

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/12 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit

BDPKS tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan karena dalam tahun berjalan piutang BDPKS berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito berjangka.

Deposito berjangka dan kas di bank ditempatkan pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki penilaian peringkat komposit bank yang sehat.

Semua aset keuangan BDPKS pada tanggal 31 Desember 2018 belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan.

(3) Risiko likuiditas

BDPKS tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika BDPKS mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. BDPKS mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, liabilitas keuangan BDPKS terutama terdiri dari akrual dan utang lainnya yang jumlahnya tidak signifikan terhadap aset likuid BDPKS. BDPKS memiliki likuiditas aset yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas.

(4) Estimasi nilai wajar

Nilai tercatat aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang, serta liabilitas keuangan seperti akrual dan utang lainnya mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka waktu yang pendek dan dampak dari diskonto yang tidak signifikan.

13. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

(2) Credit risk

BDPKS has no significant credit risk because in the current year BDPKS' receivables arise from interest income from placement of time deposits.

Time deposits and cash in banks are placed in Government Banks that has a healthy bank composite rating.

All of BDPKS' financial assets as at 31 December 2018 are neither past due nor impaired, therefore, no allowance for impairment loss is needed.

(3) Liquidity risk

BDPKS has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where BDPKS has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. BDPKS manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at 31 December 2018, BDPKS' financial liability is mainly accruals and other payables which are insignificant to the total BDPKS' liquid assets. BDPKS' assets are highly liquid in form of cash and cash equivalents.

(4) Fair value estimation

The carrying amount of financial assets such as cash and cash equivalents, receivables, and financial liabilities such as accruals and other payables approximate their fair value due to their short-term maturity and the impact of discounting is not significant.



BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Lampiran - 4/13 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan Tarif Pungutan atas Ekspor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BDPKS pada Kementerian Keuangan, mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya ditetapkan sebesar US\$ 0 untuk Harga CPO di bawah US\$ 570, antara US\$ 570 – US\$ 619 dan di atas US\$ 619.

Mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan seterusnya, tarif pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya adalah sebagai berikut:

- US\$ 0 untuk Harga CPO di bawah US\$ 570
- Bervariasi antara US\$ 5 – US\$ 25 untuk Harga CPO antara US\$ 570 - US\$ 619
- Bervariasi antara US\$ 10 – US\$ 50 untuk Harga CPO di atas US\$ 619

Penentuan Harga CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

14. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Changes of Levies on the Export of Oil Palm Product and its Derivatives

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 23/PMK.05/2019 on Second Amendments to Regulation of Minister of Finance No. 81/PMK.05/2018 on Tariff of Service of Public Service Agency of BDPKS at the Ministry of Finance, starting 1 March 2019 until 31 May 2019, levies on the export of oil palm products and its derivatives were determined at US\$ 0 for CPO Prices below US\$ 570, between US\$ 570 – US\$ 619, and above US\$ 619.

Starting 1 June 2019 onwards, levies on the export of oil palm products and its derivatives were determined as follows:

- US\$ 0 for CPO Prices below US\$ 570
- Varies between US\$5 – US\$ 25 for CPO Prices between US\$ 570 – US\$ 619
- Varies between US\$ 10 – US\$ 50 for CPO Prices above US\$ 619

Determination of CPO Prices refers to the reference price stipulated by the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia.



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank



2018 Laporan Tahunan
Annual Report

**Mengembangkan
Infrastruktur BPDPKS,
Mendukung Sawit Indonesia
yang Berkelanjutan**

Developing BPDPKS Infrastructure,
Supporting Sustainable
Indonesian Palm Oil



**Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit**
Oil Palm Plantation Fund Management Agency

Graha Mandiri Lt.5
Jl. Imam Bonjol No.61 Menteng, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10310 – www.bpdp.or.id
Email: info@bpdp.or.id